BANK INDONESIA

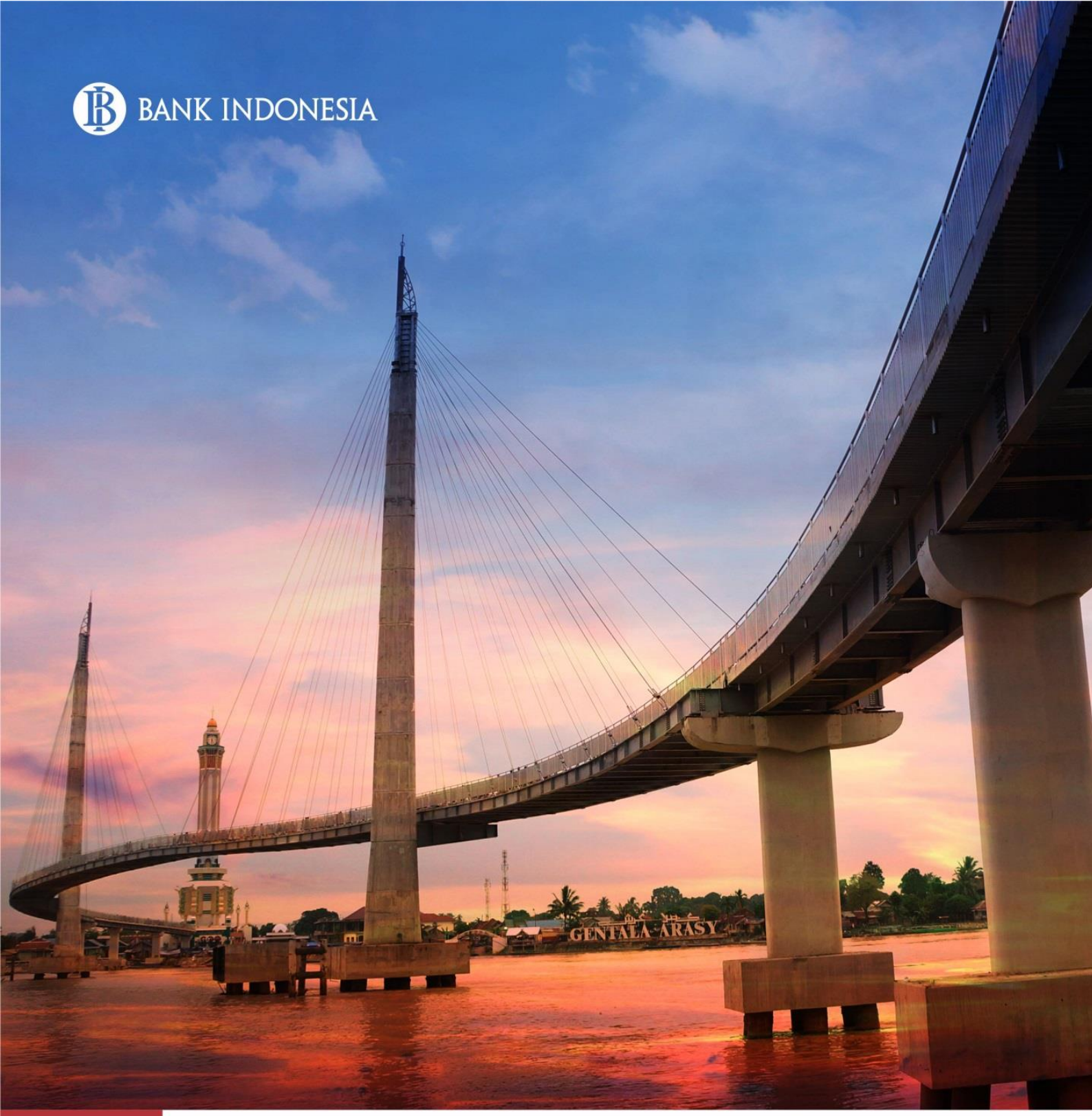

LAPORAN PEREKONOMIAN

FEBRUARI 2023

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAMBI

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.14, Telanaipura
JAMBI

Telp : (0741) 62445
Fax : (0741) 62112
Website : **www.bi.go.id**

Visi Bank Indonesia

Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia maju.

Misi Bank Indonesia

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran Kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.

Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dalam mendukung Kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) dan kehandalan Sistem Pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga Laporan Perekonomian Provinsi Jambi periode Februari 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Perekonomian merupakan salah satu terbitan periodik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi sebagai sarana diseminasi data dan informasi, baik dengan *stakeholders* internal maupun eksternal. Selanjutnya, para pemangku kepentingan seperti pelaku usaha, perbankan dan terutama Pemerintah Daerah Jambi (provinsi dan kabupaten/kota) diharapkan dapat memperoleh masukan dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi daerah.

Laporan ini mencakup beberapa aspek seperti perkembangan ekonomi makro regional, keuangan pemerintah daerah, inflasi daerah, stabilitas keuangan daerah, pengembangan akses keuangan dan UMKM, penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, serta ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Publikasi ini juga memuat perkiraan pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah.

Berdasarkan asesmen atas data dan informasi triwulan IV 2022, ekonomi Provinsi Jambi (PDRB) tumbuh 5,22% (yoy), terakselerasi setelah sebelumnya tumbuh 5,20% (yoy) pada triwulan III 2022. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai LU transportasi dan pergudangan yang tumbuh 19,19% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi adalah komponen konsumsi pemerintah sebesar 8,78% (yoy).

Sementara, inflasi Gabungan kota/Kab IHK di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 6,35% *(yoy),* lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,09% *(yoy).* Meski demikian, angka inflasi ini lebih tinggi dibandingkan nasional yang tercatat sebesar 5,51% *(yoy)*. Laju inflasi Gabungan kota/Kab IHK di Provinsi Jambi tersebut merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo pada triwulan IV 2022 yang masing-masing tercatat sebesar 6,39% (*yoy*) dan 6,04% (*yoy*).

Pertumbuhan kredit korporasi di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp14,32 triliun atau tumbuh sebesar 6,44% *(yoy)*, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,34% *(yoy)*. Peningkatan kredit korporasi didorong oleh Pertumbuhan pada sektor pertanian sejalan dengan pencabutan tarif pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang berlaku efektif pada 15 Oktober 2022 sampai dengan 30 Desember 2022. Hal ini menjadi faktor pendorong peningkatan permintaan Tandan Buah Segar (TBS). Pertumbuhan kredit korporasi didorong oleh sejumlah sektor yang tumbuh di antaranya sektor pertanian tumbuh sebesar 15,03% *(yoy)* dan sektor perdagangan sebesar 7,95% *(yoy)* pada triwulan laporan. Dari sisi risiko kredit, kredit korporasi menunjukan perbaikan, *Non-Performing Loan* (NPL) kredit korporasi tercatat 4,98% *(gross)* membaik dari triwulan sebelumnya yaitu 5,07% *(gross)*. NPL pada triwulan IV 2022 berada pada level dibawah *threshold* yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Hal ini mengindikasi tingkat resiko yang relatif aman.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2023 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2022, didukung peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat seiring penghapusan PPKM yang mendorong permintaan domestik. Penghapusan kebijakan PPKM mendorong berlanjutnya peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Lebih lanjut, kebijakan Pemerintah untuk menyalurkan berbagai program jaring pengaman sosial turut menopang perbaikan konsumsi masyarakat dan dunia usaha.

Dalam penyusunan laporan ini kami banyak memperoleh dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah, instansi, perbankan, BUMN/BUMD, dan pelaku usaha. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak. Semoga kerjasama yang telah terjalin baik selama ini dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

Seiring dengan keterbatasan yang ada, kami mengharapkan kritik dan saran dalam meningkatkan kualitas laporan ini agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, untuk kemakmuran masyarakat Jambi.

Jambi, Februari 2023
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI JAMBI

ttd

Hermanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR IV

DAFTAR ISI V

DAFTAR TABEL VIII

DAFTAR GRAFIK IX

TABEL INDIKATOR MAKRO TERPILIH XI

RINGKASA 16

SN EKSEKUTIF 16

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH 23

1.1. PERKEMBANGAN UMUM 23

1.2. PDRB SISI LAPANGAN USAHA 25

1.2.1 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 26

1.2.2 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian 27

1.2.3 Lapangan Usaha Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 29

1.2.4 Lapangan Usaha Industri Pengolahan 30

1.2.5 Lapangan Usaha Lainnya 31

1.3. PDRB SISI LAPANGAN PENGELUARAN 33

1.3.1 Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah 33

1.3.2 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) 35

1.3.3 Perdagangan Eksternal 36

1.3.3.1 Ekspor Luar Negeri Non Migas Provinsi Jambi 37

1.3.3.2 Impor Luar Negeri Non Migas Provinsi Jambi 38

BAB II KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 42

2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH 43

2.2 REALISASI BELANJA DAERAH 44

2.3 KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH 46

2.4 KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 48

BAB III PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH 52

3.1 KAJIAN UMUM 53

3.2 INFLASI KOTA JAMBI BERDASARKAN KELOMPOK BARANG 55

3.2.1 Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau 55
3.2.2 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah 61
3.2.3 Kelompok Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran 62
3.2.4 Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 62
3.2.5 Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya 62
3.2.6 Kelompok Pakaian dan Alas Kaki 62
3.2.7 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 63
3.2.8 Kelompok Pendidikan 63
3.2.9 Kelompok Kesehatan 63
3.2.10 Kelompok Transportasi 63
3.2.11 Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan 64
3.3 Inflasi Kabupaten Bungo Berdasarkan Kelompok Barang 64

BOKS 1 70

BAB IV STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 75

4.1 Ketahanan Sektor Korporasi 76
4.1.1 Sumber Kerentanan Sektor Korporasi 76
4.1.2 Kinerja Korporasi dan Penilaian Risiko 76
4.1.3 Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi 77
4.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga 78
4.2.1 Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga 79
4.2.2 Dana Pihak Ketiga Perseorangan di Perbankan 79
4.2.3 Kredit Rumah Tangga di Perbankan 80
4.3 Perkembangan Kredit UMKM 81
4.4 Perkembangan Bank Umum 83
4.4.1 Perkembangan Aset Bank 83
4.4.2 Perkembangan Dana Masyarakat 84
4.4.3 Perkembangan Kredit/Penyaluran Dana 86

BOKS 2 90

BAB V PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 96

5.1 Perkembangan transaksi tunai dan nontunai 97
5.2 Penyediaan uang layak edar 98
5.3 perkembangan temuan uang rupiah yang diragukan keasliannya 99
5.4 perkembangan penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu 99

5.5 INKLUSI KEUANGAN DAN ELEKTRONIFIKASI 100
5.6 PERKEMBANGAN QRIS 102

BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 106

6.1 KETENAGAKERJAAN DAERAH 107
6.1.1 Prospek Ketenagakerjaan 109
6.2 KESEJAHTERAAN 110
6.2.1 Kemiskinan 110
6.2.2 Kesejahteraan Petani 112

BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 117

5.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI KESELURUHAN TAHUN 118
7.1.1 Prospek Permintaan 118
7.1.2 Prospek Penawaran 119
7.2 PROYEKSI INFLASI 119
5.3 REKOMENDASI KEBIJAKAN 120

LAMPIRAN 123

DAFTAR ISTILAH 126

TIM PENYUSUN 127

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jambi (*yoy*) 25
Tabel 1.2. Kontribusi PDRB Sisi Penggunaan Terhadap Pertumbuhan (*yoy*) 35
Tabel 1.3. Indeks Keyakinan Konsumen 35
Tabel 1.4. Realisasi Investasi 37
Tabel 2.1. Perkembangan Pendapatan APBD Provinsi Jambi 45
Tabel 2.2. Perkembangan Belanja APBD Provinsi Jambi 45
Tabel 2.3. Perkembangan Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi 46
Tabel 2.4. Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi 48
Tabel 3.1. Perkembangan Inflasi Kota Jambi (Tahun Dasar 2018) 59
Tabel 3.2. Perkembangan Inflasi Kota Jambi Berdasarkan Kelompok dan Sub Kelompok Barang dan Jasa 60
Tabel 3.3. Sumbangan Inflasi Bulanan (mtm) Kota Jambi Berdasarkan Komoditas 61
Tabel 3.4. Perkembangan Inflasi Bungo (Tahun Dasar 2018) 68
Tabel 3.5. Perkembangan Inflasi Bungo Berdasarkan Kelompok dan Sub Kelompok Barang dan Jasa 68
Tabel 3.6. Sumbangan Inflasi Bulanan (*mtm*) Bungo Berdasarkan Komoditas 69
Tabel 4.1. Penghimpunan Dana Bank Umum Provinsi Jambi (Rp Juta) 86
Tabel 4.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Golongan Pemilik (Rp Juta) 86
Tabel 4.3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Lokasi Bank (Rp Juta) 87
Tabel 4.4. Perkembangan Kredit Bank Umum Provinsi Jambi (Rp Juta) 87
Tabel 4.5. erkembangan *Non* Performing *Loan* (NPL) Gross Bank Umum di Provinsi Jambi 89
Tabel 5.1. Perkembangan Sistem Pembayaran melalui KPw. BI Provinsi Jambi 96
Tabel 5.2 Kas Keliling dan Penukaran Uang Tidak Layak Edar di Provinsi Jambi Tahun 2021 98
Tabel 5.3 Daftar TP2DD yang telah terbentuk di Provinsi Jambi 102
Tabel 6.1 Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja (ribu orang) 108
Tabel 6.2 Pekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama (ribu orang) 108
Tabel 6.3 Pekerja Berdasarkan Status Pendidikan (ribu orang) 109
Tabel 6.4 Pekerja berdasarkan Lapangan Usaha 109
Tabel 6.5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jambi 113
Tabel 6.6 Garis Kemiskinan Provinsi Jambi 113
Tabel 6.7 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Jambi 113
Tabel 6.8 Gini Ratio Provinsi Jambi 113
Tabel 6.9 Indeks Pembangunan Manusia menurut komponen 113

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.Perkembangan PDRB Provinsi Jambi *(yoy)* 23
Grafik 1.2.Distribusi PDRB (ADHB) Menurut Lapangan Usaha 26
Grafik 1.3.Perkembangan Harga CPO lokal dan internasional, serta TBS 10 Tahun 26
Grafik 1.4.Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) 27
Grafik 1.5.Perkembangan Harga Bokar 27
Grafik 1.6.Perkembangan Harga Minyak WTI 29
Grafik 1.7.Perkembangan Jumlah Kendaraan Baru 29
Grafik 1.8.Produksi Karet 31
Grafik 1.9.Perkembangan Jumlah Bongkar dan Muat Barang 31
Grafik 1.10.Perkembangan Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang 32
Grafik 1.11.Perkembangan Konsumsi Semen 33
Grafik 1.12.Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 33
Grafik 1.13.Perkembangan Jumlah Tamu Menginap 33
Grafik 1.14Perkembangan Kredit Konsumsi 34
Grafik 1.15.Indeks Keyakinan Konsumen Provinsi Jambi 34
Grafik 1.16.Perkembangan Kredit Investasi 36
Grafik 1.17.Perkembangan Ekspor Non Migas Berdasarkan Komoditas 36
Grafik 1.18.Pangsa Ekspor Non Migas Berdasarkan Komoditas 37
Grafik 1.19.Pangsa Ekspor Non Migas Berdasarkan Komoditas 38
Grafik 1.20.Pangsa Ekspor Non Migas Berdasarkan Negara Asal 38
Grafik 1.21.Perkembangan Ekspor Non Migas Berdasarkan Negara Tujuan 38
Grafik 1.22.Pangsa Impor Non Migas Provinsi Jambi 38
Grafik 1.23.Pangsa Impor Non Migas Provinsi Jambi 39
Grafik 2.1.Pangsa Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi 49
Grafik 2.2.Pangsa Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi 49
Grafik 2.3.Perkembangan Simpanan Pemerintah Provinsi Jambi di Perbankan 49
Grafik 3.1.Perkembangan Inflasi Provinsi Jambi 53
Grafik 3.2.Perbandingan Inflasi Bulanan Kota Jambi dan Kota Lainnya di Pulau Sumatera 58
Grafik 3.3.Perkembangan Harga Aneka Cabai 59
Grafik 3.4.Perkembangan Harga CPO dan Minyak Goreng 59
Grafik 3.5.Perkembangan Harga Beras Lokal dan Internasional 59
Grafik 3.6.Perkembangan Harga Gandum dan Tepung Terigu 59
Grafik 3.7.Perkembangan Harga Bawang Merah dan Bawang Putih 59
Grafik 3.8.Perkembangan Daging Ayam Ras dan Daging Sapi 59
Grafik 3.9.Perkembangan Harga Emas Internasional 63
Grafik 3.10.Perkembangan Inflasi Tahunan Bungo (*yoy*) 64
Grafik 4.1. Survei Kegiatan Dunia Usaha Provinsi Jambi 76
Grafik 4.2. Pertumbuhan Kredit Korporasi 77
Grafik 4.3. Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Utama Provinsi Jambi 77
Grafik 4.4. Proporsi Kredit Korporasi menurut Sektor Utama Provinsi Jambi 77
Grafik 4.5. Proporsi Kredit Korporasi Per Jenis Penggunaan 78
Grafik 4.6. NPL Kredit Korporasi Sektor Utama Provinsi Jambi 78

Grafik 4.7.IKE, IEK, dan IKK Survei Konsumen Provinsi Jambi 78
Grafik 4.8.Perkembangan PDRB Konsumsi Rumah Tangga 79
Grafik 4.9.Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 79
Grafik 4.10.Komposisi Dana Pihak Ketiga 79
Grafik 4.11.Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 79
Grafik 4.12.Pangsa Dana Pihak Ketiga 80
Grafik 4.13.Perkembangan Pembiayaan Sektor Rumah Tangga 80
per Jenis Penggunaan 80
Grafik 4.14.Pertumbuhan KPR per Tipe 81
Grafik 4.15.Perkembangan NPL Sektor Rumah Tangga per Jenis Pengeluaran 81
Grafik 4.16.Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum Provinsi Jambi 81
Grafik 4.17.Pangsa Kredit Bank Umum Menurut Jenis Kredit UMKM 82
Grafik 4. 18.Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan 82
Grafik 4. 19.Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi 82
Grafik 4. 20.NPL UMKM Provinsi Jambi 83
Grafik 4. 21.NPL UMKM Menurut Sektor Ekonomi 83
Grafik 4. 22.Perkembangan Aset Bank Umum 83
Grafik 4. 23.Return on Asset 84
Grafik 4. 24.BOPO 84
Grafik 4. 25.Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum 84
Grafik 4. 26.Perkembangan *Loan to Deposit* (LDR) Bank Umum Provinsi Jambi 88
Grafik 4. 27.Perkembangan Suku Bunga Rata-rata Tertimbang Kredit dan Deposito Bank Umum di Provinsi Jambi 89
Grafik 21.1.Inflows, *Outflows* dan *Netflows* di Provinsi Jambi 98
Grafik 21.2.Perkembangan Volume dan Nilai Kliring di Provinsi Jambi 98
Grafik 21.3.Perkembangan Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya di Provinsi Jambi 99
Grafik 21.4.Perkembangan Transaksi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet 100
Grafik 21.5.Realisasi penyaluran Program Sembako di Provinsi Jambi 101
Grafik 21.6.Perkembangan Merchant yang Memiliki QRIS di Provinsi Jambi 103
Grafik 21.7.Perkembangan QRIS-*user* di Provinsi Jambi 103
Grafik 22.1.Penyerapan Tenaga Kerja 109
Grafik 22.2.Distribusi Pengeluaran Penduduk 113
Grafik 22.3.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 113
Grafik 22.4.Nilai Tukar Petani 114

TABEL INDIKATOR MAKRO TERPILIH

BANK INDONESIA

1. INFLASI, PDRB, DAN EKSPOR IMPOR

INDIKATOR	2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
INFLASI [1]								
Indeks Harga Konsumen Kota Jambi	106.80	106.64	106.27	108.00	109.75	114.04	114.81	114.90
Indeks Harga Konsumen Bungo [2]	106.35	105.88	105.75	107.69	109.97	113.96	114.75	114.19
Laju Inflasi Tahunan (y-o-y) Kota Jambi	2.71	2.58	2.11	1.67	2.71	6.94	8.04	6.39
Laju Inflasi Tahunan (y-o-y) Bungo [2]	2.17	1.27	1.42	1.65	2.76	7.63	8.51	6.04
PDRB - Harga Konstan (Juta Rp) [3]	36,787,760	38,364,730	39,415,151	39,257,890	38,519,490	40,425,770	41,465,680	41,306,760
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,074,420	10,434,780	10,561,520	10,138,420	10,338,000	10,756,990	11,056,380	11,116,510
Pertambangan dan Penggalian	8,261,850	8,622,310	9,638,880	9,212,180	9,007,650	9,709,410	10,096,220	9,716,750
Industri Pengolahan	3,801,900	3,984,030	4,021,470	3,903,710	3,841,450	4,152,270	4,204,120	3,992,880
Pengadaan Listrik, Gas	20,850	21,320	22,000	22,720	23,420	23,830	24,860	24,900
Pengadaan Air	50,540	53,540	53,940	55,060	53,880	54,510	56,460	54,940
Konstruksi	3,042,690	2,853,700	2,899,320	3,229,300	3,098,520	2,914,150	2,940,960	2,965,370
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,535,980	3,799,930	3,862,170	3,846,500	3,654,200	3,927,110	4,079,310	4,197,170
Transportasi dan Pergudangan	1,022,190	1,073,330	1,130,130	1,202,940	1,140,910	1,300,650	1,302,620	1,433,830
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	397,630	413,170	397,200	453,440	431,380	452,280	470,070	491,870
Informasi dan Komunikasi	1,529,130	1,587,540	1,603,001	1,615,330	1,635,840	1,710,260	1,717,610	1,730,500
Jasa Keuangan	912,290	924,270	940,950	896,770	949,220	856,090	939,080	903,440
Real Estate	552,610	553,470	574,840	601,000	589,860	590,930	591,820	605,580
Jasa Perusahaan	361,180	376,720	389,040	413,360	414,430	464,140	445,740	449,080
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,110,040	1,423,460	1,105,570	1,290,240	1,110,230	1,275,870	1,255,310	1,256,100
Jasa Pendidikan	1,269,810	1,349,430	1,228,850	1,368,440	1,304,770	1,315,560	1,329,730	1,371,770
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	478,410	507,300	607,470	618,620	540,640	506,740	545,760	565,630
Jasa lainnya	366,240	386,430	378,800	389,860	385,090	414,980	409,630	430,440
Pertumbuhan (y-o-y) Provinsi Jambi	-0.33	5.40	5.98	3.67	4.71	5.37	5.20	5.22
Nilai Ekspor Non Migas (ribu USD) [4]	266,007	244,359	355,222	312,185	313,451	389,161	431,117	422,270
Volume Ekspor Nonmigas (ton)	806,993	673,757	1,398,314	1,482,211	1,571,838	2,260,847	2,589,208	3,254,099
Nilai Impor Nonmigas (ribu USD) [5]	6,770	7,621	8,640	6,507	10,518	5,409	8,028	9,795
Volume Impor Nonmigas (ribu ton)	29,777	25,163	25,068	25,438	13,954	26,720	32,433	23,834

Sumber : BPS Provinsi Jambi (diolah)

Catatan

[1] Sejak Januari 2020 perhitungan perkembangan IHK menggunakan SBH TD 2018 = 100 dan terdapat penyesuaian jumlah kelompok pengeluaran menjadi 11 kelompok dari sebelumnya 7 kelompok

[2] Sejak Januari 2014 terdapat penambahan cakupan kota inflasi di Provinsi Jambi dari sebelumnya hanya Kota Jambi menjadi Kota Jambi dan Kab.Bungo

[3] Tahun dasar 2010 angka sementara

[4] Pengklasifikasian komoditi menggunakan 21 kelompok barang berdasarkan SITC 2 digit yang berlaku.

[5] Pengklasifikasian komoditi dalam statistik impor menggunakan SITC 2 digit

2. PERBANKAN

INDIKATOR	2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
PERBANKAN								
A. Bank Umum:								
Total Aset (Rp Juta)	53,282,871	55,992,478	55,931,216	57,511,028	58,322,250	60,908,462	60,922,328	61,370,272
DPK (Rp Juta)	39,487,503	41,639,162	41,868,890	40,941,161	41,202,954	41,117,819	40,804,834	41,624,154
- Tabungan	19,910,127	21,290,677	22,454,263	23,739,486	8,861,357	8,141,812	8,429,128	7,791,246
- Giro	6,486,427	6,225,606	7,420,155	7,250,768	23,592,882	24,384,224	23,902,405	25,190,415
- Deposito	13,090,950	14,122,880	11,994,471	9,950,907	8,748,715	8,591,783	8,473,301	8,642,493
Kredit (Rp Juta) - berdasarkan Lokasi Proyek	52,180,894	52,922,400	53,075,546	55,584,813	57,132,543	63,849,320	46,428,422	46,428,422
- Modal Kerja	18,799,544	19,093,706	19,269,263	19,365,413	19,995,485	20,192,185	14,957,278	14,957,278
- Konsumsi	20,562,595	20,704,646	12,864,666	21,176,610	15,682,905	21,312,258	11,452,231	11,452,231
- Investasi	12,818,755	13,124,048	20,941,617	15,042,791	21,454,153	22,344,877	20,018,912	20,018,912
- LDR (%)	132.15	127.10	126.77	135.77	138.66	155.28	113.78	111.54
Kredit (Rp Juta) - berdasarkan Kantor Cabang	43,029,989	43,387,578	43,703,259	44,384,752	45,251,650	45,930,462	46,427,200	47,271,816
- Modal Kerja	13,893,018	14,047,305	14,131,178	14,460,930	14,541,573	15,066,462	14,956,056	15,058,468
- Investasi	19,031,650	19,150,905	10,181,117	10,295,930	10,939,201	11,084,996	11,452,231	11,845,976
- Konsumsi	10,105,320	10,189,368	19,390,963	19,627,892	19,770,876	19,779,005	20,018,912	20,367,372
- LDR (%)	108.97	104.20	104.38	108.41	109.83	111.70	113.78	113.57
- NPL Gross Nominal	951,705	939,658	922,024	895,111	819,113	925,281	893,224	893,224
- NPL Gross (%)	2.21	2.17	2.11	2.02	1.81	2.01	1.92	1.89
Kredit Mikro (≤ Rp 50 juta) (Rp Juta)	4,654,629	4,853,332	5,214,030	5,425,703	6,079,688	5,902,107	5,932,012	5,507,630
- Kredit Modal Kerja	2,663,322	2,887,734	3,265,248	3,483,665	3,715,022	3,754,583	3,803,388	3,562,924
- Kredit Investasi	671,644	639,186	560,967	569,906	629,804	594,301	550,061	421,342
- Kredit Konsumsi	1,319,662	1,326,412	1,387,814	1,372,132	1,734,862	1,553,223	1,578,563	1,523,364
Kredit Kecil (Rp 50 < x ≤ Rp500 juta) (Rp Juta)	26,077,256	26,450,728	26,665,573	27,385,281	27,831,347	28,690,537	29,623,983	30,988,105
- Kredit Modal Kerja	4,375,652	4,509,736	4,727,959	4,680,796	4,846,465	5,028,628	5,227,555	5,472,692
- Kredit Investasi	4,049,884	4,186,854	4,039,243	4,587,913	4,971,690	5,408,222	5,865,447	6,550,234
- Kredit Konsumsi	17,651,719	17,754,138	17,898,371	18,116,572	18,013,192	18,253,687	18,530,982	18,965,179
Kredit Menengah (Rp500 juta < x ≤ Rp5 miliar) (R	6,105,462	6,187,812	6,062,047	6,064,851	6,084,900	6,040,217	6,270,367	6,603,030
- Kredit Modal Kerja	3,486,122	3,518,804	3,359,545	3,361,289	3,164,660	3,068,328	3,293,344	3,378,267
- Kredit Investasi	1,056,689	1,089,250	1,091,135	1,053,999	1,260,426	1,275,962	1,224,239	1,393,108
- Kredit Konsumsi	1,562,651	1,579,759	1,611,367	1,649,563	1,659,815	1,695,927	1,752,785	1,831,655
Total Kredit MKM (Rp Juta) *)	36,837,346	37,491,872	37,941,651	38,875,836	39,995,935	40,632,862	41,826,362	43,098,764
- NPL MKM Gross (%)	2.08	2.26	2.12	1.91	1.95	2.10	2.03	1.86
- NPL MKM Gross Nominal	766,438	846,773	804,047	743,271	779,853	854,060	849,446	800,226

Sumber: LBU Bank Indonesia

*) Kategori Kredit MKM menggunakan pendekatan nominal kredit yang disalurkan untuk seluruh jenis kredit (UMKM dan Non UMKM)

3. SISTEM PEMBAYARAN

URAIAN	2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
NON TUNAI								
KLIRING								
Nilai Kliring (juta Rp)	1,035,326	1,052,743	1,004,739	1,069,990	979,565	996,783	938,381	939,066
Volume Kliring (lembar warkat)	25,438	22,373	21,730	22,666	20,353	18,915	19,672	18,623
CEK DAN BIRO GILYET KOSONG								
Nominal (juta Rp)	27,056	20,273	26,874	22,487	21,850	23,707	25,574	22,583
Lembar	561	478	540	501	449	456	525	403
TUNAI								
NET INFLOWS/OUTFLOWS (JUTA RP)	1,059,908	(1,517,187)	(652,585)	(2,183,836)	102,649	(479,186)	357,003	(1,870,157)
Aliran Uang Masuk/Inflows (juta Rp)	2,334,676	1,964,932	1,249,210	976,076	1,838,612	2,427,801	1,888,055	1,000,704
Aliran Uang Keluar/Outflows (juta Rp)	1,274,768	3,482,119	1,901,795	3,159,912	1,735,963	2,906,987	1,531,052	2,870,860

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

BANK INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

I. EKONOMI MAKRO REGIONAL

Ekonomi triwulan IV 2022 tumbuh 5,22% (yoy), tumbuh terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya 5,20% (yoy)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 5,22% (yoy), setelah sebelumnya tumbuh 5,20% *(yoy)*. Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar 0,38% *(qtq).* Dari 17 LU pada sisi produksi, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan. LU transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,19% *(yoy)*, didorong peningkatan permintaan kendaraan truk tanpa operator seiring meningkatnya produksi batu bara.

Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 29,77%, diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 19,31%, Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,90%, dan Industri Pengolahan sebesar 9,48%. Struktur pertumbuhan tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan triwulan sebelumnya mengingat kebergantungan Provinsi Jambi terhadap komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan karet sebagai komoditas utama beserta kegiatan pengolahan turunannya.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen konsumsi pemerintah sebesar 8,78% *(yoy)* seiring dengan akselerasi realisasi anggaran Pemerintah sesuai pola musiman. Selanjutnya komponen komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) masing-masing tumbuh sebesar 2,99% *(yoy)* dan 2,76% *(yoy)*. Sementara itu, ekspor, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan impor terkontraksi 4,91% *(yoy)*, 6,08% *(yoy)*, dan 14,43% *(yoy)*.

Berdasarkan distribusinya, aktivitas pengeluaran masih didominasi oleh komponen ekspor (70,06%) namun terkoreksi di sisi impor (42,04%). Komponen lain yang berperan besar terhadap PDRB adalah konsumsi rumah tangga yang mencapai hampir separuh PDRB Provinsi Jambi yaitu sebesar 41,16% dan diikuti oleh PMTB sebesar 20,02%. Sedangkan peranan konsumsi pemerintah dan LNPRT Pemerintah relatif kecil masing-masing 9,85% dan 0,53%. Struktur pengeluaran tersebut juga tidak menunjukkan perubahan yang berarti dibandingkan periode sebelumnya.

II. KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Realisasi pendapatan triwulan IV 2022 sebesar 106,75%, sedangkan realisasi belanja terserap 89,24%

Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan triwulan IV 2022 terealisasi sebesar Rp4,63 triliun atau 106,75% dari target APBD 2022. Realisasi tersebut tumbuh 2,53% *(yoy)* dibandingkan pendapatan triwulan IV 2021 sebesar Rp4,51 triliun (102,56% dari target APBD 2021) dan lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh terkontraksi sebesar -5,35% *(yoy)*.

Lebih lanjut, realisasi belanja daerah juga tercatat tumbuh sebesar 4,92% mencapai Rp4,51 triliun atau 89,24% dari target APBD 2022. Realisasi tersebut terpantau meningkat dari triwulan IV 2021 yang tercatat sebesar Rp4,29 triliun atau 89,38% dari pagu belanja 2021. Kenaikan realisasi tersebut didorong oleh realisasi seluruh pos belanja terutama pada jenis belanja modal.

III. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Inflasi Provinsi Jambi triwulan IV 2022 sebesar 6,35% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 8,09% (yoy).

Pada triwulan IV 2022, inflasi gabungan 2 (dua) Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi tercatat 6,35% *(yoy),* lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,09% *(yoy),* meski demikian angka inflasi ini lebih tinggi dibandingkan nasional yang tercatat sebesar 5,51% *(yoy)*. Laju inflasi gabungan 2 (dua) Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi tersebut merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo pada triwulan IV 2022 yang masing-masing tercatat sebesar 6,39% (*yoy*) dan 6,04% (*yoy*).

Tekanan inflasi di Kota Jambi didorong oleh inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Pada triwulan IV 2022, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau mengalami inflasi sebesar 5,90% *(yoy)*. Inflasi kelompok ini didorong oleh inflasi sub kelompok Makanan yang mengalami inflasi sebesar 7,51% *(yoy).* Adapun komoditas utama yang memberikan andil terhadap inflasi sub kelompok tersebut di antaranya beras, telur ayam ras, dan ikan nila.

Sejalan dengan Kota Jambi, Kabupaten Bungo juga tercatat mengalami inflasi pada triwulan IV 2022. Inflasi di Kabupaten Bungo tersebut terutama disumbangkan oleh inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi 7,15% *(yoy)*. Inflasi kelompok pengeluaran tersebut didorong oleh peningkatan harga pada sub kelompok Makanan sebesar 6,39% *(yoy).* Adapun komoditas pada sub kelompok Makanan yang menyumbang inflasi di antaranya beras dan ikan nila.

Selanjutnya, dengan berbagai upaya stabilisasi harga dan pasokan yang akan dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah di Provinsi Jambi di tengah masuknya periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1444H, inflasi gabungan 2 (dua) Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi pada triwulan I 2023 diprakirakan akan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan perkembangan tersebut, inflasi pada tahun 2023 diprakirakan akan berada pada rentang sasaran inflasi nasional 3%$\pm$1% seiring dengan upaya TPID untuk mengendalikan inflasi dalam kerangka 4K.

IV. STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Penyaluran kredit tercatat sebesar 14,32 triliun tumbuh 6,44% (yoy) lebih baik dibanding triwulan sebelumnya

Pertumbuhan kredit korporasi di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp14,32 triliun atau tumbuh sebesar 6,44% *(yoy)*, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,34% *(yoy)*. Peningkatan kredit korporasi didorong oleh Pertumbuhan pada sektor pertanian sejalan dengan pencabutan tarif pungutan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) yang berlaku

efektif pada 15 Oktober 2022 sampai dengan 30 Desember 2022. Hal ini menjadi faktor pendorong peningkatan permintaan Tandan Buah Segar (TBS). Pertumbuhan kredit korporasi didorong oleh sejumlah sektor yang tumbuh di antaranya sektor pertanian tumbuh sebesar 15,03% *(yoy)* dan sektor perdagangan sebesar 7,95% *(yoy)* pada triwulan laporan. Dari sisi risiko kredit, kredit korporasi menunjukan perbaikan, NPL kredit korporasi tercatat 4,98% *(gross)* membaik dari triwulan sebelumnya yaitu 5,07% *(gross)*. NPL pada triwulan IV 2022 berada pada level dibawah *threshold* yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Hal ini mengindikasi tingkat resiko yang relatif aman.

Adapun sektor yang menunjukan perbaikan Rasio NPL terjadi hampir pada seluruh sektor utama yaitu sektor pertanian dan perdagangan yang tercatat 0,45% *(gross)* dan 1,02% *(gross)* pada triwulan laporan. Meski demikian, perlu diwaspadai bahwa Rasio NPL sektor pertambangan sangat tinggi dan jauh diatas *threshold* yang ditetapkan. Dari sisi penghimpunan dana, Pertumbuhan DPK menurut kategori di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2022 mencapai 3,81% *(yoy)* atau lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,68% *(yoy)*.

V. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Aliran uang kartal triwulan IV 2022 mengalami net outflow sebesar Rp1,870 miliar.

Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan IV 2022 tercatat mengalami peningkatan ditandai dengan *net outflow* sebesar Rp1,870 miliar atau tumbuh sebesar 14,36% (yoy). Demikian halnya, transaksi nontunai melalui SKNBI yang terkontraksi sebesar 12,24% (yoy) secara nilai dan 17,8% (yoy) secara volume. Secara triwulanan, nilai kliring pada triwulan IV - 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,07% (qtq) sedangkan volume kliring mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya sebesar 5,33% (qtq). Selain itu, transaksi menggunakan APMK baik debet maupun kredit, transaksi UE, serta transaksi QRIS mengalami peningkatan pada triwulan IV 2022.

VI. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2022 turun menjadi 4,70% (yoy).

Pada Agustus 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jambi tercatat turun sebesar 4,70% (*yoy*). Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dan didorong oleh pertumbuhan serapan kerja sejalan dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi. Lebih lanjut, peningkatan jumlah penduduk bekerja tersebut mampu mendorong peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi 67,84% dibandingkan Agustus 2021 yang tercatat sebesar 67,17%.

NTP triwulan IV 2022 sebesar 138,29, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 127,52.

Pada sisi kesejahteraan petani, rerata indeks Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan peningkatan pada triwulan IV 2022 yang tercatat sebesar 138,29 atau naik 1,06% (*yoy*) dibandingkan rerata triwulan IV 2021 sebesar 136,84. Angka tersebut juga terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan rerata NTP triwulan III 2022 yang tercatat sebesar 127,52. Perbaikan NTP disebabkan oleh peningkatan indeks yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan peningkatan indeks yang dibayar petani. Rerata Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada triwulan IV 2022 sebesar 156,67 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 147,41.

Sementara itu, Indeks yang Dibayar Petani (Ib) pada triwulan IV 2022 sebesar 113,29, meningkat dibandingkan triwulan IV 2021 yang tercatat 107,43.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi pada September 2022 tercatat sebanyak 283,83 ribu orang atau meningkat 4,45 ribu orang dibandingkan Maret 2022, dan meningkat sebesar 3,96 ribu orang dibandingkan September 2021. Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi baik di wilayah kota maupun pedesaan. Peningkatan angka penduduk miskin tersebut diindikasikan disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa di Provinsi Jambi, sejalan dengan kenaikan inflasi yang mendorong penurunan daya beli masyarakat. Angka kemiskinan Provinsi Jambi pada September 2022 juga meningkat dibandingkan September 2021, dimana terjadi peningkatan baik dari sisi persentase maupun jumlah penduduk. Selanjutnya, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan peningkatan pada September 2022.

Persentase penduduk miskin naik menjadi 283,83 ribu pada September 2022.

VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2023 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2022 didukung peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat seiring penghapusan PPKM yang mendorong permintaan domestik.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi 2023 diprakirakan meningkat.

Pekonomian Provinsi Jambi tahun 2023 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2022 didukung penghapusan kebijakan PPKM yang mendorong berlanjutnya peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Lebih lanjut, kebijakan Pemerintah untuk menyalurkan berbagai program jaring pengaman sosial turut menopang perbaikan konsumsi masyarakat dan dunia usaha.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi pada 2023 berisiko tertahan sejalan dengan perlambatan ekonomi global, khususnya dipengaruhi risiko resesi di beberapa negara mitra dagang, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Selanjutnya, dari sisi perkembangan harga, laju inflasi gabungan 2 (dua) Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi pada tahun 2023 diprakirakan menurun didukung sinergi kebijakan antar lembaga yang menahan laju inflasi di Provinsi Jambi. Penurunan inflasi terutama disebabkan oleh sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi dalam menunjang pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Jambi yang memberikan dampak positif pada pengendalian inflasi di provinsi Jambi.

Namun demikian, meningkatnya permintaan domestik yang diiringi berlanjutnya ketidakpastian global berisiko mendorong laju inflasi komoditas primer di Provinsi Jambi.

Sehingga, dengan mencermati perkembangan inflasi, laju inflasi 2 (dua) Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi pada keseluruhan tahun diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2022, namun bias atas terhadap kisaran sasaran inflasi nasional yaitu sebesar 3±1%.

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

BAB I

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Perekonomian Provinsi Jambi triwulan IV 2022 tetap kuat dan kembali menunjukkan tren pertumbuhan positif, terakselerasi dibandingkan capaian triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh meningkatnya permintaan domestik di tengah dinamika tantangan eksternal.

1.1. PERKEMBANGAN UMUM

Berlanjutnya eskalasi geopolitik Rusia-Ukraina yang disertai pengenaan sanksi dagang terhadap Rusia, meluasnya kebijakan proteksionisme pangan di berbagai negara, serta pencabutan kebijakan *zero case covid policy* di Tiongkok yang baru dilakukan pada akhir triwulan laporan mengakibatkan berlanjutnya gangguan pada rantai pasok global. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya tekanan inflasi global yang direspon oleh kebijakan agresif bank sentral di dunia termasuk The Fed sehingga mengakibatkan penguatan Indeks USD dan berimbas pada mulai tertekannya harga komoditas primer Jambi.

Di tengah dinamika eksternal, meredanya dampak COVID-19 terhadap mobilitas dan aktivitas perekonomian masyarakat serta dukungan kebijakan fiskal Pemerintah melalui pemberian insentif subsidi dan jaring perlindungan sosial yang menopang daya beli masyarakat mendorong peningkatan konsumsi domestik seiring momentum perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal tersebut mendorong realisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan IV 2022 meneruskan tren pertumbuhan positif sebesar 5,22% (*yoy*), tetap kuat setelah sebelumnya tumbuh 5,20% (*yoy*). (GRAFIK 1.1)

Grafik 1.1. Perkembangan PDRB Provinsi Jambi *(yoy)*

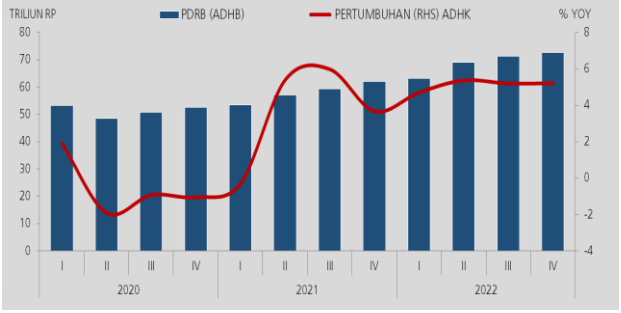

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), laju pertumbuhan paling tinggi pada triwulan IV 2022 terjadi pada LU transportasi dan pergudangan sebesar 19,19% (yoy). Selanjutnya, berturut-turut diikuti oleh LU pertanian, kehutanan dan perikanan (LU pertanian) 9,65% (yoy), LU pengadaan listrik dan gas 9,62% (yoy), LU perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (LU Perdagangan) 9,12% (yoy), dan LU jasa perusahaan sebesar 8,64% (*yoy*) . (TABEL 1.1).

Berdasarkan distribusi pertumbuhan triwulan IV 2022, LU pertanian menyumbangkan porsi tertinggi sebesar 29,77%. Selanjutnya, diikuti oleh LU pertambangan dan penggalian (LU pertambangan) dengan porsi sebesar 19,31%; LU perdagangan dengan porsi sebesar 12,90%; LU industri pengolahan dengan porsi 9,48%; dan LU konstruksi dengan porsi 6,72%. Adapun andil terbesar pertumbuhan triwulan IV 2022 terutama didorong oleh akselerasi pada LU pertanian sebesar 2,49%, LU pertambangan sebesar 1,29%, serta LU perdagangan sebesar 0,89%.

Peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit pasca *replanting* yang mulai memasuki usia produktif mendorong kinerja LU pertanian pada triwulan laporan. Lebih lanjut, relaksasi kebijakan tarif pungutan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) yang berlaku sampai dengan pertengahan triwulan laporan serta berlaku sampai dengan akhir triwulan laporan untuk ekspor Tandan Buah Segar (TBS) turut mendorong kinerja LU pertanian. Namun demikian, penguatan kinerja lebih lanjut tertahan oleh melambatnya produksi karet alam seiring tingginya intensitas curah hujan sepanjang tahun 2022 yang mempengaruhi penurunan produktivitas akibat penyakit gugur daun dan berkurangnya intensitas penyadapan oleh petani.

Sementara itu, mulai beroperasinya 14 lokasi tambang baru pada periode laporan mendorong peningkatan produksi batubara yang menopang kinerja LU Pertambangan. Peningkatan produksi batubara sejalan dengan pemenuhan kebutuhan pembangkit listrik domestik antara lain memenuhi permintaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pulau Baai Bengkulu. Selain itu, berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dan sanksi dagang yang diberlakukan Uni Eropa terhadap batu bara, gas dan minyak bumi Rusia justru menjadi *blessing in disguise* dan mendorong potensi perluasan pasar ekspor ke kawasan Eropa sebagai alternatif di tengah terhentinya pasokan batu bara dan gas dari Rusia ke Eropa meski tertahan perlambatan perekonomian global.

Pada sisi pengeluaran, di tengah dinamika eksternal permintaan domestik tetap kuat yang tercermin pada terakselerasinya kinerja konsumsi rumah tangga didukung terkendalinya kasus COVID-19 serta normalisasi mobilitas dan aktivitas masyarakat. Berbagai perkembangan positif tersebut juga sejalan dengan terjaganya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) triwulan laporan yang berada pada *level* 115,80 (naik 0,80 poin dibandingkan triwulan sebelumnya) yang menunjukkan optimisme keyakinan konsumen Jambi (indeks >100).

Sejalan dengan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah turut tumbuh positif pada triwulan laporan didukung akselerasi realisasi belanja modal termasuk kegiatan pemeliharaan infrastruktur yang sempat tertahan pada periode sebelumnya imbas penerapan automatic adjustment atau pencadangan anggaran yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Lebih lanjut, realisasi belanja wajib perlindungan sosial (perlinsos) dan belanja tak terduga sebagai bantalan terhadap dampak tekanan laju inflasi, serta realisasi belanja bantuan kepada partai dan belanja transfer turut mendorong puncak realisasi belanja APBD yang terjadi pada triwulan laporan sesuai pola historisnya.

Di sisi lain, kinerja ekspor barang dan jasa tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan ini sejalan dengan perlambatan ekonomi global yang menahan permintaan dari negara tujuan ekspor, khususnya Eropa dan Amerika di tengah tekanan inflasi yang masih tinggi. Masih lemahnya permintaan eksternal tercermin pada angka *Purchasing Manufacture's Index* (PMI) beberapa negara mitra dagang yang berada di bawah 50, antara lain Amerika dan Jepang. Namun demikian, penurunan kinerja lebih dalam tertahan oleh relaksasi kebijakan tarif pungutan ekspor komoditas TBS kelapa sawit.

Ke depan, perekonomian provinsi Jambi triwulan I 2023 diperkirakan tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan tahun 2022 dan masih akan ditopang kinerja LU pertanian, LU pertambangan dan LU perdagangan. Kinerja ekspor diprakirakan tertahan sejalan dengan perlambatan ekonomi global, meski permintaan dari Tiongkok diperkirakan membaik didorong oleh *reopening* Tiongkok yang dimulai sejak Desember 2022.

Pertumbuhan kinerja LU pertanian diprediksi masih akan ditopang oleh komoditas kelapa sawit yang masih akan melanjutkan tren pertumbuhan positif meskipun tertahan oleh penurunan produksi kelapa sawit seiring masuknya musim trek serta imbas kurangnya intensitas pemupukan di tahun 2022. Lebih lanjut, curah hujan tinggi yang berlangsung sepanjang tahun 2022 diprakirakan masih memberikan dampak positif pada terjaganya produktivitas pada level tinggi. Di sisi lain, propek cuaca yang membaik seiring dengan La Nina yang menuju netral akan berdampak positif pada peningkatan produktivitas karet alam seiring menurunnya curah hujan dan penyakit gugur daun sehingga turut mendorong terjaganya tren positif kinerja LU pertanian.

Adapun kinerja LU pertambangan diperkirakan akan melanjutkan tren pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi pasca beroperasinya 14 lokasi tambang baru di Provinsi Jambi. Berlanjutnya perbaikan permintaan domestik untuk memenuhi kebutuhan domestik di tengah koreksi harga diperkirakan akan menopang kinerja LU pertambangan dari sisi permintaan. Di sisi eksternal, berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina diperkirakan masih akan memberikan dampak pada gangguan rantai pasok komoditas energi sehingga masih mendorong permintaan batu bara. Selain itu, permintaan dari Tiongkok secara gradual diperkirakan akan meningkat seiring dengan pelonggaran *zero covid policy*.

Sementara itu, penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.53 Tahun 2022 diprakirakan akan mendorong akselerasi permintaan domestik yang menjadi faktor kunci dalam mendorong kinerja perekonomian di tengah perlambatan perekonomian global yang disertai oleh risiko resesi di sejumlah negara. Semakin kuatnya permintaan domestik akan menopang laju kinerja LU perdagangan seiring normalisasi mobilitas dan aktivitas masyarakat

Prospek pertumbuhan tersebut sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Para pelaku usaha memperkirakan bahwa kegiatan dunia usaha pada triwulan I 2023 akan melanjutkan tren positif di tengah

perbaikan mobilitas masyarakat dan berbagai momentum HBKN (Imlek, Nyepi dan Ramadhan).

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut masih tidak lepas dari sejumlah risiko. Terus meningkatnya tekanan inflasi global akibat gangguan rantai pasokan sejalan dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, serta meluasnya kebijakan proteksionisme pangan di berbagai negara dapat mengakibatkan laju pertumbuhan lebih terbatas. Pertumbuhan kinerja LU pertanian diprediksi masih akan ditopang oleh komoditas primer unggulan Jambi yaitu kelapa sawit dan karet yang meskipun termoderasi masih tetap berada pada level tinggi. Pemberian insentif pungutan ekspor TBS kelapa sawit diharapkan dapat mendorong produktivitas kinerja kelapa sawit dan turunannya. Sementara itu, berlanjutnya ketidakpastian konflik Rusia-Ukraina diperkirakan masih mendorong permintaan batu bara yang menopang kenaikan harga.

Perbaikan kinerja LU pertanian dan LU pertambangan akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekspor dan konsumsi rumah tangga. Kinerja ekspor diperkirakan tumbuh positif namun lebih terbatas akibat permintaan eksternal yang berpotensi lebih rendah seiring moderasi perekonomian global. Permintaan domestik diprakirakan semakin kuat dan menopang laju LU perdagangan seiring normalisasi mobilitas dan aktivitas masyarakat. Peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat merupakan faktor kunci untuk mendorong kinerja perekonomian sampai dengan tahun 2023.

Prospek pertumbuhan tersebut sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Kegiatan dunia usaha pada triwulan I 2023 diprakirakan oleh para pelaku usaha tetap akan mengalami pertumbuhan positif seiring berlanjutnya perbaikan ekonomi di tengah peningkatan mobilitas masyarakat serta faktor cuaca yang mendukung produksi komoditas utama daerah. Berbagai indikator dini juga menunjukkan perbaikan ekonomi yang terus berlanjut seperti kenaikan Indeks Ekspektasi Konsumen, angka penjualan ritel, penjualan online dan peningkatan *index job vacancy*. Lebih lanjut, perbaikan pendapatan sejalan dengan terjaganya kinerja sektor ekonomi utama juga turut mendorong pertumbuhan.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut masih tidak lepas dari sejumlah risiko. Terus meningkatnya tekanan inflasi global akibat gangguan rantai pasokan sejalan dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, serta meluasnya kebijakan proteksionisme pangan di berbagai negara dapat mengakibatkan laju pertumbuhan lebih terbatas.

Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jambi (*yoy*)

KELOMPOK	2020				TAHUN 2020	2021				TAHUN 2021	2022				TAHUN 2022
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
LAPANGAN USAHA															
PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN	0.70	1.24	0.53	3.58	1.51	3.25	5.38	6.09	0.00	3.67	2.62	3.09	4.69	9.65	5.00
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	0.81	(3.95)	(2.42)	(2.42)	(2.02)	(6.75)	0.15	9.46	4.59	2.13	9.03	12.61	4.74	5.48	7.82
INDUSTRI PENGOLAHAN	1.43	0.59	(0.57)	(0.87)	0.12	(0.25)	4.52	3.17	(2.23)	1.27	1.04	4.22	4.54	2.28	3.05
PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	7.75	3.86	4.19	2.73	4.59	3.67	9.78	5.88	9.05	7.08	12.31	11.81	13.00	9.62	11.66
PENGADAAN AIR	3.72	4.16	0.39	(0.20)	1.98	0.63	4.67	6.99	8.19	5.13	6.60	1.81	4.67	(0.22)	3.15
KONSTRUKSI	2.91	(3.16)	(2.78)	6.23	0.88	15.89	9.35	6.16	1.74	7.94	1.83	2.12	1.44	(8.17)	(0.88)
PERD. BESAR, ECERAN, REP. MOBIL DAN SPD MOTOR	5.29	(4.24)	(3.91)	(10.61)	(3.54)	(6.10)	7.90	10.36	11.30	5.92	3.34	3.35	5.62	9.12	5.41
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	(6.12)	(27.17)	(12.72)	(10.95)	(14.06)	(10.46)	19.03	6.02	9.91	5.35	11.61	21.18	15.26	19.19	16.92
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	(1.66)	(15.81)	(4.03)	(6.06)	(6.92)	(1.38)	16.03	(1.84)	8.26	4.97	8.49	9.47	18.35	8.48	11.09
INFORMASI DAN KOMUNIKASI	10.56	10.12	10.05	3.52	8.48	0.89	3.94	4.93	5.56	3.84	6.98	7.73	7.15	7.13	7.25
JASA KEUANGAN	6.89	4.07	9.75	7.11	6.97	6.79	12.31	5.48	(2.31)	5.36	4.05	(7.38)	(0.20)	0.74	(0.72)
REAL ESTATE	2.26	(3.31)	0.70	0.31	(0.02)	0.75	4.24	2.21	5.41	3.16	6.74	6.77	2.95	0.76	4.22
JASA PERUSAHAAN	(1.52)	(7.11)	(5.07)	(7.63)	(5.39)	(3.06)	4.79	5.19	9.16	4.03	14.74	23.20	14.57	8.64	15.13
ADM. PEMERINTAHAN, PERTAHANAN, DAN JAM. SOS. WAJB	1.88	(3.66)	(5.39)	(16.87)	(6.32)	(8.10)	12.90	(9.42)	13.79	2.20	0.02	(10.37)	13.54	(2.65)	(0.65)
JASA PENDIDIKAN	4.78	5.03	5.14	(0.03)	3.67	1.34	5.37	(6.89)	5.24	1.22	2.75	(2.51)	8.21	0.24	2.02
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	6.31	5.10	8.22	10.03	7.46	4.13	10.66	24.16	22.02	15.55	13.01	(0.11)	(10.16)	(8.57)	(2.40)
JASA LAINNYA	(1.34)	(4.58)	(0.27)	(2.57)	(2.21)	(4.67)	2.75	0.48	3.67	0.53	5.15	7.39	8.14	10.41	7.81
PDRB	**1.92**	**(1.91)**	**(0.92)**	**(1.04)**	**(0.51)**	**(0.30)**	**5.40**	**5.98**	**3.67**	**3.69**	**4.71**	**5.37**	**5.20**	**5.22**	**5.13**

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

1.2. PDRB SISI LAPANGAN USAHA

Pertumbuhan ekonomi terjadi didorong oleh kinerja positif pada mayoritas LU dengan LU transportasi dan pergudangan yang mengalami pertumbuhan tertinggi didorong oleh berlanjutnya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Sedangkan LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan andil pertumbuhan terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada periode laporan.

Struktur ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV tahun 2022 masih bertumpu pada sektor primer. Pertumbuhan ekonomi daerah terutama bersumber dari LU pertanian sebesar 29,77%. Selanjutnya, diikuti oleh LU pertambangan dengan pangsa sebesar 19,31% dan LU perdagangan menyumbang 12,90%. Sementara, LU industri pengolahan dan LU konstruksi masing masing menyumbang 9,48% dan 6,72% dari total pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan (GRAFIK 1.2).

Grafik 1.2. Distribusi PDRB (ADHB) Menurut Lapangan Usaha

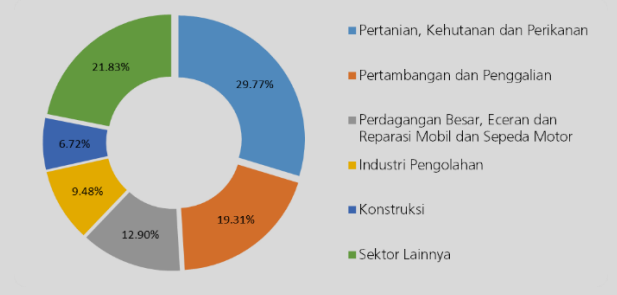

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Berlanjutnya kinerja positif perekonomian Provinsi Jambi ditopang oleh terakselerasinya kinerja ketiga sektor utama, yaitu LU pertanian, LU pertambangan dan LU perdagangan.

Lebih lanjut, kinerja terbaik pada triwulan IV terjadi pada LU transportasi dan pergudangan didorong oleh normalisasi mobilitas dan aktivitas masyarakat seiring dengan momentum perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Grafik 1.3. Perkembangan Harga CPO lokal dan internasional, serta TBS 10 Tahun

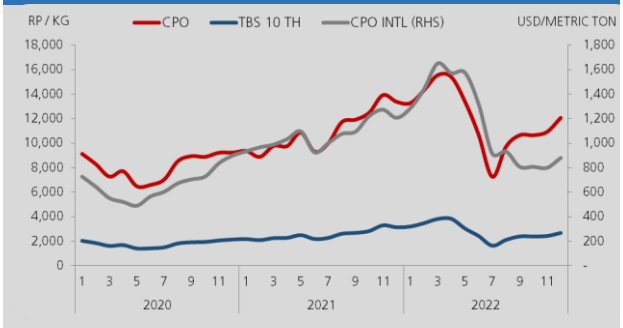

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi & Bloomberg (diolah)

1.2.1 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pertumbuhan LU pertanian tercatat tumbuh terakselerasi pada triwulan IV 2022. Pertumbuhan LU pertanian tercatat 9,65% (*yoy*), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,09% (*yoy*). LU pertanian berkontribusi sebesar 29,77% terhadap struktur perekonomian Provinsi Jambi dengan andil terhadap pertumbuhan sebesar 2,49%.

Kinerja positif LU pertanian, antara lain ditopang oleh peningkatan produksi TBS kelapa sawit pasca *replanting* kelapa sawit yang mulai memasuki usia produktif disertai dengan pergeseran puncak panen ke awal triwulan laporan. Tetap tingginya produktivitas tanaman kelapa sawit juga tidak lepas dari curah hujan yang cenderung tinggi sepanjang tahun 2022. Meningkatnya produktivitas kelapa sawit juga diiringi kebijakan relaksasi tarif pungutan TBS kelapa sawit yang berlaku sampai dengan akhir triwulan laporan.

Lebih lanjut, eskalasi geopolitik Rusia-Ukraina masih berdampak pada pasokan produk substitusi seperti minyak biji bunga matahari dan minyak kedelai. Hal tersebut berimbas pada terjaganya permintaan minyak nabati berbahan dasar kelapa sawit di tengah risiko penghapusan secara bertahap penggunaan bahan bakar berbasis kelapa sawit oleh negara-negara kawasan Eropa.

Di sisi harga, peningkatan produksi TBS kelapa sawit juga disertai dengan berangsur pulihnya harga TBS kelapa sawit di tingkat lokal yang secara level mulai menunjukkan perbaikan dari Rp2.045,59/kg pada triwulan sebelumnya menjadi Rp2.505,54/kg pada triwulan laporan meskipun masih terkontraksi 19,30%(yoy). (GRAFIK 1.3)

Perkembangan harga komoditas tersebut sejalan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang pada triwulan IV 2022, tercatat sebesar 140,63 atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 133,23 namun masih lebih rendah dibandingkan triwulan I 2022 sebesar 142,38. NTP yang belum pulih sepenuhnya berkaitan dengan menurunnya pendapatan petani seiring dengan harga komoditas perkebunan yang belum pulih sepenuhnya. (GRAFIK 1.4). Namun demikian, kinerja positif pada komoditas sawit tidak diiringi perbaikan komoditas karet alam yang menahan kinerja LU pertanian. Curah hujan yang cenderung tinggi sepanjang tahun 2022 dan berpengaruh positif terhadap komoditas kelapa sawit justru mengakibatkan penyakit gugur daun dan berkurangnya intensitas penyadapan oleh petani yang mengakibatkan penurunan produksi.

Di sisi harga, komoditas karet alam diperjualbelikan pada harga USD 1,75/kg, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya senilai USD 1,93/kg. Pada triwulan IV 2022, harga rata-rata karet internasional terkontraksi 19,82% (*yoy*), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 5,85% (*yoy*). Di tingkat lokal, harga rata-rata bokar pada triwulan IV 2022 terkontraksi 23,39% (*yoy*), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 8,84% (*yoy*). Melambatnya perekonomian global, serta penguatan mata uang dolar AS juga turut memberikan tekanan terhadap berbagai harga komoditas global termasuk karet alam. (GRAFIK 1.5)

Grafik 1.4. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)

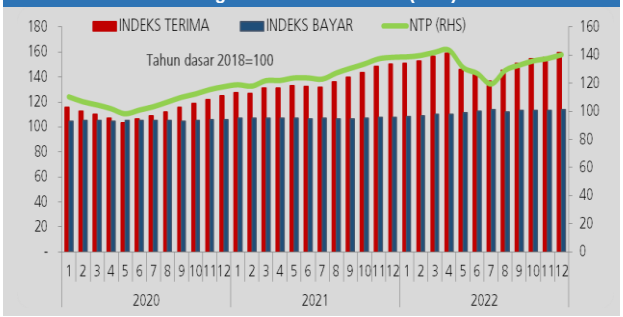

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (diolah)

Selanjutnya, pertumbuhan LU pertanian diprakirakan tumbuh positif pada triwulan I 2023 ditopang oleh kinerja komoditas kelapa sawit, karet, *pulp paper* dan kopi meskipun diperkirakan tertahan oleh perlambatan ekonomi global. Produksi TBS kelapa sawit diperkirakan akan tertahan seiring masuknya musim trek serta imbas intensitas pemupukan yang kurang maksimal di tahun 2022. Namun demikian, lahan *replanting* yang telah memasuki usia tanaman menghasilkan dan peningkatan produktivitas seiring peningkatan usia tanaman sawit diperkirakan akan turut mendorong laju produksi di keseluruhan tahun. Pertumbuhan lebih lanjut diperkirakan akan tertahan oleh berangsur normalnya pasokan minyak nabati dari negara pesaing.

Di sisi permintaan, mengacu pada Keputusan Menteri ESDM No.205.K/EK.05/DJE/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel serta Alokasi Besaran Volume untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode Januari-Desember 2023. Dengan proyeksi penyaluran Biosolar tahun 2022 sebesar 36,47 juta kiloliter (kL) serta asumsi pertumbuhan permintaan/*demand* sebesar 3%, diperkirakan penjualan Biosolar di tahun 2023 akan mencapai angka 37,56 juta kL. Hal ini berimbas pada estimasi kebutuhan Biodiesel untuk mendukung implementasi B35 sebesar 13.15 juta kL, atau meningkat sekitar 19% dibandingkan alokasi tahun 2022 sebesar 11, 02 juta kL. Permintaan CPO domestik juga diprakirakan membaik seiring dengan meningkatnya permintaan bahan makanan berbasis minyak kelapa sawit. Adapun pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan untuk dapat menjamin pasokan minyak kelapa sawit di dalam negeri, antara lain melalui kebijakan pengetatan rasio ekspor CPO dari 1:8 menjadi 1:6 serta peningkatan tarif bea keluar (BK) dan tariff BLU BPD-PKS menjadi masing-masing sebesar USD 74/ metric ton dan USD 95/ metric ton.

Di sisi lain, produksi karet alam diperkirakan akan menunjukkan perbaikan didukung oleh berangsur turunnya curah hujan secara gradual seiring dengan La Nina yang menuju netral. Menurunnya curah hujan berpotensi mendorong produktivitas karet alam dengan meningkatkan intensitas penyadapan oleh petani serta berkurangnya penyakit gugur daun. Berdasarkan analisis *World Rubber Industry Outlook*, permintaan global akan karet alam pada tahun 2023 diprakirakan tumbuh di angka 2,8% (*yoy*). Selain itu, WRIO juga memperkirakan kenaikan produksi di angka 2,9% (*yoy*) pada keseluruhan tahun 2023.

Grafik 1.5. Perkembangan Harga Bokar

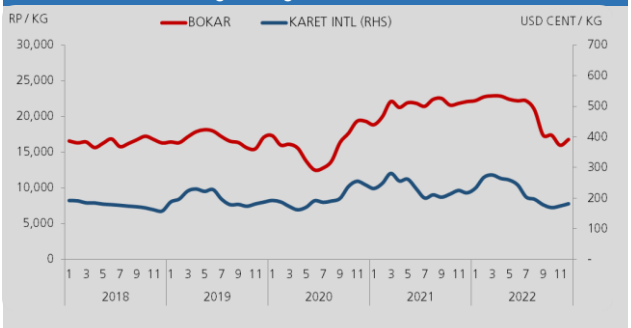

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi & Bloomberg (diolah)

1.2.2 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Pada triwulan IV 2022, kinerja LU pertambangan tercatat tumbuh positif 5,48% *(yoy)*, terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 4,74% *(yoy)*. LU pertambangan berkontribusi terhadap perekonomian Provinsi Jambi sebesar

19,31% dengan andil terhadap pertumbuhan sebesar 1,29%.

Kinerja positif LU pertambangan, antara lain ditopang oleh peningkatan produksi batubara seiring dengan mulai beroperasinya 14 lokasi tambang baru yang tersebar di wilayah Kab. Batanghari, Kab. Tebo dan Kab. Muaro Jambi. Peningkatan kapasitas produksi batubara sejalan dengan pemenuhan kebutuhan pasokan domestik, antara lain untuk memenuhi permintaan batubara dari PLTU Pulau Baai Bengkulu. Peningkatan permintaan juga didorong oleh berlanjutnya eskalasi geopolitik Rusia – Ukraina dan sanksi dagang yang diberlakukan Uni Eropa terhadap batubara, gas dan minyak bumi Rusia yang masih berdampak terhadap gangguan rantai pasok dan *energy crunch* sehingga mendorong permintaan eksternal, khususnya permintaan batubara dari kawasan Eropa untuk pemenuhan bahan baku pembangkit listrik selama musim dingin. Adapun ekspor batu bara Jambi sebagian besar ditujukan ke negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Namun demikian, pertumbuhan lebih lanjut tertahan oleh kendala terhambatnya distribusi batubara di Provinsi Jambi akibat kerusakan jalan di ruas jalan Muara Bulian – Simpang Tiga Tembesi yang merupakan pertemuan arus kendaraan dari Kab. Bungo, Kab. Tebo dan Kab. Sarolangun. Kerusakan jalan tersebut, berisiko mengakibatkan waktu tempuh Bungo – Jambi meningkat dari hanya 5-6 jam menjadi lebih dari 10 jam.

Meningkatnya permintaan dan harga batu bara belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh eksportir batu bara nasional. Kondisi tambang batu bara yang sudah tua diiringi dengan pengetatan regulasi operasional kendaraan batu bara menahan peningkatan kinerja lebih lanjut. Di Provinsi Jambi, pelaku usaha tambang batu bara juga masih menghadapi kendala distribusi untuk pengiriman ke pasar dalam negeri.

Sejak awal tahun 2018, jam operasional pengangkutan batu bara dibatasi untuk menghindari konflik dengan masyarakat sekitar area perlintasan angkutan batu bara. Regulasi tersebut kembali mengalami pengetatan pada bulan November 2021 dengan ditandatanganinya MoU antara Gubernur Jambi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi, dan Bupati/ Walikota yang merupakan jalur distribusi angkutan batu bara yang antara lain mengakibatkan pembatasan jam operasional dan pembatasan tonase kendaraan.

Solusi pembangunan jalur angkutan khusus batu bara telah disepakati oleh pemangku kepentingan terkait, namun masih memerlukan waktu untuk dapat direalisasikan. Dengan kondisi tersebut, pelaku usaha cenderung memilih untuk menjaga tingkat penjualan pada level tetap karena khawatir dengan hambatan pengiriman. Lebih lanjut, pasar komoditas batu bara internasional secara umum menunjukkan peningkatan seiring aktivitas industri manufaktur yang mulai pulih di India.

Pada komoditas migas, merujuk pada OPEC *Monthly Oil Market Report* Februari 2023, permintaan minyak mentah global pada tahun 2023 diperkirakan naik menjadi 2,3 mb/d lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 2,2 mb/d didukung perkembangan ekonomi di beberapa negara terutama Tiongok yang melakukan pencabutan zero covid policy. Namun demikian, permintaan tersebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata permintaan tahun 2022 sebesar 2,5 mb/d. Rendahnya permintaan sepanjang tahun 2023 sejalan dengan perkiraan perlambatan ekonomi diberbagai negara yang diiringi risiko resesi.

Sementara itu, produksi minyak mentah dunia diperkirakan berada pada kisaran 67,0 mb/d, lebih tinggi dibandingkan rata-rata produksi sepanjang tahun 2022 sebesar 65,6 mb/d. Peningkatan pasokan diperkirakan ditopang oleh produksi dari Amerika, Norwegia, Brazil, Kanada, Kazakhstan dan Guyana namun tertahan oleh menurunnya produksi dari Rusia dan Meksiko.

Rata-rata harga minyak pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar US$ 82,85/bbl atau tumbuh 7,12% (yoy) dibandingkan rata-rata triwulan IV 2021 sebesar USD 77,34/bbl. Perbaikan harga minyak terutama dipengaruhi oleh pencabutan zero covid policy oleh Tiongkok yang mendorong permintaan. Lebih lanjut, menguatnya permintaan dari India, negara kawasan Asia Pacific dan negara-negara Timur Tengah diperkirakan turut mendorong terjaganya harga minyak dunia pada level tinggi. (GRAFIK 1.6)

Ke depan, kinerja LU pertambangan diprakirakan akan tetap kuat pada triwulan I 2023 meskipun tertahan oleh perlambatan perekonomian dunia. Berlanjutnya tren

positif terutama didorong oleh peningkatan kinerja komoditas batu bara dan minyak mentah. Permintaan batu bara eksternal dan domestik akan tetap tinggi. Di sisi domestik, pelonggaran pembatasan sosial akan mendorong konsumsi bahan bakar listrik dan industri. Sementara itu, permintaan eksternal diperkirakan akan tetap tinggi meskipun tidak setinggi permintaan tahun 2022 yang merupakan *outliers*. Hal tersebut dipengaruhi oleh berlanjutnya eskalasi geopilitik Rusia-Ukraina serta sanksi dagang kepada Rusia, khususnya batu bara yang berlaku sejak Agustus 2022.

Grafik 1.6. Perkembangan Harga Minyak WTI

Sumber: Bloomberg (diolah)

Selain itu, kinerja komoditas minyak juga diperkirakan meneruskan tren positif seiring terjaganya harga minyak mentah dunia pada level tinggi seiring terjaganya permintaan eksternal terutama dari negara berkembang. Berlanjutnya pemulihan ekonomi di berbagai negara, khususnya India dan Tiongkok mendorong kembali bergeraknya aktivitas industri kedua negara tersebut, yang berdampak positif terhadap permintaan minyak mentah.

1.2.3 Lapangan Usaha Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

LU perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor masih melanjutkan perbaikan di triwulan IV 2022. Laju pertumbuhan LU perdagangan tercatat sebesar 9,12% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 5,62% (yoy). LU perdagangan berkontribusi sebesar 12,90% terhadap perekonomian Provinsi Jambi dengan andil terhadap pertumbuhan sebesar 0,89%.

Berlanjutnya pelonggaran PPKM yang disertai dengan momentum perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional HBKN Nataru mendorong peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat yang menopang berlanjutnya tren positif kinerja LU perdagangan pada triwulan laporan. Lebih lanjut, realisasi berbagai program jaring pengaman sosial sehubungan dengan peningkatan tekanan inflasi yang direalisasikan pada triwulan IV 2022 turut menjaga daya beli dan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Grafik 1.7. Perkembangan Jumlah Kendaraan Baru

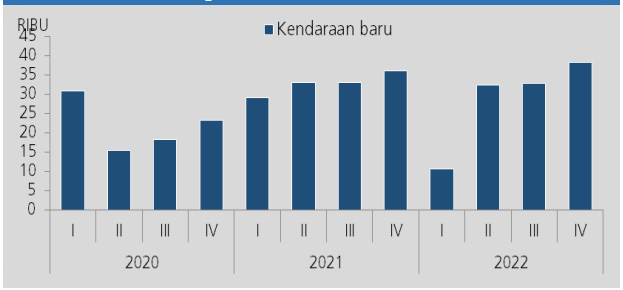

Sumber: Bakeuda Provinsi Jambi

Selaras dengan perkembangan tersebut, jumlah kendaraan baru tercatat sebanyak 38,24 ribu penambahan kendaraan atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat 32,75 ribu penambahan kendaraan baru. Penambahan kendaraan tersebut terakselerasi sebesar 6,17% (yoy), lebih baik dibandingkan periode sebelumnya yang terkontraksi 2,02% (yoy). Perkembangan tersebut juga lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak 36,01 ribu penambahan kendaraan. (GRAFIK 1.7)

Namun demikian, peningkatan kinerja lebih lanjut tertahan kenaikan biaya energi dan berakhirnya stimulus pemerintah seperti pemberian relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) terhadap segmen kendaraan kendaraan hemat energi dan harga terjangkau atau lebih dikenal dengan istilah *Low-Cost Green Car* (LCGC) dan pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) terhadap pembelian properti.

Selanjutnya, kinerja LU perdagangan pada triwulan I 2023 diprakirakan tetap tumbuh melambat menuju normal. Kondisi ini didukung oleh berlanjutnya relaksasi kebijakan LTV/FTV pada kredit kendaraan bermotor dan kebijakan pemerintah yang tetap akomodatif, antara lain pengalokasian sebagian anggaran subsidi BBM untuk bantuan sosial dalam rangka menopang daya beli masyarakat serta berlanjutnya subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) 3%.

Perbaikan kinerja LU perdagangan tersebut tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Jambi. Hasil SKDU triwulan IV 2022 menunjukkan bahwa perkiraan kegiatan usaha sektor perdagangan berpotensi terakselerasi pada triwulan I 2023 yang tercermin pada saldo bersih tertimbang (SBT) sektor perdagangan triwulan I 2023 yang diprakirakan sebesar 2,87%, terakselerasi dibandingkan SBT triwulan laporan sebesar 1,16%.

Normalisasi permintaan pasca perayaan HBKN Nataru diperkirakan akan lebih terbatas seiring dengan majunya periode bulan Ramadhan berpotensi menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap tinggi pada triwulan I 2023. Selain itu, kebijakan Pemerintah yang juga akomodatif untuk mendukung peningkatan permintaan domestik kedepan antara lain melalui penghapusan PPKM pada 30 Desember 2022 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2022, meskipun status pandemi COVID-19 masih diberlakukan sesuai keputusan World Health Organization (WHO) dan Keputusan Presiden (Keppres) yang berlaku akan turut berdampak pada peningkatan permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga.

Lebih lanjut kebijakan Pemerintah yang mengeluarkan sejumlah aturan untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, yaitu aturan mengenai penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Belanja Wajib Dana Transfer Umum (DTU). Penggunaan BTT diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, serta kestabilan harga pangan. Sementara itu, DTU diharapkan dapat direalisasikan untuk pemberian bansos, penciptaan lapangan kerja, serta pemberian subsidi angkutan umum di daerah.

Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.500/4825/SJ tentang Pengguna Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah tanggal 19 Agustus 2022 yang mendorong Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk melakukan optimalisasi anggaran yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah antara lain dengan menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah yang alokasi anggarannya dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran belanja tidak terduga.

Di sisi lain, berlanjutnya tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang mempengaruhi tekanan inflasi dan nilai tukar perlu untuk dimitigasi untuk mendukung prospek perbaikan kinerja LU Perdagangan ke depan. Ke depan, penguatan strategi perekonomian daerah diarahkan untuk mendukung berlanjutnya perbaikan ekonomi.

1.2.4 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Lapangan usaha industri pengolahan tumbuh sebesar 2,28% (*yoy*) pada triwulan IV 2022, meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,54% (*yoy*). LU industri pengolahan berkontribusi sebesar 9,48% terhadap perekonomian Provinsi Jambi dengan andil terhadap pertumbuhan sebesar 0,23%.

Masih positifnya kinerja LU industri pengolahan tidak lepas dari kenaikan permintaan produk olahan seiring dengan membaiknya perekonomian domestik maupun global. Berlanjutnya eskalasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina masih berdampak pada terganggunya rantai pasok global, termasuk rantai pasok komoditas minyak nabati sehingga mendorong peningkatan permintaan komoditas CPO.

Kebijakan *flush out* dan penghapusan tarif pungutan ekspor CPO yang dilakukan oleh Pemerintah pada beberapa waktu lalu turut mendorong produktivitas pengolahan TBS kelapa sawit menjadi CPO. Peningkatan produksi CPO juga didorong oleh relaksasi kebijakan tarif pungutan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) yang berlaku sampai dengan pertengahan triwulan laporan juga turut menopang kinerja LU industri pengolahan. Selain itu, permintaan pengolahan kelapa sawit dalam negeri yang juga ditopang oleh konsumsi *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) untuk biodiesel B30 yang tinggi ini, masih akan menjaga harga komoditas di tengah termoderasinya harga bahan baku. Sejalan dengan permintaan domestik yang tinggi untuk produk pangan dan kuota alokasi biodiesel yang meningkat. Perkembangan ini didukung oleh produksi bahan baku yang meningkat sejalan dengan masuknya periode panen.

Sementara itu, membaiknya aktivitas industri otomotif baik domestik maupun global belum dapat mendorong permintaan komponen pendukung kendaraan berbahan baku karet yang justru tekontraksi pada

periode laporan. Hal ini tercermin dari angka volume ekspor karet yang dihasilkan perusahaan pada triwulan IV 2022 yang terkontraksi 20,53%, (*yoy*), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 6,53% (*yoy*). Menurunnya permintaan karet global antara lain disebabkan belum pulihnya permintaan dari Tiongkok seiring dengan kebijakan *lockdown* dan *zero covid policy* yang baru dicabut pada akhir triwulan laporan.

Grafik 1.8. Produksi Karet

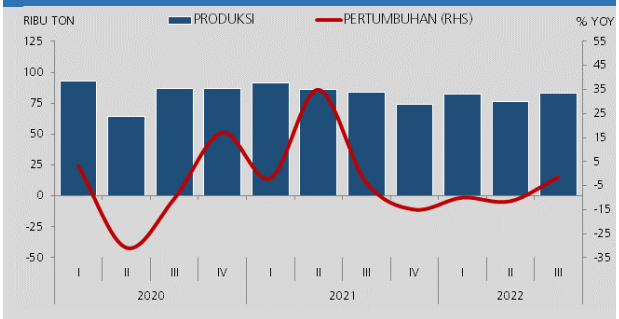

Sumber: GAPKINDO Provinsi Jambi (diolah)

Di sisi produksi, curah hujan yang cenderung tinggi sepanjang tahun 2022 turut berdampak pada menurunnya produksi bahan baku karet alam triwulan IV yang terkontraksi 20,17% (*yoy*), melanjutkan tren penurunan setelah sebelumnya terkontraksi 1,42% (*yoy*) pada triwulan III 2022. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya intensitas penyadapan oleh petani dan penyakit gugur daun yang berimbas pada terbatasnya ketersediaan bahan baku karet alam (**GRAFIK 1.8**).

Grafik 1.9. Perkembangan Jumlah Bongkar dan Muat Barang

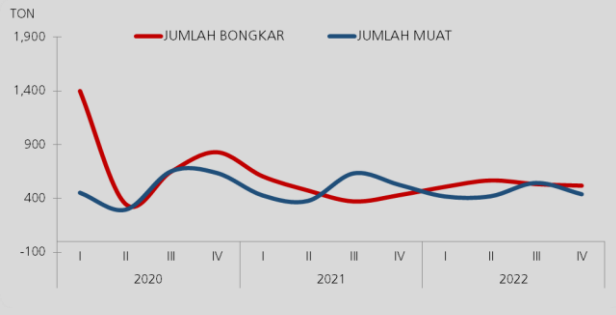

Sumber: PT. Angkasa Pura II (PERSERO) Sultan Thaha Jambi (diolah)

Ke depan, permintaan domestik yang kuat diperkirakan akan menopang kinerja LU industri pengolahan di tengah dinamika permintaan eksternal yang termoderasi. Kondisi cuaca yang mulai berangsur membaik dan kebijakan pemerintah untuk melanjutkan program B30 sejak tahun 2021 diperkirakan juga akan turut menopang perbaikan LU industri pengolahan. Namun demikian, pengesahan *Europen Union Regulation on Deforestation-Free Supply Chain* (DFSC) pada 6 Desember 2022 yang bertujuan untuk memastikan produk yang masuk dan dipasarkan tidak berkontribusi pada deforestasi atau degradasi hutan dan mengkategorikan kelapa sawit sebagai salah satu penyebab utama deforestasi (*embodied deforestation*) berisiko berdampak pada pembatasan permintaan secara bertahap dari negara-negara di kawasan Eropa.

1.2.5 Lapangan Usaha Lainnya

Secara umum, LU lain di luar sektor ekonomi utama juga masih melanjutkan tren pertumbuhan positif pada triwulan IV 2022 dengan LU transportasi dan pergudangan tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 19,19 % (*yoy*), terakselerasi dibandingkan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,26% (*yoy*). Lapangan usaha tersebut memberikan andil sebesar 0,49% ditopang oleh meningkatnya mobilitas di tengah terjaganya kasus COVID-19 dan meningkatnya capaian vaksinasi nasional, serta seiring dengan penyelenggaran HBKN Nataru.

Berlanjutnya tren positif perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat juga turut memperbaiki kinerja aktivitas penerbangan yang mulai ramai dilakukan oleh masyarakat. Hal ini tercermin berlanjutnya tren positif peningkatan data bongkar kargo bandara di Provinsi Jambi tercatat tumbuh sebesar 20,54% (*yoy*) di triwulan IV 2022, atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 43,32% (*yoy*). Membaiknya volume bongkar muat menunjukkan aktivitas ekonomi yang pulih menuju normal sejalan dengan kebijakan akomodatif pemerintah terutama terkait kebijakan pemerintah dalam implementasi pelonggaran PPKM. (**GRAFIK 1.9**).

Sejalan dengan aktivitas bongkar muat kargo bandara, jasa transportasi udara juga kembali tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Perbaikan kinerja transportasi udara tersebut terakselerasi tercermin dari jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang angkutan udara pada triwulan IV 2022. Jumlah kedatangan penumpang di Bandara Sultan Thaha Jambi tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 45,94% (*yoy*) dengan total penumpang 114,97 ribu, melanjutkan tren positif setelah sebelumnya tumbuh 307,31% (*yoy*) dengan total penumpang sebanyak 103,57 ribu. Jumlah

keberangkatan penumpang juga tumbuh signifikan sebesar 51,99% (*yoy*) dengan total penumpang sebanyak 115,35 ribu, melanjutkan tren positif setelah sebelumnya tercatat tercatat tumbuh 330,32% (*yoy*) dengan total penumpang sebanyak 105,80 ribu. (GRAFIK 1.10).

Grafik 1.10. Perkembangan Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang

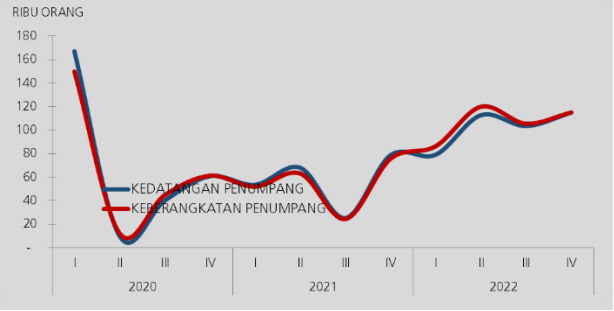

Sumber: PT. Angkasa Pura II (PERSERO) Sultan Thaha Jambi (diolah)

Ke depan, kinerja sektor transportasi dan pergudangan diprakirakan akan tetap tumbuh positif pada triwulan I 2023. Hal ini didukung oleh berlanjutnya tren positif peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaksanaan sejumlah event strategis dari sebelumnya *online* menjadi *offline* sebagai imbas penghapusan PPKM. Namun demikian, perlambatan perekonomian global yang mempengaruhi permintaan serta masih terbatasnya pemanfaatan *National Logistic Ecosystem* (NLE) oleh pelaku usaha berisiko menahan perbaikan lebih lanjut.

Sejalan dengan kinerja LU transportasi dan pergudangan, LU penyediaan akomodasi dan makan minum juga tercatat tumbuh 8,48% (*yoy*) pada triwulan IV 2022, melanjutkan tren positif setelah tumbuh 18,35% (*yoy*) pada triwulan sebelumnya. LU penyediaan akomodasi dan makan minum memberikan andil pertumbuhan sebesar 0,12%. Perbaikan kinerja tersebut baik secara umum disebabkan oleh kembali beroperasinya kegiatan *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition* (MICE) seiring normalisasi mobilitas dan aktivitas masyarakat sejalan dengan meredanya dampak pandemi COVID-19. Namun demikian, peningkatan kinerja lebih lanjut tertahan oleh penyesuaian harga BBM dan kenaikan biaya transportasi pada Oktober 2022, serta kebijakan yang mensyaratan para perlaku perjalanan dalam negeri untuk melakukan vaksinasi booster.

Kinerja LU penyediaan akomodasi dan makan minum pada triwulan I 2023 diprakirakan tumbuh terakselerasi seiring dengan meningkatnya intensitas kegiatan MICE serta aktivitas restoran dan *cafe* yang dapat memaksimalkan 100% kapasitasnya didukung oleh penghapusan kebijakan PPKM serta peningkatan permintaan selama bulan Ramadhan.

Kinerja LU jasa perusahaan juga tercatat tumbuh 8,64% (*yoy*), melanjutkan tren positif setelah sebelumnya tercatat tumbuh 14,57% (*yoy*) pada triwulan sebelumnya. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan berlanjutnya tren positif kinerja LU utama turut mendorong peningkatan intensitas jasa perusahaan antara lain meliputi persewaan kendaraan baik untuk tujuan wisata maupun truk pengangkutan komoditas primer.

Selanjutnya, LU informasi dan komunikasi pada triwulan IV 2022 tercatat tumbuh 7,13% (*yoy*), melambat menuju normal setelah triwulan sebelumnya tumbuh 7,15% (*yoy*). Adapun andil LU informasi dan komunikasi terhadap pertumbuhan triwulan IV 2022 sebesar 0,29%. Melambatnya LU informasi dan komunikasi pada triwulan IV 2022 sejalan dengan beralihnya sebagian kegiatan bekerja dan belajar yang kembali diselenggarakan secara luring ataupun *hybrid*. Selanjutnya, pertumbuhan positif LU informasi dan komunikasi diprediksi masih akan terjadi hingga triwulan I 2023 meskipun lebih terbatas akibat dampak normalisasi aktivitas dan mobilitas masyarakat pasca meredanya kasus COVID-19.

Adapun sektor yang masih menunjukkan tren pertumbuhan positif, yaitu LU pengadaan, listrik dan gas, LU *real estate*, LU jasa keuangan dan LU jasa pendidikan yang masing-masing tumbuh sebesar 9,62% (*yoy*), 0,76% (*yoy*), 0,74% (*yoy*) dan jasa pendidikan 0,24% (*yoy*) dengan andil pertumbuhan masing-masing sebesar 0,01%, 0,01%, 0,02% dan 0,01%

Sementara itu, LU konstruksi tercatat terkontraksi 8,17% (*yoy*) dengan andil pertumbuhan sebesar -0,67%. Kinerja LU konstruksi terkontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 1,44% (*yoy*). Berakhirnya proyek penataan trotoar jalan disejumlah titik serta penyelesaian administrasi tender proyek Islamic Center yang lebih lambat dari perkiraaan menahan kinerja LU konstruksi pada triwulan laporan. Lebih lanjut, pengerjaan Stadion Pijoan Kab. Muaro Jambi yang tertunda dan memerlukan tender ulang juga

turut menahan kinerja LU konstruksi. Namun demikian, kontraksi lebih dalam tertahan oleh ekspansi proyek fisik swasta terutama pembangunan PLTA Batang, Merangin di Kabupaten Kerinci dan terminal Rawasari serta pengembangan kawasan terpadu Jambi Business Center masih mendorong kinerja LU konstruksi.

Tertahannya sejumlah proyek konstruksi di Provinsi Jambi juga tercermin pada angka konsumsi semen triwulan IV 2022 yang tercatat sebesar 262.625 ton atau terkontraksi 18,21% (*yoy*) lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 5,95% (*yoy*) (GRAFIK 1.11).

Grafik 1.11. Perkembangan Konsumsi Semen

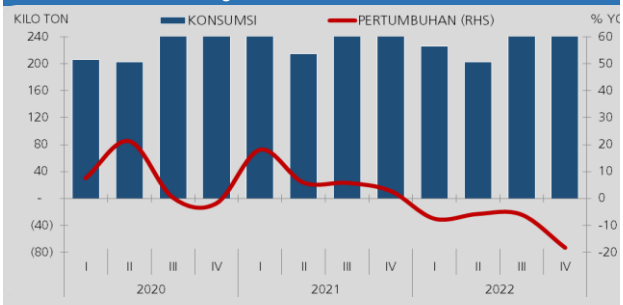

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (diolah)

Pada triwulan I 2023, LU konstruksi diprakirakan akan mengalami pertumbuhan yang terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Faktor utama yang mendorong perbaikan kinerja LU konstruksi adalah realisasi belanja modal pemerintah daerah di luar PSN, serta meningkatnya pembangunan rumah pribadi dan bangunan komersial. Berlanjutnya relaksasi kebijakan LTV/FTV pada kredit perumahan diperkirakan juga dapat mendorong kinerja sub-sektor perumahan.

1.3. PDRB SISI LAPANGAN PENGELUARAN

Di sisi pengeluaran, perkembangan PDRB Provinsi Jambi pada triwulan IV 2022 masih melanjutkan tren positif terutama ditopang pemulihan ekonomi domestik ditengah dinamika eksternal. Meredanya dampak COVID-19 sejalan dengan kesiapan Pemerintah tercermin pada terkendalinya kasus positif mendukung peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat terutama mendorong terakselerasinya konsumsi rumah tangga meskipun sempat tertahan dampak rambatan kenaikan harga energi meski dukungan kebijakan fiskal diperkirakan mampu menjaga daya beli masyarakat. (TABEL 1.2).

Berdasarkan struktur perekonomian, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV 2022 masih bersumber dari konsumsi rumah tangga dan LNPRT sebesar 41,69%. Selanjutnya, diikuti oleh net ekspor sebesar 28,02%, pembentukan modal tetap domestik bruto dengan pangsa sebesar 20,02%, konsumsi pemerintah sebesar 9,85% dan perubahan inventori sebesar 0,42% (GRAFIK 1.12).

Grafik 1.12. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran

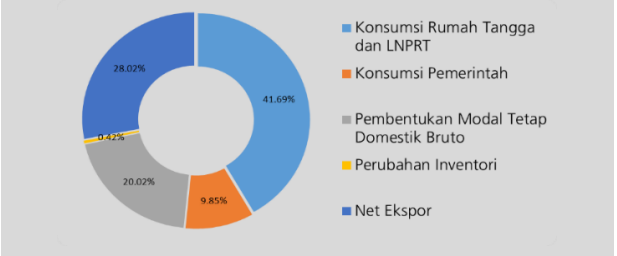

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

1.3.1 Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah

Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2022 tercatat tumbuh 2,99% (*yoy*), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,80% (*yoy*). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga memberikan sumbangan sebesar 41,16% terhadap perekonomian Provinsi Jambi dengan andil sebesar 1,33%.

Meskipun mulai melambat menuju normal, berlanjutnya tren pertumbuhan positif konsumsi rumah tangga sejalan dengan berlanjutnya tren positif beberapa lapangan usaha. Meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat seiring implementasi kebijakan pelonggaran PPKM tercermin pada perkembangan tingkat hunian hotel dan jumlah tamu menginap yang masing-masing meningkat 57,72% (*yoy*) dan 52,22% (*yoy*). Hal ini juga sejalan dengan kinerja positif LU transportasi dan pergudangan dan LU penyediaan akomodasi dan makan minum. (GRAFIK 1.13).

Grafik 1.13. Perkembangan Jumlah Tamu Menginap

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Perbaikan pada kinerja konsumsi juga ditunjukan oleh berlanjutnya pertumbuhan kredit konsumsi yaitu

sebesar 3,77% (*yoy*) melanjutkan tren pertumbuhan positif setelah tumbuh 6,42% (*yoy*) pada triwulan sebelumnya. (GRAFIK 1.14).

Grafik 1.14. Perkembangan Kredit Konsumsi

Sumber: LBU Bank Indonesia

Selain itu, dampak pelonggaran PPKM pada triwulan laporan juga tercermin pada indeks keyakinan konsumen yang terjaga pada level optimis (indeks >100). Indeks keyakinan konsumen di Provinsi jambi pada triwulan IV 2022 (Desember) sebesar 115,80, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (September) sebesar 115,00 (GRAFIK 1.15).

Grafik 1.15. Indeks Keyakinan Konsumen Provinsi Jambi

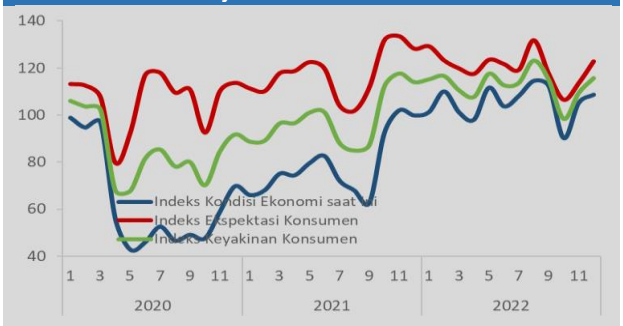

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia (diolah)

Selain itu, pertumbuhan kinerja konsumsi juga terjadi seiring dengan realisasi penyaluran bantuan sosial pada triwulan laporan. Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) diperkirakan mempengaruhi daya beli masyarakat dengan realisasi penyaluran tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 pada triwulan IV 2022 yang sudah mencapai 100% dan telah mencapai 97,10% untuk PKH tahap 4.

Berlanjutnya normalisasi aktivitas bisnis dan sosial didukung pelonggaran aturan PPKM yang diberlakukan di Provinsi Jambi pasca menurunnya kasus COVID-19 di beberapa daerah masih mendorong akselerasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Selain itu, jaring pengaman sosial yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah antara lain melalui Bantuan Sosial atas Dampak Penyesuaian Harga BBM dengan target penerima bantuan yaitu Nelayan dan Penarik Ojek serta Bantuan Modal usaha kepada pelaku UMKM di Provinsi Jambi juga turut menopang konsumsi masyarakat.

Selanjutnya, kinerja konsumsi rumah tangga diprakirakan akan meningkat pada triwulan I 2023. Peningkatan konsumsi rumah tangga terutama didorong meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang bulan Ramadhan. Adapun normalisasi permintaan pasca HBKN Nataru diperkirakan relatif terbatas dan kebijakan insentif pemulihan ekonomi yang masih dipertahankan diperkirakan mampu menjaga daya beli masyarakat.

Prospek ekonomi tersebut sejalan dengan Survei Keyakinan Konsumen yang dilakukan oleh KPwBI Provinsi Jambi pada triwulan IV tahun 2022. Hasil survei menunjukkan bahwa konsumen memiliki pandangan yang optimis terhadap perekonomian ke depan. Pandangan konsumen terhadap perekonomian ke depan masih akan melanjutkan pertumbuhan yang telah terjadi selama beberapa triwulan terakhir. Persepsi konsumen tersebut terutama dipengaruhi oleh optimisme untuk memperoleh pendapatan seiring normalisasi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Sementara itu, konsumsi pemerintah tercatat tumbuh terakselerasi pada triwulan IV 2022. Kinerja pada sektor konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 8,78% (*yoy*), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya terkontraksi 0,17% (*yoy*). Pertumbuhan konsumsi pemerintah memberikan sumbangan sebesar 9,85% terhadap perekonomian Provinsi Jambi dengan andil sebesar 0,85%.

Terakselerasinya konsumsi pemerintah pada triwulan laporan ditopang oleh akselerasi penyerapan komponen belanja modal seiring dengan terlaksananya kegiatan pemeliharaan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah. Lebih lanjut, penggunaan anggaran yang sempat terkendala *automatic adjustment* atau pencadangan anggaran yang rencananya akan digunakan untuk tambahan subsidi BBM telah terealisasi antara lain dalam bentuk berbagai program pengendalian inflasi di Provinsi Jambi. Selain itu, dana pemerintah pusat yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk satuan kerja Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di Provinsi

Jambi yang sempat terblokir juga telah mulai direalisasikan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun kinerja konsumsi pemerintah diprakirakan akan melanjutkan tren positif pada triwulan I 2023 meskipun melambat sesuai dengan pola musimannya. Berbagai upaya percepatan belanja di daerah yang dilakukan secara sinergis bersama Kementerian/ Lembaga terkait, diantaranya percepatan kegiatan belanja modal, peningkatan bimbingan teknis (bimtek), penyaluran jaring pengaman sosial serta penguatan koordinasi antar instansi dalam rangka pembinaan dan pengawasan anggaran diharapkan dapat berkontribusi positif dalam mendorong percepatan realisasi konsumsi pemerintah dan pemulihan ekonomi di Provinsi Jambi.

Tabel 1.2. Kontribusi PDRB Sisi Penggunaan Terhadap Pertumbuhan (*yoy*)

JENIS PENGELUARAN	2020				TAHUN 2020	2021				TAHUN 2021	2022				TAHUN 2022
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA	4.72	(3.83)	(2.60)	0.06	(0.44)	(1.09)	6.48	3.29	5.15	3.41	5.03	6.11	3.80	2.99	4.46
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA INPRT	(3.76)	(6.15)	2.85	4.76	(0.75)	(1.27)	2.86	1.39	4.72	1.94	6.47	7.10	8.04	2.76	6.05
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH	2.66	(6.66)	(11.52)	(2.03)	(5.24)	(0.97)	7.49	(0.68)	(4.20)	0.04	3.00	(7.02)	(0.17)	8.78	1.52
PEMBENTUKAN MODAL TETAP DOMESTIK BRUTO	3.76	(4.10)	(3.22)	7.50	1.04	12.70	12.76	6.16	6.31	9.27	6.83	2.84	7.24	(6.08)	2.38
PERUBAHAN INVENTORI	(182.03)	(133.44)	(165.84)	178.95	(30.76)	(230.38)	(225.60)	(42.55)	(81.91)	111.12	(38.54)	31.73	(54.91)	(24.63)	(25.22)
EKSPOR	(1.91)	(15.86)	(17.85)	(2.81)	(9.52)	(11.18)	8.55	14.58	8.42	4.65	4.26	10.13	9.54	(4.91)	4.27
IMPOR	(9.22)	(32.80)	(23.99)	4.26	(14.69)	(4.51)	23.29	14.07	6.14	8.53	3.02	10.89	10.03	(14.43)	0.40
PDRB	1.92	(1.91)	(0.92)	(1.04)	0.51)	(0.30)	5.40	5.98	3.67	3.69	4.71	5.37	5.20	5.22	5.13

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Tabel 1.3. Indeks Keyakinan Konsumen

INDEKS	2020				2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
INDEKS KONDISI EKONOMI	97.00	48.27	49.53	58.83	69.82	78.97	67.67	98.23	104.33	103.83	112.50	108.80
INDEKS EKSPEKTASI KONSUMEN	111.13	96.40	112.77	105.45	113.08	120.30	105.87	131.17	124.07	121.67	117.50	122.80
INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN	104.07	72.33	81.13	82.14	91.45	99.63	86.77	114.70	114.20	112.75	115.00	115.80

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

1.3.2 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)

Perkembangan PDRB Investasi di Provinsi Jambi yang dinyatakan dalam PMTDB terkontraksi 6,08% (*yoy*) pada triwulan IV 2022, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,24% (*yoy*). PMTDB menyumbang 20,02% dari perekonomian Provinsi Jambi dengan andil terhadap pertumbuhan sebesar -1,52% terhadap total pertumbuhan triwulan IV 2022.

Secara nominal kinerja PMTDB masih didorong oleh investasi swasta. Hal ini tercermin dari komponen penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada triwulan IV 2022 yang tercatat Rp2,86 triliun atau tumbuh 88,13% (*yoy*), melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 105,21% (*yoy*).

Sejalan dengan hal tersebut, di tengah meningkatnya dinamika ketidakpastian eksternal penanaman modal asing (PMA) pada triwulan IV 2022 tercatat tumbuh sebesar 37,95% (*yoy*) menjadi US$ 12,19 juta, lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 90,36% (*yoy*) di angka US$ 9,58 juta. **(TABEL 1.4).**

Penurunan investasi pada triwulan IV 2022 terutama disebabkan oleh beralihnya masa pengerjaan Jalan Tol Trans Sumatera tahap kedua, khususnya ruas jalan tol Jambi – Betung dan Jambi – Rengat yang diperkirakan baru dimulai di tahun 2023. Selain itu, tersendatnya perizinan Kawasan Industri Kemingking yang merupakan salah satu prioritas nasional dalam Rencaha Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 juga turut menahan laju investasi di Provinsi Jambi.

Namun demikian penurunan lebih jauh tertahan oleh pengerjaan proyek PLTA Batang Merangin berkapasitas 350 Megawatt di Kabupaten Kerinci masih mendorong pertumbuhan investasi pada triwulan IV 2022. Adapun pembangunan bendungan raksasa sungai Merangin tepatnya di Simpang Parit, Kecamatan Sungai Mana ini menghabiskan anggaran hampir Rp5,5 Triliun dengan perkiraan anggaran awal sebelumnya sebesar Rp3,3 Triliun.

Hingga akhir triwulan laporan, kegiatan proyek sudah menyelesaikan tahapan pembangunan sarana dan prasarana berupa jalan dan terowongan dan ditargetkan selesai pada 2024 mendatang. Selain proyek PLTA, sedang dilakukan juga persiapan

pembangunan jalan rigid beton menuju Muara Sabak Rumah Sakit Rapha Theresia yang sudah memasuki tahap akhir turut mendorong pertumbuhan pada sektor tersebut. Selanjutnya, pada triwulan laporan juga mulai dilakukan pengerjaan proyek jalan Simpang Pelawan – Batang, Simpang Pudak – Suak, dan Simpang Teluk Nilau – Senyerang yang sampai dengan 2024 sebesar Rp703,3 miliar.

Di sisi pembiayaan, penyaluran kredit investasi pada triwulan IV 2022 masih melanjutkan tren positif dan tumbuh 15,05% (*yoy*), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 17,60% (*yoy*) (**GRAFIK 1.16**).

Grafik 1.16. Perkembangan Kredit Investasi

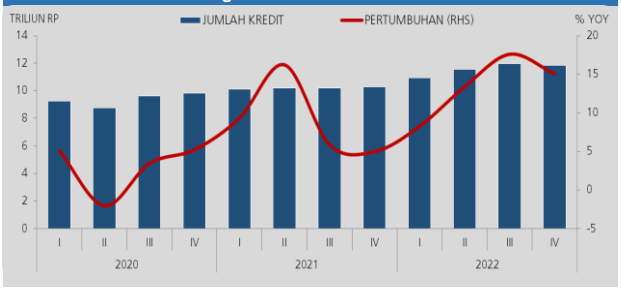

Sumber: LBU Bank Indonesia

Realisasi investasi pada triwulan I 2023 diprakirakan masih akan tertahan terutama dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian global antara lain berupa berlanjutnya eskalasi geopolitik Rusia-Ukraina dan berlanjutnya Indeks USD yang menekan harga komoditas primer Provinsi Jambi.

Dalam rangka meningkatkan kinerja investasi, pemerintah daerah telah melaksanakan beberapa kali rapat koordinasi penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan di sektor pengembangan Kawasan Industri Kemingking. Adapun rapat yang dimaksud memberikan gambaran terkait hasil survei lapangan yang telah dilaksanakan sebelumnya dan membangun koordinasi yang baik antarpihak yang terlibat sehingga realisasi pembangunan proyek dapat segera terwujud dan memperbaiki perekonomian Provinsi Jambi.

Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya mendorong percepatan dan kemudahan layanan perizinan. Implementasi *online single submission* yang telah dijalankan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jambi diarahkan untuk mendukung peningkatan investasi. Namun, terdapat kendala yang sering menghambat perkembangan investasi terutama terkait kebijakan antara pusat dan daerah yang kurang selaras. Penetapan Undang-undang Cipta Kerja dan sentralisasi perizinan satu pintu dinilai positif mendorong peningkatan investasi ke depan.

1.3.3 Perdagangan Eksternal

Kinerja perdagangan eksternal masih melanjutkan pertumbuhan positif pada triwulan IV 2022 di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Kinerja impor yang terkontraksi lebih dalam dibandingkan ekspor membuat kinerja net ekspor masih berada pada arah pertumbuhan positif.

Kinerja ekspor pada triwulan IV 2022 terkontraksi 4,91% (*yoy*), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,54% (*yoy*). Penurunan juga ditunjukkan kinerja impor yang terkontraksi 14,43% (*yoy*) pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,03% (*yoy*). Sehingga, kinerja net ekspor pada triwulan IV 2022 terpantau tumbuh sebesar 23,64% (*yoy*), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,84% (*yoy*).

Nilai ekspor LN total Provinsi Jambi pada komoditas non migas pada triwulan IV 2022 tumbuh 35,26 % (*yoy*) terakselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang juga tumbuh positif sebesar 21,37% (*yoy*) ditopang terjaganya harga komoditas unggulan daerah pada level tinggi selama triwulan laporan. Peningkatan nilai ekspor LN tersebut bersumber dari kenaikan permintaan terhadap komoditas batu bara (204,57%) dan minyak nabati (135,27%) yang menopang kinerja ekspor Provinsi Jambi. (**GRAFIK 1.17**).

Grafik 1.17. Perkembangan Ekspor Non Migas Berdasarkan Komoditas

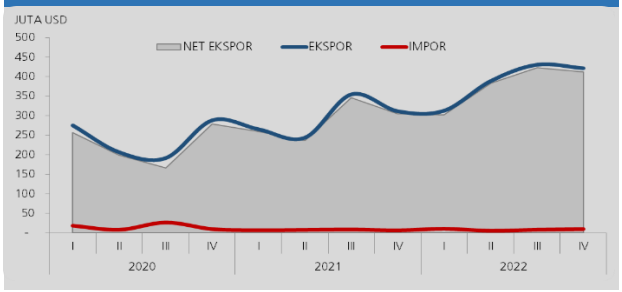

Sumber: Bea Cukai (diolah)

Berlanjutnya konflik Rusia dan Ukraina masih berdampak pada gangguan rantai pasok dan *energy crunch* yang mendorong peningkatan permintaan komoditas energi termasuk batu bara, terutama dari

negara kawasan Eropa guna pemenuhan kebutuhan bahan baku pembangkit listrik selama musim dingin. Adapun ekspor batu bara Jambi sebagian besar ditujukan ke negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Pada komoditas kelapa sawit, konflik Rusia-Ukraina juga masih berdampak pada berkurangnya pasokan produk substitusi minyak nabati berbahan kelapa sawit, seperti minyak biji bunga matahari dan minyak kedelai. Hal ini berimbas pada terjaganya harga CPO pada level tinggi meskipun mulai melambat menuju normal. Namun demikian, pengesahan *Europen Union Regulation on* DFSC pada 6 Desember 2022 yang secara tidak langsungmengkategorikan kelapa sawit sebagai salah satu penyebab utama deforestasi (*embodied deforestation*) menahan peningkatan permintaan lebih lanjut.

Ke depan, kinerja perdagangan eksternal diperkirakan masih akan melanjutkan tren positif pada triwulan I 2023 meskipun tertahan oleh perlambatan ekonomi global. Adapun komoditas pertambangan dan CPO diperkirakan masih akan menjadi komoditas yang menopang kinerja perdagangan eksternal didukung

berlanjutnya berlanjutnya konflik Rusia- Ukraina. Lebih lanjut, pelonggaran mobilitas yang terjadi di beberapa negara pasca pandemi berpotensi meningkatkan

permintaan bahan bakar energi primer untuk kebutuhan sehari-hari di domestik. Kembalinya aktivitas industri diperkirakan masih akan menjaga permintaan bahan baku/*raw material* yang merupakan komoditas unggulan.

Tabel 1.4. Realisasi Investasi

	2020				2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
PMA (USD Juta)	6.78	12.23	2.99	4.97	17.13	5.97	18.92	8.83	6.07	11.36	9.58	12.19
PMDN (RP Miliar)	1,028.76	1,001.27	519.10	1,025.41	2,838.97	1,165.95	676.43	1,522.81	1,739.83	2,889.91	1,388.12	2,864.80

Sumber: BKPM (diolah)

1.3.3.1 Ekspor Luar Negeri Non Migas Provinsi Jambi

Perkembangan ekspor komoditas non migas menujukkan perbaikan dan tercatat tumbuh positif pada triwulan laporan. Data perdagangan eksternal pada triwulan IV 2022 menunjukkan berlanjutnya tren positif kinerja ekspor diiringi dengan kenaikan kinerja impor.

Berdasarkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), nilai ekspor luar negeri non migas Provinsi Jambi pada triwulan IV 2022 tercatat US$ 422,27 juta atau tumbuh sebesar 35,26% (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga tumbuh sebesar 21,37% (*yoy*). Peningkatan kinerja ekspor non migas dibandingkan dengan triwulan sebelumnya terjadi pada beberapa komoditas terutama batu bara dan minyak kelapa sawit yang tumbuh positif dibandingkan periode sebelumnya. Secara keseluruhan dengan memperhitungkan impor, Provinsi Jambi tercatat mengalami *net* ekspor sebesar US$ 412,47 juta atau tumbuh 34,94% (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,07% (*yoy*).

Kontribusi ekspor non migas terbesar masih disumbangkan oleh komoditas batu bara sebesar US$ 164,35 juta atau 38,92% dari total ekspor luar negeri non migas. Selanjutnya, diikuti oleh komoditas minyak dan lemak nabati yang tercatat sebesar US$ 89,11 juta dengan pangsa 21,10%. Kemudian ekspor komoditas karet mentah memiliki pangsa 17,80% dengan nilai ekspor sebesar US$ 75,15 juta dan diikuti oleh komoditas buah-buahan dan sayuran yang tercatat sebesar US$ 18,09 juta dengan pangsa 4,28%. Adapun komoditas *pulp*, kertas, kertas karton dan olahannya berada di posisi terakhir dan tercatat sebesar US$14,51 juta dengan pangsa 3,44%. (GRAFIK 1.18) dan (GRAFIK 1.19).

Grafik 1.18. Pangsa Ekspor Non Migas Berdasarkan Komoditas

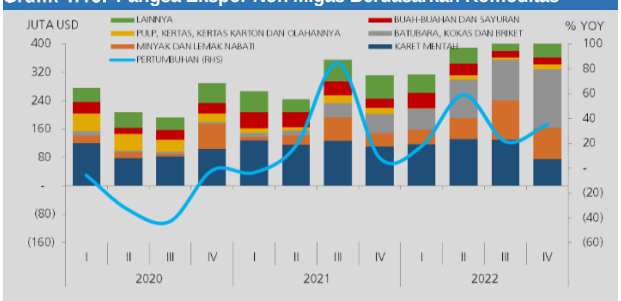

Sumber: Bea Cukai (dioah)

Perbaikan kinerja ekspor non migas terutama disebabkan oleh peningkatan nilai ekspor pada komoditas batu bara. Adapun nilai ekspor pada komoditas tersebut tumbuh 204,57% (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 178,97% (*yoy*) disebabkan oleh meningkatnya permintaan batu bara dari Tiongkok dan India. Selanjutnya, kinerja positif komoditas kelapa sawit yang tergabung dalam komoditas minyak nabati yang tumbuh sebesar 135,27% (*yoy*), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 68,50% (*yoy*).

Grafik 1.19. Pangsa Ekspor Non Migas Berdasarkan Komoditas

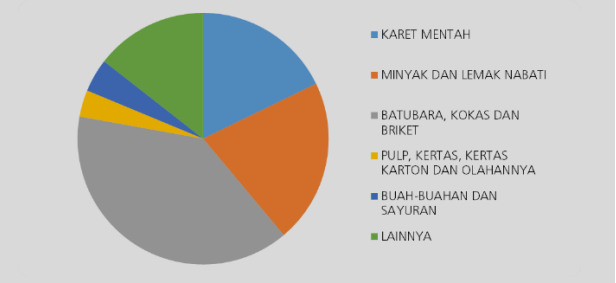

Sumber: Bea Cukai (dioah)

Namun demikian, perbaikan lebih lanjut tertahan oleh kinerja ekspor komoditas karet mentah yang terkontraksi 32,25% (*yoy*), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,20% (*yoy*). Melemahnya kinerja tersebut sejalan dengan penurunan produktivitas karet alam akibat curah hujan yang berlangsung sepanjang tahun. Selanjutnya, kinerja ekspor buah-buahan dan sayur serta yang terkontraksi 29,87% (*yoy*) pada triwulan IV 2022, tidak sedalam triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi 50,35% (*yoy*). Lebih lanjut, komoditas pulp, kertas, kertas karton dan olahannya juga tercatat terkontraksi 16,25% (*yoy*), tidak sedalam triwulan sebelumnya yang terkontraksi 72,86% (*yoy*).

Grafik 1.20. Pangsa Ekspor Non Migas Berdasarkan Negara Asal

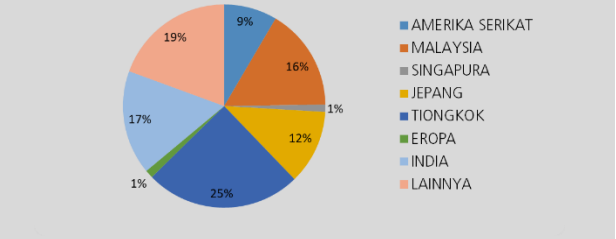

Sumber: Bea Cukai (diolah)

Pangsa ekspor non migas berdasarkan negara tujuan menunjukkan Tiongkok menjadi importir terbesar komoditas Provinsi Jambi. Nilai ekspor ke Tiongkok tercatat sebesar US$ 105,13 juta (pangsa 24,90% dari total ekspor). Selanjutnya, diikuti oleh Malaysia dengan nilai ekspor US$ 68,77 juta (pangsa 16,29% dari total ekspor), Jepang dengan nilai ekspor US$ 50,06 juta (pangsa 11,86% dari total ekspor), Amerika Serikat dengan nilai ekspor sebesar US$ 35,83 juta (pangsa 8,49% dari total ekspor), Eropa dengan nilai ekspor US$ 5,48 juta (pangsa 1,30% dari total ekspor) dan Singapura dengan nilai ekspor US$ 4,87 juta (pangsa 1,15% dari total ekspor) (GRAFIK 1.20) dan (GRAFIK 1.21).

Grafik 1.21. Perkembangan Ekspor Non Migas Berdasarkan Negara Tujuan

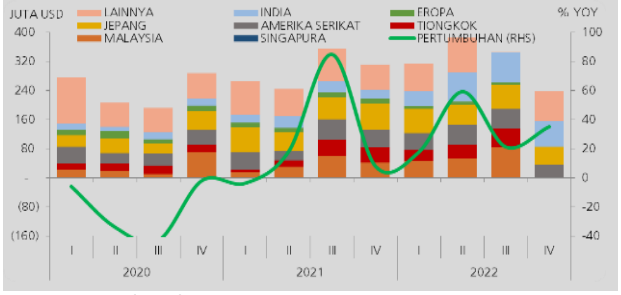

Sumber: Bea Cukai (diolah)

1.3.3.2 Impor Luar Negeri Non Migas Provinsi Jambi

Impor non migas terpantau mengalami perbaikan pada triwulan IV 2022. Nilai impor non migas tercatat US$ 9,79 juta atau tumbuh sebesar 50,52% (*yoy*), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 7,08% (*yoy*) (GRAFIK 1.22).

Grafik 1.22. Pangsa Impor Non Migas Provinsi Jambi

Sumber: Bea Cukai (diolah)

Impor terbesar terjadi pada kelompok mesin industri tertentu/khusus, kelompok kimia anorganis dan kelompok mesin industri dan perlengkapannya yang masing-masing menyumbang 12,46%, 8,04% dan 7,11% terhadap impor non migas. (GRAFIK 1.23).

Grafik 1.23. Pangsa Impor Non Migas Provinsi Jambi

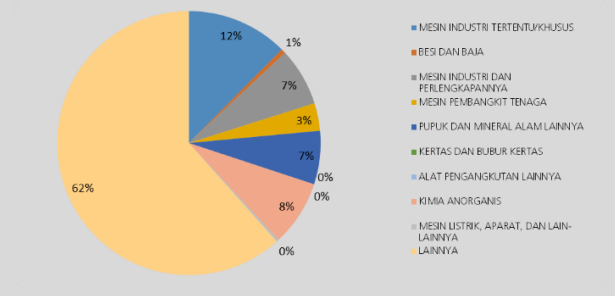

Sumber: Bea Cukai (Diolah)

Sementara itu, penurunan impor terbesar terjadi di kelompok mesin listrik, apparat dan lainnya yang pada periode laporan terkontraksi 95,87% (*yoy*). Meningkatnya ketidakpastian global akibat berlanjutnya eskalasi geopolitik Rusia dan Ukraina menahan *appetite* perusahaan untuk melakukan kegiatan impor.

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

BAB II

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Realisasi pendapatan pemerintah daerah sampai dengan triwulan IV 2022 secara nominal tumbuh positif dibanding tahun sebelumnya. Sejalan dengan realisasi pendapatan, komponen belanja juga tercatat tumbuh didorong oleh peningkatan serapan belanja modal.

Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan triwulan IV 2022 terealisasi sebesar Rp4,63 triliun atau 106,75% dari target APBD 2022. Realisasi tersebut tumbuh 2,53% *(yoy)* dibandingkan pendapatan triwulan IV 2021 sebesar Rp4,51 triliun (102,56% dari target APBD 2021) dan lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh terkontraksi sebesar -5,35% *(yoy)*. Komponen pendapatan terbesar bersumber dari komponen pendapatan transfer menyumbang 52,86% dari total pendapatan yaitu sebesar Rp2,45 triliun (103,38% dari target APBD 2022) dan secara tahunan tercatat terkontraksi sebesar 8,15% (*yoy*) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, komponen dengan sumbangan terbesar lainnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) (46,82% dari total pendapatan 2022) yang mencapai angka Rp2,17 triliun (112,01% dari target APBD 2022). Pendapatan tersebut tumbuh 17,54% (*yoy*) dibanding periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1,84 triliun didorong oleh pos pajak daerah yang memberi andil 86,38% dari total pendapatan asli daerah. Selanjutnya, realisasi pos retribusi daerah tercatat sebesar Rp16,89 miliar atau tumbuh sebesar 33,90% *(yoy)*. Terakhir, realisasi pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tercatat sebesar Rp247,72 Miliar (114,48% dari target APBD 2022) atau tumbuh sebesar 1,11% *(yoy),* lebih tinggi dibandingkan dengan kontraksi yang terjadi pada triwulan sebelumnya sebesar 12,27% *(yoy).*

Lebih lanjut, sisi realisasi belanja daerah juga tercatat tumbuh sebesar 4,92% dibandingkan realisasi triwulan IV 2021, yang mencapai Rp4,51 triliun atau 89,24% dari target APBD 2022. Realisasi tersebut terpantau tinggi dibandingkan dengan realisasi di triwulan IV 2021 yang tercatat sebesar Rp4,29 triliun atau 89,38% dari pagu belanja 2021. Kenaikan realisasi tersebut didorong oleh realisasi seluruh pos belanja terutama pada jenis belanja modal yang terealisasi sebesar Rp907,33 Miliar atau 93,02% dari pagu belanja modal 2022. Berdasarkan komposisinya, serapan anggaran di triwulan IV 2022 utamanya disumbangkan oleh belanja operasional yang tercatat sebesar Rp2,82 triliun meskipun terkontraksi di angka 8,28% (*yoy*). Namun demikian, serapan belanja operasional telah mencapai 90,50% dari pagu belanja operasional tahun 2022. Adapun realisasi belanja pegawai pada triwulan IV 2022 sebesar Rp1,51 triliun atau sebesar 95,80% terhadap APBD 2022. Hingga akhir triwulan, realisasi belanja pegawai tersebut tumbuh sebesar 0,67% *(yoy)* dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang tercatat sebesar Rp1,50 triliun. Selanjutnya, pos belanja barang dan jasa juga tumbuh positif sebesar 44,46% (*yoy*) dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2021 dengan nominal Rp1,11 triliun atau terserap 46,58% dari pagu APBD 2022.

Selanjutnya, serapan belanja daerah sampai dengan triwulan IV 2022 juga disumbangkan oleh belanja modal. Realisasi belanja modal mencapai nominal Rp907,33 miliar atau terserap 93,02% dari total pagu dengan realisasi belanja yang tumbuh sebesar 101,62% (*yoy*) dibandingkan triwulan IV 2021 yang tercatat sebesar Rp450,01 miliar atau terserap 92,73% dari pagu APBD 2021. Kenaikan serapan belanja modal utamanya disebabkan oleh realisasi beberapa komponen belanja seperti belanja tanah; bangunan dan gedung; peralatan dan mesin; serta belanja jalan, irigasi, dan jaringan.

2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Hingga akhir triwulan IV 2022, pendapatan Provinsi Jambi terealisasi sebesar Rp4,63 triliun atau mencapai 106,75% dari target APBD tahun 2022 sebesar Rp4,34 triliun. Realisasi pendapatan tersebut tumbuh sebesar 2,52% (*yoy*) dibandingkan triwulan IV 2021 sebesar Rp4,51 triliun. Peningkatan realisasi pendapatan daerah tersebut didorong oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan melalui pajak, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah dan lainnya yang mencapai angka Rp2,17 triliun atau 46,82% dari total pendapatan 2022 (112,01% dari target APBD 2022). Pendapatan tersebut tumbuh 17,54% (*yoy*) dibanding periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1,84 triliun. Pendapatan terutama disumbangkan oleh pajak daerah yang mencapai Rp1,87 triliun (112,11% dari target APBD 2022) yang tumbuh sebesar 20,14% *(yoy)* dari triwulan IV 2022 yang tercatat sebesar Rp1,59 triliun. Adapun sub komponen penyusun pendapatan pada pos pajak daerah di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKN), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Selanjutnya, realisasi pendapatan dari retribusi daerah tercatat sebesar Rp16,89 miliar atau tumbuh sebesar

33,90% *(yoy)*, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2021 yang tercatat sebesar Rp12,62 miliar.

Sejalan dengan komponen pajak dan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga tumbuh sebesar 9,22% (*yoy*) dengan total nominal Rp30,61 miliar (terealisasi 100,63% dari APBD 2022), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp28,03 miliar. Terakhir, komponen lain-lain PAD yang sah juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,11% (*yoy*) dengan total nominal Rp247,72 miliar (terealisasi 114,48% dari target APBD 2022).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sumber penerimaan di luar pajak. Upaya tersebut misalnya dilakukan melalui peningkatan pembiayaan pada BPD, optimalisasi kontribusi BUMD dan utilisasi aset daerah. Namun demikian, untuk meningkatkan pendapatan daerah secara optimal maka perlu dilakukan langkah-langkah menyeluruh yaitu identifikasi mendalam terhadap potensi sumber pendapatan dan perluasan basis pajak, perbaikan administrasi pajak/ restribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem yang terintegrasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, perbaikan layanan, serta *law enforcement,* dan perbaikan aturan pajak/ restribusi. Dengan demikian, basis pendapatan utama daerah (pajak dan retribusi) dapat terus tumbuh serta berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah **(TABEL 2.1)**.

Sementara itu, pendapatan transfer pemerintah pusat masih memberikan andil terbesar dengan pangsa sebesar 52,86% dari total pendapatan. Hingga akhir triwulan IV 2022, pendapatan transfer tercatat sebesar Rp2,45 triliun, dengan realisasi sebesar 103,38% dari target APBD 2022. Berdasarkan perkembangan tersebut, pendapatan transfer terpantau tumbuh terkontraksi sebesar 8,15% (*yoy*) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,66 triliun. Meskipun demikian, kontraksi tersebut terpantau lebih kecil dibandingkan kontraksi yang terjadi pada triwulan III 2022.

2.2 REALISASI BELANJA DAERAH

Hingga triwulan IV 2022, realisasi belanja Provinsi Jambi mencapai Rp4,51 triliun atau terealisasi 89,24% dari pagu Anggaran belanja daerah 2022 sebesar Rp5,05 triliun. Realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan nominal belanja periode yang sama tahun 2021 yaitu sebesar Rp4,29 triliun. Berdasarkan jenisnya, realisasi belanja masih didominasi oleh belanja operasional yang tercatat sebesar Rp2,82 triliun (pangsa 62,60% terhadap total belanja). Realisasi belanja operasional sampai triwulan IV 2022 tersebut terkontraksi sebesar 8,28% (*yoy*) dibandingkan triwulan IV 2021 sebesar Rp3,07 triliun (90,88% terhadap pagu APBD 2021).

Berdasarkan komponennya, belanja operasional masih didominasi oleh realisasi belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp1,51 triliun (pangsa sebesar 53,54% terhadap belanja operasional) atau terserap 95,80% terhadap pagu APBD 2022 dan tumbuh sebesar 0,67% (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Dominasi komponen belanja pegawai tersebut sesuai dengan pola di setiap tahunnya dan terbatas pada pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Meskipun demikian, alokasi belanja pegawai tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp1,58 triliun, mengalami penurunan sebesar 1,80% dibandingkan dengan alokasi belanja pegawai pada tahun 2021 yang mencapai Rp1,61 triliun **(TABEL 2.2)**.

Adapun komponen penyumbang realisasi belanja operasional pemerintah selanjutnya adalah belanja barang dan jasa yang hingga triwulan IV 2022 tercatat telah terealisasi sebesar Rp1,11 triliun (pangsa sebesar 39,47% terhadap belanja operasional), atau tumbuh sebesar 44,46% (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Pertumbuhan positif realisasi belanja barang dan jasa tersebut dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu utamanya didorong oleh kegiatan belanja kolektif dan individu antara lain. berupa pelaksanaan berbagai program penanganan pandemi COVID-19 di antaranya pelaksanaan vaksinasi, pengadaan alat uji medis, penyemprotan disinfektan, *testing* dan *tracing,* serta program-program kegiatan lainnya. Selain itu, realisasi kegiatan perjalanan dinas juga turut menyumbang komponen ini setelah sub komponen jasa pasca penetapan kebijakan pelonggaran mobilitas perjalanan. Selanjutnya, komponen belanja subsidi juga terpantau tumbuh tinggi meskipun memiliki pangsa yang relatif rendah terhadap belanja operasional. Belanja subsidi terpantau tumbuh sebesar 122,03% *(yoy)*, dari Rp0,55 miliar pada triwulan IV 2021 menjadi Rp1,22 miliar pada triwulan laporan. Selanjutnya, komponen belanja operasional lainnya seperti belanja hibah dan bantuan sosial

menunjukkan pertumbuhan angka realisasi yang terkontraksi dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, yang masing-masing tercatat sebesar 77,01% *(yoy)* dan 34,62% *(yoy).*

Pada triwulan laporan, belanja modal tercatat Rp907,33 miliar atau terserap 93,02% terhadap pagu APBD tahun 2022. Serapan belanja modal tersebut mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 101,62% (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang terserap sebesar Rp450,01 miliar (92,73% terhadap pagu APBD 2021). Adapun komponen belanja modal yang terealisasi di triwulan laporan terdiri dari belanja tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang serapan terhadap alokasi belanja tahun 2022 masing-masing mencapai 99,43%; 90,22%; 86,92%; 97,24%, dan 89,88% dari pagu anggaran 2022.

Adanya kenaikan belanja operasional, khususnya dalam bentuk barang dan jasa, serta pertumbuhan realisasi belanja modal hingga triwulan IV 2022 mengindikasikan bahwa pengerjaan proyek fisik sebagian besar dilakukan dan terealisasi pada kuartal terakhir tahun berjalan. Beberapa kendala yang mengemuka antara lain terkait proses pengajuan rencana umum pengadaan dan proses lelang serta adanya gangguan cuaca.

Secara keseluruhan, realiasi belanja daerah di triwulan IV 2022 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya meskipun belum optimal. Hal tersebut menjadi penopang pemulihan ekonomi Jambi di tengah belum kuatnya kinerja konsumsi dan investasi, terutama belanja modal yang dapat memberikan dampak multiplier terhadap perekonomian.

Selanjutnya, realisasi keseluruhan komponen belanja yang mengalami kontraksi menandakan bahwa daya ungkit fiskal masih sangat terbatas. Melihat data historis, adanya kebutuhan anggaran yang tidak terduga pada realisasi belanja pemerintah di keseluruhan tahun 2021, realokasi dan *refocusing* anggaran dilakukan antara lain terhadap alokasi anggaran belanja modal. Hal tersebut berpengaruh terhadap penyesuaian beberapa kegiatan dan program kerja yang memengaruhi realisasi anggaran pemerintah secara keseluruhan.

Tabel 2.1. Perkembangan Pendapatan APBD Provinsi Jambi

URAIAN	APBD 2022	S.D. TW I-2022		S.D. TW II-2022		S.D. TW III-2022		S.D. TW IV-2022	
		NOMINAL (Rp. Miliar)	Persen (thd APBD 2022)	NOMINAL (Rp. Miliar)	Persen (thd APBD 2022)	NOMINAL (Rp. Miliar)	Persen (thd APBD 2022)	NOMINAL (Rp. Miliar)	Persen (thd APBD 2022)
PENDAPATAN	**4,335.68**	**765.25**	**17.65**	**1,860.80**	**42.92**	**2,984.38**	**68.83**	**4,628.19**	**106.75**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**1,934.77**	**373.17**	**19.29**	**825.01**	**42.64**	**1,481.41**	**76.57**	**2,167.06**	**112.01**
PAJAK DAERAH	1,669.70	319.40	19.13	757.76	45.38	1,324.15	79.30	1,871.84	112.11
RETRIBUSI DAERAH	18.26	2.82	15.42	7.61	41.67	11.96	65.51	16.89	92.54
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAH	30.42	30.42	100.00	30.42	100.00	30.61	100.63	30.61	100.63
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	216.39	20.53	9.49	29.22	13.50	114.69	53.00	247.72	114.48
PENDAPATAN TRANSFER	**2,366.53**	**391.67**	**16.55**	**1,035.25**	**43.75**	**1,501.89**	**63.46**	**2,446.42**	**103.38**
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2,366.53	391.67	16.55	1,035.25	43.75	1,501.89	63.46	2,446.42	103.38
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**34.37**	**0.40**	**1.17**	**0.54**	**1.56**	**1.07**	**3.12**	**14.72**	**42.83**
PENDAPATAN HIBAH	34.37	0.40	1.17	0.54	1.56	1.07	3.12	14.72	42.83
PENDAPATAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Unaudited, (diolah)

Tabel 2.2. Perkembangan Belanja APBD Provinsi Jambi

URAIAN	APBD 2022	S.D. TW I-2022		S.D. TW II-2022		S.D. TW III-2022		S.D. TW IV-2022	
		NOMINAL (Rp. Miliar)	Persen (thd APBD 2022)	NOMINAL (Rp. Miliar)	Persen (thd APBD 2022)	NOMINAL (Rp. Miliar)	Persen (thd APBD 2022)	NOMINAL (Rp. Miliar)	Persen (thd APBD 2022)
BELANJA	**5,048.95**	**313.28**	**6.20**	**1,345.44**	**26.65**	**2,679.02**	**53.06**	**4,505.80**	**89.24**
BELANJA OPERASI	**3,116.99**	**248.37**	**7.97**	**886.35**	**28.44**	**1,677.47**	**53.82**	**2,820.76**	**90.50**
BELANJA PEGAWAI	1,576.30	199.37	12.65	631.54	40.06	1,064.57	67.54	1,510.17	95.80
BELANJA BARANG DAN JASA	1,315.44	48.85	3.71	238.09	18.10	542.20	41.22	1,113.35	84.64
BELANJA SUBSIDI	8.18	-	-	0.55	6.72	0.55	6.72	1.22	14.92
BELANJA HIBAH	198.56	-	-	15.22	7.67	68.33	34.41	178.81	90.05
BELANJA BANTUAN SOSIAL	18.51	0.15	0.82	0.95	3.00	1.83	3.00	17.21	3.00
BELANJA MODAL	**975.36**	**34.63**	**3.55**	**195.82**	**20.08**	**389.36**	**39.92**	**907.33**	**93.02**
BELANJA TANAH	26.52	-	-	9.31	35.12	24.58	92.70	26.37	99.43
BELANJA PERALATAN DAN MESIN	235.54	0.47	0.20	13.95	5.92	44.26	18.79	212.51	90.22
BELANJA BANGUNAN DAN GEDUNG	241.41	0.09	0.04	12.74	5.28	60.08	24.88	209.84	86.92
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	468.20	34.07	7.28	159.62	34.09	259.61	55.45	455.29	97.24
BELANJA ASET TETAP LAINNYA	3.69	0.01	0.18	0.20	5.35	0.83	22.53	3.32	89.88
BELANJA TAK TERDUGA	**28.88**	**-**	**-**	**9.67**	**33.46**	**9.66**	**33.46**	**9.09**	**31.47**
BELANJA TAK TERDUGA	28.88	-	-	9.67	33.46	9.66	33.46	9.09	31.47
BELANJA TRANSFER	**927.72**	**30.28**	**3.26**	**253.60**	**27.34**	**602.51**	**64.95**	**768.62**	**82.85**
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	768.62	30.28	3.94	253.60	32.99	602.51	78.39	768.62	100.00
BAGI HASIL PAJAK	768.62	30.28	3.94	253.60	32.99	602.51	78.39	768.62	100.00
BELANJA BANTUAN KEUANGAN	159.10	-	-	-	-	-	-	156.60	98.43

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Unaudited, (diolah)

Tabel 2.3. Perkembangan Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi

KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH						
REALISASI PENDAPATAN	2021		2022			
	TW III (Rp Juta)	TW IV (Rp Juta)	TW I (Rp Juta)	TW II (Rp Juta)	TW III (Rp Juta)	TW IV* (Rp Juta)
I PAJAK DALAM NEGERI	1,146,156	2,019,176	577,267	2,502,205	1,474,173	1,824,215
PPH	538,335	695,097	502,378	1,296,399	676,212	760,221
PPN	553,805	1,202,770	59,782	1,183,703	687,815	989,160
PBB	32,276	98,992	1,927	5,372	90,787	53,964
PENDAPATAN BPHTB	-	-	-	-	-	-
CUKAI	-	-	-	-	-	410
LAINNYA	21,740	22,318	13,180	16,731	19,359	20,460
PENGEMBALIAN PENDAPATAN PAJAK DAN CUKAI	-	-	-	-	-	-
II PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL	180,582	181,630	82,101	89,941	142,248	54,269
Pendapatan Bea Masuk	2,571	2,773	1,987	1,446	2,395	2,683
Pendapatan Bea Keluar/Pungutan Ekspor	178,011	178,857	80,115	88,496	139,853	51,586
Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor						
III PENERIMAAN SDA	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Pertambangan Umum	-	-	-	-	-	-
Pendapatan kehutanan	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Perikanan	-	-	-	-	-	-
IV PNBP LAINNYA	61,486	55,357	81,876	65,606	84,169	89,689
V PENDAPATAN HIBAH	-	-	-	-	-	-
VI PENDAPATAN BAGIAN LABA BUMN	-	-	-	-	-	-
VII PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	208,767	117,920	60,157	124,380	193,684	84,390
VIII PENDAPATAN PENYESUAIAN	-	-	-	-	-	-
TOTAL REALISASI PENDAPATAN	1,596,991	2,374,083	801,401	2,782,132	1,894,273	2,052,563

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil V Jambi, Laporan Realisasi Pendapatan Wilayah Jambi. Unaudited, (diolah)

2.3 KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH

Realisasi pendapatan pemerintah pusat di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2022 mencapai Rp2,05 triliun atau mengalami kontraksi sebesar 13,54% (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp2,37 triliun) (TABEL 2.3). Lebih rendahnya realisasi pendapatan tersebut didorong oleh penurunan realisasi komponen Pajak Dalam Negeri, Pajak Perdagangan Internasional, dan Pendapatan Badan Layanan Umum dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Pajak Dalam Negeri yang memegang andil terbesar yaitu 88,87% dari total pendapatan tercatat lebih rendah menjadi Rp1,82 triliun dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya (Rp2,02 triliun) atau terkontraksi 9,66% (*yoy*).

Adapun penurunan realisasi pendapatan pajak tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah pendapatan pada beberapa sub komponen pajak. Adapun salah satu sub komponen Pajak yang mengalami penurunan paling besar yaitu sub komponen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terkontraksi sebesar 45,49% (*yoy)* dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,40% *(yoy)* di triwulan IV 2021. Selain itu, penurunan pendapatan Pajak Dalam Negeri juga ditopang oleh penurunan realisasi pendapatan di sub komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang pada triwulan IV 2022 tercatat menyumbangkan Rp989,16 miliar atau terkontraksi sebesar 17,6% (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp1,20 triliun. Meskipun demikian, realisasi pendapatan di sub komponen PPN tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp687,81 miliar. Adanya penetapan tarif PPN 11% oleh pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan mulai diterapkan per 1 April 2022 lalu menjadi faktor pendorong utama kenaikan pada komponen tersebut di tengah perbaikan mobilitas perekonomian masyarakat pasca COVID-19.

Sementara itu, Pajak Penghasilan (PPh) pada triwulan IV 2022 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2021. Pada triwulan IV 2022, PPh mencapai Rp760,22 miliar atau meningkat 9,37% (*yoy*) dibandingkan triwulan IV 2021 sebesar Rp695,10 miliar. Kenaikan PPh utamanya berasal dari komponen PPh Pasal 21 (pajak penghasilan perseorangan). Perbaikan tersebut juga didorong oleh peningkatan gaji pegawai yang mengalami kenaikan sebesar 0,72% sesuai UMP Jambi menjadi sebesar Rp2,65 juta di tahun 2022. Selain itu, stabilnya harga komoditas batubara dan sawit turut berpengaruh terhadap kenaikan PPh Badan.

Komponen lainnya yang turut tumbuh positif adalah komponen Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya yang tercatat meningkat menjadi Rp89,69 miliar pada triwulan IV 2022 atau tumbuh positif 62,02% (*yoy*). Realisasi pendapatan ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang

sama di tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp55,36 miliar. Adapun sumber pendapatan PNBP lainnya berasal dari pendapatan Jasa Layanan Umum, pendapatan administrasi dan penegakan hukum serta pendapatan kesehatan, perlindungan sosial dan keagamaan.

Namun demikian, pertumbuhan lebih lanjut tertahan oleh capaian beberapa komponen di antaranya sub komponen Pendapatan Badan Layanan Umum dan Pajak Perdagangan Internasional yang mengalami kontraksi. Adapun realisasi pendapatan BLU pada triwulan IV 2022 yang tercatat sebesar Rp84,39 miliar atau terkontraksi 28,43% (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp117,92 miliar. Penurunan pendapatan tersebut merupakan *base year effect* pada tahun sebelumnya sejak pelonggaran mobilitas di masyarakat pasca menurunnya angka kasus terdampak COVID-19.

Lebih lanjut Komponen Pajak Perdagangan Internasional pada triwulan IV 2022 tercatat Rp54,27 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 70,12% (yoy) dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yaitu Rp181,63 miliar. Penurunan pendapatan dari komponen pajak perdagangan internasional utamanya didorong oleh penurunan realisasi pendapatan bea keluar yang disebabkan oleh perubahan tarif preferensi CPO dan turunannya khususnya cangkang sawit, sehingga penerimaan bea keluar pada triwulan laporan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. pendapatan bea keluar pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp51,59 miliar atau terkontraksi sebesar 71,16% *(yoy)* dibandingkan dengan realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp178,58 miliar. Penurunan tersebut sejalan dengan kinerja ekspor pada triwulan IV 2022 yang terkontraksi 4,91% (*yoy*). Selanjutnya, realisasi pendapatan bea masuk juga terpantau terkontraksi sebesar 3,25% *(yoy)* menjadi Rp2,68 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi triwulan IV 2021 sebesar Rp2,77 miliar. Penurunan tersebut juga terpantau searah dengan penurunan kinerja impor yang terkontraksi 14,43% (*yoy*) pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,03% (*yoy*).

Berdasarkan kontribusinya, penerimaan pendapatan terbesar bersumber dari pendapatan Pajak Dalam Negeri yang mencapai Rp1,82 triliun (pangsa 88,87%), Pendapatan PNBP lainnya sebesar Rp89,69 miliar (pangsa 4,37%). Dan Pajak Badan Layanan Umum sebesar Rp84,39 miliar (pangsa 4,11%) **(GRAFIK 2.1)**.

Sementara itu, belanja pemerintah pusat di Provinsi Jambi hingga triwulan IV 2022 terealisasi sebesar Rp4,51 triliun atau tumbuh sebesar 29,83% (*yoy*) dibandingkan realisasi belanja pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp3,47 triliun **(TABEL 2.4).** Kenaikan angka realisasi belanja disebabkan oleh pertumbuhan yang terjadi pada hampir di semua komponen kecuali belanja dan desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Pos belanja pegawai dan barang sebagai komponen dengan pangsa terbesar mengalami petumbuhan terakselerasi masing-masing di angka 2,64% (*yoy*) dan 2,83% (*yoy*) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun masing-masing-masing pos terealisasi sebesar Rp672,01 miliar dan Rp863,77 miliar rupiah. Adapun realisasi belanja pegawai yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya penambahan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selanjutnya kenaikan realisasi komponen belanja barang disebabkan oleh penerapan pola kerja baru dalam pengoptimalan kebutuhan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dan didorong oleh perkembangan kondisi pandemi yang semakin terkendali sehingga kegiatan realisasi dapat berjalan sebagaimana pola tahunan di triwulan IV.

Selanjutnya, belanja modal mencatatkan pertumbuhan dengan realisasi sebesar Rp975,67 miliar atau tumbuh 32,27% (*yoy*) dibandingkan angka realisasi belanja triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp737,66 miliar. Peningkatan belanja modal tersebut didorong oleh adanya pelonggaran aktivitas yang tidak seketat tahun sebelumnya sehingga mendorong realisasi belanja menjadi lebih tinggi di tengah tekanan penurunan alokasi dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun pemanfaatan komponen belanja modal difokuskan kepada pembelian peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan dan irigasi. Optimalisasi belanja modal sangat penting karena belanja modal di Provinsi Jambi didominasi oleh belanja konstruksi jalan yang berpotensi menjadi tumpuan utama kelancaraan distribusi barang. Lancarnya akses ini akan

memberikan dampak yang luar biasa apalagi untuk *inter regional trading* yang sedang digalakkan untuk menjaga inflasi di Provinsi Jambi.

Lebih lanjut, DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp1,23 triliun yang mengalami pertumbuhan signifikan di angka 494,05% (*yoy*). Adapun realisasi belanja DAK Fisik difokuskan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang sempat tertahan pasca pengetatan implementasi PPKM lalu meliputi program reguler, afirmasi dan penugasan sedangkan realisasi belanja DAK Non Fisik didominasi oleh realisasi dana penyaluran BOS, BOP PAUD dan BOP kesetaraan.

selanjutnya, pertumbuhan realisasi belanja pemerintah pusat di daerah juga didorong oleh komponen bantuan sosial yang tumbuh dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada triwulan IV 2022, pos ini terealisasi sebesar Rp12,20 miliar atau tumbuh 21,53% (*yoy*) dibandingan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp10,03 miliar. Peningkatan realisasi belanja tersebut juga didorong oleh peningkatan alokasi anggaran yang mengindikasikan komitmen pemerintah untuk mendorong peningkatan infrastruktur, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan dalam rangka pemulihan pasca Covid-19 dan pengentasan kemiskinan ekstrim di Provinsi Jambi di tahun 2024.

Sementara itu, pertumbuhan lebih tinggi ditahan oleh Komponen belanja DAK Fisik dengan realisasi sebesar Rp522,15 miliar atau terkontraksi sebesar 24,39% *(yoy),* dibandingkan angka realisasi belanja triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp690,61 miliar. Penurunan tersebut dipengaruhi adanya *shifting* dalam penyaluran DAK Fisik akibat adanya perubahan kebijakan terkait pengadaan alat kesehatan, kebijakan TKDN dan penanganan stunting, serta adanya perubahan spesifikasi teknis dan kontrak pengadaan barang dan jasa.

Terakhir, komponen dana desa juga menunjukan kontraksi di angka 30,00% (*yoy*) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya juga turut menahan pertumbuhan lebih baik. Komponen ini terealisasi sebesar Rp233,21 miliar dan disalurkan dalam bentuk bantuan sosial berupa BLT Dana Desa sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS) pasca pandemi COVID-19 di tengah kondisi yang mulai berangsur pulih. Namun demikian, keberhasilan monitoring penyampaian laporan dana desa dan APBDes oleh masing-masing pemerintah Kab/Kota kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah Provinsi Jambi menahan realisasi belanja tidak terkontraksi semakin dalam. Adapun hasil rekapitulasi APBDes tersebut kemudian diteruskan kepada Kementerian Keuangan hampir semua desa telah menyerahkan APBDes.

Berdasarkan pangsanya, realisasi belanja pemerintah pusat sebagian besar digunakan untuk belanja barang (19,15%), belanja pegawai (14,90%), DAK Fisik (11,58%), belanja modal (21,64%), dana desa (11,38%), DAK Non Fisik (27,29%) dan belanja bantuan sosial (0,27%).**(GRAFIK 2.2).**

Tabel 2.4. Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi

KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH						
REALISASI BELANJA	2021		2022			
	TW III (Rp Juta)	TW IV (Rp Juta)	TW I (Rp Juta)	TW II (Rp Juta)	TW III (Rp Juta)	TW IV* (Rp Juta)
I BELANJA PEGAWAI	618,794	654,741	490,145	719,179	697,006	672,010
II BELANJA BARANG	588,937	840,000	282,492	559,031	611,914	863,773
III BELANJA DENDA DAN SUBSIDI PERUSAHAAN	-	-	-	-	-	-
III BELANJA BANTUAN SOSIAL	1,967	10,035	72	7,982	231	12,196
IV BELANJA LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-
V BELANJA MODAL	345,749	737,661	196,206	241,672	335,367	975,674
VI DANA DESA	374,360	333,160	139,777	474,631	272,030	233,211
VII DAK FISIK	313,686	690,608	-	92,269	378,339	522,152
VIII DAK NON FISIK	7,517	207,131	245,307	218,230	94,941	1,230,462
TOTAL REALISASI BELANJA	**2,251,009**	**3,473,335**	**1,353,999**	**2,312,994**	**2,389,828**	**4,509,479**

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil V Jambi, Laporan Realisasi Pendapatan Wilayah Jambi. Unaudited, (diolah)

2.4 KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Jumlah simpanan Pemerintah Daerah di perbankan Jambi pada triwulan IV 2022 sebesar Rp2,54 triliun, tumbuh 9,80% (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,31 triliun **(GRAFIK 2.3)**.

Dua dari tiga jenis simpanan pemerintah daerah tercatat tumbuh diantaranya jenis giro dan tabungan

yang masing-masing tumbuh sebesar 10,04% (*yoy*) dan 20,04% (*yoy*). Namun demikian, total simpanan pemerintah daerah di perbankan pada triwulan laporan terpantau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp4,48 triliun. Penurunan simpanan tersebut sejalan dengan akselerasi realisasi belanja pemerintah sebagaimana siklus di akhir tahun di tengah kondisi perekonomian yang berangsur pulih sepenuhnya. Berdasarkan komposisinya, simpanan pemerintah lebih banyak ditempatkan dalam bentuk giro sebesar 98,96% dan diikuti oleh deposito dan tabungan dengan komposisi masing-masing sebesar 0,58% dan 0,46%. Namun demikian, simpanan pemerintah dalam bentuk deposito tercatat terkontraksi sebesar 24,44% (*yoy*).

Grafik 2.1. Pangsa Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi

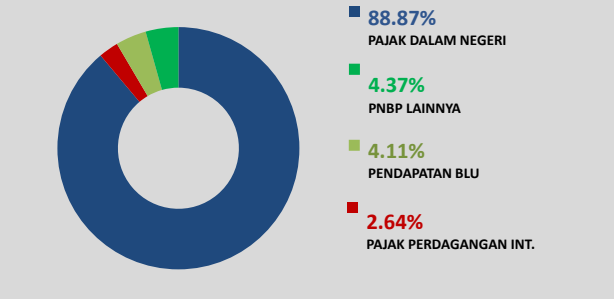

Sumber: Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI Kanwil Provinsi Jambi (diolah)

Grafik 2.2. Pangsa Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi

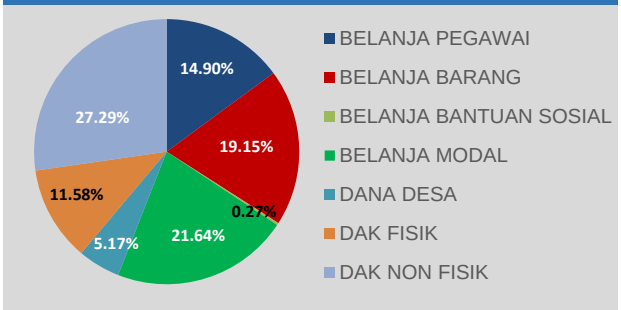

Sumber: Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI Kanwil Provinsi Jambi (diolah)

Grafik 2.3. Perkembangan Simpanan Pemerintah Provinsi Jambi di Perbankan

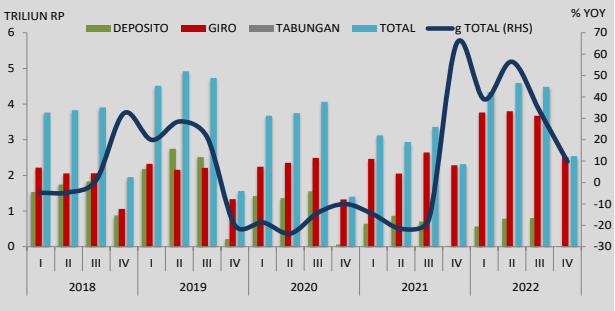

Sumber: LBU Bank Indonesia

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

BAB III

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Pada triwulan IV 2022, IHK Gabungan 2 (dua) Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi tercatat mengalami inflasi yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi utamanya disumbangkan oleh kelompok Transportasi, Perawatan Pribadi, dan Jasa Lainnya serta kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliaraan Rumah Tangga.

3.1 KAJIAN UMUM

Grafik 3.1. Perkembangan Inflasi Provinsi Jambi

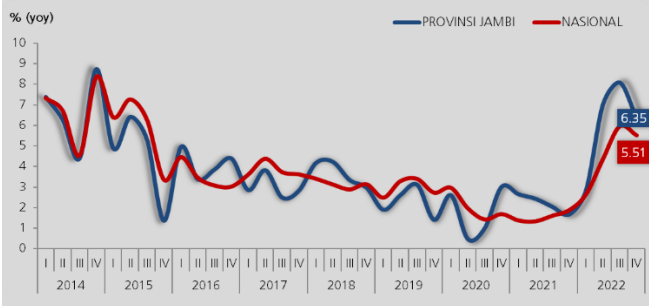

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Pada triwulan IV 2022, inflasi[1] gabungan Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi[2] tercatat sebesar 6,35% *(yoy)*, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,097% *(yoy)*. Realisasi inflasi tersebut juga terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat 5,51% *(yoy)* **(GRAFIK 3.1)**. Laju inflasi Gabungan Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo yang masing-masing tercatat sebesar 6,39% *(yoy)* dan 6,04% *(yoy)*[3], menurun dibandingkan dengan inflasi pada triwulan III 2022 yang masing-masing tercatat sebesar 8,04% *(yoy)* dan 8,51% *(yoy).* Inflasi bulanan *(mtm)* Kota Jambi pada Desember 2022 terpantau meningkat dibandingkan September 2022, sedangkan inflasi Kabupaten Bungo pada Desember 2022 terpantau menurun dibandingkan inflasi September 2022. Berdasarkan perkembangan inflasi bulanan tersebut, Kota Jambi dan Kabupaten Bungo berada di urutan ke-23 dan ke-15 tertinggi dari 24 (dua puluh empat) kota yang menjadi sampel inflasi di Sumatera. **(GRAFIK 3.2)**.

Secara triwulanan, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2022 tercatat inflasi sebesar 0,01% *(qtq)*, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022 yang mengalami inflasi 0,68% *(qtq)*. Lebih lanjut, perkembangan IHK bulanan pada September 2022, tercatat inflasi inflasi 0,77% *(mtm),* lebih tinggi dibandingkan inflasi September 2022 yang tercatat sebesar 0.61% *(mtm).* Secara kumulatif, pergerakan IHK di Provinsi Jambi berdasarkan tahun kalender 2022 tercatat inflasi sebesar 6,35% (*ytd*).

Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan *(yoy)* Gabungan Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2022 terutama disumbangkan oleh kelompok Transportasi, Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya serta kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliaraan Rumah Tangga. Hal tersebut didorong oleh kenaikan harga pada Tarif Angkutan Udara, Emas Perhiasan, serta Perawatan Pribadi Lainnya.

Pada Desember 2022, inflasi Kota Jambi tercatat sebesar 0,79% *(mtm)* yang disumbangkan oleh 4 (empat) kelompok pengeluaran yaitu kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, kelompok Transportasi, serta kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga. Adapun kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil terbesar didorong oleh kenaikan harga kooditas daging ayam ras dan cabai merah. Namun demikian, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi yang terjadi pada kelompok Informasi Komunikasi dan Jasa Keuangan yang didorong oleh penurunan harga peralatan informasi dan komunikasi seiring penurunan permintaan produk akibat melandainya infeksi dan dampak penyebaran Covid-19 sehingga intensitas kegiatan yang dilakukan secara daring.

---

[1] Sejak Januari 2020, perhitungan inflasi di seluruh wilayah Indonesia telah menggunakan Diagram Timbang Indeks Harga Konsumen (IHK) Tahun Dasar 2018. Dengan adanya pemutakhiran IHK Tahun Dasar 2018 serta penyempurnaan metodologi penghitungan IHK maupun inflasi, terdapat beberapa penyesuaian dalam jumlah keranjang komoditas IHK yang disurvei, pembobotan kota sampel berdasarkan Nilai Konsumsi (NK), serta data inflasi yang disajikan dalam 11 kelompok pengeluaran (sebelumnya 7 kelompok pengeluaran) dengan nomenklatur yang disesuaikan.

[2] Inflasi Provinsi Jambi merupakan agregat dari dua kota sampel perhitungan IHK yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Bungo

[3] Sejak Januari 2014 terdapat penambahan cakupan kota inflasi di Provinsi Jambi dari sebelumnya hanya Kota Jambi menjadi Kota Jambi dan Muara Bungo; Sementara dengan TD 2018 terdapat penambahan kota sampel inflasi di tingkat nasional dari 82 kota menjadi **90 kota.**

Sementara itu, Inflasi bulanan Kabupaten Bungo pada Desember 2022 tercatat sebesar 0,68% *(mtm)* yang disumbangkan oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, serta kelompok Transportasi. Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, yang memberikan andil terbesar di Kabupaten Bungo, pada inflasi Desember 2022 didorong oleh adanya peningkatan harga pada komoditas daging ayam ras, cabai merah, dan telur ayam ras.

Selanjutnya, inflasi gabungan 2 (dua) kota/kabupaten di Provinsi Jambi pada triwulan I 2023 diprakirakan akan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring dengan pelaksanaan berbagai upaya stabilisasi harga dan pasokan yang akan dilakukan oleh TPID Provinsi Jambi di tengah masuknya periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1444H. Berdasarkan perkembangan tersebut, inflasi triwulan I tahun 2023 diprakirakan berada di atas rentang sasaran inflasi nasional 3%±1% dan akan berada di rentang sasaran pada tahun 2023 seiring dengan upaya TPID untuk mengendalikan inflasi dalam kerangka 4K.

Dalam rangka pengendalian inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi terus bersinergi dan berupaya meningkatkan kolaborasi dengan instansi terkait dalam rangka menjaga stabilitas harga dan menjaga ketersedian pasokan. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat respon koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah serta mitra strategis lainnya melalui penguatan efektivitas pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP) untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menyelenggarakan berbagai kegiatan Pencanangan GNPIP Provinsi Jambi sejak 23 September 2022. Penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen dan sinergi KPwBI Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah dalam menjaga terkendalianya inflasi di Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Jambi, Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi, FORKOPIMDA Provinsi Jambi, Kepala Instansi Vertikal, serta OPD terkait.

Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) merupakan bentuk aksi nyata yang bersifat *nation-wide*, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022 lalu yang bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi serta komitmen Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam mengoptimalkan upaya dan langkah pengendalian inflasi pangan guna menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sebelumnya, dalam rangkaian kegiatan *road to* GNPIP Provinsi Jambi, Bank Indonesia beserta seluruh anggota TPID Provinsi Jambi telah melaksanakan berbagai program, di antaranya penyelenggaraan pasar murah dan penyerahan bantuan berupa bibit cabai dan saprodi budidaya ikan nila, serta alsintan kepada beberapa kelompok tani dan instansi sejak 13 Agustus 2022.

Sebagai wujud komitmen dan sinergi antar pihak dalam menyukseskan GNPIP dalam pengendalian inflasi di Provinsi Jambi dan mendukung digitalisasi pertanian, pada kegiatan ini, dilakukan beberapa komitmen/kerjasama di antaranya Penandatanganan Komitmen Dukungan GNPIP oleh KPwBI Provinsi Jambi dengan seluruh Walikota/Bupati se-Provinsi Jambi, Penandatanganan kerja sama Digitalisasi Pertanian Provinsi Jambi, Pencanangan Gerakan Menanam Cabai, dan Pencanangan Gerakan Konsumsi Cabai Olahan. Pada kegiatan tersebut, KPwBI Provinsi Jambi juga memberikan bantuan, yaitu bibit cabai merah kepada tiga pondok pesantren; Penyerahan bantuan alsintan dan saprodi kepada SMKPP Negeri Jambi; dan Penyerahan Subsidi Ongkos Angkut dalam rangka optimalisasi fasilitasi distribusi pangan strategis kepada TPID Provinsi Jambi.

Selanjutnya, sebagai upaya pengendalian inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Jambi telah menyusun berbagai program pengendalian harga melalui kerangka Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K) seperti: a) melakukan pemantauan pasokan dan kewajaran harga di tingkat pedagang melalui koordinasi dengan Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Jambi; b) melakukan koordinasi dengan Perum BULOG Kanwil Provinsi Jambi dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk pemenuhan ketersediaan bahan pangan; c) melakukan operasi pasar murah untuk komoditas-komoditas pangan strategis yang mengalami kenaikan signifikan bekerjasama dengan instansi dan OPD terkait; d) serta mengadakan rapat koordinasi *High Level Meeting* (HLM) TPID se-Provinsi Jambi menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka pengendalian inflasi. HLM TPID se-Provinsi Jambi juga membentuk *task force* TPID untuk memperkuat koordinasi seluruh TPID di wilayah Provinsi Jambi dalam rangka menjaga stabilitas harga.

Lebih Lanjut, untuk mengantisipasi inflasi pada triwulan I 2023, sekaligus persiapan menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, TPID Provinsi Jambi berencana untuk menggelar HLM TPID pada Maret 2023 mendatang. Adapun HLM TPID se-Provinsi Jambi tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan koordinasi Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga serta ketersediaan pasokan bahan pangan di tengah tingginya inflasi komoditas hortikultura. Sebagai upaya Pengendalian Inflasi, dilakukan pencanangan kegiatan pasar murah di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo sekaligus penyaluran Program Bantuan Sosial Bank Indonesia (PSBI) berupa penyerahan 1.000 bibit cabai kepada Kelompok Wanita Tani Sumber Jaya Tangkit Baru dan bantuan sarana/prasarana demplot cabai merah seluas 1 Hektar. Selanjutnya, dilakukan peluncuran unit usaha distribusi beras oleh BUMD Kabupaten Bungo, serta dilakukan penandatanganan beberapa komitmen stabilitasai harga antara instansi terkait. Upaya pengendalian inflasi tersebut tentunya mengacu pada koridor 4K.

3.2 INFLASI KOTA JAMBI BERDASARKAN KELOMPOK BARANG

Inflasi Kota Jambi triwulan IV 2022 tercatat sebesar 6,39% *(yoy)*, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami inflasi sebesar 8,04% *(yoy)*. Penurunan tingkat inflasi pada triwulan IV 2022 terutama didorong penurunan tingkat kontribusi pada kelompok Makanan, Miuman dan Tembakau sebagai hasil sinergi berbagai pihak dalam TPID Kota Jambi dalam upaya stabilisasi harga komoditas holtikultura dan peternakan di Kota Jambi. Meskipun demikian, sub-kelompok Rokok dan Tembakau terpantau mengalami kenaikan tingkat inflasi yang dikarenakan dampak keberlanjutan dari transmisi kenaikan cukai hasil tembakau di tahun 2022 yang mendorong peningkatan harga komoditas rokok.

3.2.1 Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Pada triwulan IV 2022, Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau mengalami inflasi sebesar 5,90% *(yoy)* atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi 11,47% *(yoy)*. Kelompok ini menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua di Kota Jambi pada triwulan IV 2022 dengan sumbangan inflasi sebesar 1,82%.

Berdasarkan sub kelompoknya, melambatnya laju inflasi tahunan Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau pada triwulan IV 2022 didorong oleh penurunan tekanan harga yang terjadi pada sub kelompok Makanan yaitu sebesar 7,51% *(yoy)* dengan sumbangan terhadap inflasi sebesar 1,15%. Di sisi lain, tekanan inflasi meningkat pada sub kelompok minuman yang tidak beralkohol terpantau yang tercatat sebesar 8,12% *(yoy)* dengan sumbangan sebesar 0,14% serta sub kelompok rokok dan

tembakau sebesar 12,49% *(yoy)* dengan sumbangan sebesar 0,53%. Secara keseluruhan, inflasi pada kelompok ini terutama disumbangkan oleh kenaikan harga pada komoditas beras (10,99%, *yoy*), rokok kretek filter (11,62%, *yoy*), telur ayam ras (21,94%, *yoy*), rokok kretek (17,35, *yoy*), ikan nila (15,61%, *yoy*), dan rokok putih (9,46%, *yoy*).

Melandainya laju inflasi yang terjadi pada komoditas aneka cabai dan bawang putih didorong oleh peningkatan pasokan seiring dengan periode panen yang terjadi dan peningkatan impor pada mayoritas wilayah sentra produksi dan distribusi. Perkembangan cuaca yang masih kondusif seiring dengan penurunan intensitas curah hujan mendukung panen yang berlangsung sejak akhir Juli 2022. Sejalan dengan cabai merah, produksi cabai rawit juga meningkat yang didorong oleh masuknya masa panen. Selain itu, ketersediaan pasokan juga didukung oleh membaiknya kondisi produksi di lokal Jambi. Selanjutnya, rerata harga komoditas bawang merah juga terpantau mengalami penurunan yang didukung oleh peningkatan pasokan seiring dengan panen yang terjadi di beberapa sentra produksi bawang merah, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Selanjutnya, komoditas beras terpantau mengalami peningkatan inflasi seiring dengaan masuknya periode tanam gadu di wilayah sentra produksi, penyesuaian harga BBM, serta adanya kebijakan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah. Inflasi beras tersebut tercermin dari perkembangan harga Gabah Kering Giling (GKG) yang meningkat di tingkat petani dan tingkat penggilingan.

Selanjutnya, melandainya inflasi pada komoditas minyak goreng didukung oleh ketersediaan pasokan yang terjaga. Kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga minyak goreng melalui penerapan kewajiban pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO) mampu menjaga ketersediaan pasokan bahan baku minyak goreng. Lebih lanjut, pemerintah terus menyalurkan minyak goreng curah hasil pemenuhan DMO dengan skema Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) dan Minyakita dengan harga HET Rp14.000/liter.

Selanjutnya, komoditas telur ayam juga terpantau mengalami inflasi yang didorong oleh peningkatan biaya produksi yang mencakup biaya pakan dan DOC, peningkatan permintaan untuk bansos dan sektor HORECA, serta adanya gangguan produksi di beberapa sentra produksi seiring dengan perubahan cuaca.

Sementara itu, secara triwulanan, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau terpantau mengalami deflasi sebesar 0,95% *(qtq)*. sejumlah komoditas yang mendorong deflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau di antaranya cabai merah (-20,00%, *qtq*), daging ayam ras (-7,30%, *qtq*), cabai rawit (-20,72%, *qtq*) dan minyak goreng (-2,48%, *qtq*). Berdasarkan data PIHPS, rataan harga cabai merah di Kota Jambi pada triwulan IV 2022 sebesar Rp31.392/kg, lebih rendah dibandingkan rataan harga pada triwulan sebelumnya yaitu 57.300/kg. Melandainya harga cabai merah tersebut disebabkan oleh ketersediaan pasokan di tengah masuknya musim panen di beberapa wilayah sentra produksi seiring dengan kondisi cuaca yang kondusif **(GRAFIK 3.3)**.

Melandainya tingkat inflasi komoditas minyak goreng tidak terlepas dari upaya pemerintah menerapkan kebijakan DMO kelapa sawit sehingga menjaga ketersediaan pasokan bahan baku. Selain itu, perluasan MCGR yang dilakukan Kemeterian Perdagangan turut mendukung kecukupan pasokan minyak goreng **(GRAFIK 3.4)**.

Lebih lanjut, berdasarkan data PIHPS, harga bawang merah di kota Jambi pada triwulan IV 2022 sebesar Rp30.315/kg, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yaitu sebesar 30.150/kg **(GRAFIK 3.7)**. Sejalan dengan penurunan tingkat inflasi pada komoditas hortikultura

lainnya, relatif stabilnya harga bawang merah juga didorong oleh peningkatan pasokan dari sentra produksi.

Namun demikian, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga beberapa komoditas, seperti beras, aneka rokok, dan telur ayam ras. Pada triwulan IV 2022, beras tercatat mengalami inflasi sebesar 10,99% *(qtq)* dengan sumbangan sebesar 0,40%. Selanjutnya, berdasarkan data PIHPS, rerata harga beras kualitas medium di Kota Jambi pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp252.408/20 kg, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp245.000/20 kg. Kenaikan harga beras tersebut didorong oleh adanya penyesuaian harga BBM serta kebijakan kenaikan HPP gabah. Selanjutnya, inflasi pada aneka rokok pada triwulan IV 2022 didorong oleh kenaikan pemungutan cukai rokok pada tahun 2022. Peningkatan harga juga terjadi pada komoditas telur ayam ras didorong oleh pakan dan DOC, peningkatan permintaan untuk bansos dan sektor HORECA.

Mengantisipasi perkembangan harga komoditas bahan pangan, TPID Provinsi Jambi secara intensif telah melakukan pemantauan langsung ketersediaan pasokan melalui sidak ke pasar-pasar tradisional, melakukan operasi pasar murah, memastikan kelancaran distribusi, serta mengimbau masyarakat untuk bijak berkonsumsi melalui komunikasi yang efektif. Koordinasi pengendalian inflasi antara TPID Provinsi serta Kabupaten/Kota juga terus diperkuat melalui penyelenggaraan *High Level Meeting* (HLM) yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi. Melalui HLM yang dilaksanakan diperoleh beberapa komitmen untuk pengendalian inflasi di Provinsi Jambi sesuai dengan koridor 4K.

Program unggulan TPID Provinsi Jambi juga diharapkan dapat direplikasi dan diterapkan oleh TPID Kab/Kota sehingga pengendalian inflasi lebih efektif di setiap daerah. Salah satu program unggulan TPID Provinsi Jambi adalah penyediaan infrastruktur penyimpanan seperti *Cold Storage* atau *Controlled Atmosphere Storage* (CAS). Dengan teknologi ini komoditas bahan pangan *perishable* seperti komoditas hortilkultura lainnya dapat bertahan hingga 6 (enam) bulan. Diharapkan OPD teknis dapat melakukan pengadaan infrastruktur tersebut beserta kesiapan infrastrukur pendukung seperti listrik dan biaya operasional lainnya. Selain itu, diperlukan juga upaya revitalisasi CAS untuk memastikan penggunaannya optimal. Untuk efisiensi distribusi dan tata niaga hasil produk pertanian di Provinsi Jambi, pemanfaatan Toko TPID yang telah dibentuk atau Toko Tani Indonesia perlu semakin diperkuat. Selanjutnya, replikasi Toko TPID perlu didorong di pasar-pasar yang menjadi sampel survei BPS, yaitu Pasar Talang Banjar di Kota Jambi serta Pasar Bungur dan Seroja di Kabupaten Bungo. Selain itu, TPID juga terus melakukan pengendalian inflasi melalui pengelolaan ekspektasi masyarakat terhadap ketersediaan barang/jasa, meningkatkan intensitas koordinasi dengan pihak terkait untuk menekan hambatan distribusi, dan mendorong terciptanya produk pangan olahan.

TPID Provinsi Jambi juga berkomitmen untuk melaksanakan hasil Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) TPID tanggal 21 November 2019 lalu. Terdapat beberapa poin hasil Rakorpusda TPID yang perlu ditindaklanjuti oleh TPID di tingkat daerah, di antaranya: a) TPID agar berperan aktif melakukan inisiasi sinergi dan inovasi dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi; b) mengoptimalkan infrastruktur pertanian dan logistik melalui sinergitas program dukungan pemerintah dan pemerintah daerah; c) mengembangkan model kerjasama perdagangan antar daerah (KAD) yang mengoptimalkan kelembagaan ekonomi dari tingkat desa di daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); d) memperluas inovasi penggunaan teknologi informasi

secara terintegrasi guna mendorong peningkatan produksi pertanian, pemasaran dan juga memperlancar distribusi; e) melakukan Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM) kepada program-program kerja TPID lain sebagai salah satu pertimbangan penyusunan program kerja TPID; f) sinkronisasi program peta jalan pengendalian inflasi dengan program/kegiatan perangkat daerah yang terkait, serta mengintegrasikan program tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah, sehingga kegiatan pengendalian inflasi dapat terlaksana dengan baik. Diharapkan dengan menjalankan hasil Rakorpusda TPID, kinerja TPID di

Provinsi Jambi semakin meningkat sehingga efektifitas kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan optimal. Selain itu, diharapkan dukungan dari berbagai pihak khususnya kepala daerah sebagai Ketua TPID untuk memberikan arahan kebijakan pengendalian inflasi di daerah demi mendukung pencapaian sasaran target inflasi nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, TPID Provinsi Jambi serta TPID Kabupaten/Kota berkomitmen untuk melaksanakan hasil HLM TPID Provinsi Jambi Semester II Tahun 2022 untuk menjaga inflasi daerah sesuai dengan koridor 4K dan melakukan pantauan terhadap masalah dan hambatan yang terjadi guna menjaga inflasi tetap berada pada rentang sasaran inflasi.

Grafik 3.2. Perbandingan Inflasi Bulanan Kota Jambi dan Kota Lainnya di Pulau Sumatera

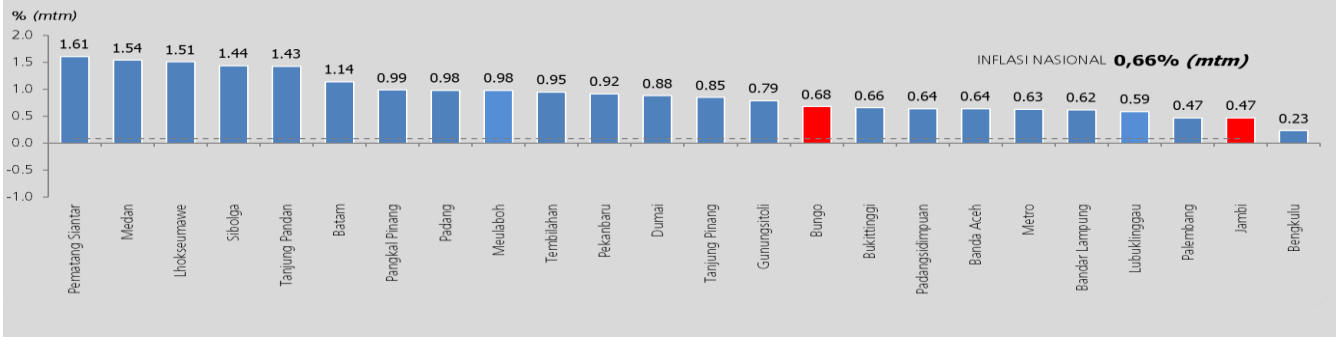

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Grafik 3.3. Perkembangan Harga Aneka Cabai

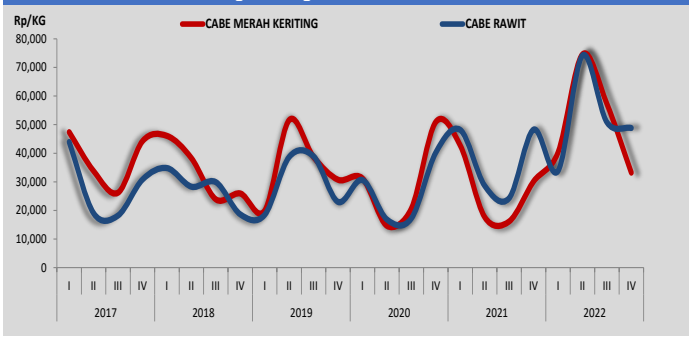

Sumber: PIHPS Nasional (diolah)

Grafik 3.4. Perkembangan Harga CPO dan Minyak Goreng

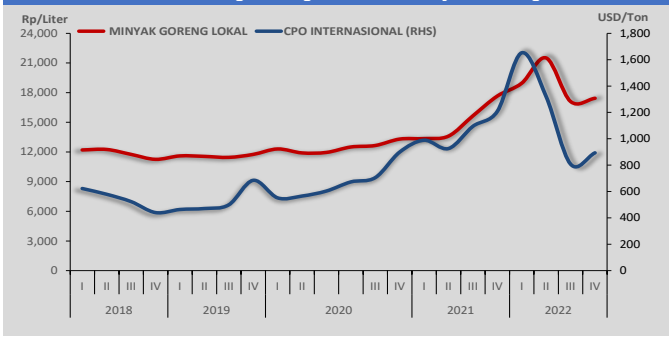

Sumber: Bloomberg dan PIHPS Nasional (diolah)

Grafik 3.5. Perkembangan Harga Beras Lokal dan Internasional

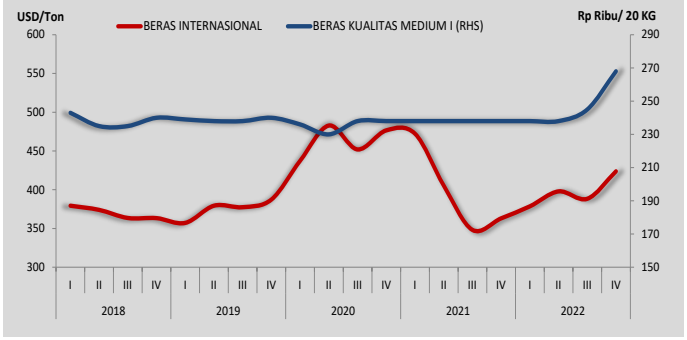

Sumber: Bloomberg dan PIHPS Nasional (diolah)

Grafik 3.6. Perkembangan Harga Gandum dan Tepung Terigu

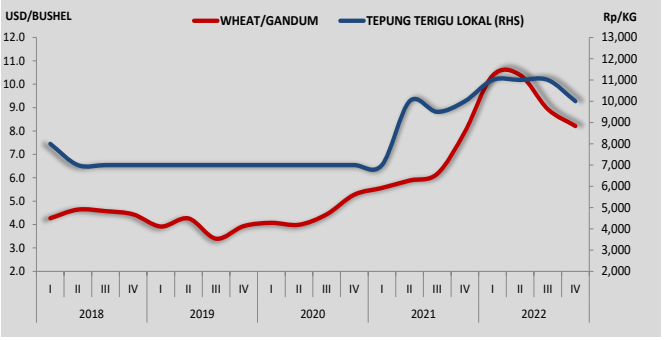

Sumber: Bloomberg dan PIHPS Nasional (diolah)

Grafik 3.7. Perkembangan Harga Bawang Merah dan Bawang Putih

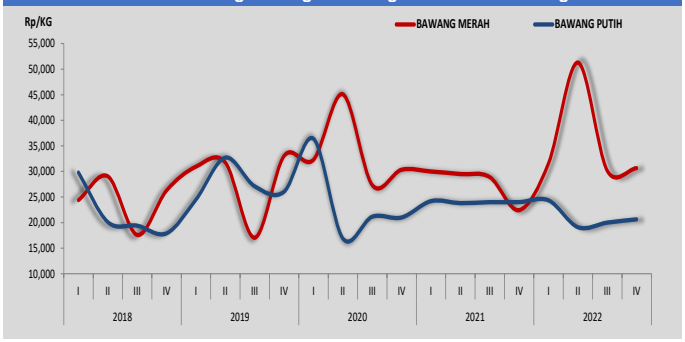

Sumber: Bloomberg dan PIHPS Nasional (diolah)

Grafik 3.8. Perkembangan Daging Ayam Ras dan Daging Sapi

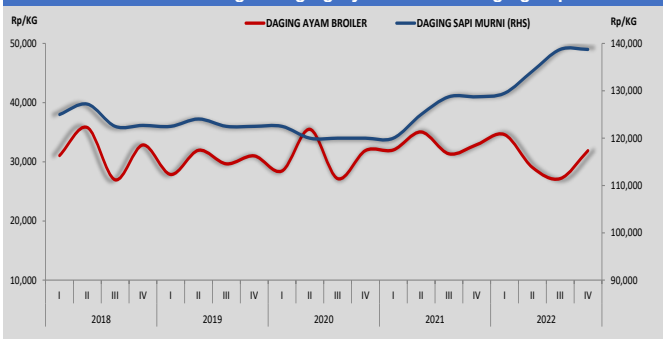

Sumber: Bloomberg dan PIHPS Nasional (diolah)

Tabel 3.1. Perkembangan Inflasi Kota Jambi (Tahun Dasar 2018)

KELOMPOK	TRIWULAN I-2022				TRIWULAN II-2022				TRIWULAN III-2022				TRIWULAN IV-2022			
	(QTQ %)		(YOY %)		(QTQ %)		(YOY %)		(QTQ %)		(YOY %)		(QTQ %)		(YOY %)	
	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	2.40	0.74	4.63	1.42	7.88	2.45	14.02	4.24	-3.21	-1.04	11.47	3.45	-0.95	-0.29	5.90	1.82
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	-0.08	-0.01	-0.33	-0.02	0.70	0.05	0.41	0.03	0.22	0.01	0.82	0.06	0.00	0.00	0.84	0.06
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	1.85	0.34	3.53	0.65	1.02	0.19	4.31	0.80	1.60	0.29	5.63	1.05	0.02	0.00	4.55	0.84
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RT	2.16	0.13	2.86	0.17	1.85	0.11	4.34	0.26	1.15	0.07	6.19	0.37	1.03	0.06	6.33	0.38
KESEHATAN	0.02	0.00	0.04	0.00	0.92	0.02	0.73	0.01	0.02	0.00	0.76	0.01	-0.48	-0.01	1.15	0.01
TRANSPORTASI	1.39	0.16	1.46	0.17	7.59	0.88	9.24	1.09	9.68	1.17	20.11	2.37	1.33	0.18	21.25	2.48
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	-0.20	-0.01	-0.58	-0.03	-0.23	-0.01	-0.74	-0.04	-0.21	-0.01	-0.57	-0.03	0.00	0.00	-0.63	-0.03
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	0.08	0.00	1.52	0.03	-0.02	0.00	0.06	0.00	0.21	0.00	0.27	0.01	0.00	0.00	0.27	0.01
PENDIDIKAN	0.00	0.00	0.32	0.01	0.16	0.01	0.48	0.02	0.38	0.02	0.54	0.02	0.00	0.00	0.54	0.02
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	1.00	0.07	1.89	0.13	1.95	0.14	3.70	0.26	1.09	0.08	4.66	0.33	0.06	0.00	4.16	0.29
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	2.99	0.18	3.59	0.22	1.34	0.08	4.09	0.26	1.60	0.10	6.32	0.40	2.21	0.14	8.38	0.52
INFLASI	**1.62**	**1.62**	**2.76**	**2.76**	**3.91**	**3.91**	**6.94**	**6.94**	**0.68**	**0.68**	**8.04**	**8.04**	**0.08**	**0.08**	**6.39**	**6.39**

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Tabel 3.2. Perkembangan Inflasi Kota Jambi Berdasarkan Kelompok dan Sub Kelompok Barang dan Jasa
(TD 2018)

KELOMPOK	TW I-2022		TW II-2022		TW III-2022		TW IV-2022	
	qtq	yoy	qtq	yoy	qtq	yoy	qtq	yoy
I. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	**2.40**	**4.63**	**7.88**	**14.02**	**-3.21**	**11.47**	**-0.95**	**5.90**
a. MAKANAN	2.18	3.89	9.25	15.28	-4.43	12.14	-1.93	4.63
b. MINUMAN YANG TIDAK BERALKOHOL	2.55	4.86	0.74	5.01	4.09	7.62	0.54	8.12
c. ROKOK DAN TEMBAKAU	3.63	9.15	2.77	10.35	1.41	9.24	4.14	12.49
II. PAKAIAN DAN ALAS KAKI	**-0.08**	**-0.33**	**0.70**	**0.41**	**0.22**	**0.82**	**0.00**	**0.84106**
a. PAKAIAN	-0.10	-0.40	0.87	0.52	0.26	1.01	0.00	1.03
b. ALAS KAKI	0.02	-0.06	-0.01	-0.03	0.00	0.01	0.00	0.01
III. PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	**1.85**	**3.53**	**1.02**	**4.31**	**1.60**	**5.63**	**0.02**	**4.55**
a. SEWA DAN KONTRAK RUMAH	0.27	1.02	0.18	1.20	0.13	1.00	0.00	0.57
b. PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, DAN KEAMANAN TEMPAT TINGGAL/PERUMAHAN	1.07	6.15	1.81	6.98	-0.51	5.55	0.06	2.44
c. PENYEDIAAN AIR DAN LAYANAN PERUMAHAN LAINNYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	5.08	5.41	1.60	7.10	5.63	13.12	0.00	12.77
IV. PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RT	**2.16**	**2.86**	**1.85**	**4.34**	**1.15**	**6.19**	**1.03**	**6.33**
a. FURNITUR, PERLENGKAPAN DAN KARPET	1.32	4.94	3.51	5.19	0.91	6.31	-0.06	5.77
b. TEKSTIL RUMAH TANGGA	0.81	1.51	0.84	1.75	0.25	1.91	0.00	2.16
c. PERALATAN RUMAH TANGGA	-0.29	0.73	0.97	1.23	0.23	1.55	0.15	1.07
d. BARANG PECAH BELAH DAN PERALATAN MAKAN MINUM	-0.72	1.73	1.92	2.31	-0.42	3.13	1.42	2.19
e. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERUMAHAN DAN KEBUN	2.03	2.76	0.41	2.71	0.28	2.73	0.40	3.15
f. BARANG DAN LAYANAN UNTUK PEMELIHARAAN RUMAH TANGGA RUTIN	3.72	3.29	1.89	5.77	1.91	8.78	1.55	9.38
V. KESEHATAN	**0.02**	**0.04**	**0.92**	**0.73**	**0.02**	**0.76**	**-0.48**	**0.47**
a. OBAT-OBATAN DAN PRODUK KESEHATAN	0.04	0.07	2.23	1.77	0.03	1.81	-1.13	1.15
b. JASA RAWAT JALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. JASA RAWAT INAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. TRANSPORTASI	**1.39**	**1.46**	**7.59**	**9.24**	**9.68**	**20.11**	**1.33**	**21.25**
a. PEMBELIAN KENDARAAN	4.50	6.10	3.74	8.22	0.76	9.80	0.17	9.41
b. PENGOPERASIAN PERALATAN TRANSPORTASI PRIBADI	0.31	0.63	1.89	2.53	17.06	19.87	1.37	21.27
c. JASA ANGKUTAN PENUMPANG	-0.99	-4.08	31.28	30.16	6.53	39.30	2.91	42.51
d. JASA PENGIRIMAN BARANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	**-0.20**	**-0.58**	**-0.23**	**-0.74**	**-0.21**	**-0.57**	**0.00**	**-0.63**
a. PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	-0.44	-1.91	-0.97	-2.57	-0.90	-1.92	-0.01	-2.31
b. LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	0.04	0.05	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00	0.04
c. ASURANSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. JASA KEUANGAN	-2.29	-3.12	0.00	-3.12	0.00	-3.12	0.00	-2.29
VIII. REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	**0.08**	**1.52**	**-0.02**	**0.06**	**0.21**	**0.27**	**0.00**	**0.27**
a. BARANG REKREASI LAINNYA DAN OLAHRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. LAYANAN REKREASI DAN OLAHRAGA	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. LAYANAN KEBUDAYAAN	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. KORAN, BUKU, DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	0.15	0.15	-0.05	0.11	0.39	0.49	0.00	0.49
IX. PENDIDIKAN	**0.00**	**0.32**	**0.16**	**0.48**	**0.38**	**0.54**	**0.00**	**0.54**
a. PENDIDIKAN DASAR DAN ANAK USIA DINI	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	1.61	0.00	1.61
b. PENDIDIKAN MENENGAH	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
c. PENDIDIKAN TINGGI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. PENDIDIKAN LAINNYA	0.00	2.30	1.18	3.50	0.00	1.18	0.00	1.18
X. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	**1.00**	**1.89**	**1.95**	**3.70**	**1.09**	**4.66**	**0.06**	**4.16**
a. JASA PELAYANAN MAKANAN DAN MINUMAN	1.00	1.89	1.95	3.70	1.09	4.66	0.06	4.16
XI. PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	**2.99**	**3.59**	**1.34**	**4.09**	**1.60**	**6.32**	**2.21**	**8.38**
a. PERAWATAN PRIBADI	2.89	3.23	1.71	4.65	2.01	6.86	1.39	8.23
b. PERAWATAN PRIBADI LAINNYA	3.49	4.78	0.61	3.22	0.80	5.67	3.80	27.55
c. PERLINDUNGAN SOSIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. JASA LAINNYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
INFLASI UMUM	**1.62**	**2.76**	**3.91**	**6.94**	**0.68**	**8.04**	**0.08**	**6.39**

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Tabel 3.3. Sumbangan Inflasi Bulanan (mtm) Kota Jambi Berdasarkan Komoditas

10 KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI	TW IV-2022 SUMBANGAN
OKTOBER	
1. BERAS	0.06
2. CUCI KENDARAAN	0.05
3. ANGKUTAN UDARA	0.04
4. BENSIN	0.04
5. UDANG BASAH	0.02
6. ROKOK KRETEK	0.01
7. SABUN DETERGEN BUBUK/CAIR	0.01
8. PEMBALUT WANITA	0.01
9. TAHU MENTAH	0.01
10. PISANG	0.01
SUMBANGAN 10 KOMODITAS	**0.25**
NOVEMBER	
1. UDANG BASAH	0.04
2. BERAS	0.03
3. PERAWATAN PRIBADI LAINNYA	0.03
4. DAGING AYAM RAS	0.03
5. BIAYA FOTO COPY	0.02
6. EMAS PERHIASAN	0.02
7. TOMAT	0.02
8. MINYAK GORENG	0.01
9. SAWI HIJAU	0.01
10. PEMBALUT WANITA	0.01
SUMBANGAN 10 KOMODITAS	**0.23**
DESEMBER	
1. DAGING AYAM RAS	0.24
2. CABAI MERAH	0.16
3. ROKOK KRETEK FILTER	0.07
4. TELUR AYAM RAS	0.06
5. CABAI RAWIT	0.04
6. ROKOK KRETEK	0.03
7. ANGKUTAN UDARA	0.03
8. PERAWATAN PRIBADI LAINNYA	0.03
9. EMAS PERHIASAN	0.02
10. ROKOK PUTIH	0.02
SUMBANGAN 10 KOMODITAS	**0.70**

10 KOMODITAS PENYUMBANG DEFLASI	TW IV-2022 SUMBANGAN
OKTOBER	
1. CABAI MERAH	-0.27
2. TELUR AYAM RAS	-0.04
3. DAGING SAPI	-0.04
4. CABAI HIJAU	-0.03
5. CABAI RAWIT	-0.03
6. DAGING AYAM RAS	-0.02
7. IKAN LAMBAK	-0.01
8. KOL PUTIH/KUBIS	-0.01
9. PIPA	-0.01
10. IKAN ASIN TERI	-0.01
SUMBANGAN 10 KOMODITAS	**-0.46**
NOVEMBER	
1. CABAI MERAH	-0.79
2. CABAI RAWIT	-0.04
3. BUNCIS	-0.01
4. SUSU BUBUK UNTUK BALITA	0.00
5. IKAN GABUS	0.00
6. SUSU BUBUK	0.00
7. KETIMUN	0.00
8. KOL PUTIH/KUBIS	0.00
9. IKAN GURAME	0.00
10. BENSIN	0.00
SUMBANGAN 10 KOMODITAS	**-0.86**
DESEMBER	
1. BERAS	-0.04
2. BAWANG MERAH	-0.03
3. TELEVISI BERWARNA	-0.01
4. KANGKUNG	-0.01
5. BESI BETON	-0.01
6. PIPA	0.00
7. KETIMUN	0.00
8. DEODORANT	0.00
9. AYAM HIDUP	0.00
10. SENG	0.00
SUMBANGAN 10 KOMODITAS	**-0.11**

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

3.2.2 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah

Pada triwulan IV 2022, Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga mengalami inflasi sebesar 4,55% *(yoy)* dengan sumbangan terhadap inflasi sebesar 0,84%. Inflasi pada kelompok ini terpantau menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,63% *(yoy)*. Secara triwulanan, kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,02% *(qtq)*, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 1,60% *(qtq)*. Inflasi pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga terutama ditopang oleh inflasi pada sub kelompok Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang tercatat inflasi sebesar 12,77% *(yoy)* dengan andil 0,69%. Inflasi tersebut disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas bahan bakar rumah tangga seiring penyesuaian harga energi nonsubsidi yang dilakukan pemerintah. Selanjutnya, sub kelompok Pemeliharaan, Perbaikan, dan Keamanan Tempat Tinggal/Perumahan juga terpantau mengalami inflasi sebesar 2,44% *(yoy)* dengan andil 0,12%. Inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga pada komoditas semen, kerikil/batu split, dan kusen yang masing-masing tercatat inflasi sebesar 8,10% *(yoy)*, 4,62% *(yoy)*, dan 7,04% *(yoy)*. Kenaikan harga tersebut disebabkan oleh adanya *second round effect* penyesuaian harga BBM dan adanya kebijakan penyesuaian tarif Pajak Pertambangan Nilai (PPN) sebagaimana amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sejak 1 April 2022.

3.2.3 Kelompok Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran

Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi sebesar 4,16% *(yoy)* dengan andil sebesar 0,29%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,66% *(yoy).* Inflasi pada kelompok ini didorong oleh kenaikan harga pada komoditas makanan berminyak seperti pempek, martabak, dan tekwan dengan inflasi masing-masing sebesar 22,57% *(yoy)*, 10,54% *(yoy),* dan 8,78% *(yoy)*. Inflasi pada komoditas tersebut sejalan dengan inflasi pada bahan utama dan pendukungnya yaitu telur ayam ras, margarine, mie kering instant dan beras dengan inflasi masing-masing 21,94% *(yoy)*, 15,89% *(yoy)*, 15,19% *(yoy),* dan 10,99% *(yoy)*. Sejalan dengan angka inflasi tersebut, data Survei PIHPS mencatatkan harga rataan beras pada Desember 2022 yang masing-masing tercatat sebesar Rp13.400/kg dan Rp27.186/kg atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar Rp12.250/kg.

3.2.4 Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Pada triwulan Iv 2022, kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutih Rumah Tangga tercatat inflasi sebesar 6,33% *(yoy)* dengan andil 0,38%. Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 6,19% *(yoy)*. Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh inflasi pada sub kelompok Barang dan Layanan untuk Pemeliharaan Rumah Tangga Rutin dengan inflasi dan andil masing-masing sebesar 09,38% *(yoy)* dan 0,29%. Inflasi pada kelompok ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas sabun detergen bubuk/cair, sabun cair/cuci piring, dan pembersih lantai yang masing-masing tercatat inflasi sebesar 20,16% *(yoy),* 31,51% *(yoy),* 18,86% *(yoy).* Kenaikan harga pada komoditas tersebut didorong oleh kenaikan biaya produksi berupa kenaikan harga produk turunan *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO). Selain itu, adanya *second round effect* dari penyesuaian harga BBM di awal September 2022 dan penyesuaian tarif PPN 11% juga turut mendorong kenaikan harga komoditas tersebut.

Sub kelompok *furniture*, perlengkapan, dan karpet juga terpantau mengalami inflasi sebesar 5,77% *(yoy)* dengan sumbangan 0,04%. Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada sub kelompok ini adalah karpet, lemari pakaian, dan meja kursi tamu yang masing-masing tercatat inflasi sebesar 12,66% *(yoy),* 6,93 % *(yoy),* dan 5,46% *(yoy)*. Kenaikan harga komoditas tersebut didorong oleh adanya normalisasi permintaan di tengah peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat serta sebagai dampai penyesuaian harga BBM yang mendorong kenaikan harga bahan baku dan biaya distribusi barang di industri mebel dan kerajinan.

3.2.5 Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya

Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya mengalami inflasi tahunan sebesar 0,27% *(yoy)* dengan sumbangan inflasi 0,01%. Inflasi kelompok ini terutama disumbangkan oleh sub kelompok koran, buku, dan perlengkapan sekolah yang tercatat inflasi sebesar 0,49% *(yoy)* dengan andil sebesar 0,01%. Inflasi tersebut ditopang oleh kenaikan harga pulpen/bolpen yang tercatat inflasi sebesar 1,33% *(yoy)*. Sementara itu, inflasi sub Layanan Rekreasi dan Olahraga serta Layanan Kebudayaan masih terpantau stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

3.2.6 Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 0,84% *(yoy)* dengan sumbangan 0.06% terhadap inflasi umum di Kota Jambi. Inflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh peningkatan tekanan harga pada sub kelompok pakaian sebesar 1,03% *(yoy)*. Berdasarkan komoditasnya, inflasi sub kelompok tersebut didorong oleh kenaikan harga pada beberapa komoditas di antaranya baju muslim anak (36,77%, *yoy*), sarung (13,73%, *yoy*), seragam sekolah wanita (5,78%, *yoy*), dan seragam sekolah anak (5,66%, *yoy*). Kenaikan harga pada komoditas tersebut didorong oleh normalisasi kegiatan belajar mengajar

yang dilakukan secara luring serta dampak dari penyesuaian harga BBM yang mendorong kenaikan harga bahan baku, seperti pembuatan sarung yang naik hingga 30%.

3.2.7 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya tercatat mengalami inflasi sebesar 8,38% *(yoy)* dengan andil 0,52%. Inflasi kelompok tersebut utamanya disumbang oleh sub kelompok perawatan pribadi sebesar 8,23% *(yoy)* yang disebabkan kenaikan pada komoditas bedak bayi (27,55%, *yoy*), deodorant (27,49%, *yoy*), pembalut wanita (24,12%, *yoy),* maskara (18,19%, *yoy*), alas bedak (17,34%, *yoy*) dan sabun mandi cair (10,49%, *yoy*). Lebih lanjut, sub kelompok perawatan pribadi lainnya juga terpantau mengalami inflasi sebesar 8,15% *(yoy),* yang ditopang oleh kenaikan harga pada komoditas emas perhiasan sebesar 10,79% *(yoy)* dengan sumbangan sebesar 0,09% serta popok bayi sebesar 10,48% *(yoy)* dengan andil 0,05%. Perkembangan harga emas perhiasan terpantau melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Data SPH menunjukkan bahwa harga emas perhiasan 22 karat pada Desember 2022 sebesar Rp726.000/gram, lebih rendah dibandingkan Rp758.500/gram pada September 2022. Perlambatan harga emas perhiasan tersebut sejalan dengan harga emas internasional. Berdasarkan data Bloomberg, harga emas internasional pada Desember 2022 tercatat sebesar 1.798 USD/*Troy Ounce*, lebih rendah dibandingkan 1.837 USD/*Troy Ounce* pada September 2022. **(GRAFIK 3.9).**

3.2.8 Kelompok Pendidikan

Secara tahunan, Kelompok Pendidikan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,54% *(yoy)* dengan andil 0,02%. Inflasi pada kelompok ini ditopang oleh inflasi pada sub kelompok pendidikan dasar dan anak usia dini serta pendidikan lainnya yang masing-masing tercatat sebesar 1,61% *(yoy)* dan 1,18% *(yoy).* Inflasi pada sub kelompok Pendidikan dasar dan anak usia dini tersebut didorong oleh kenaikan harga komoditas sekolah dasar 2,54% *(yoy)*. Sementara itu, inflasi pada sub Pendidikan lainnya didorong oleh kenaikan harga bimbingan belajar sebesar 2,01% *(yoy)*. Inflasi tersebut sejalan dengan meningkatkan intensitas kegiatan belajar mengajar di tengah telah kembali diberlakukannya kegiatan belajar secara tatap muka di sekolah.

Grafik 3.9. Perkembangan Harga Emas Internasional

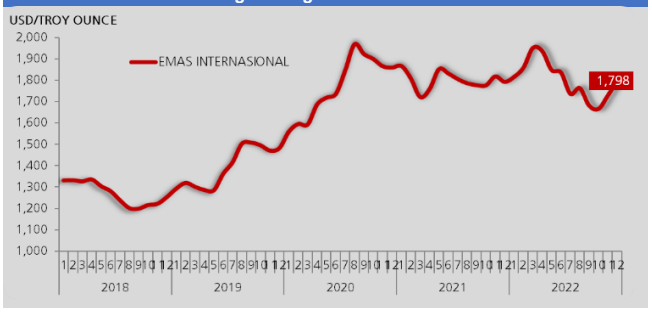

Sumber: Bloomberg (diolah)

3.2.9 Kelompok Kesehatan

Kelompok kesehatan mengalami inflasi 0,47% *(yoy)* dengan kontribusi inflasi sebesar 0,01%. Inflasi kelompok ini dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi pada sub kelompok obat-obatan dan produk kesehatan yang tercatat inflasi sebesar 1,15% *(yoy).* Inflasi sub kelompok ini disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas obat flu, obat sakit kepala, obat gosok, popok dewasa, dan obat batuk yang naik masing-masing sebesar 6,66% *(yoy)*, 5,66% *(yoy),* 2,76% *(yoy),* 2,28% *(yoy)* dan1,06% *(yoy)*. Kenaikan harga obat-obatan pada triwulan IV 2022 dipicu oleh kenaikan harga bahan baku dan lonjakan biaya di rantai produksi sejak awal tahun 2022.

3.2.10 Kelompok Transportasi

Selanjutnya, kelompok Transportasi tercatat mengalami inflasi sebesar 21,25% *(yoy)* dengan andil 2,48%. Inflasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 20,11% *(yoy)*. Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh inflasi pada sub kelompok jasa angkutan penumpang dan pengoperasian peralatan transportasi pribadi yang masing-masing tercatat inflasi sebesar 42,51% *(yoy)* dan 21,27% *(yoy)*. Adapun

komoditas yang menjadi sumber inflasi adalah bensin, angkutan udara, solar, dan cuci kendaraan yang masing-masing memberikan andil terhadap inflasi sebesar 1,06%, 0,76%, 0,07% dan 0,05%. Tekanan inflasi pada kelompok Transportasi ini tidak terlepas dari adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi sejak awal September 2022.

3.2.11 Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,63% *(yoy)* dengan andil sebesar -0,03% terhadap inflasi secara umum di Kota Jambi. Deflasi didorong oleh penurunan harga pada sub kelompok peralatan informasi dan komunikasi dengan andil sebesar -0,03% terhadap inflasi pada kelompok ini. Adapun komoditas yang tercatat deflasi adalah televisi berwarna dan telepon seluler. Penurunan harga pada komoditas tersebut seiring melambatnya permintaan komoditas tersebut di tengah telah berlangsungnya kegiatan belajar tatap muka yang Selanjutnya, sub kelompok jasa keuangan juga terpantau mengalami deflasi dengan andil sebesar -0,01% yang didorong oleh penurunan harga pada komoditas biaya administrasi transfer uang.

Lebih lanjut, perkembangan inflasi di Kota Jambi sampai dengan Januari 2023 menunjukkan perlambatan pergerakan harga-harga secara umum. Pada Januari 2023, Kota Jambi tercatat mengalami deflasi sebesar 0,91% *(mtm)* atau inflasi 5,68% *(yoy)*. Inflasi di Kota Jambi utamanya disebabkan oleh peningkatan harga di Kelompok Trasportasi serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi dengan andil tertinggi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yaitu cabai merah, beras, telur ayam ras, bawang merah, dan rokok kretek filter. Meskipun demikian, inflasi minyak goreng, bawang merah, dan telur ayam ras terpantau melambat dibandingkan dengan Desember 2022. Perlambatan kenaikan harga tersebut didorong oleh upaya stabilisasi pasokan. Sementara itu, deflasi Januari 2023 didorong oleh penurunan harga pada kelompok Peralatan, Informasi, dan Komunikasi yang tercatat mengalami deflasi sebesar 2,48% *(yoy)* dengan andil 0,03%.

Selanjutnya, dengan berbagai upaya stabilisasi harga dan pasokan yang akan dilakukan oleh TPID Kota Jambi di tengah masuknya periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1444H, inflasi kota Jambi pada triwulan I 2023 diprakirakan akan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan perkembangan tersebut, inflasi pada tahun 2023 diprakirakan akan berada pada rentang sasaran inflasi nasional 3%±1% seiring dengan upaya TPID untuk mengendalikan inflasi dalam kerangka 4K.

3.3 INFLASI KABUPATEN BUNGO BERDASARKAN KELOMPOK BARANG

Sejak Januari 2014, Kabupaten Bungo masuk sebagai kota sampel IHK di Provinsi Jambi. Inflasi bulanan Kabupaten Bungo pada triwulan IV 2022 berada pada urutan ke-15 dari 24 (dua puluh empat) kota di Sumatera yang dijadikan sampel perhitungan inflasi.

Grafik 3.10. Perkembangan Inflasi Tahunan Bungo (*yoy*)

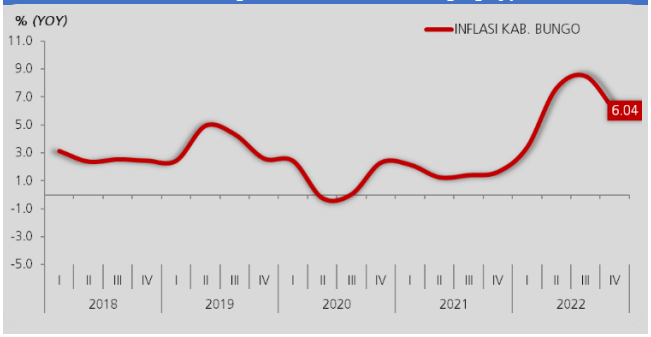

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Dilihat berdasarkan pergerakan IHK tahunan, pada triwulan IV 2022, Kabupaten Bungo tercatat mengalami inflasi sebesar 6,04% *(yoy)*, lebih rendah dibandingkan inflasi yang terjadi di triwulan III 2022 yang tercatat sebesar 8,51% *(yoy)* (GRAFIK 3.10). Selanjutnya, jika dilihat secara bulanan, Inflasi Kabupaten Bungo pada Desember 2022 sebesar 0,79% *(mtm)*, atau lebih tinggi dibandingkan inflasi September 2022 yang tercatat sebesar 0,55 % *(mtm)*.

3.3.1. Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

Menurut kelompok pengeluran, penyumbang inflasi tahunan terbesar Kabupaten Bungo bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan inflasi tercatat 7,15% *(yoy)* dan andil 2,24%. Inflasi pada kelompok ini utamanya disebabkan oleh inflasi yang terjadi pada sub kelompok makanan sebesar 6,39% *(yoy)* dengan andil sebesar 1,48%, sub kelompok rokok dan tembakau sebesar 10,66% *(yoy)* dengan andil sebesar 0,70%, serta sub kelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 3,77% *(yoy)*, dengan andil sebesar 0,06%. Sejumlah komoditas yang memicu inflasi pada sub kelompok makanan di antaranya beras (21,31%, *yoy*), rokok kretek filter (9,45%, *yoy*), rokok kretek (14,82%, *yoy*), ikan nila (3,84%, *yoy)*, dan rokok putih (9,45%, *yoy*). Inflasi komoditas beras pada Triwulan IV 2022 terpantau meningkat dibandingkan triwulan III 2022. Berdasarkan data PIHPS, harga rataan berasa di Kabupaten Bungo pada Desember 2022 tercatat sebesar Rp63.980/kg, lebih rendah dibandingkan Rp76.724/kg pada Juni 2022. Penurunan harga cabai merah tersebut didorong oleh ketersediaan pasokan di tengah musim panen yang terjadi di wilayah sentra produksi. Sementara itu, harga rataan beras terpantau meningkat yaitu Rp13.900/kg pada Desember 2022, atau lebih tinggi dibandingkan dengan Rp12.384/kg pada September 2022. Peningkatan harga beras tersebut disebabkan oleh kenaikan harga GKG dan GKP di tengah kebijakan kenaikan HPP Gabah serta sebagai dampak penyesuaian harga BBM. Selanjutnya, harga rataan minyak goreng curah dan kemasan pada Desember 2022 tercatat sebesar Rp17.593/kg, atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp17.050/kg. Peningkatan tekanan harga minyak goreng tersebut didorong oleh pelonggaran kebijakan hasil alokasi pasar dalam negeri (DMO) yang dilakukan oleh Kemendag sehingga terjadi penurunan jumlah pasokan minyak goreng di pasar domestik. Melalui pemenuhan DMO, pemerintah melakukan distribusi Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) serta Minyak Goreng Kemasan Murah (Minyakita) yang menjaga kecukupan pasokan dan pemerataan distribusi. Selanjutnya, harga rataan telur ayam ras pada Desember 2022 sebesar Rp27.150/kg, lebih tinggi dibandingkan dengan harga pada triwulan lalu yaitu Rp Rp27.082/kg. Sementara itu, berdasarkan SPH, harga rataan ikan nila pada Desember 2022 sebesar Rp37.000/kg, atau stabil terhadap harga komoditas pada September 2022.

Namun demikian, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh kontraksi yang terjadi pada komoditas daging ayam ras (-8,27%, *yoy*), ikan serai (-8,84%, *yoy*), cabai rawit (-8,88%, *yoy*), udang basah (-23,18%, *yoy)*, dan ikan asin teri (-7,56%, *yoy*). Berdasarkan survei PIHPS, harga rataan daging ayam ras pada September 2022 tercatat sebesar Rp35.300/kg, lebih tinggi dibandingkan Juni 2022 yang tercatat sebesar Rp31.502/kg. Peningkatan harga daging ayam ras sejalan dengan peningkatan biaya produksi yang mencakup biaya pakan dan DOC, peningkatan permintaan untuk bansos dan sektor HORECA.

3.3.2. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar rumah tangga terpantau mengalami inflasi sebesar 4,11% *(yoy)* dengan sumbangan inflasi sebesar 0,75%. Inflasi tersebut terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada triwulan sebelumnya yaitu 3,94% *(yoy)*. Inflasi pada kelompok ini utamanya disumbangkan oleh kenaikan sub kelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 5,75% *(yoy)* dengan andil sebesar 0,38% terhadap inflasi umum di Kabupaten Bungo. Inflasi pada sub kelompok tersebut didorong oleh kenaikan harga bahan bakar rumah tangga di tengah masih tingginya harga komoditas energi global serta sebagai dampak penyesuaian harga BBM. Selanjutnya, sub kelompok pemeliharaan,

perbaikan, dan keamanan tempat tinggal/perumahan juga tercatat inflasi sebesar 6,03% *(yoy)* dengan sumbangan 0,22% yang didorong oleh kenaikan harga semen, seng, dan pasir.

3.3.3. Kelompok Transportasi

Selanjutnya, kelompok Transportasi tercatat mengalami inflasi sebesar 14,64% *(yoy)* dengan andil sebesar 1,80%. Sub kelompok pendorong inflasi adalah pengoperasian peralatan transportasi pribadi sebesar 19,10% *(yoy)*, dengan sumbangan terbesar berasal dari sub kelompok bensin dengan andil sebesar 1,21% dan sub kelompok jasa angkutan penumpang sebesar 21,53% *(yoy)* dengan andil sebesar 0,42%. Kenaikan tekanan harga pada sub kelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi disebabkan oleh adanya kenaikan harga bensin dan solar yang ditetapkan sejak September 2022. Berdasarkan data SPH, harga pertalite pada Desember 2022 tercatat sebesar Rp10.000/liter, atau stabil dibandingkan dengan harga pada September 2022. Selanjutnya, inflasi pada sub kelompok jasa angkutan penumpang disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan udara seiring kenaikan harga avtur.

3.3.4. Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan rutin Rumah Tangga mengalami inflasi sebesar 5,03% *(yoy)* dengan sumbangan inflasi 0,30%. Inflasi pada kelompok ini utamanya disebabkan oleh sub kelompok barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah tangga rutin yang tercatat inflasi sebesar 8,49% *(yoy)* dengan andil sebesar 0,22%. Inflasi pada sub kelompok ini didorong oleh kenaikan harga pada komoditas sabun detergen bubuk/cair (19,26%, *yoy*) dan sabun cair/cuci piring (29,30%, *yoy*). Selain itu, sub kelompok furnitur, perlengkapan, dan karpet juga terpantau mengalami inflasi sebesar 3,22% *(yoy)* dengan andil sebesar 0,04%. Inflasi pada sub kelompok ini didorong oleh kenaikan harga komoditas lemari pakaian, meja kursi tambu, dan karpet yang masing-masing tercatat inflasi sebesar 6,32% *(yoy)*, 4,40% *(yoy),* dan 10,28& *(yoy)* yang didorong oleh kenaikan harga bahan baku dan produksi.

3.3.5. Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

Kelompok Pakaian dan Alas Kaki mengalami inflasi 2,74% *(yoy)* dengan kontribusi sebesar 0,20%. Inflasi kelompok ini terutama disumbangkan oleh sub kelompok pakaian yang tercatat mengalami inflasi sebesar 2,86% *(yoy)* dengan sumbangan sebesar 0,17%. Peningkatan tekanan harga pada sub kelompok pakaian didorong oleh inflasi pada komoditas baju muslim wanita dan sarung yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 8,51% *(yoy)* dan 6,09% *(yoy)*. Peningkatan inflasi pada kelompok ini didorong oleh dengan normalisasi konsumsi masyarakat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta sebagai dampak penyesuaian harga BBM.

3.3.6. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Lebih lanjut, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, tercatat inflasi 11,45%*(yoy)* dengan sumbangan sebesar 0,75%. Inflasi pada kelompok pengeluaran ini didorong oleh inflasi yang terjadi pada sub kelompok perawatan pribadi sebesar 16,12% *(yoy)* dengan sumbangan 0,56%. Kenaikan tekanan harga pada sub kelompok perawatan pribadi didorong oleh kenaikan harga pada komoditas bedak bayi, deodorant, dan pembalut wanita yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 27,55% *(yoy),* 26,17% *(yoy)* dan 22,89% *(yoy)*. Kenaikan harga pada komoditas tersebut didorong oleh kenaikan biaya produksi berupa kenaikan harga olein yang merupakan produk turunan *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO) serta adanya dampak penyesuaian harga BBM. Selain itu, penyesuaian tarif PPN 11% juga turut mendorong kenaikan harga komoditas tersebut. Selanjutnya, sub kelompok perawatan pribadi lainnya juga tercatat mengalami inflasi sebesar 7,71% *(yoy)*, yang utamanya didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan sebesar 9,63% *(yoy)* serta kenaikan harga popok bayi sekali pakai/*diapers* sebesar 10,10% *(yoy).*

3.3.7. Kelompok Kesehatan

Pada triwulan IV 2022, kelompok Kesehatan tercatat mengalami inflasi sebesar 1,13% *(yoy)* dengan sumbangan terhadap total inflasi pada kelompok Kesehatan sebesar 0,02%. Inflasi kelompok ini utamanya disumbangkan oleh sub kelompok obat-obatan dan produk kesehatan yang tercatat mengalami inflasi 2,94% *(yoy)* dengan sumbangan sebesar 0,02%. Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi adalah obat gosok sebesar 4,79% *(yoy)*.

3.3.8. Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya

Selanjutnya, Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya terpantau mengalami inflasi sebesar 2,74% *(yoy)* dengan sumbangan 0,05%. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh tekanan harga pada sub kelompok koran, buku dan perlengkapan sekolah dengan tingkat inflasi sebesar 4,21% *(yoy)* dan andil 0,03%. Adapun komoditas yang mendorong inflasi yaitu buku tulis bergaris yang tercatat inflasi 8,85% *(yoy)* yang didorong oleh penyesuaian harga seiring kenaikan harga bahan baku dan BBM.

3.3.9. Kelompok Pendidikan

Sejalan dengan hal tersebut, Kelompok Pendidikan mencatatkan inflasi pada triwulan IV 2022 sebesar 0,95% *(yoy)* dengan andil sebesar 0,03%. Inflasi pada kelompok tersebut didorong oleh inflasi pada sub kelompok pendidikan dasar dan anak usia dini, pendidikan menengah, dan pendidikan lainnya yang masing-masing tercatat inflasi sebesar 1,56% *(yoy),* 1,08% *(yoy),* dan 2,47% *(yoy)*. Adapun komoditas utama penyumbang inflasi pada sub kelompok tersebut adalah sekolah dasar dengan nilai inflasi 2,41% *(yoy*).

3.3.10. Kelompok Penyediaan Makanan dan Minum/Restoran

Selanjutnya, Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran pada triwulan IV 2022 mengalami inflasi sebesar 0,26% *(yoy),* dengan sumbangan 0,02% terhadap total inflasi di Kabupaten Bungo. Sub kelompok jasa pelayanan makanan dan minuman menjadi pendorong utama inflasi di kelompok ini dengan peningkatan IHK sebesar 0,26% *(yoy)*. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh komoditas pempek dana ayam goreng masing-masing sebesar 3,39% *(yoy)* dan 3,96 *(yoy)* seiring dengan kenaikan bahan baku utama.

Secara bulanan, pada Desember 2022, perkembangan IHK di Kabupaten Bungo tercatat inflasi sebesar 0,68% *(mtm)*. Inflasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,10% *(mtm)*. Berdasarkan komoditasnya **(TABEL 3.6)**, penyumbang inflasi bulanan Kabupaten Bungo pada triwulan IV 2022 di antaranya adalah daging ayam ras, cabai merah, emas perhiasan, telur ayam ras, dan rokok kretek filter. Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi yang disumbangkan oleh komoditas cabai merah, emas perhiasan, bawang merah, jengkol, dan minyak goreng.

Tekanan inflasi Bungo pada triwulan I 2023 diprakirakan akan lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022 sejalan dengan berbagai upaya stabilisasi harga dan pasokan yang akan dilakukan oleh TPID Kabupaten Bungo Jambi di tengah masuknya periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1444H.

Sebagai kota/kabupaten yang dihitung dalam perhitungan Provinsi Jambi, pemerintah daerah Kabupaten Bungo (termasuk TPID Kabupaten Muara Bungo) secara aktif melakukan langkah-langkah pengendalian harga, menjaga kelancaran arus distribusi serta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga ekspektasi konsumsi masyarakat.

Tabel 3.4. Perkembangan Inflasi Bungo (Tahun Dasar 2018)

KELOMPOK	TRIWULAN I-2022				TRIWULAN II-2022				TRIWULAN III-2022				TRIWULAN IV-2022			
	(QTQ %)		(YOY %)		(QTQ %)		(YOY %)		(QTQ %)		(YOY %)		(QTQ %)		(YOY %)	
	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	4.31	1.35	4.49	1.42	8.71	2.79	17.25	5.31	-2.76	-0.92	15.09	4.61	-2.83	-0.92	7.15	2.24
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	0.33	0.10	2.47	0.18	0.69	0.05	2.12	0.15	0.33	-0.90	2.23	0.16	0.36	0.02	2.74	0.20
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0.64	0.19	2.93	0.53	1.35	0.24	3.94	0.72	0.64	-0.81	4.11	0.75	0.49	0.09	3.56	0.65
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	0.83	0.08	5.36	0.31	2.60	0.15	6.97	0.41	0.83	-0.88	6.64	0.39	0.17	0.01	5.03	0.30
KESEHATAN	0.14	0.00	1.55	0.03	0.16	0.00	0.63	0.01	0.14	-0.92	0.63	0.01	0.71	0.01	8.12	0.02
TRANSPORTASI	11.62	0.03	2.48	0.30	1.54	0.19	3.16	0.39	11.62	0.45	15.19	1.88	-0.02	0.12	14.64	1.80
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	0.18	-0.04	-0.69	-0.04	0.32	0.02	-0.51	-0.03	0.18	-0.92	-0.60	-0.03	0.00	0.00	-0.27	-0.02
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	0.67	0.02	1.65	0.03	0.30	0.01	1.88	0.03	0.67	-0.91	2.44	0.04	0.80	0.01	2.74	0.05
PENDIDIKAN	0.69	0.00	0.52	0.01	0.14	0.00	0.65	0.02	0.69	-0.91	0.95	0.03	0.00	0.00	0.95	0.03
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	0.06	0.01	0.23	0.02	0.05	0.00	0.28	0.02	0.06	-0.92	0.18	0.01	0.08	0.00	0.26	0.02
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	0.12	0.38	9.53	0.61	2.73	0.19	9.01	0.60	0.12	-0.92	9.84	0.65	2.40	0.16	11.45	0.75
INFLASI	**2.12**	**2.12**	**3.40**	**3.40**	**3.63**	**3.63**	**7.63**	**7.63**	**0.69**	**0.69**	**8.51**	**8.51**	**-0.49**	**-0.49**	**6.04**	**6.04**

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Tabel 3.5. Perkembangan Inflasi Bungo Berdasarkan Kelompok dan Sub Kelompok Barang dan Jasa
(Tahun Dasar 2018)

KELOMPOK	TW I-2022		TW II-2022		TW III-2022		TW IV-2022	
	qtq	yoy	qtq	yoy	qtq	yoy	qtq	yoy
I. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	**4.31**	**4.49**	**8.71**	**17.25**	**-2.76**	**15.09**	**-2.83**	**7.15**
a. MAKANAN	4.93	3.22	10.43	19.29	-4.02	16.90	-4.34	6.39
b. MINUMAN YANG TIDAK BERALKOHOL	1.73	8.75	1.98	10.90	-0.02	9.88	0.04	3.77
c. ROKOK DAN TEMBAKAU	2.74	8.29	4.06	11.45	1.49	10.09	2.01	10.68
II PAKAIAN DAN ALAS KAKI	**1.34**	**2.47**	**0.69**	**2.12**	**0.33**	**2.23**	**0.36**	**2.74**
a. PAKAIAN	1.47	2.89	0.82	2.33	0.38	2.45	0.16	2.86
b. ALAS KAKI	0.78	0.69	0.09	1.17	0.11	1.28	1.30	2.30
III. PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RT	**1.04**	**2.93**	**1.35**	**3.94**	**0.64**	**4.11**	**0.49**	**3.56**
a. SEWA DAN KONTRAK RUMAH	0.33	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.41	0.74
b. PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, DAN KEAMANAN TEMPAT TINGGAL/PERUMAHAN	0.68	5.00	3.86	8.28	0.21	6.35	1.19	6.03
c. PENYEDIAAN AIR DAN LAYANAN PERUMAHAN LAINNYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	2.14	3.19	1.59	4.19	1.65	5.69	0.27	5.75
IV. PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RT	**1.36**	**5.36**	**2.60**	**6.97**	**0.83**	**6.64**	**0.17**	**5.03**
a. FURNITUR, PERLENGKAPAN DAN KARPET	0.14	2.34	2.18	2.25	0.63	2.96	0.24	3.22
b. TEKSTIL RUMAH TANGGA	0.06	0.87	0.99	1.54	2.00	3.53	0.63	3.73
c. PERALATAN RUMAH TANGGA	0.17	6.73	0.87	5.62	0.71	2.66	0.03	1.78
d. BARANG PECAH BELAH DAN PERALATAN MAKAN MINUM	-0.86	0.59	0.00	-0.19	1.58	0.88	0.00	0.71
e. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERUMAHAN DAN KEBUN	0.00	5.13	0.00	4.71	0.97	0.97	0.00	0.97
f. BARANG DAN LAYANAN UNTUK PEMELIHARAAN RUMAH TANGGA RUTIN	3.12	7.91	4.34	12.19	0.68	12.15	0.14	8.49
V. KESEHATAN	**0.11**	**1.55**	**0.16**	**0.63**	**0.14**	**0.63**	**0.71**	**1.13**
a. OBAT-OBATAN DAN PRODUK KESEHATAN	0.29	1.46	0.43	1.67	0.36	1.63	1.83	2.94
b. JASA RAWAT JALAN	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. JASA RAWAT INAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. TRANSPORTASI	**0.26**	**2.48**	**1.54**	**3.16**	**11.62**	**15.19**	**0.89**	**14.64**
a. PEMBELIAN KENDARAAN	2.38	2.78	0.20	2.02	1.66	3.85	0.08	4.38
b. PENGOPERASIAN PERALATAN TRANSPORTASI PRIBADI	0.12	1.70	0.34	1.34	17.54	18.73	0.86	19.10
c. JASA ANGKUTAN PENUMPANG	-3.72	4.57	8.53	11.98	13.52	28.50	2.45	21.53
d. JASA PENGIRIMAN BARANG	0.00	1.49	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	**-0.77**	**-0.69**	**0.32**	**-0.51**	**0.18**	**-0.60**	**0.00**	**-0.27**
a. PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	1.09	2.86	0.08	2.40	0.68	2.01	0.00	1.83
b. LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	-0.03	-0.02	0.45	0.43	0.01	0.43	-0.02	0.43
c. ASURANSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. JASA KEUANGAN	-15.11	-19.59	0.00	-19.59	0.00	-19.59	0.00	-15.11
VIII. REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	**0.94**	**1.65**	**0.30**	**1.88**	**0.67**	**2.44**	**0.80**	**2.74**
a. BARANG REKREASI LAINNYA DAN OLAHRAGA	0.15	0.15	0.00	0.15	0.16	0.30	2.37	2.68
b. LAYANAN REKREASI DAN OLAHRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. KORAN, BUKU, DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	2.01	3.63	0.66	4.15	1.37	5.27	0.12	4.21
IX. PENDIDIKAN	**0.13**	**0.52**	**0.14**	**0.65**	**0.69**	**0.95**	**0.00**	**0.95**
a. PENDIDIKAN DASAR DAN ANAK USIA DINI	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	1.56	0.00	1.56
b. PENDIDIKAN MENENGAH	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	0.00	1.08
c. PENDIDIKAN TINGGI	0.00	0.92	0.00	0.92	0.19	0.19	0.00	0.19
d. PENDIDIKAN LAINNYA	1.19	1.19	1.26	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47
X. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	**0.08**	**0.23**	**0.05**	**0.28**	**0.06**	**0.18**	**0.08**	**0.26**
a. JASA PELAYANAN MAKANAN DAN MINUMAN	0.08	0.23	0.05	0.28	0.06	0.18	0.08	0.26
XI. PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	**5.81**	**9.53**	**2.73**	**9.01**	**0.12**	**9.84**	**2.40**	**11.45**
a. PERAWATAN PRIBADI	6.98	11.66	3.96	13.78	2.90	15.90	1.46	16.12
b. PERAWATAN PRIBADI LAINNYA	4.74	7.55	1.40	4.11	-3.25	3.30	2.77	5.59
c. JASA LAINNYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
INFLASI (UMUM)	**2.12**	**3.40**	**3.63**	**7.63**	**0.69**	**8.51**	**-0.49**	**6.04**

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah

Tabel 3.6. Sumbangan Inflasi Bulanan (*mtm*) Bungo Berdasarkan Komoditas

10 KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI	TW IV-2022 SUMBANGAN
OKTOBER	
1. BERAS	0.27
2. BENSIN	0.05
3. IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	0.04
4. BIAYA FOTO COPY	0.03
5. IKAN ASIN TERI	0.03
6. ROKOK KRETEK	0.02
7. BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0.02
8. ANGKUTAN UDARA	0.02
9. PASIR	0.02
10. BATU BATA/BATU TELA	0.01
SUMBANGAN 10 KOMODITAS	**0.50**
NOVEMBER	
1. BERAS	0.18
2. DAGING AYAM RAS	0.10
3. PETAI	0.04
4. JENGKOL	0.04
5. KANGKUNG	0.03
6. TEMPE	0.03
7. TAHU MENTAH	0.03
8. SEWA RUMAH	0.03
9. IKAN SERAI	0.02
10. BAYAM	0.02
SUMBANGAN 10 KOMODITAS	**0.51**
DESEMBER	
1. DAGING AYAM RAS	0.13
2. CABAI MERAH	0.12
3. EMAS PERHIASAN	0.06
4. TELUR AYAM RAS	0.05
5. ROKOK KRETEK FILTER	0.05
6. CABAI RAWIT	0.04
7. ANGKUTAN UDARA	0.04
8. ROKOK KRETEK	0.03
9. JENGKOL	0.03
10. MINYAK GORENG	0.03
SUMBANGAN 10 KOMODITAS	**0.59**

10 KOMODITAS PENYUMBANG DEFLASI	TW IV-2022 SUMBANGAN
OKTOBER	
1. CABAI MERAH	-1.32
2. DAGING AYAM RAS	-0.09
3. TELUR AYAM RAS	-0.08
4. IKAN SERAI	-0.04
5. CABAI RAWIT	-0.04
6. PETAI	-0.03
7. AYAM HIDUP	-0.02
8. JENGKOL	-0.02
9. JERUK	-0.01
10. KENTANG	-0.01
SUMBANGAN 10 KOMODITAS	**-1.66**
NOVEMBER	
1. CABAI MERAH	-0.54
2. CABAI RAWIT	-0.04
3. BAWANG MERAH	-0.04
4. KENTANG	-0.01
5. BAWANG PUTIH	-0.01
6. PISANG	-0.01
7. IKAN ASIN TERI	-0.01
8. IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	-0.01
9. MINYAK GORENG	-0.01
10. BENSIN	-0.01
SUMBANGAN 10 KOMODITAS	**-0.67**
DESEMBER	
1. BAWANG MERAH	-0.09
2. KANGKUNG	-0.03
3. IKAN ASIN TERI	-0.03
4. BAYAM	-0.02
5. PEPAYA	0.00
6. IKAN CAKALANG/ IKAN SISIK	0.00
7. IKAN MAS	0.00
8. UDANG BASAH	0.00
9. IKAN KEMBUNG/IKAN GEMBUNG/ IKAN BA	0.00
10. CUMI-CUMI	0.00
SUMBANGAN 10 KOMODITAS	**-0.19**

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

BOKS 1

'*ROADSHOW* GNPIP PROVINSI JAMBI 2022: SINERGI DAN KOLABORASI, UPAYA STABILISASI INFLASI PANGAN'

I. Pelaksanaan GNPIP Provinsi Jambi

Di tengah pertumbuhan ekonomi, Indonesia masih menghadapi tantangan kenaikan inflasi, khususnya karena kenaikan harga komoditas pangan strategis di antaranya beras, cabai merah dan bawang merah. Sebagai betuk respon kondisi ini, Bank Indonesia dan Pemerintah telah menginisiasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Pencanangan GNPIP yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2022 di Kota Malang menjadi titik awal penyelenggaraan GNPIP di berbagai daerah di Indonesia. Di Provinsi Jambi, *Kick Off* GNPIP Provinsi Jambi dilakukan pada tanggal 23 September 2022. Penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen, sinergi dan kolaborasi KPwBI Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah dalam menjaga terkendalinya inflasi di Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jambi, Bupati/ Walikota se-Provinsi Jambi, FORKOPIMDA Provinsi Jambi dan Kepala Instansi Vertikal, serta OPD terkait.

Dalam kerangka GNPIP, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi beserta seluruh anggota TPID di lingkup Provinsi Jambi dan Kabupaten/ Kota melaksanakan berbagai kegiatan sebagai menjaga kestabilan harga di Provinsi Jambi, di antaranya:

a. Penandatanganan komitmen dukungan GNPIP oleh semua Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi
   Pentingnya dukungan dari Pemerintah dan multi *stakeholder* dalam menjaga kestabilan laju inflasi dikuatkan dengan penandatangan komitmen bersama. Selain itu, masing-masing TPID di lingkup Provinsi dan Kabupaten/ Kota juga telah menyusun rencana pengendalaian inflasi jangka pendek dan menengah.

b. Penyelenggaraan pasar murah oleh Bulog Jambi dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
   Pasar Murah ini dilakukan rutin melalui Toko TPID, TTIC, Car Free Day (CFD) dan area kantor pemerintahan. Saat pelaksanaan Pasar Murah, beberapa komoditas pangan seperti beras, cabai merah, bawang merah, gula pasir dan telur ayam ras dijual kepada masyarakat dibarengi dengan edukasi berbelanja bijak.

c. Perluasan lahan tanam cabai
   Sebagai upaya meningkatkan produksi komoditi penyumbang inflasi, melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) diberikan bantuan bibit cabai dan saprodi budidaya ikan nila, serta alsintan kepada beberapa kelompok tani, pondok pesantren dan Kebun TPID.

d. Digitalisasi pertanian
   Aplikasi Ciptani berbasis *website* merupakan salah satu inovasi digitalisasi pertanian di Provinsi Jambi. Aplikasi ini berisi database petani dan hasil tani (lokasi, jadwal dan kuantitas proyeksi panen per individu petani), Data ini akan menjadi salah satu indikator dan alarm bagi TPID terkait kecukupan stok. Selain itu, data ini juga dapat menjadi petunjuk pelaksanaan Kerjasama Antar daerah (KAD) intra Provinsi Jambi.

e. Subsidi ongkos angkut
   Sebagai upaya optimalisasi fasilitasi distribusi pangan strategis kepada masyarakat, TPID Prov. Jambi memberikan subsidi ongkos angkut untuk mendorong percepatan distribusi dan menurunkan harga pangan.

f. Pencanangan Gerakan Konsumsi Cabai Olahan
   Gerakan ini dilakukan secara berkelanjutan dan melalui *omni channel* menghimbau masyarakat untuk meningkatkan mengkonsumsi cabai olahan, dibandingkan cabai segar. Salah satu bentuk kegiatan adalah melalui demo masak oleh *chef* pada Safari GNPIP ke Kabupaten/ Kota.

g. Safari GNPIP
   Koordinasi dan komunikasi dioptimalkan melalui penyelenggaran GNPIP yang dilakukan secara *road show* ke seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jambi. Dalam kegiatan ini diisi dengan edukasi sadar inflasi kepada masyarakat dan *High Level Meeting* (HLM), serta rapat koordinasi TPID sebagai upaya menyamakan persepsi dan sinergi pengendalian inflasi di Provinsi Jambi.

Bagaimana dampak GNPIP di Provinsi Jambi pada tahun 2022?

Sinergi GNPIP di Provinsi Jambi membuahkan hasil yang menggembirakan. Laju inflasi Provinsi Jambi mengalami penurunan. Indeks Harga Kosumen (IHK) gabungan kota dan kabupaten di Provinsi Jambi posisi Desember 2022 tercatat 6,35% *(yoy)*. Angka ini menurun signifikan dibandingkan posisi tertinggi di bulan Juli 2022 sebesar 8,55% *(yoy)*. Penurunan ini dipicu penurunan yang cukup dalam pada inflasi *volatile foods* menjadi sebesar 4,49% dari 24,11% di bulan Juli 2022.

II. Keberhasilan Perluasan Implementasi QRIS melalui 'Safari GNPIP Provinsi Jambi 2022'

Dalam rangka memenuhi arahan Gubernur Bank Indonesia terkait target nasional akumulasi 15 Juta Pengguna Baru *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi (KPwBI Provnisi Jambi), turut berkontribusi dalam ketercapaian target implementasi QRIS Nasional. Hingga Desember 2022, KPwBI Jambi telah menyelenggarakan sosialisasi dan implementasi QRIS sebanyak 32 kali yang berlokasi di seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi. Salah satu *roadshow* implementasi QRIS terbesar yang dilakukan KPwBI Provnisi Jambi adalah Safari GNPIP.

Kegiatan tersebut dilakukan di 9 (Sembilan) Kab/Kota di Provinsi jambi dengan melakukan sosialisasi terkait penggunaan QRIS (dari sisi *merchant*, *customer* dan pemerintah daerah) serta akuisisi pengguna baru. KPwBI Provinsi Jambi terus mendorong masyarakat untuk selalu beradaptasi dalam hal digitalisasi pembayaran menggunakan QRIS karena saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa digitalisasi pembayaran membawa banyak kemajuan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional maupun daerah. Seluruh rangkaian kegiatan Safari GNPIP dihadiri oleh Walikota/Bupati daerah, Pimpinan OPD Daerah, OPD Daerah lainnya serta masyarakat sekitar dengan jumlah peserta lebih dari 5000 orang dan jumlah akuisisi pengguna baru lebih dari 4000 orang.

Dalam pelaksanaan Safari GNPIP, terdapat dua kondisi yang menjadi tantangan dalam akuisisi pengguna baru, yaitu dan tingkat infrastruktur daerah yang baik dengan minat masyarakat masih rendah dan tingkat infrastruktur daerah yang kurang memadai dengan tingkat minat masyarakat yang masih rendah Pada daerah dengan tingkat infrastruktur yang baik dan minat masyarakat yang rendah, KPwBI Provnisi Jambi berhasil menghasilkan **68%** pengguna baru dari total peserta hadir sebesar 4500 peserta. Rincian keberhasilan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Pencapaian Implementasi QRIS pada Daerah dengan Tingkat Infrastruktur yang Baik dan Minat Masyarakat yang Rendah

Sementara, pada daerah dengan tingkat infrastruktur yang kurang memadai dan minat masyarakat yang rendah, KPwBI Provinsi Jambi berhasil menghasilkan **83%** pengguna baru dari total peserta hadir sebesar 1500 peserta. Rincian keberhasilan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2.

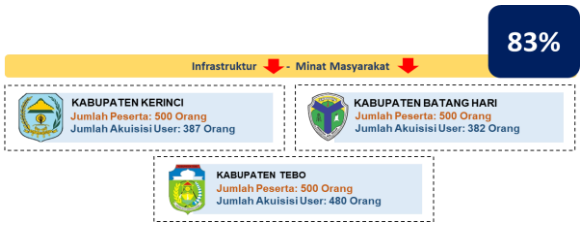

Gambar 1. 2 Pencapaian Implementasi QRIS pada Daerah dengan Tingkat Infrastruktur yang kurang Memadai dan Minat Masyarakat yang Rendah

Melihat keberhasilan tersebut, Bank Indonesia menyadari bahwa tanpa sinergi dan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, Penyelenggara Jasa Pembayaran, dan pihak-pihak terkait, upaya perluasan dan pencapaian QRIS yang merata di Provinsi jambi tidak akan berjalan maksimal. KPwBI Provnsi Jambi akan terus mengedukasi dan mensosialisasikan terkait penggunaan QRIS pada setiap kesempatan yang ada baik dari sisi *merchant* ataupun *customer*. Selanjutnya Pelaksanaan sosialisasi dan akuisisi QRIS di tahun 2023 bersinergi dengan Safari GNPIP akan diselenggarakan kembali melihat keberhasilan kegiatan tersebut di tahun 2022.

DOKUMENTASI KEGIATAN

Sinergi GNPIP di Provinsi Jambi masih terus dilanjutkan pada tahun 2023 berlandaskan pada kerangka 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribudi dan Komunikasi yang Efektif). Harapannya program strategis GNPIP dapat meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Jambi, serta memberikan kontribusi positif pada upaya menjaga kestabilan harga pangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

BAB IV

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Jambi pada triwulan IV 2022 tetap terjaga, tercermin dari tingkat ROA bank dan rasio LDR yang tercatat tetap terjaga pada triwulan berjalan. Kinerja positif juga tercermin pada sisi penghimpunan dana yang masih tercatat tumbuh yang utamanya didominasi oleh pertumbuhan deposito. Hal ini sejalan dengan penyaluran kredit korporasi yang tercatat terakselerasi 6,44% *(yoy)* pada triwulan IV. Meski demikian, perbankan masih memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan penyaluran kredit korporasi dengan tetap harus mengutamakan asas kehati-hatian mengingat tingginya resiko kredit yang tercermin pada NPL.

4.1 KETAHANAN SEKTOR KORPORASI

Pertumbuhan kredit korporasi di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2022 terakselerasi sebesar 6,44% *(yoy)*. Pertumbuhan kredit korporasi tercatat lebih baik dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,34% *(yoy)*. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit korporasi sektor pertanian 15,03% *(yoy),* tentu pertumbuhan tersebut lebih baik mengingat pada triwulan sebelumnya sektor ini tercatat terkontraksi. Pertumbuhan pada sektor pertanian didorong oleh pencabutan tarif pungutan ekspor TBS yang berlaku efektif pada 15 Oktober 2022 sampai dengan 30 Desember 2022. Hal ini menjadi faktor pendorong peningkatan permintaan TBS. Selain itu, tingginya curah hujan pada akhir tahun serta *replanting* sawit yang memasuki fase *newly matured* meningkatkan jumlah panen. Namun, pertumbuhan kredit yang lebih tinggi tertahan oleh kontraksi pada sektor pertambangan sebesar 25,02% *(yoy)* dan industri 6,26% *(yoy)*. Faktor penghambat kinerja sektor pertambangan disebabkan oleh perbaikan jalan rusak dan pengerjaan *box culvert* sepanjang jalur distribusi batubara mengakibatkan terhambatnya distribusi batubara.

Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) KPw BI Provinsi Jambi triwulan IV 2022 menunjukkan bahwa perlambatan kegiatan usaha sektor pertambangan dipengaruhi oleh pemberlakukan pembatasan kendaraan batubara dari sekitar 15.000 kendaraan per hari menjadi maksimal 3.500 per hari imbas kemacetan jalur lintas Sumatera. Sementara, hal serupa terjadi pada industri pengolahan. Salah satu penghambat disebabkan oleh menurunnya ketersediaan bahan baku karet seiring menurunnya produktivitas akibat curah hujan tinggi.

Meski demikian, pelaku usaha memprakirakan kegiatan usaha pada triwulan I 2023 akan melanjutkan tren peningkatan seiring berlanjutnya perbaikan ekonomi di tengah kebijakan penghapusan PPKM serta berbagai momentum Hari Besar Nasional (Imlek, Nyepi dan Ramadhan). Hal tersebut terkonfirmasi dari nilai SBT yang diproyeksi tumbuh positif sebesar 14,84% atau lebih tinggi dibandingkan -9,55% pada triuwlan IV 2022.

Sejalan dengan SKDU, perkembangan penjualan domestik terpantau tumbuh positif yang tercermin pada *likert scale* (LS) triwulan IV 2022 sebesar 0,13. Lebih lanjut, berdasarkan hasil Survei Konsumen (SK) yang dilakukan oleh KPwBI Provinsi Jambi, diperoleh informasi bahwa keyakinan masyarakat terhdap kinerja ekonomi daerah pada triwulan laporan terpantau tetap kuat dan berada pada level optimis.

4.1.1 Sumber Kerentanan Sektor Korporasi

Kinerja korporasi di Provinsi Jambi sangat dipengaruhi perkembangan komoditas perkebunan dan komoditas energi primer. Hal tersebut disebabkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi lebih dari 50% disumbangkan oleh LU pertanian, LU pertambangan dan LU industri pengolahan. Secara umum, pada triwulan IV 2022 pelaku usaha menyatakan cukup mudah dalam mendapat akses kredit terhadap perbankan seiring dengan momentum pemulihan ekonomi. Hal ini sejalan dengan data SKDU, responden menyatakan bahwa akses kredit perbankan dirasakan cukup baik. Sebanyak 95,00% responden menyatakan cukup mudah dalam mendapatkan akses kredit terhadap perbankan.

4.1.2 Kinerja Korporasi dan Penilaian Risiko

Kegiatan usaha domestik pada triwulan IV 2022 tercatat terkontraksi, tercermin dari hasil SKDU oleh KPwBI Provinsi Jambi yang menunjukkan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 9,55%. Angka tersebut tercatat terkontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat terakselerasi sebesar 17,75%. Penurunan kinerja kegiatan usaha terjadi pada beberapa sektor yakni Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (SBT -4,03%), Informasi dan Komunikasi (SBT -3,26%), Konstruksi (SBT -1,96%), pertambangan dan penggalian (SBT -1,62%) dan Real Estate (SBT -1,59%).

Grafik 4.1. Survei Kegiatan Dunia Usaha Provinsi Jambi

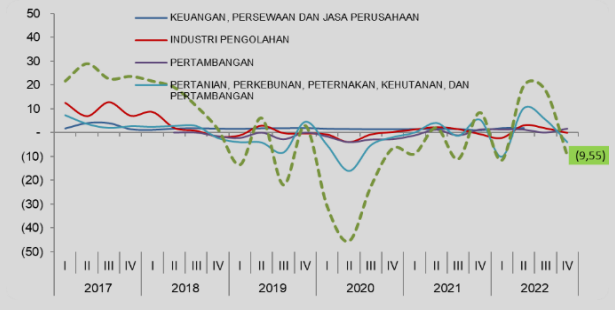

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Provinsi Jambi

Penurunan kegiatan usaha Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di triwulan IV-2022 disebabkan oleh harga pupuk yang cenderung tinggi mengurangi minat petani untuk melakukan perawatan yang berakibat pada penurunan produktivitas tanaman perkebunan. Selain itu, Harga bokar pada triwulan IV-2022 tercatat sebesar 16.600/kg atau turun 23,10%*(yoy)*. Sementara itu, Harga pinang juga tercatat Rp4.000/kg, belum menunjukkan perbaikan sejak triwulan III 2022(GRAFIK 4.1).

4.1.3 Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi

Kredit korporasi yang disalurkan di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp14,32 triliun atau tumbuh sebesar 6,44% *(yoy)*, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,34% *(yoy)*. (GRAFIK 4.2).

Grafik 4.2. Pertumbuhan Kredit Korporasi

Sumber: LBU Bank Indonesia

Di sisi lain, suku bunga tertimbang rata-rata untuk nasabah korporasi tercatat sebesar 9,52%, menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 9,73%. Meski demikian, suku bunga kredit yang dtetapkan masih jauh diatas suku bunga BI7DRR yang ditetapkan sebesar 5,50%.

Sektor ekonomi yang mendorong perbaikan kredit diantaranya sektor pertanian 15,03% *(yoy),* sektor lain lain 17,99% *(yoy)* dan sektor perdagangan 7,95% *(yoy)*. Perbaikan pada sejumlah sektor tersebut menopang pertumbuhan kredit korporasi pada triwulan berjalan. Meski demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi terhambat oleh sejumlah sektor yang masih tercatat kontraksi antara lain sektor pertambangan 25,02% *(yoy)* dan sektor industri 6,26% *(yoy).* Kredit pada sektor industri mengalami kontraksi dipengaruhi oleh wacana perluasan pembatasan kendaraan batubara dan TBS kelapa sawit yang berpotensi menghambat pasokan dari petani ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Selain itu, *Purchasing Manager Index* (PMI) Amerika, Tiongkok dan Jepang berada pada devel di bawah 50 yang berpotensi menahan permintaan *crumb rubber.* (GRAFIK 4.3).

Grafik 4.3. Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Utama Provinsi Jambi

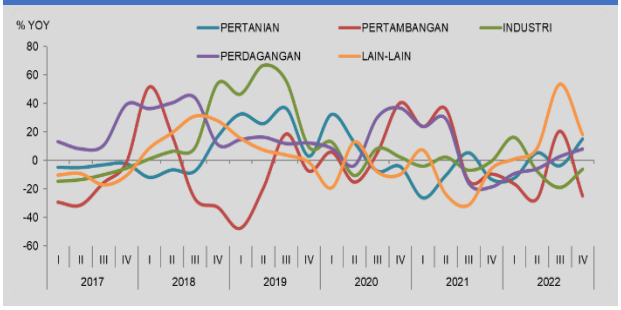

Sumber: LBU Bank Indonesia

Berdasarkan hasil liaison yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada triwulan IV 2022 sebagain besar kontak menyatakan bahwa perusahaan menggunakan pembiayaan usaha yang berasal dari dana internal perusahaan, baik untuk modal kerja maupun investasi. Sejalan dengan hal tersebut, 87,50% kontak *liaison* mengungkapkan bahwa perusahaan memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi dari dana internal. Sementara itu, 12,5% kontak *liaison* lainnya melakukan pembiayaan dari 2 sumber yaitu internal dan perbankan. Adapun fasilitas pembiayaan perbankan yang diterima bersumber dari bank domestik.

Sementara berdasarkan pangsanya, kredit korporasi triwulan IV 2022 masih didominasi oleh 4 sektor utama yaitu sektor pertanian (32,47%), sektor industri pengolahan (22,78%), sektor perdagangan (21,78%), dan sektor pertambangan (3,65%) (GRAFIK 4.4).

Grafik 4.4. Proporsi Kredit Korporasi menurut Sektor Utama Provinsi Jambi

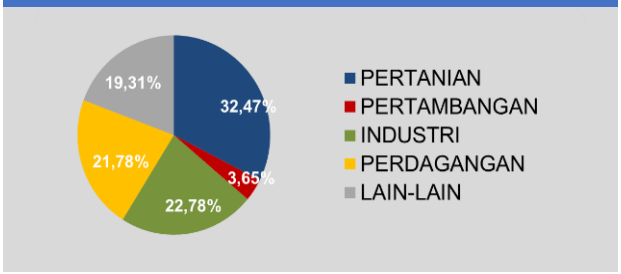

Sumber: LBU Bank Indonesia

Berdasarkan jenis penggunaan, pada triwulan IV 2022 kredit korporasi didominasi untuk kebutuhan modal kerja sebesar Rp8,04 triliun (pangsa 56,26%), sementara kredit untuk investasi sebesar Rp6,25 triliun (pangsa 43,74%) (GRAFIK 4.5).

Kredit modal kerja terpantau masih terkontraksi sebesar 1,06% *(yoy)* membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 2,24% *(yoy)*. Selanjutnya, kredit investasi terakselerasi sebesar 18,07% *(yoy).* Sementara itu, kredit konsumsi terkontraksi 9,66% *(yoy)*. Pertumbuhan kredit korporasi merupakan cermin perbaikan kondisi usaha serta meningkatnya peran intermediasi perbankan.

Peningkatan penyaluran kredit konsumsi tersebut terkonfirmasi dari hasil liaison triwulan IV 2022 dimana kontak liason secara umum menunjukan optimisme terhadap daya beli masyarakat. Hal ini sejalan dengan **Penghapusan kebijakan PPKM** serta penurunan harga tiket pesawat mendorong peningkatan mobilisasi dan konsumsi masyarakat. Serta trafik pesawat di bandara Jambi secara umum masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata trafik pesawat selama tahun 2021 yang tercatat hanya sebanyak 450 pesawat.

Grafik 4.5. Proporsi Kredit Korporasi Per Jenis Penggunaan

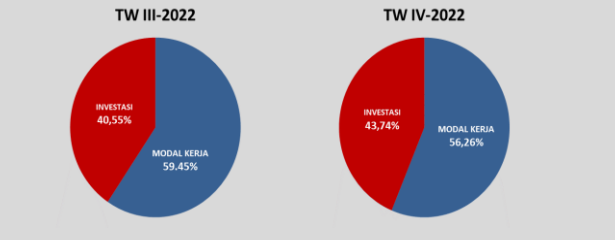

Sumber: LBU Bank Indonesia

Meski demikian menjadi perhatian pada sisi risiko kredit, tercatat penurunan risiko kredit korporasi menjadi sebesar 4,98% *(gross)* membaik dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,07% *(gross)*. **(GRAFIK 4.6)**.

Grafik 4.6. NPL Kredit Korporasi Sektor Utama Provinsi Jambi

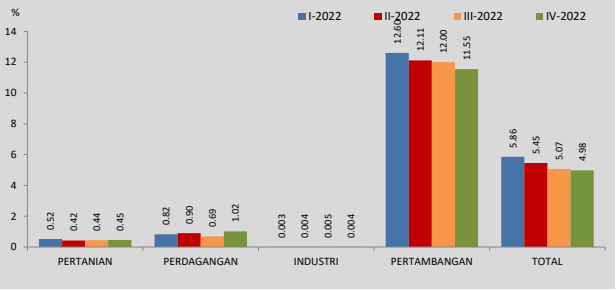

Sumber: LBU Bank Indonesia

Penurunan risiko kredit NPL debitur korporasi disumbangkan oleh NPL sektor pertambangan pada triwulan IV 2022 sebesar 11,55% *(gross),* membaik dibandingkan pada triwulan sebelumnya sebesar 12,00% *(gross).* Sementara itu, sektor pertanian dan perdagangan menunjukkan peningkatan dengan masing-masing tercatat sebesar 0,45% *(gross),* meningkat dari triwulan sebelumnya yaitu 0,44% *(gross)* dan 1,02% *(gross),* meningkat dari triwulan sebelumnya 0,69% *(gross).* Adapun NPL sektor industri pengolahan terjaga rendah dan tercatat sebesar 0,004% (*gross*) setelah sebelumnya tercatat sebesar 0,005% (*gross*).

4.2 KETAHANAN SEKTOR RUMAH TANGGA

Kinerja sektor rumah tangga pada triwulan laporan relatif stabil dan tidak jauh berbeda dengan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari peningkatan simpanan perseorangan sejalan dengan perbaikan penyaluran kredit rumah tangga. Kinerja rumah tangga yang relatif stabil didukung optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juni 2022 sebesar 115,80 sedikit lebih tinggi dibandingkan IKK September 2022 sebesar 115,00 **(GRAFIK 4.7)**.

Sentimen positif konsumen seiring relaksasi kebijakan tercermin pada Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) yang meningkat menjadi 122,80 dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 117,50.

Grafik 4.7. IKE, IEK, dan IKK Survei Konsumen Provinsi Jambi

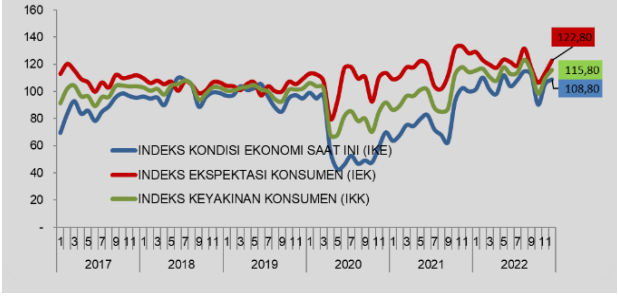

Sumber: SK Bank Indonesia

Lebih lanjut, kredit sektor rumah tangga mengalami perbaikan. Pertumbuhan kredit Rumah Tangga (RT) Jambi pada triwulan IV 2022 sebesar 5,52% *(yoy)*, terakselerasi dibandingkan triwulan III 2022 4,59% *(yoy)*. Selanjutnya, DPK RT tumbuh sebesar 7,08% *(yoy)*, tumbuh membaik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,86% *(yoy)*. Dari DPK tersebut didominasi oleh pertumbuhan tabungan sebesar 6,89% *(yoy)*, tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 8,38% *(yoy)*. Lebih lanjut, pangsa masing-masing DPK yaitu Giro, Tabungan dan

Deposito sebesar 2,39%, 76,47% dan 21,14%. Sejalan dengan hal tersebut, PDRB konsumsi rumah tangga juga masih menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan IV 2022 (GRAFIK 4.8).

Grafik 4.8. Perkembangan PDRB Konsumsi Rumah Tangga

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Kondisi peningkatan kredit dan diiringi perlambatan pertumbuhan DPK, mengindikasi masyarakat mulai melakukan kegiatan ekonomi pada sektor rill, setelah sebelumnya menahan konsumsi sebagai bentuk berjaga-jaga selama masa pandemi.

4.2.1 Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

Pertumbuhan DPK perseorangan Jambi pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 7,08% *(yoy)*, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,86% *(yoy)*. Namun sebaliknya DPK non perseorangan terpantau terkontraksi sebesar 3,80% *(yoy)* lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,61% *(yoy)* (GRAFIK 4.9).

Grafik 4.9. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

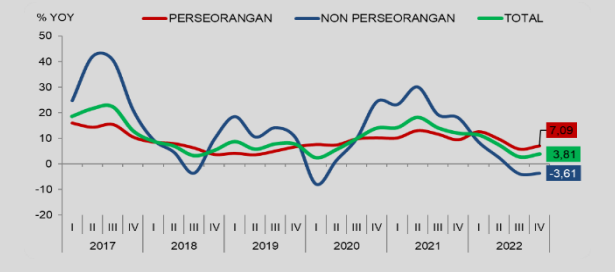

Sumber: LBU Bank Indonesia

4.2.2 Dana Pihak Ketiga Perseorangan di Perbankan

Pertumbuhan DPK perseorangan Jambi pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 7,09% *(yoy)*, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,86% *(yoy)*. Namun sebaliknya DPK non perseorangan terpantau terkontraksi sebesar 3,81% *(yoy)* lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,61% *(yoy)* (GRAFIK 4.9).

Berdasarkan pangsanya, dana pihak ketiga RT (perseorangan) pada triwulan laporan mendominasi DPK perbankan dengan pangsa sebesar 71,53%, sedangkan sisanya sebesar 28,47% merupakan DPK non perseorangan. (GRAFIK 4.10).

Grafik 4.10. Komposisi Dana Pihak Ketiga

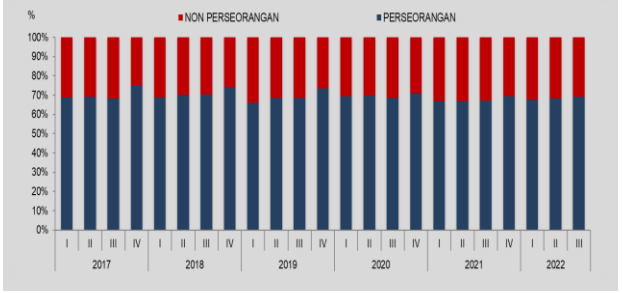

Sumber: LBU Bank Indonesia

Pertumbuhan DPK rumah tangga didorong oleh pertumbuhan giro dan tabungan. Pada triwulan IV 2022, giro tumbuh sebesar 2,86% *(yoy)* tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,95% *(yoy)*. Selanjutnya, tabungan tercatat tumbuh sebesar 6,89% *(yoy)* tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 8,38% *(yoy)*. Sedangkan, deposito tumbuh sebesar 8,28% *(yoy)*, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 3,62% *(yoy)* (GRAFIK 4.11).

Grafik 4.11. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

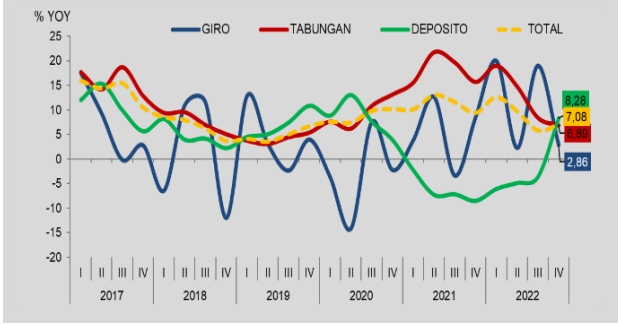

Sumber: LBU Bank Indonesia

Sesuai dengan karakteristiknya, preferensi RT dalam menyimpan kelebihan dananya mayoritas disimpan dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka (deposito) masing-masing sebesar 76,47% dan 21,14%, sementara pangsa giro hanya sebesar 2,39% (GRAFIK 4.12).

Peningkatan preferensi RT dalam menyimpan kelebihan dananya dalam bentuk tabungan mengindikasikan bahwa motif berjaga-jaga RT dalam mengalokasikan kelebihan dananya terlihat lebih kuat

dibandingkan motif investasi. Selain itu, simpanan dalam bentuk tabungan juga memudahkan RT dalam penggunaannya baik untuk keperluan konsumsi maupun pembayaran cicilan.

Grafik 4.12. Pangsa Dana Pihak Ketiga

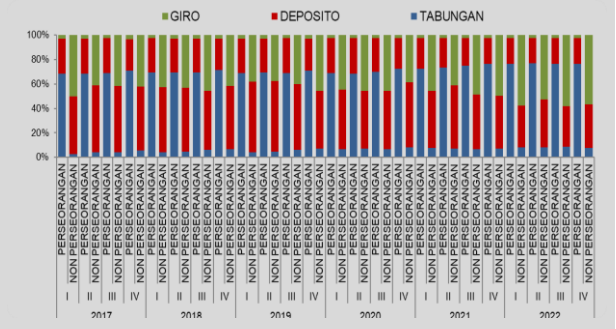

Sumber: LBU Bank Indonesia

Preferensi masyarakat tersebut sesuai dengan perkembangan perekonomian di masa pandemi, dimana masyarakat cenderung mengutamakan kebutuhan pokoknya serta menahan konsumsi untuk kebutuhan sekunder seperti barang elektronik dan kendaraan bermotor. Lebih lanjut, Saat ini, PDRB konsumsi rumah tangga pada triwulan IV sebesar 2,99% *(yoy)*, lebih rendah dari triwulan III sebesar 3,80% *(yoy)*. Hal ini sejalan dengan kecendrungan untuk melakukan *saving.*

4.2.3 Kredit Rumah Tangga di Perbankan

Kredit rumah tangga (RT) mencapai sebesar Rp22,34 triliun atau tumbuh sebesar 5,52% *(yoy)*, tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,59% *(yoy)*. Pertumbuhan kredit tersebut ditopang oleh laju pertumbuhan kredit rumah tangga sub sektor multiguna, kepemilikan rumah (KPR), dan pemilikan kendaraan bermotor (KKB) yang masing-masing memiliki andil sebesar 57,3%, 26,5% dan 7,6%.

Pada triwulan laporan, kredit rumah tangga sub sektor multiguna mencapai Rp12,81 triliun atau tumbuh sebesar 2,63% *(yoy)*, tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,23% *(yoy)*. Kredit multiguna utamanya didorong oleh subsektor rumah tangga untuk pemilikan flat atau apartemen tipe diatas 70 sebesar 63,42% *(yoy)*.

Selanjutnya, kredit rumah tangga pada sub sektor KKB sebesar Rp 1,68 triliun atau tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 16,49% *(yoy)*, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 18,29% *(yoy)*. Peningkatan tersebut terjadi pada hampir seluruh jenis KKB. KKB untuk pemilikan mobil roda empat tumbuh sebesar 17,12% *(yoy)*, sementara itu KKB pemilikan sepeda motor tercatat tumbuh sebesar 10,49% *(yoy)*. Selanjutnya, terkait KKB truk dan kendaraan bermotor roda enam atau lebih terakselerasi 31,29% *(yoy)*. Meski demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh kontraksi pada KKB untuk pemilihan kendaraan bermotor lainnya terkontraksi sebesar 52,57% *(yoy),* membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 76,48% *(yoy)*. **(GRAFIK 4.13)**.

Grafik 4.13. Perkembangan Pembiayaan Sektor Rumah Tangga per Jenis Penggunaan

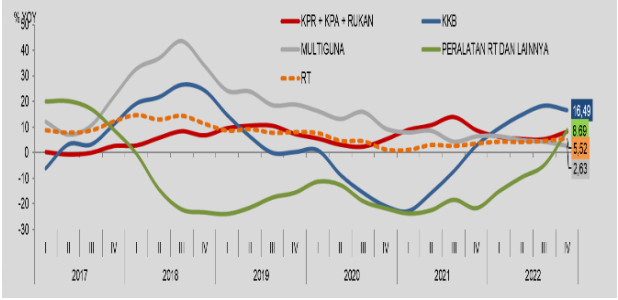

Sumber: LBU Bank Indonesia

Lebih lanjut, kredit rumah tangga pada sub sektor peralatan RT senilai Rp 1,92 trilliun atau tumbuh sebesar 8,69% *(yoy)*. Pertumbuhan ini tercatat lebih baik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 4,70% *(yoy)*. Pertumbuhan tersebut utamanya didorong oleh kredit pemilikan komputer dan alat komunikasi yaitu 36,30% *(yoy)*.

Sedangkan, Kredit rumah tangga pada sub sektor kepemilikan rumah (KPR) tercatat sebesar Rp5,92 triliun atau tumbuh sebesar 8,18% *(yoy)*, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,22% *(yoy)*. Pada triwulan laporan, kredit Ruko/rukan terkontraksi sebesar 15,48% *(yoy)*, lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 9,84% *(yoy)*. Sementara itu, KPR tipe > 70m^2 terkontraksi sebesar 8,70% *(yoy)*, membaik dibandingkan triwulan III 2022 yang tercatat mengalami kontraksi lebih besar yaitu 14,91% *(yoy)*. KPR tipe 21 m^2 terkontraksi sebesar 19,85% *(yoy)*, membaik jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat kontraksi sebesar 21,93% *(yoy)*. Ditengah perlambatan tersebut, KPR tipe 22-70 m^2 masih mencatatkan pertumbuhan 11,67% *(yoy)*, membaik dibandingkan

triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,91% *(yoy)* **(GRAFIK 4.14)**.

Grafik 4.14. Pertumbuhan KPR per Tipe

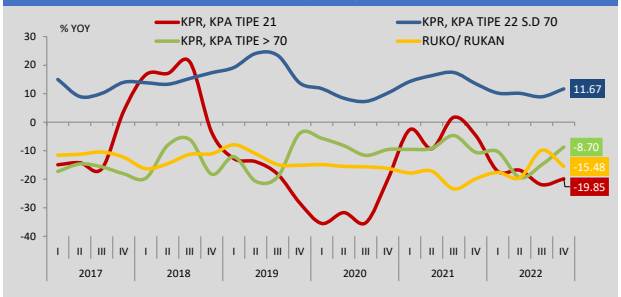

Sumber: LBU Bank Indonesia

Secara umum, risiko di sektor rumah tangga relatif terkendali tercermin dari rasio NPL yang masih terjaga di bawah batas 5% *(gross)*. Saat ini NPL rumah tangga tercatat sebesar 1,55%, membaik bila dibandingkan dengan triwulan III 2022 yaitu 1,66%. Sementara itu, NPL multiguna dan KPR masing-masing sebesar 1,14% dan 1,69%, relatif stabil bila dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 1,12% dan 1,91%. Disisi lain, NPL KKB tercatat 0,97%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 1,34% Resiko NPL yang rendah menunjukkan bahwa kinerja kredit bagi sektor rumah tangga sangat potensial untuk dibiayai dalam rangka mengingkatkan peran intermediasi perbankan. **(GRAFIK 4.15)**.

Grafik 4.15. Perkembangan NPL Sektor Rumah Tangga per Jenis Pengeluaran

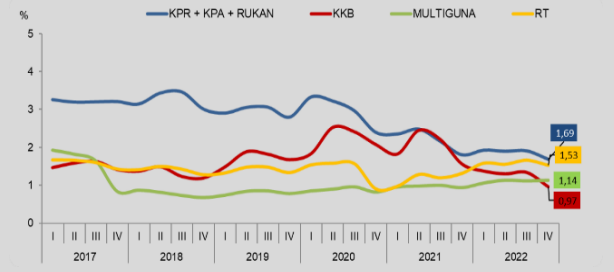

Sumber: LBU Bank Indonesia

4.3 PERKEMBANGAN KREDIT UMKM

Kredit UMKM Jambi pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp20,90 triliun, tumbuh sebesar 17,76% *(yoy)*, tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,61% *(yoy)*. Pertumbuhan kredit UMKM sejalan dengan pertumbuhan total kredit keseluruhan yaitu sebesar 6,50% *(yoy)*, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 yaitu sebesar 6,24% *(yoy)*. **(GRAFIK 4.16).**

Grafik 4.16. Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum Provinsi Jambi

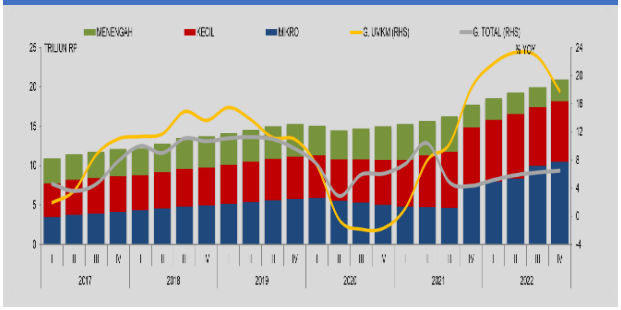

Sumber: LBU Bank Indonesia

Porsi kredit UMKM terhadap total kredit menunjukan tren menurun pada tahun 2020, terutama mulai triwulan II 2020 dan mulai mengalami peningkatan pada triwulan III 2021 serta masih menunjukkan pertumbuhan hingga akhir 2022 **(GRAFIK 4.17)**. Tentunya penurunan pangsa kredit UMKM selama tahun 2020 terutama dipengaruhi oleh kebijakan perbankan dalam menyalurkan kreditnya secara selektif dan lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian *(prudent)* ditengah pandemi COVID-19. Meski demikian, saat ini perbankan mulai kembali memberikan kelonggaran sehingga meningkatkan pangsa kredit UMKM. Hal tersebut terkonfirmasi dengan hasil *liaison* yang dilakukan terhadap responden penyedia jasa keuangan khususnya perbankan. Kontak mengungkapkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi dalam proses penyaluran kredit UMKM yaitu optimalisasi penyaluran kredit dengan tetap memperhatikan kesehatan usaha. Faktor risiko gagal bayar nasabah ketika pandemi lebih besar dibandingkan dengan kondisi nasabah pada kondisi normal. Beberapa faktor penyebab kegagalan pembayaran tersebut diantaranya penurunan omset debitur, penutupan usaha serta faktor kesehatan dari calon debitur yang semakin susah akibat COVID-19 dimana kesehatan nasabah dapat memburuk dalam jangka waktu singkat. Oleh karena itu, faktor kesehatan menjadi pertimbangan para kreditur dalam menentukan kelayakan pemberian kredit. Disamping itu, penularan COVID-19 yang sangat cepat juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi perbankan untuk lebih selektif dalam menentukan calon debitur yang akan dikunjungi untuk penelusuran usaha nasabah. Pada triwulan IV 2022 porsi kredit UMKM di Provinsi Jambi menjadi

44,22%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 42,93%, diatas rata-rata 3 tahun terakhir sebesar 38,17%. Tentunya perbaikan penyaluran kredit dipengaruhi oleh meningkatkan harga komoditas global serta sentimen positif masyarakat dipengaruhi kebijakan penghapusan PPKM.

Grafik 4.17. Pangsa Kredit Bank Umum Menurut Jenis Kredit UMKM

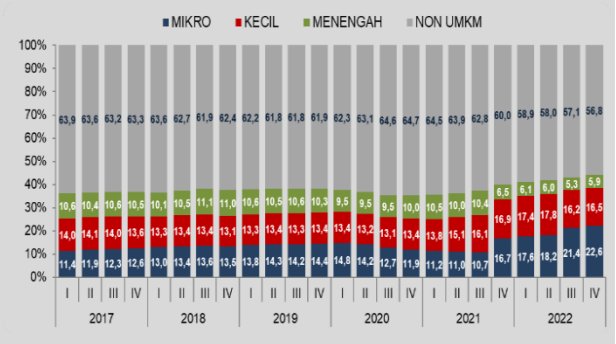

Sumber: LBU Bank Indonesia

Sementara itu, menurut jenis penggunaannya, kredit UMKM mayoritas digunakan untuk mendukung kegiatan operasional berupa modal kerja sebesar Rp12,25 triliun (pangsa 58,63% terhadap total kredit UMKM) dan sisanya digunakan untuk keperluan investasi sebesar Rp8,64 triliun (pangsa 41,37% terhadap total kredit UMKM). Distribusi penggunaan kredit tersebut menunjukan bahwa pelaku UMKM di Provinsi Jambi masih mengandalkan kredit untuk menjaga perputaran usaha. Namun demikian, rencana pengembangan usaha atau ekspansi bisnis relatif mulai membaik tercermin pada peningkatan pangsa kredit investasi **(GRAFIK 4.18)**.

Grafik 4. 18. Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan

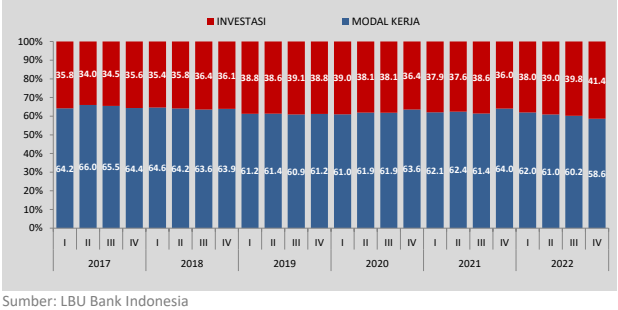

Sumber: LBU Bank Indonesia

Kredit UMKM untuk modal kerja pada triwulan IV 2022 sebesar Rp 12,25 trilliun atau tumbuh 7,80% *(yoy)*, tumbuh melambat dibandingkan triwulan III 2022 yaitu sebesar 20,09% *(yoy)*. Sementara kredit investasi tercatat sebesar Rp 8,64 trilliun atau tumbuh 35,50% *(yoy),* lebih rendah dari triwulan III 2022 yaitu 26,62% *(yoy)*. Secara sektoral, pada triwulan III 2022 kredit UMKM sebagian besar disalurkan untuk sektor perdagangan (pangsa 39,61%) dan sektor pertanian (pangsa 46,89%). Kondisi tersebut sejalan dengan struktur UMKM di Provinsi Jambi yang mayoritas berada di sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor pertanian **(GRAFIK 4.19)**.

Grafik 4. 19. Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi

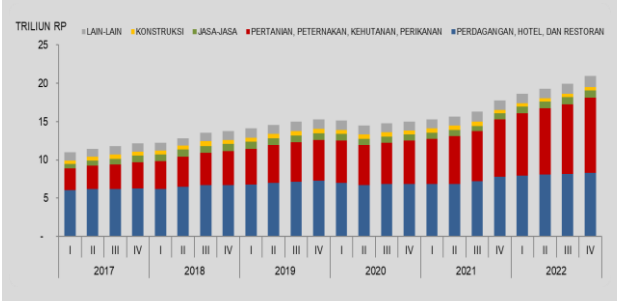

Sumber: LBU Bank Indonesia

Kredit UMKM sektor perdagangan, hotel dan eceran pada triwulan IV 2022 sebesar Rp8,28 triliun, didominasi oleh kredit sub sektor perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi sub sektor makanan, minuman dan tembakau sebesar Rp1,46 triliun (pangsa 19,94%), sub sektor perdagangan kelapa dan kelapa sawit sebesar Rp 0,62triliun (pangsa 8,56%).

Sementara, kredit UMKM sektor pertanian pada triwulan IV 2022 sebesar Rp9,67 triliun mayoritas disalurkan untuk sub sektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp7,78 triliun (pangsa 40%) dan sub sektor perkebunan karet dan penghasil getah lainnya sebesar Rp0,88 triliun (pangsa 2,66%).

Terdapat perbaikan risiko kredit yang tercermin dari rasio NPL UMKM terpantau menurun menjadi sebesar 2,48% *(gross)* pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,73% *(gross)*. Risiko kredit UMKM tersebut cukup baik ditengah momentum pertumbuhan ekonomi pasca pandemic COVID-19. Hal ini tidak terlepas dari insentif dan stimulus yang diberikan Pemerintah dan otoritas terkait terhadap pelaku UMKM di masa pandemi serta kehati-hatian yang diterapkan oleh perbankan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Walaupun risiko tersebut tergolong baik, namun masih diperlukan langkah-langkah lanjutan untuk menjaga risiko kredit senantiasa berada pada ambang batas aman ditengah pemulihan ekonomi. Perbaikan NPL UMKM sejalan dengan

perbaikan NPL kredit secara umum baik kredit investasi, kredit konsumsi dan kredit modal kerja (GRAFIK 4.20).

Apabila dilihat secara sektoral, perbaikan NPL UMKM pada triwulan laporan didorong oleh penurunan rasio NPL pada sektor konstruksi, keuangan dan real estate dan sektor UMKM. NPL pada sektor konstruksi tercatat sebesar 18,90% pada triwulan IV, menurun dari 21,95% pada triwulan III. Sementara itu, NPL sektor keuangan dan real estate tercatat 1,69%, membaik dari triwulan sebelumnya sebesar 3,39%. Selanjutnya, NPL sektor UMKM sebesar 2,48% pada triwulan IV 2022, lebih baik dibandingkan triwulan III 2022 sebesar 2,73%. (GRAFIK 4.21).

Grafik 4. 20. NPL UMKM Provinsi Jambi

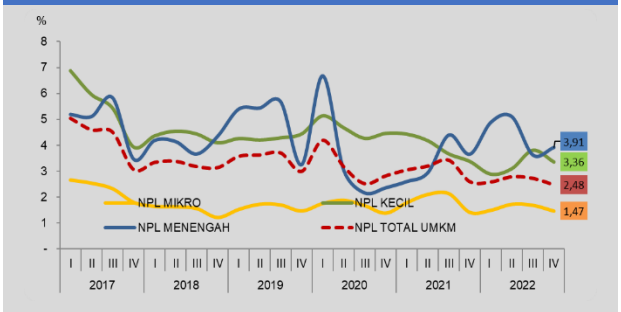

Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4. 21. NPL UMKM Menurut Sektor Ekonomi

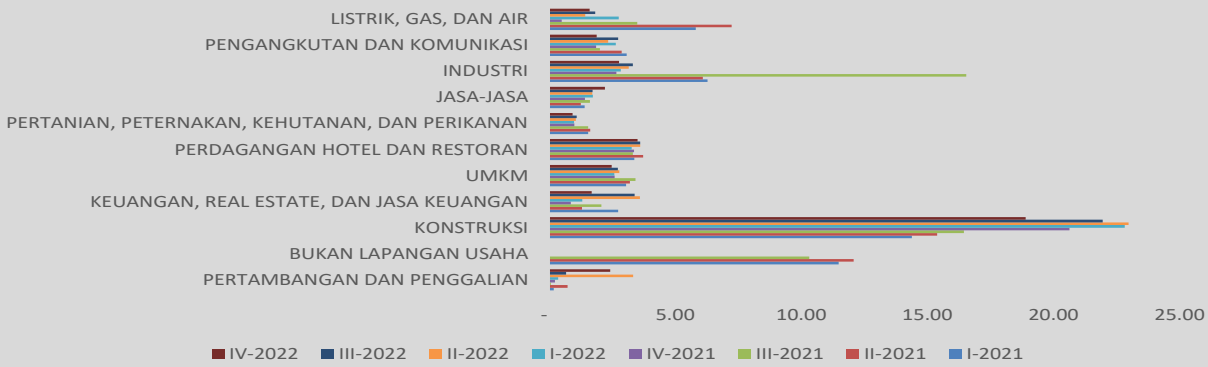

Sumber: LBU Bank Indonesia

4.4 PERKEMBANGAN BANK UMUM

4.4.1 Perkembangan Aset Bank

Aset perbankan pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp61,97 triliun atau tumbuh sebesar 6,71% *(yoy)*, tumbuh melambat dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh 8,92% *(yoy)*. (GRAFIK 4.22).

Grafik 4. 22. Perkembangan Aset Bank Umum

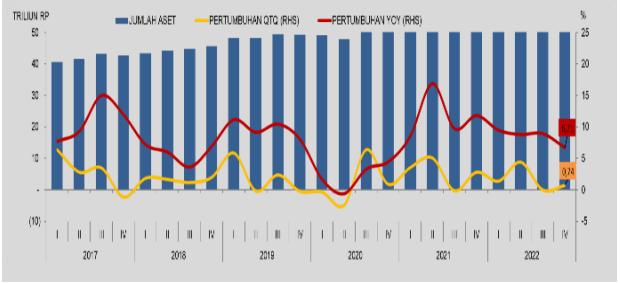

Sumber: LBU Bank Indonesia

Andil terbesar pada Aset perbankan masing-masing sebesar 25,45%, 26,95% dan 48,27% untuk aset bank swasta nasional, bank pemerintah daerah dan bank persero. Pertumbuhan aset perbankan didorong oleh pertumbuhan aset pada kelompok bank persero. Aset bank persero tumbuh sebesar 8,43% *(yoy)* pada triwulan IV 2022, tumbuh melambat dari triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 9,44% *(yoy)*. Selain itu, aset bank swasta nasional juga tercatat tumbuh pada triwulan laporan sebesar 11,44% *(yoy)*, lebih baik dari triwulan sebelumnya sebesar 8,95% *(yoy)*. Lebih lanjut, aset bank pemerintah daerah pada triwulan IV sebesar 0,08%, tumbuh melambat dibandingkan triwulan III sebesar 8,35% *(yoy)*.

Pertumbuhan aset perbankan didorong oleh pertumbuhan aset pada kelompok bank persero. Aset bank persero tumbuh sebesar 8,43% *(yoy)* pada triwulan IV 2022, tumbuh melambat dari triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 9,44% *(yoy)*. Selain itu, aset bank swasta nasional juga tercatat tumbuh pada triwulan laporan sebesar 11,44% *(yoy)*, lebih baik dari triwulan sebelumnya sebesar 8,95% *(yoy)*. Lebih lanjut, aset bank pemerintah daerah pada triwulan IV sebesar 0,08%, tumbuh melambat dibandingkan triwulan III sebesar 8,35% *(yoy)*.

Grafik 4. 23. Return on Asset

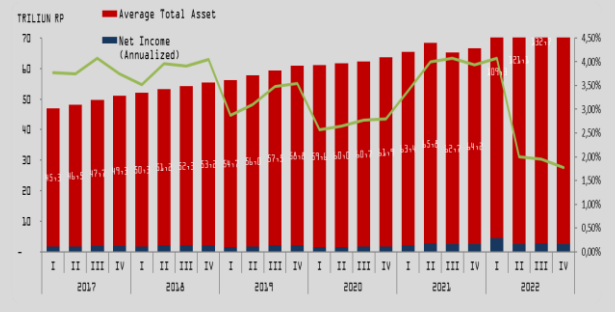

Sumber: LBU Bank Indonesia

Dari sisi pendapatan, Return on Assets (ROA) perbankan di Provinsi Jambi yang menggambarkan kemampuan perbankan untuk mencetak laba dari asset. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 1,77%, (*annualized*) tumbuh melambat dibandingkan triwulan III 2022 sebesar 1,95% (*annualized*). Sedangkan average total asset perbankan tercatat meningkat dari 132,74 T menjadi 144,37 T pada triwulan laporan. **(GRAFIK 4.23).**

Meski demikian, disisi lain kinerja perbankan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tercatat lebih besar dibandingkan triwulan sebelumnya. Tercatat BOPO pada triwulan IV 2022 sebesar 80,77% *(yoy)*, lebih besar dibandingkan triwulan III sebesar 79,85% *(yoy)*. Hal ini mencerminkan pendapatan operasional meningkat lebih rendah dibandingkan peningkatan biaya operasional. Semakin rendah nilai rasio BOPO, maka semakin baik Kinerja perusahaan. **(GRAFIK 4.24)**

Grafik 4. 24. BOPO

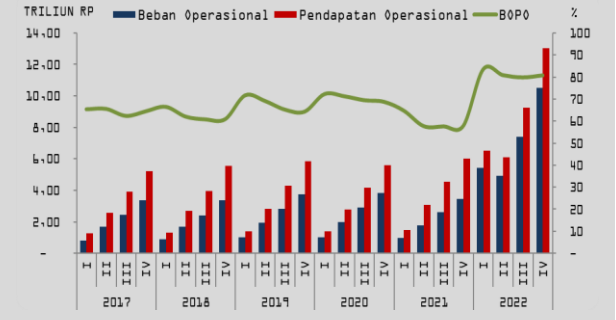

Sumber: LBU Bank Indonesia

4.4.2 Perkembangan Dana Masyarakat

Pada triwulan laporan, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan mencapai Rp44,40 triliun atau tumbuh sebesar 3,81% *(yoy)*, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,68% *(yoy)*. Pertumbuhan DPK yang melambat terjadi pada seluruh jenis DPK utamanya disebabkan oleh deposito yang terkontraksi 4,60%, membaik dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya yaitu 15,70% *(yoy).*

Pada triwulan IV 2022, jumlah giro tercatat sebesar Rp7,82 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 7,94% *(yoy)*, terdeselarasi dari triwulan III yang tercatat 15,43% *(yoy)*. Sementara itu, jumlah tabungan tercatat sebesar Rp25,19 triliun atau tumbuh sebesar 6,80% *(yoy)*, tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,12% *(yoy)*. Selanjutnya, jumlah deposito tercatat sebesar Rp11,38 triliun atau terkontraksi 4,60% *(yoy)*, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi hingga 15,70% *(yoy)*.

Berdasarkan pangsanya, dana pihak ketiga pada triwulan laporan masih didominasi tabungan sebesar 56,75%, deposito sebesar 25,64%, serta giro sebesar 17,61%. Komposisi DPK ini cenderung tidak mengalami perubahan sepanjang 5 (lima) tahun terakhir. **(GRAFIK 4.25).**

Grafik 4. 25. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum

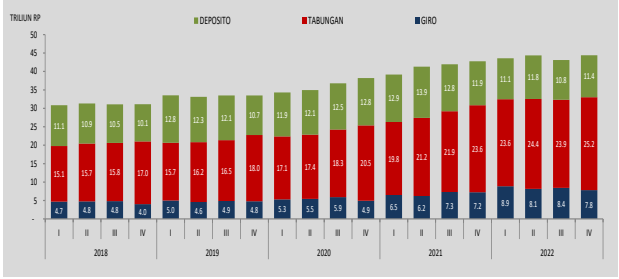

Sumber: LBU Bank Indonesia

Berdasarkan kelompok bank, penghimpunan DPK mayoritas berasal dari bank pemerintah. DPK bank pemerintah mencapai Rp30,39 triliun (pangsa 68,47%), diikuti oleh bank swasta nasional Rp10,17 triliun (pangsa 22,93%), dan bank syariah Rp3,82 triliun (pangsa 8,61%) **(TABEL 4.1)**.

Secara umum DPK perbankan di Provinsi Jambi terpantau sebesar Rp 44,4 trilliun atau tumbuh 3,81% *(yoy)* pada triwulan IV 2022, tumbuh dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 2,68% *(yoy).*

Meski demikian, pertumbuhan DPK didorong oleh masih lemahnya keinginan masyarakat untuk melakukan konsumsi ditengah pandemi COVID-19

yang belum sepenuhnya pulih serta preferensi untuk menyiapkan dana dengan motif berjaga-jaga ditengah perlambatan ekonomi serta berkurangnya kesempatan kerja. Peningkatan DPK terbesar terjadi pada bank syariah. Simpanan DPK bank syariah tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 43,54% *(yoy)*, terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 34,83% *(yoy)*. Sejalan dengan hal tersebut, DPK bank swasta tercatat tumbuh sebesar 8,35% *(yoy),* tumbuh membaik dibandingkan triuwlan sebelumnya yaitu 5,84% *(yoy).* Sementara itu, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh kontraksi pada DPK bank pemerintah sebesar 1,02% *(yoy),* lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 0,94% *(yoy).*

Kontraksi DPK bank pemerintah dipicu oleh kontraksi pada simpanan berjangka sebesar 16,85% *(yoy)* pada triwulan laporan, membaik dibandingkan triwulan III 2022 yang terkontraksi 23,39% *(yoy)*. Meski demikian, tabungan tercatat tumbuh sebesar 5,15% *(yoy)*, melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 6,78% *(yoy)*. Lebih lanjut, giro pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 3,35% *(yoy)*, tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 12,33% *(yoy)*.

Pertumbuhan DPK bank swasta nasional didorong oleh pertumbuhan giro pada triwulan IV sebesar 29,23% *(yoy),* lebih baik dibandingkan triwulan III sebesar 25,59% *(yoy).* Sementara tabungan tercatat tumbuh sebesar 4,77% *(yoy),* melambat dibandingkan triwulan lalu yaitu 9,65%*(yoy)*. Lebih lanjut, simpanan berjangka tumbuh sebesar 7,59% *(yoy),* lebih baik dibandingkan triwulan III yang tercatat kontraksi sebesar 7,10% *(yoy).*

Lebih lanjut, pertumbuhan DPK pada bank syariah didorong pertumbuhan pada giro, tabungan dan simpanan berjangka masing-masing sebesar 31,99% *(yoy),* 31,00% *(yoy)* dan 69,96% *(yoy).*

Berdasarkan golongan pemilik, pertumbuhan DPK utamanya dipicu oleh peningkatan penghimpunan dana dari BUMD dan pemerintah daerah. Namun, golongan pemilik perseorangan memiliki andil terbesar.

DPK perseorangan masih memberikan andil terbesar yaitu 71,51%. DPK perseorangan terpantau tumbuh dari sebesar 7,08% *(yoy)* pada triwulan IV 2022, tumbuh melambat dari triwulan sebelumnya yaitu 5,86% *(yoy)*. Meningkatnya penghimpunan DPK perseorangan sejalan dengan tingginya ketidakpastian ekonomi global. Meski demikian, perlambatan pertumbuhan menjadi sinyal perbaikan dan peningkatan konsumsi masyarat seiring dengan berbagai relaksasi mobilitas.

Golongan nasabah lain yang turut mendorong pertumbuhan DPK berasal dari nasabah kelompok Bukan Lembaga Keuangan dengan andil sebesar 17,21%. Kelompok tersebut tumbuh sebesar 17,10% *(yoy)*, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terpantau sebesar 3,63% *(yoy)*. Adapun kelompok lain yang memiliki andil besar dalam pertumbuhan DPK adalah Pemerintah Daerah (Pemda) dengan andil sebesar 5,75%. Pertumbuhan DPK pada golongan Pemda tercatat sebesar 9,80% *(yoy),* tumbuh melambat dari triwulan II sebesar 33,39% *(yoy).*

Disisi lain, pertumbuhan DPK yang lebih tinggi terhambat oleh kontraksi pada sektor swasta lainnya sebesar 99,45% *(yoy)* pada triwulan laporan, lebih dalam dibandingkan triwulan III 2022 yang terkontraksi sebesar 92,145% *(yoy).* Sementara itu, golongan Badan dan Lembaga Pemerintah mencatatkan kontraksi hingga 84,64% *(yoy),* lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 56,45% *(yoy)*

Sejumlah kelompok lain yang tercatat kontraksi diantaranya BUMN atau Pemerintah Campuran, Lembaga Keuangan Non-Bank, Pemerintah Pusat masing-masing kontraksi sebesar 82,01% *(yoy),* 28,52% *(yoy)* dan 9,77% *(yoy)* **(TABEL 4.2)**.

Berdasarkan lokasi kab/kota, pertumbuhan DPK dengan andil terbesar berada di Kota Jambi.

Daerah dengan pertumbuhan paling tinggi adalah Kota Jambi dengan pertumbuhan sebesar 12,67% *(yoy)*, lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 10,74% *(yoy)*. Sementara itu, pertumbuhan DPK terendah terjadi di Kab. Sarolangun yang terkontraksi sebesar 48,38% *(yoy)*, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 48,92% *(yoy)*. Berdasarkan pangsanya, komposisi DPK Provinsi Jambi masih didominasi Kota Jambi (pangsa 71,69%), diikuti Kabupaten Tanjung Jabung Barat (pangsa 5,87%) dan Kab. Bungo (pangsa 5,06%) **(TABEL 4.3)**.

4.4.3 Perkembangan Kredit/Penyaluran Dana

Penyaluran kredit oleh bank umum pada triwulan IV 2022 sebesar Rp47,27 triliun, tumbuh sebesar 6,50% *(yoy)*, dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2022 sebesar Rp46,42 triliun yang tumbuh sebesar 6,24% *(yoy)*.

Berdasarkan kelompok bank, pertumbuhan penyaluran kredit terjadi pada kelompok bank pemerintah dan bank syariah. Pada triwulan laporan, posisi kredit yang disalurkan bank pemerintah sebesar Rp37,20 triliun, tumbuh sebesar 6,90% *(yoy)*, tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,49% *(yoy)*. Penyaluran kredit bank syariah pada triwulan laporan sebesar Rp4,43 triliun, tumbuh 21,52% *(yoy)* lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 19,25% *(yoy)*. Sementara, bank swasta menyalurkan kredit sebesar Rp5,63 triliun atau terkontraksi sebesar 5,04% *(yoy)*, lebih bak dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 8,43% *(yoy)* **(TABEL 4.4.)**.

Menurut jenis penggunaan, kredit terbesar adalah kredit konsumsi dengan pangsa sebesar 43,09%, diikuti oleh kredit modal kerja (31,86%) dan kredit investasi (25,06%). Pertumbuhan penyaluran kredit didorong oleh peningkatan pada seluruh jenis penggunaan kredit. Pada triwulan III 2022 kredit konsumsi tercatat sebesar Rp20,36 triliun atau tumbuh sebesar 3,77% *(yoy)*, tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,24% *(yoy)*.

Kredit modal kerja pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp15,05 triliun atau tumbuh sebesar 4,13% *(yoy)*, melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,85% *(yoy)*. Pertumbuhan kredit modal kerja utamanya didorong oleh meningkatnya kredit utamanya pada sektor pertanian dan sektor perdagangan hotel dan restoran yang memiliki andil sebesar 27,59% dan 20,24%. Pada triwulan IV 2022 tercatat peningkatan kredit pada sektor tersebut masing-masing sebesar 23,18% *(yoy)* dan 7,08% *(yoy)*.

Tabel 4.1. Penghimpunan Dana Bank Umum Provinsi Jambi (Rp Juta)

URAIAN	2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
BANK KONVENSIONAL	**36.501.057,88**	**38.666.516,52**	**39.480.451,49**	**40.108.253,33**	**40.551.237,94**	**41.157.761,06**	**39.739.974,09**	**40.578.290,22**
BANK PEMERINTAH	27.730.949,72	29.491.105,83	30.190.131,99	30.713.372,83	30.952.195,71	31.378.744,53	29.906.851,09	30.399.076,71
1. GIRO	5.436.589,03	5.090.401,94	6.085.171,71	5.984.942,17	7.478.164,22	6.700.688,10	6.835.422,86	6.185.413,65
2. TABUNGAN	13.759.551,90	14.734.509,17	15.263.371,14	16.600.587,47	16.316.032,47	16.778.790,34	16.298.278,67	17.455.141,25
3. SIMPANAN BERJANGKA	8.534.808,79	9.666.194,72	8.841.589,13	8.127.843,18	7.157.999,02	7.899.266,09	6.773.149,57	6.758.521,81
BANK SWASTA NASIONAL	8.770.108,16	9.175.410,69	9.290.319,51	9.394.880,50	9.599.042,23	9.779.016,52	9.833.123,00	10.179.213,51
1. GIRO	864.438,28	931.290,60	1.005.696,08	1.033.281,49	1.128.757,78	1.171.286,81	1.263.019,51	1.335.357,34
2. TABUNGAN	4.775.889,14	5.095.634,30	5.216.562,70	5.408.429,76	5.575.536,72	5.788.218,21	5.720.005,58	5.666.442,89
3. SIMPANAN BERJANGKA	3.129.780,74	3.148.485,79	3.068.060,73	2.953.169,25	2.894.747,73	2.819.511,50	2.850.097,91	3.177.413,29
BANK SYARIAH	**2.669.618,43**	**2.653.350,21**	**2.484.126,32**	**2.662.703,17**	**3.042.967,32**	**3.202.941,18**	**3.349.377,80**	**3.822.069,51**
1. GIRO	184.737,82	199.964,18	216.592,86	227.283,35	254.563,79	272.603,33	336.885,60	299.994,79
2. TABUNGAN	1.270.831,29	1.352.504,39	1.424.293,16	1.583.876,79	1.710.149,43	1.820.141,38	1.884.533,35	2.074.806,45
3. SIMPANAN BERJANGKA	1.214.049,31	1.100.881,64	843.240,30	851.543,03	1.078.254,10	1.110.196,47	1.127.958,86	1.447.268,26
JUMLAH	39.170.676,31	41.319.866,73	41.964.577,81	42.770.956,49	43.594.205,26	44.360.702,24	43.089.351,89	44.400.359,73
1. GIRO	6.485.765,13	6.221.656,72	7.307.460,65	7.245.507,01	8.861.485,80	8.144.578,25	8.435.327,97	7.820.765,79
2. TABUNGAN	19.806.272,33	21.182.647,86	21.904.227,00	23.592.894,02	23.601.718,62	24.387.149,93	23.902.817,59	25.196.390,58
3. SIMPANAN BERJANGKA	12.878.638,84	13.915.562,15	12.752.890,16	11.932.555,46	11.131.000,85	11.828.974,06	10.751.206,34	11.383.203,36

Sumber: LBU Bank Indonesia

Tabel 4.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Golongan Pemilik (Rp Juta)

NO	GOLONGAN PEMILIK	2021				2022				2022				2022				2022			
		I	II	III	IV	I				II				III				IV			
		NOMINAL	NOMINAL	NOMINAL	NOMINAL	NOMINAL	SHARE	YOY	ANDIL	NOMINAL	SHARE	YOY	ANDIL	NOMINAL	SHARE	YOY	ANDIL	NOMINAL	SHARE	YOY	ANDIL
PENDUDUK / RESIDENTS		**39.160.306**	**41.312.052**	**41.951.495**	**42.763.421**	**43.581.112**	**99,97%**	**11,29%**	**11,29%**	**44.350.058**	**99,98%**	**7,35%**	**7,35%**	**43.078.608**	**99,98%**	**2,69%**	**2,69%**	**44.390.071**	**99,98%**	**3,80%**	**3,80%**
1.	Pemerintah Pusat	866.277	1.121.690	912.630	519.939	573.834	1,32%	-33,76%	-0,75%	551.153	1,24%	-50,86%	-1,38%	514.956	1,20%	-43,57%	-0,95%	469.127	1,06%	-9,77%	-0,12%
2.	Pemerintah Daerah (Pemda)	3.124.660	2.934.338	3.361.508	2.314.301	4.339.156	9,95%	38,87%	3,10%	4.591.624	10,35%	56,48%	4,01%	4.483.874	10,41%	33,39%	2,67%	1.101	0,00%	-99,95%	-5,41%
3.	Badan Dan Lembaga Pemerintah	65.550	45.697	8.931	7.260	3.683	0,01%	-94,38%	-0,16%	3.909	0,01%	-91,45%	-0,10%	3.889	0,01%	-56,45%	-0,01%	2.541.039	5,72%	34901,25%	5,92%
4.	BUMN Atau Pemerintah Campuran	1.079.325	954.655	802.239	1.323.408	983.344	2,26%	-8,89%	-0,25%	330.830	0,75%	-65,35%	-1,51%	374.623	0,87%	-53,30%	-1,02%	238.125	0,54%	-82,01%	-2,54%
5.	BUMD	276.194	307.086	184.479	169.827	180.055	0,41%	-34,81%	-0,25%	184.467	0,42%	-39,93%	-0,30%	238.303	0,55%	29,18%	0,13%	191.315	0,43%	12,65%	0,05%
6.	Lembaga Keuangan Non Bank	1.464.452	2.070.534	2.075.442	2.174.250	1.712.309	3,93%	16,92%	0,63%	1.624.142	3,66%	-21,56%	-1,08%	1.061.245	2,46%	-48,87%	-2,42%	1.554.225	3,50%	-28,52%	-1,45%
7.	Bukan Lembaga Keuangan	6.009.765	6.239.389	6.345.561	6.527.317	6.310.868	14,48%	5,01%	0,77%	6.819.909	15,37%	9,30%	1,40%	6.575.811	15,26%	3,63%	0,55%	7.643.225	17,21%	17,10%	2,61%
8.	Sektor Swasta Lainnya	104.196	85.349	92.385	76.001	6.442	0,01%	-93,82%	-0,25%	4.825	0,01%	-94,35%	-0,19%	7.264	0,02%	-92,14%	-0,20%	418	0,00%	-99,45%	-0,18%
9.	Perseorangan	26.169.888	27.553.313	28.168.320	29.651.118	29.471.420	67,60%	12,62%	8,43%	30.239.200	68,17%	9,75%	6,50%	29.818.644	69,20%	5,86%	3,93%	31.751.497	71,51%	7,08%	4,91%
BUKAN PENDUDUK / NON RESIDENTS		**10.370**	**7.815**	**13.083**	**7.535**	**13.093**	**0,04%**	**26,26%**	**0,01%**	**10.644**	**0,03%**	**36,20%**	**0,01%**	**10.744**	**0,03%**	**-17,87%**	**-0,01%**	**10.289**	**0,03%**	**36,54%**	**0,01%**
PENDUDUK DAN BUKAN PENDUDUK		39.170.676	41.319.867	41.964.578	42.770.956	43.594.205	100,01%	11,29%	11,29%	44.360.702	100,01%	7,36%	7,36%	43.089.352	100,01%	2,68%	2,68%	44.400.360	100,01%	3,81%	3,81%

Sumber: LBU Bank Indonesia

Tabel 4.3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Lokasi Bank (Rp Juta)

NO	KOTA/KABUPATEN	2021				2022													
		I	II	III	IV	I				II				III				IV			
		NOMINAL	NOMINAL	NOMINAL	NOMINAL	NOMINAL	SHARE	PERTUMBUHAN	YOY (%)	NOMINAL	SHARE	PERTUMBUHAN	YOY (%)	NOMINAL	SHARE	PERTUMBUHAN	YOY (%)	NOMINAL	SHARE	PERTUMBUHAN	YOY (%)
1.	Kota Jambi	24.624.880	25.582.179	26.867.126	28.251.021	29.749.573	68,24	5.124.693	20,81	30.719.249	69,25	5.137.070	20,08	29.751.640	69,05	2.884.514	10,74	31.831.421	71,69	3.580.399	12,67
2.	Kab. Kerinci	2.361.659	2.599.943	2.514.451	2.434.472	2.312.735	5,31	(48.923)	(2,07)	2.273.501	5,13	(326.442)	(12,56)	2.167.703	5,03	(346.748)	(13,79)	2.121.307	4,78	(313.165)	(12,86)
3.	Kab. Bungo	2.270.850	2.502.513	2.522.658	2.369.122	2.417.092	5,54	146.242	6,44	2.417.083	5,45	(85.430)	(3,41)	2.355.620	5,47	(167.037)	(6,62)	2.245.521	5,06	(123.602)	(5,22)
4.	Tanjung Jabung Ba	2.515.427	2.576.355	2.502.261	2.592.953	2.765.120	6,34	249.692	9,93	2.707.313	6,10	130.957	5,08	2.635.048	6,12	132.787	5,31	2.604.598	5,87	11.645	0,45
5.	Kab. Merangin	1.743.382	2.048.887	1.896.600	1.712.453	1.707.087	3,92	(36.295)	(2,08)	1.698.133	3,83	(350.754)	(17,12)	1.633.639	3,79	(262.960)	(13,86)	1.601.016	3,61	(111.437)	(6,51)
6.	Kab. Batanghari	1.455.082	1.639.947	1.562.424	1.652.464	1.646.652	3,78	191.570	13,17	1.659.022	3,74	19.076	1,16	1.618.469	3,76	56.045	3,59	1.557.482	3,51	(94.982)	(5,75)
7.	Kab. Sarolangun	1.822.096	1.867.898	1.780.013	1.754.275	978.550	2,24	(843.546)	(46,30)	901.962	2,03	(965.936)	(51,71)	909.201	2,11	(870.812)	(48,92)	905.490	2,04	(848.785)	(48,38)
8.	Kab. Tebo	1.335.221	1.374.069	1.207.208	1.176.817	1.091.120	2,50	(244.101)	(18,28)	1.101.846	2,48	(272.223)	(19,81)	1.100.006	2,55	(107.202)	(8,88)	935.919	2,11	(240.898)	(20,47)
9.	Tanjung Jabung Tir	539.604	575.418	553.229	392.205	471.167	1,08	(68.437)	(12,68)	485.263	1,09	(90.155)	(15,67)	496.654	1,15	(56.575)	(10,23)	328.236	0,74	(63.969)	(16,31)
10	Kab. Muaro Jambi	502.474	552.658	558.608	435.175	455.108	1	(47.366)	(9,43)	397.330	0,90	(155.328)	(28,11)	421.371	0,98	(137.237)	(24,57)	269.371	0,61	(165.804)	(38,10)
	JUMLAH	39.170.676	41.319.867	41.964.578	42.770.956	43.594.205	100,00	5.391.529,5	14,11	44.360.702	100,00	5.190.025,9	13,25	43.089.352	100,00	1.769.485,2	4,28	44.400.360	100,00	2.435.781,9	5,80

Sumber: LBU Bank Indonesia

Tabel 4.4. Perkembangan Kredit Bank Umum Provinsi Jambi (Rp Juta)

URAIAN	2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kelompok Bank	**43.029.989**	**43.387.578**	**43.703.259**	**44.384.752**	**45.251.650**	**45.932.075**	**46.428.422**	**47.271.816**
1. Bank Pemerintah	33.150.790	33.635.746	34.113.632	34.803.571	35.509.428	36.151.873	36.667.627	37.203.874
2. Bank Swasta*)	6.340.023	6.192.348	6.051.692	5.929.779	5.854.038	5.768.870	5.541.836	5.630.636
3. Bank Syariah	3.539.175	3.559.484	3.537.935	3.651.402	3.888.183	4.011.332	4.218.959	4.437.306
Jenis Penggunaan	**43.029.989**	**43.387.578**	**43.703.259**	**44.384.752**	**45.251.650**	**45.932.075**	**46.428.422**	**47.271.816**
1. Modal Kerja	13.893.018	14.047.305	14.131.178	14.460.930	14.541.573	15.068.075	14.957.278	15.058.468
2. Investasi	10.105.320	10.189.368	10.181.117	10.295.930	10.939.201	11.084.996	11.452.231	11.845.976
3. Konsumsi	19.031.650	19.150.905	19.390.963	19.627.892	19.770.876	19.779.005	20.018.912	20.367.372
Sektor Ekonomi	**43.029.989**	**43.387.578**	**43.703.259**	**44.384.752**	**45.251.650**	**45.932.075**	**46.428.422**	**47.271.816**
1. Pertanian Peternakan Kehutanan dan Perikanan	9.606.679	9.914.663	10.207.453	10.586.234	11.242.393	12.266.039	12.595.837	13.040.023
2. Pertambangan dan Penggalian	165.478	172.749	176.473	145.307	140.468	155.185	151.402	162.840
3. Industri	2.565.250	2.489.930	2.359.138	2.451.909	2.239.994	1.461.918	1.221.847	1.348.665
4. LGA	13.984	21.351	22.403	13.501	12.336	23.447	18.056	20.137
5. Konstruksi	1.179.938	1.154.056	1.038.412	917.466	917.041	911.971	840.418	879.484
6. Perdagangan Hotel dan Restoran	8.567.445	8.654.003	8.834.957	8.933.756	9.244.381	9.384.394	9.476.913	9.566.159
7. Pengangkutan dan Komunikasi	315.610	303.037	315.403	286.340	269.106	512.965	589.522	287.001
8. Keuangan,Real estate dan Jasa Perusahaan	512.640	491.813	439.150	459.347	494.460	496.267	546.681	554.125
9. Jasa-jasa	1.060.822	1.025.012	908.897	962.752	920.596	940.884	968.832	1.046.011
10. Bukan Lapangan Usaha	19.042.143	19.160.964	19.400.972	19.628.141	19.770.876	19.779.005	20.018.912	20.367.372

Sumber: LBU Bank Indonesia

Pertumbuhan paling tinggi oleh sektor listrik, gas dan air (LGA) yang tercatat terakselerasi sebesar 49,15% *(yoy)*,meningkat dibandingkan triwulan III 2022 yang terkontraksi sebesar 19,40% *(yoy)*.

Selanjutnya, kredit investasi pada triwulan IV 2022 mencapai Rp11,84 triliun, tumbuh sebesar 15,05% *(yoy)*, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,49% *(yoy)*. Hal ini sejalan dengan hasil liaison pada triwulan IV 2022 bahwa tingkat investasi masih tumbuh positif dan stabil dibandingkan triuwlan sebelumnya. Hal tersebut tercermin pada *likert scale* investasi yang tercatat sebesar 0,50. *Likert scale* investasi yang terpantau positif tersebut didorong oleh realisasi investasi yang dilakukan oleh kontak untuk menjaga kuantitas dan kualitas produksinya, serta mendorong tingkat penjualan perusahaan. Pergerakan investasi pada triwulan IV 2022 terpantau sejalan dengan hasil SKDU yang dilaksanakan oleh KPwBI Provinsi Jambi.

Berdasarkan sektor ekonomi, alokasi kredit terbesar adalah sektor bukan lapangan usaha, sektor pertanian, serta sektor perdagangan**.** Pada triwulan laporan, sektor bukan lapangan usaha memiliki pangsa 43,09%, diikuti dengan pangsa sektor pertanian sebesar 27,59%, sektor perdagangan sebesar 20,24%, serta sektor industri pengolahan sebesar 2,85%. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian hanya memiliki pangsa 0,34% dari total kredit yang disalurkan **(TABEL 4.4.)**.

Menurut sektor ekonomi, pertumbuhan kredit sebesar Rp47,27 trilliun atau tumbuh sebesar 6,50% *(yoy)* merupakan andil dari pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor pertambangan sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan, sektor Pertanian yang masing-masing tercatat tumbuh sebesar 86,91% *(yoy)*, 57,30% *(yoy)*, 24,21% *(yoy)* dan 23,40% *(yoy)*.

Disisi lain, sektor-sektor yang terkontraksi diantaranya sektor industri, sektor listrik dan sektor konstruksi masing-masing sebesar 45,00% *(yoy)* dan 4,14% *(yoy).*

Kredit sektor pertanian pada triwulan IV 2022 sebesar Rp13,04 triliun atau tumbuh sebesar 23,18% *(yoy)*, melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 23,40% *(yoy)*. Kredit pertanian didominasi oleh kredit subsektor perkebunan kelapa sawit dan kredit perkebunan karet.

Sektor berikutnya yang memiliki andil besar terhadap penyaluran kredit pada triwulan IV 2022 adalah sektor perdagangan sebesar Rp9,56 triliun atau tumbuh 7,08% *(yoy)*, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,27% *(yoy)*. Kredit sektor bukan lapangan usaha didominasi kredit multiguna lainnya dan kepemilikan rumah tinggal tipe 22 sampai dengan 70.

Sementara itu, kredit pada sektor keuangan, sektor pengakutan dan komunikasi, serta sektor konstruksi masing-masing sebesar Rp554,12 miliar (tumbuh 20,63%), Rp287 miliar (tumbuh melambat 0,23%), dan Rp879,48 miliar (terkontraksi 4,14%).

Kota/Kabupaten dengan tingkat intermediasi keuangan yang paling baik adalah Kab Muaro Jambi, Kota Jambi dan Kab Tanjung Jabung Timur

Kab. Muaro Jambi memiliki rasio jumlah rekening kredit terhadap jumlah penduduk tertinggi. Secara rata-rata, setiap penduduk memiliki 2,13 rekening kredit. Berikutnya disusul oleh Kota Jambi yang memiliki rasio 1,71.

Peran Intermediasi Perbankan dan Kondisi *Non-Performing Loans* (*NPL*) *gross* Bank Umum di Provinsi Jambi

Loan to Deposits Ratio (LDR)[4] pada triwulan laporan mengalami peningkatan sebesar 2,69% *(yoy)* disebabkan oleh pertumbuhan penyaluran kredit sebesar Rp 47,27 trilliun atau 6,50% *(yoy)* lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,24% *(yoy)*. Disisi lain, DPK tercatat Rp44,4 trilliun atau tumbuh sebesar 3,81% *(yoy)*, lebih baik dibandingkan triwulan III yaitu 2,68% *(yoy)*. Dengan kondisi penyaluran kredit dan penghimpunan dana tersebut, LDR provinsi Jambi tercatat sebesar 106,47%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 107,75% yang artinya telah menunjukan arah perbaikan. **(GRAFIK 4.26)**

LDR bank umum yang melebihi 100% tersebut mengindikasikan relatif tingginya sumber pendanaan kredit/pembiayaan yang berasal dari perbankan di luar Provinsi Jambi. Hal tersebut utamanya diakibatkan oleh beberapa pembiayaan proyek besar merupakan kewenangan kantor pusat bank.

Grafik 4. 26. Perkembangan *Loan to Deposit* (LDR) Bank Umum Provinsi Jambi

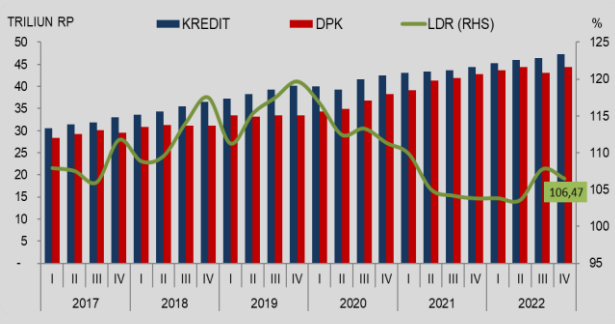

Sumber: LBU Bank Indonesia

Risiko kredit di Provinsi Jambi tergolong cukup baik, ditandai dengan penurunan rasio NPL dari sebesar1,99% *(gross)* pada triwulan III 2022 menjadi sebesar 1,54% *(gross)* pada triwulan laporan. Rasio NPL tersebut masih cukup aman dari batas *threshold* NPL sebesar 5% **(TABEL 4.5.)**. Penurunan rasio NPL tersebut didorong oleh penurunan NPL di berbagai sektor utama seperti sektor konstruksi, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan, sektor perdagangan dan sektor insutri pengolahan. Masing-masing NPL pada sektor tersebut pada triwulan IV 2022 sebesar 11,30% *(gross),* 2,21% *(gross),* 3,48% *(gross)* dan 3,22% *(gross),* menurun dibandingkan triwulan sebelumnya masing-masing NPL sebesar 12,61% *(gross),* 6,87% *(gross),* 3,59% *(gross)* dan 3,52% *(gross).*

Disisi lain, terdapat sektor yang tercatat mengalami peningkatan NPL diantaranya sektor pertambangan

[4] LDR perbankan adalah rasio antara penyaluran kredit bank umum dengan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun bank umum pada triwulan laporan.

dan penggalian dan sektor jasa-jasa. NPL Masing-masing sektor tercatat sebebsar 2,23% *(gross)* dan 6,50% *(gross),* lebih tinggi dibandingkan NPL pada triwulan III 2022 yaitu masing-masing sebesar 2,04% *(gross)* dan 1,68% *(gross).*

Dilihat dari *spread* bunga, terlihat bahwa margin rata-rata tertimbang antara suku bunga kredit dengan suku bunga deposito perbankan di Provinsi Jambi relatif menurun dari 6,73% menjadi 6,50%. Penurunan margin bunga tersebut disebabkan penurunan suku bunga kredit yang lebih lambat dibandingkan penurunan suku bunga deposito **(GRAFIK 4.27)**.

Grafik 4. 27. Perkembangan Suku Bunga Rata-rata Tertimbang Kredit dan Deposito Bank Umum di Provinsi Jambi

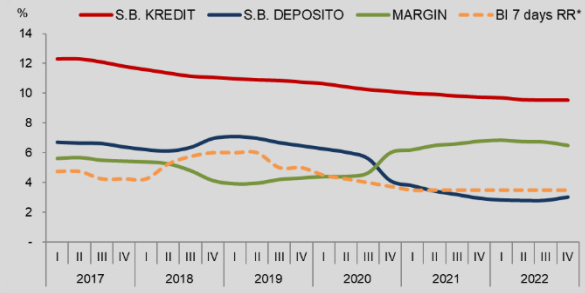

Sumber: LBU Bank Indonesia

Suku bunga rata-rata tertimbang kredit pada periode laporan tercatat sebesar 9,52%, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 9,53%. Sementara itu suku bunga deposito juga mengalami peningkatan dari 2,80% pada triwulan III 2022 menjadi 3,02% pada triwulan laporan. Per Desember 2022 Bank Indonesia telah meningkatkan *BI-7 Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) pada level 5,50%. Berdasarkan *liaison* yang dilakukan KPw BI Provinsi Jambi, suku bunga kredit tersebut masih dirasa wajar, namun untuk kredit UMKM masih terlalu tinggi.

Hal tersebut juga menjadi terasa lebih memberatkan bagi UMKM masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pelaku usaha berharap tingkat suku bunga kredit dapat menurun dalam rangka pendukung perkembangan sektor usaha yang lebih cepat.

Tabel 4.5. Perkembangan *Non*-Performing *Loan* (NPL) Gross Bank Umum di Provinsi Jambi

NO	SEKTOR EKONOMI	2021								2022											
		I		II		III		IV		I			II			III			IV		
		KREDIT	NPL (%)	KREDIT	NPL (%)	KREDIT	NPL (%)	KREDIT	NPL (%)	KREDIT	NPL (RP)	NPL (%)	KREDIT	NPL (RP)	NPL (%)	KREDIT	NPL (RP)	NPL (%)	KREDIT	NPL (RP)	NPL (%)
1.	Pertanian Peternakan Kehutanan dan Pe	9.606.679	0,96	9.914.663	1,03	10.207.453	1,00	10.586.234	0,71	11.242.393	82.523	0,73	12.266.039	93.074	0,76	12.595.837	100.301	0,80	13.040.023	90.856	0,70
2.	Pertambangan dan Penggalian	165.478	0,08	172.749	0,32	176.473	0,03	145.307	0,10	140.468	178	0,13	155.185	6.918	4,46	277.585	5.668	2,04	295.839	6.611	2,23
3.	Industri	2.565.250	5,12	2.489.930	5,30	2.359.138	5,63	2.451.909	5,69	2.239.994	44.710	2,00	1.461.918	46.616	3,19	1.373.249	48.282	3,52	1.511.505	48.622	3,22
4.	LGA	13.984	5,38	21.351	6,92	22.403	3,35	13.501	0,47	12.336	340	2,75	23.447	336	1,43	18.056	331	1,83	1.368.801	323	0,02
5.	Konstruksi	1.179.938	9,66	1.154.056	10,21	1.038.412	11,55	917.466	13,26	917.041	128.938	14,06	911.971	132.059	14,48	858.475	108.259	12,61	899.620	101.671	11,30
6.	Perdagangan Hotel dan Restoran	8.567.445	3,76	8.654.003	3,33	8.834.957	3,18	8.933.756	3,56	9.244.381	284.880	3,08	9.384.394	321.747	3,43	9.241.168	331.645	3,59	9.347.530	324.973	3,48
7	Pengangkutan dan Komunikasi	315.610	5,59	303.037	5,79	315.403	4,34	286.340	1,53	269.106	5.853	2,17	512.965	5.144	1,00	589.522	6.653	1,13	9.566.159	4.688	0,05
8.	Keuangan,Real estate dan Jasa Perusah	512.640	1,88	491.813	0,90	439.150	1,55	459.347	0,63	494.460	4.773	0,97	496.267	37.126	7,48	545.459	37.487	6,87	1.385.114	30.678	2,21
9.	Jasa-jasa	1.060.822	1,21	1.025.012	1,16	908.897	1,36	962.752	1,20	920.596	14.709	1,60	940.884	15.631	1,66	968.832	16.257	1,68	340.640	22.131	6,50
10.	Bukan Lapangan Usaha	19.042.143	1,32	19.160.964	1,38	19.400.972	1,30	19.628.141	1,13	19.770.876	252.210	1,28	19.779.005	266.630	1,35	20.018.912	270.388	1,35	554.125	262.673	47,40
	J U M L A H	43.029.989	2,21	43.387.578	2,17	43.703.259	2,11	44.384.752	2,02	45.251.650	819.113	1,81	45.932.075	925.281	2,01	46.487.095	925.271	1,99	38.309.356	893.224	2,33

Sumber: LBU Bank Indonesia

BOKS 2

TRANSFORMASI BERBASIS DIGITAL DUKUNG AKSELERASI PENGEMBANGAN UMKM KELOMPOK SUBSISTEN

Transformasi UMKM menjadi penting untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan eknomi yang kuat dan inklusif. UMKM dinilai memiliki ketahanan yang tinggi dalam menghadapi berbagai krisis sebelumnya, meskipun krisis Covid-19 memberikan tekanan yang luar biasa besar. Dalam rangka percepatan pemulihan UMKM pasca pandemi, Bank Indonesia turut serta mendukung penguatan UMKM secara *end-to-end.*

Pengembangan *end-to-end* UMKM dilakukan melalui pilar kebijakan korporatisasi, peningkatan kapasitas dan pembiayaan, guna mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif dan adaptif. Penguatan korporatisasi dilakukan pada aspek kelembagaan untuk mendorong terciptanya ekosistem usaha yang terintegrasi serta peningkatan skala ekonomi usaha. Sementara itu, peningkatan kapasitas difokuskan untuk meningkatkan produktivitas melalui inovasi dan digitalisasi proses bisnis agar meningkatkan daya saing UMKM tersebut.

Berbagai upaya dilakukan untuk mendorok UMKM yang produktif, inovatif dan adaptif. Dalam pengembangan UMKM, Bank Indonesia memiliki peta jalan pengembangan UMKM mulai dari kelompok *subsistence* hingga UMKM Ekspor. Kelompok *subsistence* yaitu kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akeses terhadap layanan keuangan formal serta kesempatan untuk memperoleh pelatihan maupun perberdayaan.

Pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif dilakukan untuk mendorong peningkatan dan perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi bagi masyarakat *unbanked* dan *undeserved* melalui pembentukan kelompok (korporatisasi), peningkatan kapasitas dan penyediaan layanan keuangan dalam rangka mendukung Stabilitas Sistem Keuangan dan Stabilitas Makroekonomi.

Pelaksanaan program pengembangan dimaksud dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Tahap persiapan, terdiri atas kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi;
2. Tahap implementasi program, antara lain berupa pendampingan;
3. Tahap monitoring dan evaluasi.

Lebih lanjut, **digitalisasi menjadi kunci peningkatan akses pasar bagi UMKM, tidak hanya pasar nasional namun juga pasar global.** Tren pemanfaatan digitalisasi pada UMKM terus menunjukkan peningkatan. Adaptasi dan transformasi UMKM dalam pemanfaatan digitalisasi akan mendorong pembentukan UMKM yang tidak hanya resilien, tapi juga maju dan kuat. Selain itu, upaya perluasan kanal sistem pembayaran digital melalui QRIS mendukung akselerasi perluasan akses UMKM terhadap layanan system pembayaran yang efisien.

Gambar 1. Peta Pengembangan UMKM Bank Indonesia

Membangun KUBE MEGABUANA Mendunia

Sebagai bentuk dukungan KPwBI Provinsi Jambi terhadap para pelaku UMKM, sejak tahun 2021 kami telah memberikan pendampingan kepada kelompok Subisten yang ada di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Daerah ini merupakan sentra penghasil buah nanas terbesar di Provinsi Jambi. Mayoritas masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani nanas. Namun, saat musim panen raya, hasil buah nanas sangat melimpah. Hal ini mengakibatkan harga buah nanas turun hingga di kisaran harga Rp2.000-Rp5.000/biji. Tentu harga tersebut tidak dapat menutupi *cost* produksi para petani nanas.

Kondisi tersebut tentu memprihatinkan. Selain itu, sejumlah petani tersebut merupakan penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Mereka tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang merupakan kelompok rentan secara ekonomi karena keterbatasan akes pada layanan keuangan. Tentu keresahan tersebut mendorong kami untuk berkolaborasi bersama ibu-ibu yang ada di Desa Tangkit Baru untuk membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Megabuana. Ibu-ibu tersebut sebelumnya adalah ibu rumah tangga. Kami memberdayakan ibu-ibu tersebut untuk memiliki inisiatif mengolah buah nanas segar menjadi produk turunan nanas yang memiliki *value added economy* lebih besar.

KPwBI Provinsi Jambi turut berupaya memberikan dukungan melalui bantuan teknis, edukasi dan pelatihan terkait pengolahan produk nanas. Saat ini kelompok tersebut telah mampu memanfaatkan hingga 98% bahan baku menjadi produk olahan dan hanya menyisakan residu sebesar 2%. Selanjutnya, untuk meningkatkan kapasitas produksi dibutuhkan dukungan modal yang lebih besar. Oleh karena itu, Bank Indonesia bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memberikan pelatihan inkluasi keuangan. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan kepada produk-produk perbankan yang ada. Tentunya hal ini dapat memberikan wawasan terhadap sejumlah opsi pembiayaan kelompok.

Perlu diketahui bahwa kelompok masyarakat KUBE Megabuana pada tahun 2021 teriri atas 25 orang wanita. Kemudian, pada tahun 2022 terdapat penambahan 5 orang anggota guna memfokuskan pada unit usaha D'pina. Sejumlah anggota tersebut berbagai variasi background pendidikan maupun usia. Berikut *highlight* yang dapat menjadi gambaran kelompok.

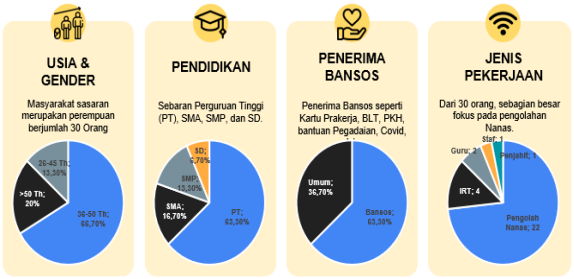

Gambar 2. Highlight Informasi Kelompok

Dalam rangka program pengembangan usaha, KPwBI Provinsi Jambi menghadirkan tenaga ahli dibidang *food and beverage.* Tenaga ahli tersebut memberikan sejumlah pelatihan pengolahan buah nanas menjadi produk olahan antara lain sirup, nastar, nanas goring, natadepina, sambal, dll. Saat ini kurang lebih terdapat lebih dari 40 jenis olahan buah nanas yang diproduksi oleh ibu-ibu yang tergabung dalam KUBE Megabuana tersebut.

Tentunya produk olahan tersebut memiliki nilai ekonomi lebih tinggi jika dibandingkan dengan penjualan buah nanas segar saja. Harga jual nanas sebesar Rp200.000/60kg nanas, saat ini dengan 60kg nanas dapat menghasilakan 300 botol sirup senilai Rp2.000.000. Nilai ekonomi yang meningkat ini memperoleh perhatian dari sejumlah pihak serta memperoleh apresiasi dari sejumlah pejabat negara.

Gambar 3. Kunjungan Menteri Pertanian

Gambar 4. Kunjungan Dewan Gubernur BI

KPwBI Provinsi Jambi telah melakukan perencanaan dan *assessment* terhadap sejumlah proyek yang akan diimplementasikan guna mempercepat perkembangan kelompok subisten tersebut. Sejumlah pendampingan pada tahun 2022 difokuskan dalam keuangan inklusif, pengembangan usaha dan kelembagaan. Dalam pengembangan keuangan inklusif bertujuan untuk memperkenalkan dan mengintegrasikan kegiataan ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan layanan keuangan digital serta ekosistem perbankan. Hal ini guna mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola keuangan ataupun memanfaatkan sejumlah instrument keuangan. Sementara itu, sehubungan dengan materi pengembangan usaha, tentunya kami memberikan pembekalan terkait penyusunan SOP sederhana untuk usaha, pelatihan *community and product branding,* serta tentunya mendorong pemasaran secara online. Lebih lanjut, fokus penguatan kelembagaan merupakan pilar fundamental bagi suatu kelompok. Melalui penguatan kelembagaan kami memperkenalkan pentingnya peran *local leader* sebagai fondasi dan keberlanjutan kelompok tersebut.

Dalam rangka memperkuat dan mengembangan kelompok KUBE Megabuana, KPwBI Provinsi Jambi bersinergi dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak ataupun *stakeholder* terkait. Tentunya kolaborasi tersebut baik untuk menambah perspektif maupun menampung berbagai *point of view.* Berikut *mapping* kontribusi masing-masing stakeholder:

No	Stakeholder	Peran / Kontribusi Riil Stakeholders
1	Kepala Desa Tangkit Baru	Dukungan sejak program pertama kali dilaksanakan hingga saat ini.
2	Bupati Muaro Jambi	Pada bulan Mei 2022 realisasi perbaikan jalan akses yang dijanjikan oleh Ibu Bupati sudah mulai dikerjakan. Hal tersebut berdampak kepada peningkatan lalu lintas kunjungan agrowisata.
3	Disperindag Muaro Jambi	Memfasilitasi KUBE dalam pameran yang dilakukan di Candi Muaro jambi bulan Juli 2022.
4	BRI	Dukungan promosi produk melalui pameran yang diadakan oleh BRI pada bulan Februari 2022.
5	BPOM Provinsi Jambi	Tanggal 10 Juni 2022 telah dilakukan sosialisasi perizinan oleh BPOM, dilanjutkan dengan kordinasi dan konsultasi secara informal terkait dengan perizinan produk dan desain rumah produksi (agar sesuai dengan ketentuan).
6	BSI	BSI dukungan pembukaan tabungan dan produk layanan lainnya sejak bulan Januari 2022, serta dukungan dalam akses pembiayaan kepada anggota.
7	BUMDES Tangkit Baru	Bumdes mendukung KUBE Megabuana dalam pemasaran produk sejak Bulan Januari 2022
8	SUCOFINDO Provinsi Jambi	Sosialisasi dan edukasi terkait tata cara mengurus perizinan/sertifikasi halal pada bulan Agustus 2022

Lebih lanjut, untuk mendukung kapasitas produksi yang lebih besar serta guna menjangkau pemasaran yang lebih luas. KPwBI Jambi melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) memberikan bantuan berupa Rumah Produksi Pengolahan Nanas. Kegiatan penyerahan PSBI tersebut dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Dodi Budi Waluyo, Gubernur Jambi, Wakapolda Jambi, PJ Bupati Muaro Jambi serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi.Bantuan rumah produksi tersebut bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar terus bersemangat dan berkarya demi keluar dari jerat ekonomi lemah. Tidak hanya sampai disitu, Bank Indonesia juga memberikan bantuan berupa

pembangunan Musholla sebagai fasilitas penunjang Agrowisata Nanas Tangkit. Diharapkan perkembangan Agrowisata juga memiliki dampak positif baik *direct* maupun *indirect* terhadap perkembangan kelompok KUBE Megabuana.

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

BAB V

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Permintaan uang kartal meningkat pada triwulan IV 2022 tercermin dari peningkatan *net outflow* yang didorong adanya libur panjang Nataru (Natal dan Tahun Baru).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman diperlukan untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggung-jawabkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter yang efektif dan efisien. Implementasi sistem pembayaran di Indonesia terdiri dari tunai dan nontunai.

Perkembangan pembayaran tunai di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2022 mengalami *net outflow* sebesar Rp1.870,157 miliar atau 14,36% (yoy). Di sisi sistem pembayaran nontunai, nilai kliring dan volume kliring di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2022 terkontraksi masing-masing sebesar 12,24% (*yoy*) dan 17,84% (*yoy*). Secara triwulanan, pada triwulan IV 2022 nilai kliring mengalami kenaikan sebesar 0,07% (*qtq*) sementara volume kliring turun dibanding triwulan sebelumnya sebesar 5,33% (*qtq*).

Selain penyelenggaraan sistem pembayaran tunai dan nontunai, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi juga mengadakan edukasi Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) secara berkala baik kepada pelajar/mahasiswa, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako, serta bekerja sama dengan perbankan untuk memfasilitasi pelaksanaan elektronifikasi transaksi keuangan Pemda. Seluruh kegiatan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan dan menciptakan *less cash society* di Provinsi Jambi. Implementasi elektronifikasi merupakan upaya mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi nontunai yang mudah, aman, praktis, nyaman, dan efisien.

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi bersama Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya telah membentuk sebanyak 12 (dua belas) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi sebagai berikut: Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batang Hari, Kota Jambi, dan Kabupaten Bungo.

Sejalan dengan implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi juga memfasilitasi pendaftaran *merchant* untuk memperoleh *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Per Desember 2022 terdapat 216.664 *merchant* yang tersebar di berbagai Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi yang telah memiliki QRIS. Jumlah ini naik sebesar 10,64% dibandingkan dengan triwulan III 2022. Sementara untuk jumlah *user* QRIS sebanyak 288.038 *user* atau naik sebesar 21,74% dibandingkan dengan triwulan III 2022. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan inklusi keuangan dan menciptakan *less cash society* di Provinsi Jambi.

Tabel 5.1. Perkembangan Sistem Pembayaran melalui KPwBI Provinsi Jambi

URAIAN	2020				2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
NON TUNAI												
KLIRING												
Nilai Kliring (juta Rp)	1,221,984	1,154,920	1,163,305	1,122,222	1,035,326	1,052,743	1,004,739	1,069,990	979,565	996,783	938,381	939,066
Volume Kliring (lembar warkat)	32,014	27,932	28,961	28,679	25,438	22,373	21,730	22,666	20,353	18,915	19,672	18,623
CEK DAN BIRO GILYET KOSONG												
Nominal (juta Rp)	35,776	160,552	45,353	36,745	27,056	20,273	26,874	22,487	21,850	23,707	25,574	22,583
Lembar	737	1,061	690	594	561	478	540	501	449	456	525	403
TUNAI												
NET INFLOWS/OUTFLOWS (JUTA RP)	499,559	(339,838)	(787,631)	(2,693,655)	1,059,908	(1,517,187)	(652,585)	(2,183,836)	102,649	(479,186)	357,003	(1,870,157)
Aliran Uang Masuk/Inflows (juta Rp)	1,758,043	1,780,393	1,145,449	944,516	2,334,676	1,964,932	1,249,210	976,076	1,838,612	2,427,801	1,888,055	1,000,704
Aliran Uang Keluar/Outflows (juta Rp)	1,258,484	2,120,231	1,933,080	3,638,171	1,274,768	3,482,119	1,901,795	3,159,912	1,735,963	2,906,987	1,531,052	2,870,860

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

5.1 PERKEMBANGAN TRANSAKSI TUNAI DAN NONTUNAI

Perkembangan sistem pembayaran di Provinsi Jambi tercermin dari jumlah transaksi tunai dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Transaksi tunai terdiri atas aliran uang masuk dari perbankan ke Bank Indonesia (*inflow*) dan aliran uang keluar dari Bank Indonesia ke perbankan (*outflow*). Perkembangan transaksi tunai dan nontunai di Provinsi Jambi pada triwulan IV - 2022 ditunjukkan pada **TABEL 5.1**.

5.1.1 Perkembangan Transaksi Tunai

Transaksi tunai di Provinsi Jambi pada triwulan IV-2022 menunjukkan *net outflow* sebesar Rp1.870,157 miliar. Total aliran uang kartal yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi pada triwulan IV-2022 sebesar Rp. 1.000.704 miliar. Hal tersebut diakibatkan oleh peningkatan aktivitas ekonomi menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Grafik 21.1. Inflows, *Outflows* dan *Netflows* di Provinsi Jambi

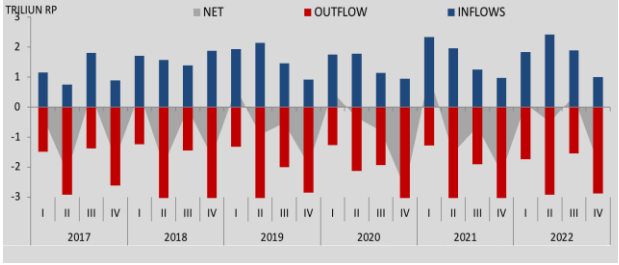

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Aliran kas masuk dan keluar di Provinsi Jambi sebagaimana GRAFIK 5.1 merupakan aliran kas dari transaksi tarikan dan setoran bank melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi maupun yang ditransaksikan melalui Kas Titipan Bank Indonesia di Muara Bungo dan Kuala Tungkal dengan jumlah *outflow* selama triwulan IV-2022 tercatat sebesar Rp. 2.870.860 miliar atau lebih tinggi dibandingkan *outflow* pada triwulan III-2022 yang berjumlah Rp. 1.531.052 miliar. Dari sisi *inflow*, pada triwulan IV-2022 tercatat sebesar Rp. 1.000.704 miliar atau lebih rendah dibandingkan *inflow* triwulan sebelumnya yang mencapai Rp. 1.888.055 miliar.

5.1.2 Perkembangan Transaksi Nontunai

Nilai dan volume kliring di Provinsi Jambi pada triwulan IV - 2022 terkontraksi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 12,24% *(yoy)* dan 17,8% *(yoy)*. Secara triwulanan, nilai kliring pada triwulan IV - 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,07% (*qtq*) sedangkan volume kliring mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya sebesar 5,33% (*qtq*).

Volume dan nilai kliring dimaksud telah mempertimbangkan pertukaran warkat debet yang dikelola oleh Koordinator Pertukaran Warkat Debet (KPWD) di Kabupaten Muara Bungo yang dikelola oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Bungo. (GRAFIK 5.2).

Masih tingginya transaksi kliring pada triwulan IV 2022 menunjukkan masih tingginya kebutuhan masyarakat dalam menggunakan instrumen pembayaran Cek dan Giro oleh individu maupun korporasi.

Grafik 21.2. Perkembangan Volume dan Nilai Kliring di Provinsi Jambi

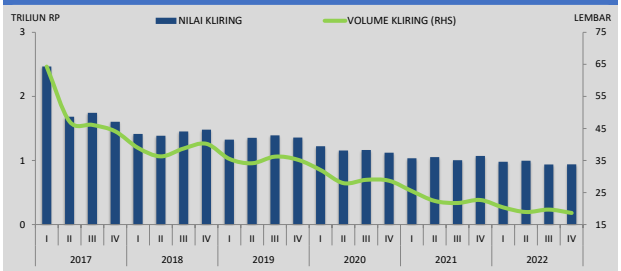

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

5.2 PENYEDIAAN UANG LAYAK EDAR

Dalam rangka memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar atau mendorong *clean money policy,* Bank Indonesia aktif melakukan layanan kas baik di dalam kantor (layanan penukaran) maupun di luar kantor (layanan kas keliling).

Layanan kas bagi masyarakat di luar kantor berupa layanan kas keliling di dalam kota dan di luar kota dilakukan dengan target lokasi di pasar tradisional/modern dan pusat-pusat keramaian lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang Rupiah layak edar. Seluruh kegiatan dimaksud diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan kualitas uang Rupiah yang beredar di Provinsi Jambi.

Dengan semakin menurunnya jumlah penyebaran Covid-19, kegiatan kas keliling kembali dilaksanakan. Layanan kas bagi masyarakat untuk melayani penukaran uang rusak, uang cacat, serta uang yang sudah dicabut dari peredaran melalui loket Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi diberlakukan setiap hari Kamis. Selain itu, kegiatan penukaran juga dilakukan dengan melibatkan perbankan di wilayah kerja dengan menghimbau seluruh bank untuk membuka loket penukaran. Selama triwulan IV - 2022 telah dilakukan layanan kas keliling sebanyak 1 (satu) kali dan layanan penukaran uang sebanyak 12 (dua belas) kali. (TABEL 5.2).

Tabel 5.2 Kas Keliling dan Penukaran Uang Tidak Layak Edar di Provinsi Jambi Triwulan I 2022

BULAN	PELAKSANAAN	
	Kas Keliling	Penukaran
Oktober	1	5
November	0	4
Desember	0	3

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Selain melalui pelaksanaan kas keliling dan penukaran uang rusak, uang cacat, serta uang yang sudah dicabut dari peredaran, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi membuka layanan penukaran uang melalui Kas Titipan di Muara Bungo dan Kuala Tungkal. Kas Titipan adalah kegiatan penyediaan uang Rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan ke salah satu kantor cabang bank (selaku bank pengelola) untuk mencukupi kebutuhan kas perbankan di wilayah tersebut. Adanya Kas Titipan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan uang seluruh lapisan masyarakat dengan kualitas uang yang lebih baik. Melalui Kas Titipan, Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang diserap oleh perbankan dapat disetorkan kepada Bank Pengelola Kas Titipan, dan selanjutnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi melakukan penarikan UTLE tersebut dan *dropping* Uang Layak Edar (ULE) kepada Bank Pengelola Kas Titipan. ULE di Bank Pengelola Kas Titipan akan diedarkan ke seluruh masyarakat melalui perbankan.

5.3 PERKEMBANGAN TEMUAN UANG RUPIAH YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA

Sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki simbol-simbol kedaulatan yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh Warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara adalah mata uang Rupiah yang diatur dengan Undang Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pemalsuan uang Rupiah merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat serta dunia terhadap Rupiah, yang pada akhirnya dapat mengganggu kestabilan perekonomian. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan pemantauan serta mengupayakan langkah-langkah pencegahan dan penanganan uang palsu.

Dalam rangka mempermudah pelaporan uang yang diragukan keasliannya oleh perbankan untuk dapat diklarifikasi lebih lanjut oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Bank Indonesia mengimplementasikan aplikasi Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center* (BI CAC). Melalui aplikasi dimaksud, bank dapat melakukan pelaporan secara *online* atas temuan uang yang diragukan keasliannya untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan fisik uang yang diragukan keasliannya ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Jumlah uang Rupiah yang diragukan keasliannya pada triwulan IV - 2022 sebanyak 328 lembar. Sumber penerimaan uang Rupiah yang diragukan keasliannya dimaksud sebagian besar berasal dari permintaan klarifikasi oleh bank (328 lembar). (GRAFIK 5.3).

Grafik 21.3. Perkembangan Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya di Provinsi Jambi

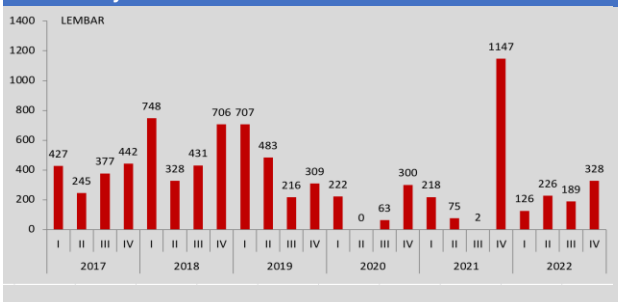

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Dalam rangka penanggulangan peredaran uang Rupiah yang diragukan keasliannya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi secara berkesinambungan bekerja sama dengan instansi yang berwenang dalam mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan uang Rupiah. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, uang Rupiah yang diragukan keasliannya akan diserahkan kepada Kepolisian Daerah Jambi untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Selain itu, sebagai upaya mencegah peredaran uang palsu, secara berkala dilakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah ke berbagai lapisan masyarakat secara intensif agar masyarakat dapat lebih cermat dalam mengenali uang Rupiah, termasuk juga sosialisasi cara memperlakukan uang Rupiah yang baik melalui 5 Jangan (Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, dan Jangan Dibasahi), serta edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah.

5.4 PERKEMBANGAN PENGGUNAAN ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

11/11/PBI/2009, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *automated teller machine* (ATM) dan/atau kartu debet. Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dan pemegang kartu wajib melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun pembayaran dengan angsuran. Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana sedangkan kartu debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan. Atas penggunaan kartu ATM dan kartu debet, kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di Provinsi Jambi, penggunaan kartu ATM dan/atau kartu debet cenderung lebih banyak digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan pemindahbukuan **(GRAFIK 5.4).**

Grafik 21.4. Perkembangan Transaksi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet

Sumber: Lapran Penerbit APMK (diolah)

5.5 INKLUSI KEUANGAN DAN ELEKTRONIFIKASI

Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) adalah gerakan penggunaan alat pembayaran nontunai yang dicanangkan Bank Indonesia sejak tanggal 14 Agustus 2014. GNNT bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sekaligus meningkatkan penggunaan nontunai di kalangan masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga pemerintah sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih aktif dalam menggunakan nontunai di Indonesia. Dalam rangka mempercepat gerakan tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran di Indonesia membentuk Program Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan.

Program elektronifikasi merupakan upaya untuk mengubah cara bertransaksi di masyarakat yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai. Program elektronifikasi diharapkan dapat memperluas akses keuangan, memperkuat kesehatan fiskal dan meningkatkan efisiensi ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Inklusi Keuangan[5] dinilai sebagai salah satu faktor penting dalam rangka menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan partisipasi masyarakat terhadap jasa keuangan formal yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Inklusi Keuangan juga masuk dalam agenda prioritas Pemerintah Pusat. Pada bulan Juni 2012, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Badan Kebijakan Fiskal mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Dalam strategi tersebut telah dicanangkan visi Inklusi Keuangan Indonesia, yaitu mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan.

Salah satu program inklusi keuangan yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi adalah penyaluran Program Sembako bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi, perbankan, serta Perum BULOG Kanwil Provinsi Jambi. Program Sembako adalah pengembangan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dengan penambahan nominal

[5] Inklusi Keuangan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan jasa-jasa keuangan.

bantuan dan jenis bahan pangan yang dapat dibelanjakan (sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan vitamin dan mineral).

Dinas Sosial Kota Jambi melalui para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bertanggung jawab melakukan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mengajukan persetujuan kepada Kementerian Sosial untuk pembukaan e-warong yang akan menjadi lokasi penyaluran Program Sembako dimaksud. Perbankan bertanggung jawab untuk menyediakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi KPM sehingga kartu tersebut dapat digunakan sebagai: (i) identitas penerima bansos, (ii) rekening tabungan, (iii) uang elektronik *registered*, serta (iv) *e-wallet* untuk PKH, Program Sembako, dan bantuan pemerintah lainnya. Selain itu, perbankan juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi e-warong yang dapat diakuisisi menjadi agen Layanan Keungan Digital/LKD sehingga dapat diberikan mesin EDC untuk melayani para KPM.

Dalam rangka memastikan kelancaran penggunaan KKS dimaksud, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi selaku otoritas sistem pembayaran bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan sehingga potensi kendala yang timbul atas penggunaan KKS dan mesin EDC di e-warong dapat dimitigasi sejak awal. Perum BULOG berperan penting dalam memastikan pasokan beras dan telur tersedia di e-warong secara tepat waktu dengan kualitas yang baik. Seluruh instansi yang terlibat dalam penyaluran Program Sembako berupaya melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan penyaluran dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat administrasi, dan tepat kualitas (6T).

Realisasi penyaluran Program Sembako sampai dengan Desember 2022 ditunjukkan pada **(GRAFIK 5.5).**

Grafik 21.5. Realisasi penyaluran Program Sembako di Provinsi Jambi

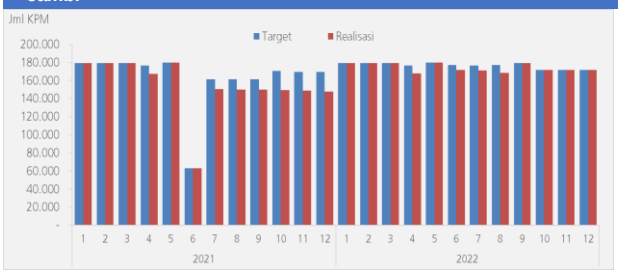

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Pada penyaluran Program Sembako, KPM diberikan pilihan dan kendali untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan mempertimbangkan pedoman gizi seimbang yaitu karbohidrat (beras, jagung, singkong, ubi, sagu, dan umbi-umbian lainnya) untuk memberikan tenaga bagi tubuh untuk melakukan kegiatan, protein hewani (telur, ayam, daging, ikan) dan protein nabati (tempe, tahu, serta beragam kacang-kacangan) untuk membangun dan memelihara sel dan jaringan tubuh, serta vitamin dan mineral (sayur dan buah-buahan) untuk antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh. Diharapkan dalam jangka panjang pemenuhan gizi seimbang dapat mencegah terjadinya *stunting*. Bantuan tidak boleh digunakan untuk pembelian minyak, tepung terigu, gula pasir, MPASI pabrikan, mie instan, makanan kaleng, dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam bahan pangan yang diatur untuk Program Sembako.

Rerata penyaluran Program Sembako pada triwulan IV - 2022 telah diberikan kepada 171.896 KPM (100% dari total target 171,896 KPM). Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, nilai bantuan Program Sembako diberi tambahan menjadi Rp200.000 sejak bulan Maret 2020 hingga tahun 2022 (sebelumnya sebesar Rp150.000 per bulan).

Berdasarkan hasil kegiatan monitoring bansos nontunai tahun 2022 yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi bekerja sama dengan Dinas Sosial setempat, temuan penting di lapangan dalam penyaluran Program Sembako diantaranya: masih terdapat permasalahan yang dialami oleh KPM saat melakukan pengambilan BSNT secara mandiri, seperti lupa PIN, salah memasukan PIN, dan kartu KKS terblokir; keterbatasan data e-warong saat memberikan layanan penarikan uang tunai kepada konsumen; serta masih terdapat sinyal komunikasi di wilayah responden yang hanya berkualitas bagus untuk beberapa operator.

Berkaitan dengan elektronifikasi transaksi keuangan Pemda, menindaklanjuti SE Menteri Dalam Negeri No.910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan SE Menteri Dalam Negeri No.910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Realisasi Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Perbendaharaan Negara dan bank daerah tanggal 2 Mei 2018 berkaitan dengan penyaluran gaji melalui rekening PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri secara terpusat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi berperan serta dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk

memastikan kelancaran penyaluran gaji melalui rekening dimaksud. Saat ini realisasi penyaluran gaji PNS telah mencapai 100% melalui rekening perbankan.

Acuan yang dapat digunakan untuk implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda di Provinsi Jambi saat ini antara lain surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jambi No.S-1226/Bakeuda-1/XI/2018 tanggal 26 November 2018 yang mewajibkan rekanan Pemerintah Daerah untuk membuka rekening dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mewajibkan pembayaran gaji, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), dan honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) secara nontunai melalui rekening, serta surat dari Gubernur Jambi No.S-028/1415/SETDA.PSDA-2.3/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Implementasi Transaksi Nontunai Pada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di Provinsi Jambi.

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi bersama Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya telah membentuk sebanyak 12 (dua belas) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi. **(TABEL 5.3).**

Tabel 5.3 Daftar TP2DD yang telah terbentuk di Provinsi Jambi

NO.	DAERAH	NO. SURAT KEPUTUSAN (SK) TP2DD	TENTANG
1	Provinsi Jambi	No.171/KEP.GUB/BAKEUDA-1/2021 tanggal 11 Februari 2021	Pembentukan TP2DD Provinsi Jambi
2	Kabupaten Kerinci	No.900/Kep.20/2021 tanggal 15 Februari 2021	Pembentukan TP2DD Kabupaten Kerinci
3	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	No.222 TAHUN 2021 tanggal 19 Maret 2021	Penetapan TP2DD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
4	Kabupaten Muaro Jambi	No.238/Kep.Bup/BPKAD/2021 tanggal 9 April 2021	Pembentukan TP2DD Kabupaten Muaro Jambi
5	Kabupaten Sarolangun	No.183/BPKAD/2021 tanggal 10 Mei 2021	Pembentukan TP2DD Kabupaten Sarolangun
6	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	No.354/Kep.Bup/Eko/2021 tanggal 17 Mei 2021	Pembentukan TP2DD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7	Kabupaten Merangin	No.60/BPPRD/2021 tanggal 20 Mei 2021	Pembentukan TP2DD Kabupaten Merangin
8	Kota Sungai Penuh	No.900/Kep.135/2021 tanggal 4 Juni 2021	Pembentukan TP2DD Kota Sungai Penuh
9	Kabupaten Tebo	No.384/TAHUN 2021 tanggal 8 Juni 2021	Pembentukan TP2DD Kabupaten Tebo
10	Kabupaten Batang Hari	No.155 TAHUN 2021 tanggal 10 Mei 2021	Pembentukan TP2DD Kabupaten Batang Hari
11	Kota Jambi	No.229 TAHUN 2021 tanggal 30 Juni 2021	Pembentukan TP2DD Kota Jambi
12	Kabupaten Bungo	No.167/PEREKONOMIAN TAHUN 2021 tanggal 1 Juli 2021	Pembentukan TP2DD Kabupaten Bungo

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

TP2DD dibentuk sebagai forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan tujuan untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemda, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi. Melalui kolaborasi dan Kerjasama yang kuat antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Pemda dan Bank RKUD, pada Semester II 2022 seluruh TP2DD di Provinsi Jambi (12 TP2DD) telah berhasil masuk dalam kategori Digital.

5.6 PERKEMBANGAN QRIS

Berkaitan dengan implementasi (GNNT) di Provinsi Jambi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi secara berkala juga melaksanakan kegiatan edukasi GNNT kepada pelajar dan mahasiswa, serta kelompok masyarakat lainnya secara lebih luas. Pelajar dan mahasiswa merupakan target utama edukasi GNNT mengingat secara umum karakter kelompok penduduk muda (milenial) adalah melek teknologi, berani mencoba hal baru, dan cenderung memilih sesuatu yang praktis. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan dan menciptakan *less cash society* di Provinsi Jambi.

Pesatnya perkembangan industri dan meningkatnya adopsi masyarakat terhadap *smartphone* di Indonesia mendorong perusahaan teknologi dan keuangan memanfaatkan teknologi sebagai media pembayaran retail. Hal ini membuat layanan *mobile payment* di dalam *smartphone* menjadi media pembayaran baru bagi masyarakat sekaligus untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia. Salah satu penggunaan teknologi dalam *mobile payment* yang berkembang pesat saat ini adalah penggunaan *Quick Response Code*.

QR *Code* merupakan serangkaian kode yang memuat data/informasi antara lain identitas pedagang/pengguna, nominal pembayaran, dan/atau mata uang yang dapat dibaca dengan alat tertentu dalam rangka transaksi pembayaran. Pembayaran dengan QR *Code* memiliki beberapa keunggulan, antara lain kemampuan QR *Code* menampung informasi pembayaran yang banyak meskipun dalam ukuran yang kecil dan memiliki kemampuan koreksi kesalahan, pembayaran menjadi lebih efisien karena tetap dapat menggunakan infrastruktur dan media pembayaran yang sudah ada, memperluas akses keuangan dan pembayaran, serta memberikan alternatif media pembayaran kepada masyarakat.

Sejalan dengan implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dan penetapan QRIS sebagai salah satu alternatif kanal pembayaran nontunai sebagaimana diatur dalam PADG No.21/18/PADG/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi memfasilitasi pendaftaran *merchant* untuk memperoleh QRIS melalui PJSP di Provinsi Jambi. Penggunaan QRIS diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi *merchant* dan konsumen antara lain: (i) menerima pembayaran secara higienis karena pembayaran dilakukan menggunakan gawai konsumen sehingga tidak memerlukan uang kembalian dan bebas dari potensi risiko pencurian dan/atau uang palsu (ii) transaksi cepat dan tercatat, serta (iii) murah dan bebas biaya bagi Usaha Mikro. Khusus untuk *merchant,* transaksi yang tercatat dapat digunakan sebagai basis membangun *credit profiling.*

Sejak QRIS diluncurkan, berbagai kemajuan cukup pesat telah dicapai. Saat ini terdapat 75 (tujuh puluh lima) Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) bank maupun nonbank yang sudah mendapat izin dari Bank Indonesia. Perluasan *merchant* QRIS telah berlangsung di seluruh Indonesia dengan jumlah 5,78 juta *merchant* di tahun 2020 dan 14 juta *merchant* di akhir tahun 2021. Per Desember 2022 terdapat 216.664 *merchant* (GRAFIK 5.6) dan 279.713 *user* (GRAFIK 5.7) yang tersebar di berbagai Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi yang telah memiliki QRIS.

Melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi QRIS oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, PJSP dan berbagai *stakeholder* lainnya diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mengetahui dan memahami QRIS sebagai kanal pembayaran nontunai, mekanisme dalam bertransaksi, keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan transaksi tunai, serta potensi risiko dan mitigasi yang dapat dilakukan oleh nasabah sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan implementasi QRIS di Provinsi Jambi. Selanjutnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi akan terus melakukan implementasi QRIS di berbagai komunitas melalui koordinasi dengan PJSP Berizin QRIS di berbagai Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi.

Grafik 21.6. Perkembangan Merchant yang Memiliki QRIS di Provinsi Jambi

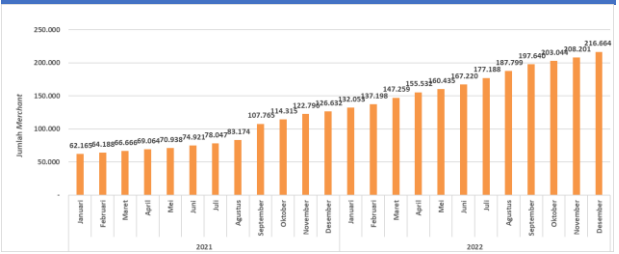

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Grafik 21.7. Perkembangan QRIS-*user* di Provinsi Jambi

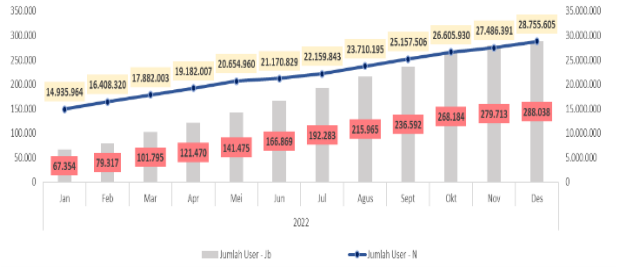

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

BAB VI

KETENANGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Berlanjutnya perbaikan ekonomi di Provinsi Jambi masih memberikan dampak pada perbaikan serapan tenaga kerja di tengah peningkatan aktivitas produksi perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja ekonomi daerah turut mendorong perbaikan kesejahteraan petani yang tercermin dari kenaikan Nilai Tukar Petani. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi terpantau menunjukan peningkatan

Data posisi Agustus 2022 menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja[6] di Provinsi Jambi tercatat tumbuh 2,92% (*yoy*) dari 1,75 juta orang pada Agustus 2021 menjadi 1,80 juta orang di Agustus 2022. Peningkatan tersebut disertai oleh angka pengangguran yang menurun dan didorong dengan pertumbuhan serapan kerja. Jumlah pengangguran terkontraksi di angka 7,78% (*yoy*) di angka 86,69 ribu orang pada Agustus 2022 dan juga menurun dibandingkan Februari lalu di angka 87,00 ribu orang. Penurunan jumlah pengangguran tersebut mengakibatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,70% pada Agustus 2022 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 5,09%.

Sementara itu, dari sisi kesejahteraan, indikator kemiskinan pada September 2022 menunjukkan penurunan. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk miskin sebesar 1,42% (*yoy*) dibandingkan September 2021. Lebih lanjut, tingkat garis kemiskinan yang merupakan dasar penentuan pengelompokkan penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 7,34% (*yoy*) pada September 2022 menjadi sebesar Rp585.950 per kapita per bulan, dari sebelumnya Rp545.870 per kapita per bulan pada Maret 2022.

6.1 KETENAGAKERJAAN DAERAH

Indikator ketenagakerjaan pada Agustus 2022 menunjukkan peningkatan potensi pasokan (*supply*) tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan sebesar 2,37% (*yoy*) dari 1,84 juta orang menjadi 1,88 juta orang. Peningkatan pasokan tenaga kerja tersebut disertai dengan peningkatan serapan tenaga kerja yang cukup tinggi, tercermin dari membaiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tumbuh positif 1,00% (*yoy*).

Pada Agustus 2022, jumlah penduduk yang bekerja tercatat 1,80 juta orang, atau meningkat 2,92% (*yoy*), dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah penduduk bekerja tersebut mampu mendorong TPAK Agustus 2022 yang juga tumbuh menjadi 67,84% dibandingkan Agustus 2021 sebesar 67,17% **(TABEL 6.1)**. Selain itu, jumlah pengangguran juga menunjukan tren penurunan di angka 86,69 ribu orang pada Agustus 2022. Berdasarkan kondisi peningkatan angkatan kerja dan angka pengangguran yang menurun tersebut, TPT Agustus 2022 terpantau menurun menjadi 4,70%, atau lebih rendah dibandingkan Agustus 2021 sebesar 5,09%.

Berdasarkan jenjang pendidikannya, TPT tertinggi terjadi pada penduduk yang berpendidikan SMA (7,57%) dan SMA (6,11%). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh *mismacth* antara lapangan pekerjaan formal yang tersedia dengan kompetensi lulusan SMA dan SMK yang dibutuhkan. Meskipun demikian TPT tetap mengalami perbaikan dengan peningkatan aspek ketenagakerjaan terutama disebabkan oleh kondisi perekonomian yang berangsur pulih pasca lonjakan kasus pandemi COVID-19 selama beberapa tahun terakhir. Penerapan *social/physical distancing* yang sempat berdampak pada kondisi dunia usaha dan membuat beberapa perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja untuk mempertahankan kelangsungan usaha, menahan perbaikan lebih lanjut.

Adapun kondisi tenaga kerja di Provinsi Jambi berdasarkan status pekerjaan belum mengalami perubahan signifikan. Jenis pekerjaan yang dominan pada Agustus 2022 adalah kelompok orang yang bekerja pada kegiatan informal dengan pangsa 59,98%. Hal ini sejalan dengan kondisi pekerja yang sebagian besar berpendidikan SD ke bawah (pangsa 38,42% terhadap total penduduk yang bekerja). Jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal terpantau menurun sebesar -0,35% (*yoy*) dibanding Agustus 2021. Di sisi lain, perkembangan jumlah pekerja formal justru meningkat sebesar 9,27% (*yoy*) dari 658,44 ribu orang pada Agustus 2021 menjadi 719,49 ribu orang pada Agustus 2022 **(TABEL 6.2)**.

[6] Penduduk yang bekerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan terutama dialami oleh sektor Industri Pengolahan disebabkan normalisasi kegiatan usaha secara umum pasca meredanya pandemi COVID-19 yang berdampak positif terhadap permintaan masyarakat.

Di sisi lain, status pekerja dengan latar belakang pendidikan menengah ke atas relatif stabil dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas pekerja di Provinsi Jambi dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan SMP ke atas pada Agustus 2022 tercatat 1,107 juta orang atau meningkat 2,80% (*yoy*) dibandingkan Agustus 2021 (1,076 juta orang) **(TABEL 6.3).**

Tabel 6.1 Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja (ribu orang)

JENIS KEGIATAN UTAMA	2020		2021		2022	
	FEB	AGU	FEB	AGU	FEB	AGU
ANGKATAN KERJA (RIBU JIWA)	**1,820**	**1,833**	**1,832**	**1,841**	**1,849**	**1,885**
BEKERJA	1,740	1,739	1,745	1,747	1,762	1,798
PEKERJA PENUH	1,080	1,003	1,115	1,004	1,016	1,109
PEKERJA TIDAK PENUH	660	736	630	743	745	686
SETENGAH MENGGANGGUR	132	196	156	170	134	134
PARUH WAKTU	528	540	474	572	611	552
PENGANGGURAN	80	94	87	94	87	87
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (%)	**67.28**	**67.79**	**67.30**	**67.17**	**68.86**	**67.84**
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)	**4.26**	**5.13**	**4.76**	**5.09**	**4.70**	**4.70**

Tabel 6.2 Pekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama (ribu orang)

STATUS PEKERJAAN UTAMA	2020		2021		2022	
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
A PEKERJA FORMAL						
1. BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP	85	73	78	71	79	91
2. BURUH / KARYAWAN	675	575	572	587	607	629
TOTAL PEKERJA FORMAL	**760**	**648**	**650**	**658**	**686**	**719**
B PEKERJA INFORMAL						
1. BERUSAHA SENDIRI	382	418	343	380	347	441
2. BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP	221	240	310	254	300	234
3. PEKERJA BEBAS	152	176	187	190	170	146
4. PEKERJA KELUARGA / TAK DIBAYAR	225	257	260	258	259	257
TOTAL PEKERJA INFORMAL	**980**	**1,091**	**1,100**	**1,082**	**1,075**	**1,078**
TOTAL	**1,740**	**1,739**	**1,745**	**1,747**	**1,762**	**1,798**

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Secara sektoral, struktur lapangan kerja di Provinsi Jambi masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyerap 862,28 ribu orang tenaga kerja atau 47,96% dari total penduduk yang bekerja. Hal ini sejalan dengan struktur perekonomian Provinsi Jambi, dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki pangsa terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan III 2022 (29,35%). Jumlah tenaga kerja sektor pertanian pada Agustus 2022 tersebut tumbuh positif sebesar 7,56% (*yoy*) dan berdampak terhadap pertumbuhan lapangan usaha pertanian yang tumbuh terakselerasi 5,09% (yoy) di triwulan laporan. Pertumbuhan lapangan usaha pertanian sejalan dengan harga komoditas karet dan kelapa sawit yang masih cukup terjaga pada triwulan III 2022.

Adapun sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tersebut menyerap jumlah tenaga kerja baru terbesar selama Agustus 2021 sampai dengan Agustus 2022. Dalam satu tahun terakhir, sektor tersebut mampu menyerap 60,58 ribu tenaga kerja baru menjadi 862,28 ribu tenaga kerja pada triwulan III 2022 setelah sebelumnya menyumbang tenaga kerja sebanyak 801,70 ribu pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Adapun kenaikan jumlah tenaga kerja tersebut disebabkan oleh membaiknya permintaan akan hasil produksi di tengah perbaikan mobilitas dan perekonomian masyarakat pasca meredanya kasus COVID-19 di Provinsi Jambi maupun nasional. Selain itu, sektor lain yang mengalami peningkatan tenaga kerja adalah sektor Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Akomodasi Makan Minum dan Pengadaan LGA, Konstruksi dan Real Estate yaitu masing-masing sebesar 13,62% (*yoy*); 9,13% (*yoy*); 6,10% (*yoy*) dan 0,14% (*yoy*) **(TABEL 6.4)**. Sementara itu, sektor yang mengalami penurunan tertinggi adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 11,79% (*yoy*) menjadi 56,64 ribu orang pada Agustus 2022 dibanding Agustus 2021 sebesar 64,21 ribu orang. Kemudian penurunan jumlah tenaga kerja tertinggi lainnya diikuti oleh sektor Administrasi Pemerintahan serta Perdagangan Besar dan Eceran yang terkontraksi masing-masing sebesar 7,44% (*yoy*) dan 4,37% (*yoy*). Selain itu, Sektor Jasa Pendidikan dan Infokom juga terkontraksi masing-masing sebesar 3,68% (*yoy*) dan 1,53% (*yoy*). Penurunan jumlah tenaga kerja pada beberapa sektor tersebut disebabkan oleh mulai aktif kembali kegiatan luring di sejumlah daerah yang menahan kinerja sektor Informasi dan Komunikasi.

Tabel 6.3 Pekerja Berdasarkan Status Pendidikan (ribu orang)

NO	STATUS PENDIDIKAN	2020		2021		2022	
		FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
1	SD KE BAWAH	645	685	652	670	674	691
2	SMP	363	342	363	319	335	340
3	SMA	375	379	375	381	396	424
4	SMK	136	133	135	154	141	132
5	DIPLOMA I/II/III	41	43	33	43	49	37
6	UNIVERSITAS	180	158	187	180	165	174
		1,740	**1,739**	**1,745**	**1,747**	**1,762**	**1,798**

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Tabel 6.4 Pekerja berdasarkan Lapangan Usaha

NO	LAPANGAN PEKERJAAN	2020		2021		2022	
		FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	811.59	807.65	826.82	801.70	755.31	862.28
2	Pertambangan dan Penggalian	39.63	70.53	48.73	64.21	60.37	56.64
3	Industri Pengolahan	92.91	87.52	87.87	83.10	119.89	94.42
4	Pengadaan LGA, Konstruksi, & Real Estate	74.97	91.14	91.92	92.95	76.30	93.08
5	Perdagangan Besar dan Eceran	277.19	270.20	244.01	272.46	301.70	260.55
6	Transportasi dan Pergudangan	51.21	59.94	55.38	57.43	65.17	62.67
7	Akomodasi, dan Makan Minum	70.76	75.14	89.45	85.64	94.43	90.86
8	Infokom & Jasa Keuangan, Asuransi, Perusahaan	43.67	33.36	41.31	41.52	31.00	40.88
9	Administrasi Pemerintahan	91.26	78.23	81.10	80.36	81.37	74.38
10	Jasa Pendidikan	91.41	83.58	96.78	94.66	99.49	91.17
11	Jasa Lainnya	84.85	81.71	81.79	72.83	76.66	70.90
	TOTAL	1,729.44	1,739.00	1,745.15	1,746.84	1,761.66	1,797.83

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Grafik 22.1. Penyerapan Tenaga Kerja

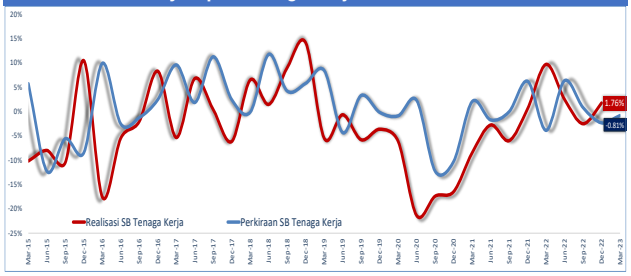

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

6.1.1 Prospek Ketenagakerjaan

Berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, tingkat penggunaan tenaga kerja pada triwulan laporan terpantau meningkat yang tercermin dari nilai SBT tenaga kerja yang tercatat sebesar 1,76%. Beberapa sektor ekonomi tercatat tumbuh pada penggunaan tenaga kerja yaitu Sektor Kontruksi (SBT 1,96%), Perdagangan Besar dan Eceran (SBT 0,29%), dan Industri Pengolahan (SBT 0,14%). Sementara itu, beberapa sektor lainnya mengalami kontraksi yaitu sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (SBT -0,25%). Kontraksi yang terjadi pada sektor tersebut diindikasikan sebagai dampak dari inflasi yang terjadi beberapa waktu terakhir yang mendorong pelaku usaha untuk mengurangi tenaga kerja guna mengurangi indeks bayar agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik.

Pada triwulan I 2023, pelaku usaha memprakirakan adanya penurunan dalam penggunaan tenaga kerja. Hal tersebut tercermin dari prakiraan nilai SBT yang tercatat sebesar -0,81%, terkontraksi dibandingkan dengan SBT 1,76% pada triwulan IV 2022. Kontraksi tersebut diprakirakan terjadi pada sektor konstruksi

(SBT -1,96%) dan jasa lainnya (SBT -0,54%) yang disebabkan oleh investasi mesin/peralatan yang dilakukan perusahaan serta peningkatan aktivitas produksi pada triwulan mendatang. Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor masih memandang positif prospek ekonomi ke depan yang dicerminkan dari prakiraan penggunaan tenaga kerja yang meningkat dengan nilai SBT 1,87% **(GRAFIK 6.1).**

6.2 KESEJAHTERAAN

6.2.1 Kemiskinan

Penduduk miskin[7] Provinsi Jambi pada September 2022 tercatat sebanyak 283,83 ribu orang atau meningkat 4,45 ribu orang dibandingkan Maret 2022, dan meningkat sebesar 3,96 ribu orang dibandingkan September 2021. Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi baik di wilayah kota maupun pedesaan. Persentase penduduk miskin di wilayah kota pada September 2022 tercatat sebesar 10.51%, atau sedikit meningkat dari 10,50% pada Maret 2022. Sementara itu, kenaikan yang lebih tinggi terjadi di wilayah pedesaan dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,32%, meningkat dari 6,19% pada Maret 2022.

Peningkatan angka penduduk miskin tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa di Provinsi Jambi sejalan dengan kenaikan inflasi yang mendorong penurunan daya beli masyarakat. Kenaikan harga utamanya terjadi pada komoditas pangan strategis, seperti cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, serta beras. Hal tersebut juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi di triwulan III 2022 yang tumbuh positif namun melambat. Berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, kebijakan *zero case* COVID-19 di Tiongkok, serta meluasnya kebijakan proteksionisme pangan di berbagai negara mengakibatkan berlanjutnya gangguan pada rantai pasok global yang menahan volume perdagangan dunia dan memberikan dampak terhadap kinerja beberapa Lapangan Usaha di Provinsi Jambi.

Angka kemiskinan Provinsi Jambi pada September 2022 juga meningkat dibandingkan September 2021, dimana terjadi peningkatan baik dari sisi persentase maupun jumlah penduduk. Pada September 2021 jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi tercatat sebesar 279,85 ribu jiwa (7,67% dari total penduduk Provinsi Jambi), lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan pada September 2022. **(TABEL 6.5).**

Lebih lanjut, tingkat garis kemiskinan yang merupakan dasar penentuan pengelompokkan penduduk miskin mengalami peningkatan 7,34% (*yoy*) pada September 2022 menjadi sebesar Rp585.950 per kapita per bulan, dari sebelumnya Rp545.870 per kapita per bulan pada Maret 2022 **(TABEL 6.6)**. Peranan komoditi makanan terhadap pembentukan garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan, dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp443.292 (75,65%) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp142.658 (24,35%). Pada September 2022, jenis komoditas makanan yang signifikan memengaruhi nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan relatif sama yaitu beras (15,40% di perkotaan dan 20,21% di perdesaan), rokok kretek filter (11,85% di perkotaan dan 15,90% di perdesaan), daging ayam ras (7,15% di perkotaan dan 4,28% di perdesaan), cabai merah (4,93% di perkotaan dan 4,17% di perdesaan), dan telur ayam ras (3,33% di perkotaan dan 2,91% di perdesaan). Sementara itu, komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar adalah Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, dan pakaian jadi perempuan dewasa.

Besarnya sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan di perkotaan mencapai 75,63%, sedangkan di pedesaan sebesar 75,83%. Hal ini mengindikasikan pentingnya peran pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian harga komoditas pangan terutama beras, yang memiliki kontribusi terbesar pada garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Di samping angka kemiskinan, terdapat beberapa indikator lain yang digunakan dalam analisis kemiskinan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan pada prinsipnya menunjukkan seberapa jauh selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Angka P1 yang semakin mendekati 0

[7] Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sementara, P2 memberikan gambaran mengenai seberapa jauh jarak pengeluaran orang paling miskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di wilayah tersebut. Angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil.

Pada September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan yaitu 1,190 lebih tinggi dibandingkan 1,174 pada Maret 2022. Sejalan dengan hal tersebut, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) September 2022 juga tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 1,088. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin di Provinsi Jambi semakin menjauhi Garis Kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) terpantau meningkat dari 0,228 pada September 2021, menjadi 0,240 pada September 2022. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin melebar di wilayah Provinsi Jambi (TABEL 6.7). Secara spasial, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan. Pada September 2022, nilai P1 untuk perkotaan sebesar 1,740, sementara di perdesaan lebih rendah yaitu 0,920. Sementara, nilai P2 untuk perkotaan sebesar 0,390 dan di pedesaan sebesar 0,160.

Selain angka kemiskinan serta indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, isu kemiskinan juga dapat dilihat dari tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur dengan Gini Ratio[8]. Pada September 2022, gini ratio Provinsi Jambi naik 0,020 poin dari 0,315 pada September 2021 menjadi 0,335 pada periode laporan. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jambi pada September 2022 juga terpantau meningkat sebesar 0,015 poin dibandingkan Maret 2022 yang tercattat sebesar 0,320. Hal tersebut mengindikasikan kondisi ketimpangan di Provinsi Jambi mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir. Meskipun demikian, angka gini ratio tersebut terpantau lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 0,381. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pengeluaran di Provinsi Jambi relatif lebih baik dibandingkan nasional (TABEL 6.8).

Berdasarkan wilayahnya, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,376, naik dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,351 maupun dibanding Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,347. Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,302, naik dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,292 dan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,284.

Berdasarkan distribusinya[9], pada September 2022 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah sebesar 20,87%, atau turun dibandingkan September 2021 dan Maret 2022 yang masing-masing tercatat sebesar 21,20% dan 21,14% (GRAFIK 6.2). Hal ini menunjukkan Provinsi Jambi masih berada pada kategori ketimpangan rendah.

Salah satu upaya dalam menekan tingkat ketimpangan adalah mengupayakan agar penduduk mendapatkan kemudahan dalam mengakses kebutuhan dasar dan mengembangkan potensinya, yang tercermin dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, IPM Provinsi Jambi tercatat tumbuh 0,71% (*yoy*) menjadi 72,14 dibandingkan 2021 sebesar 71,63. Perbaikan IPM didorong oleh peningkatan pada 3 (tiga) aspek yaitu aspek umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga aspek tersebut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) komponen indeks pembentuk IPM yaitu Indeks Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), serta Indeks Pengeluaran Per Kapita yang seluruhnya menunjukkan

[8] Gini ratio merupakan rasio ketimpangan pengeluaran penduduk yang nilainya antara 0 sampai 1. Gini ratio yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

[9] Berdasarkan Bank Dunia, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah angkanya <12%; ketimpangan sedang jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah angkanya 12%-17%; ketimpangan rendah jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah angkanya >17%.

peningkatan. Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Jambi terus mengalami kemajuan selama periode 2013–2022. Selama periode tersebut, IPM Provinsi Jambi rata-rata tumbuh sebesar 0.75% per tahun dan diperkirakan terus tumbuh sesuai dengan trennya. Peningkatan IPM Provinsi Jambi pada tahun 2022 mampu menjaga status pembangunan manusia Provinsi Jambi di level "tinggi"[10] (TABEL 6.9) dan (GRAFIK 6.3).

6.2.2 Kesejahteraan Petani

Tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2022 terpantau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai Tukar Petani (NTP)[11] tercatat masih berada di atas 100, mencerminkan bahwa petani mengalami surplus di mana pendapatan yang diterima lebih tinggi dibandingkan beban pengeluaran. Data triwulan IV 2022 menunjukkan rerata NTP Provinsi Jambi sebesar 138,29 atau naik 1,06% (*yoy*) dibanding rerata triwulan IV 2021 sebesar 136,84 (GRAFIK 6.4). Perbaikan NTP disebabkan oleh peningkatan indeks yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan peningkatan indeks yang dibayar petani. Rerata Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada triwulan IV 2022 sebesar 156,67 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 147,41. Sementara itu, Indeks yang Dibayar Petani (Ib) pada triwulan IV 2022 sebesar 113,29, meningkat dibandingkan triwulan IV 2021 yang tercatat 107,43.

Berdasarkan kelompoknya, peningkatan NTP terjadi pada beberapa subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, dan subsektor tanaman perkebunan rakyat. Rerata NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat pada triwulan laporan tercatat paling tinggi yaitu 148,34 atau tumbuh sebesar 0,44% (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 147,68. Adapun peningkatan NTP tersebut sejalan dengan peningkatan produksi kelapa sawit di tengah kembali meningkatnya harga komoditas TBS di dari rata-rata Rp2.066/kg di triwulan III 2022 menjadi Rp2.359/kg di triwulan IV 2022. Selanjutnya, rerata NTP subsektor Hortikultura sebesar 104,70 dengan pertumbuhan sebesar 6,73% *(yoy),* atau lebih tinggi dibandingkan dengan 98,10 pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan rerata NTP tersebut disebabkan oleh masih tingginya harga jual beberapa komoditas pangan strategis yang terutama cabai merah (0,63% *yoy*), bawang merah (24,90% *yoy*), dan cabai rawit (10,28% *yoy*) pada triwulan laporan disebabkan oleh berkurangnya pasokan di wilayah sentra produksi yang juga menjadi isu nasional.

Subsektor Tanaman Pangan juga terpantau meningkat dengan rerata NTP menjadi 103,17 dibanding triwulan IV 2021 sebesar 97,80. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan indeks yang diterima petani yang naik lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan indeks bayar petani. Rerata indeks yang diterima petani terpantau meningkat sebesar 10,52% *(yoy),* atau menjadi 104,76. Sementara itu, rerata indeks bayar petani tumbuh sebesar 4,66% *(yoy),* atau menjadi 104,36.

Sementara itu, subsektor Perikanan terpantau menurun meskipun tetap berada di atas 100 dengan rerata NTP sebesar 109,42 dibandingkan triwulan IV 2021 sebesar 110,77. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan harga pada beberapa komoditas ikan dan hasil tangkap laut lainnya. Beberapa jenis di antaranya yang mengalami deflasi adalah ikan bandeng (-1,17% *yoy*), ikan kembung (-1,56% *yoy*), cumi-cumi (-8,53% *yoy*), dan ikan teri (-6,06% *yoy*) pada periode Oktober sampai dengan Desember 2022.

terakhir, subsektor Peternakan terpantau terkontraksi sebesar 1,60% *(yoy)* dan berada di bawah 100 dari rerata NTP sebesar 98,98 pada triwulan IV 2021 menjadi 97,40 pada triwulan laporan. Keuntungan peternak pada sektor tersebut menurun yang dipengaruhi oleh penurunan rerata harga komoditas daging ayam ras pada Oktober sampai dengan Desember 2022 yang mencapai 7,30% (*yoy)* di tengah masih tingginya harga bahan baku utama pakan ternak. Indeks harga bayar petani terpantau meningkat sebesar 5,03% *(yoy),* lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks yang diterima petani sebesar 3,35% *(yoy).*

Berdasarkan perkembangan tersebut, capaian NTP keseluruhan pada triwulan IV 2022 terpantau lebih tinggi dibandingkan NTP triwulan III 2022 yang tercatat 127,52 atau meningkat sebesar 8,45% *(qtq)*. Hal tersebut didorong oleh indeks yang diterima petani tumbuh sebesar 8,62% *(qtq)*, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bayar petani yang tumbuh sebesar 0,14% *(qtq)*.

[10] Sangat tinggi jika IPM≥80; tinggi jika 70 ≤ IPM < 80; sedang jika 60 ≤ IPM < 70; rendah jika IPM < 60

[11] Sejak Januari 2020, data NTP telah menggunakan Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun Dasar 2018 dalam perhitungan data NTP

Grafik 22.2. Distribusi Pengeluaran Penduduk

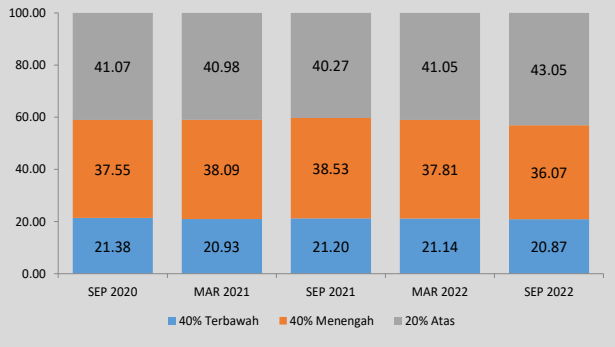

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Grafik 22.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

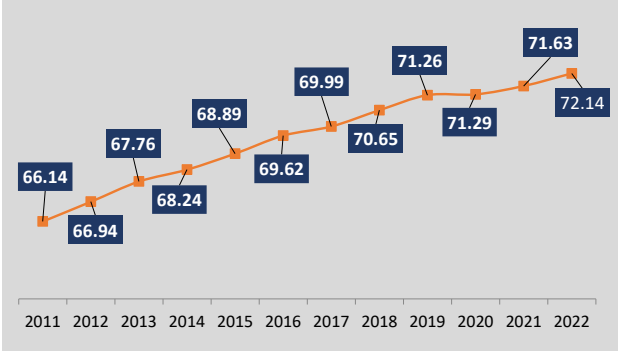

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Tabel 6.5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jambi

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin				Jumlah Penduduk Miskin (000)			
	Maret 2021	September 2021	Maret 2022	September 2022	Maret 2021	September 2021	Maret 2022	September 2022
Kota	11.52	10.50	10.51	10.48	137.24	126.10	127.34	127.80
Pedesaan	6.42	6.28	6.19	6.32	156.61	153.75	152.03	156.03
Kota + Desa	**8.09**	**7.67**	**7.62**	**7.70**	**293.85**	**279.85**	**279.37**	**283.83**

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Tabel 6.6 Garis Kemiskinan Provinsi Jambi

Wilayah	Garis Kemiskinan											
	September 2021				Maret 2022				September 2022			
	Makanan	Non Makanan	Total	% GK Makanan	Makanan	Non Makanan	Total	% GK Makanan	Makanan	Non Makanan	Total	% GK Makanan
Kota	448,893	149,285	598,178	75.04	478,149	157,559	635,708	75.22	517,739	166,816	684,555	75.63
Pedesaan	364,150	114,856	479,006	76.02	380,967	122,845	503,812	75.62	410,425	130,842	541,267	75.83
Kota + Desa	**391,656**	**126,067**	**517,723**	**75.65**	**411,537**	**134,333**	**545,870**	**75.39**	**443,292**	**142,658**	**585,950**	**75.65**

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Tabel 6.7 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Jambi

Wilayah	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan							
	Maret 2021		September 2021		Maret 2022		September 2022	
	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2
Kota	2.197	0.576	1.805	0.380	1.673	0.380	1.740	0.390
Desa	0.851	0.169	0.736	0.154	0.928	0.199	0.920	0.160
Kota + Desa	**1.293**	**0.302**	**1.088**	**0.228**	**1.174**	**0.260**	**1.190**	**0.240**

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Tabel 6.8 Gini Ratio Provinsi Jambi

Wilayah	Gini Ratio						
	September 2019	Maret 2020	September 2020	Maret 2021	September 2021	Maret 2022	September 2022
Kota	0.346	0.351	0.346	0.354	0.347	0.351	0.376
Pedesaan	0.290	0.287	0.289	0.288	0.284	0.292	0.302
Kota + Desa	**0.324**	**0.320**	**0.316**	**0.321**	**0.315**	**0.320**	**0.335**

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Tabel 6.9 Indeks Pembangunan Manusia menurut komponen

KOMPONEN	TAHUN									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	70.35	70.43	70.56	70.71	70.76	70.89	71.06	71.16	71.22	71.50
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.17	12.38	12.57	12.72	12.85	12.90	12.93	12.98	13.04	13.05
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7.80	7.92	7.96	8.07	8.15	8.23	8.45	8.55	8.60	8.68
Pengeluaran Per Kapita (Rp 000)	9,066	9,141	9,446	9,795	9,880	10,357	10,592	10,392	10,588	10,871
IPM	**67.76**	**68.24**	**68.89**	**69.62**	**69.99**	**70.65**	**71.26**	**71.29**	**71.63**	**72.14**

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Grafik 22.4. Nilai Tukar Petani

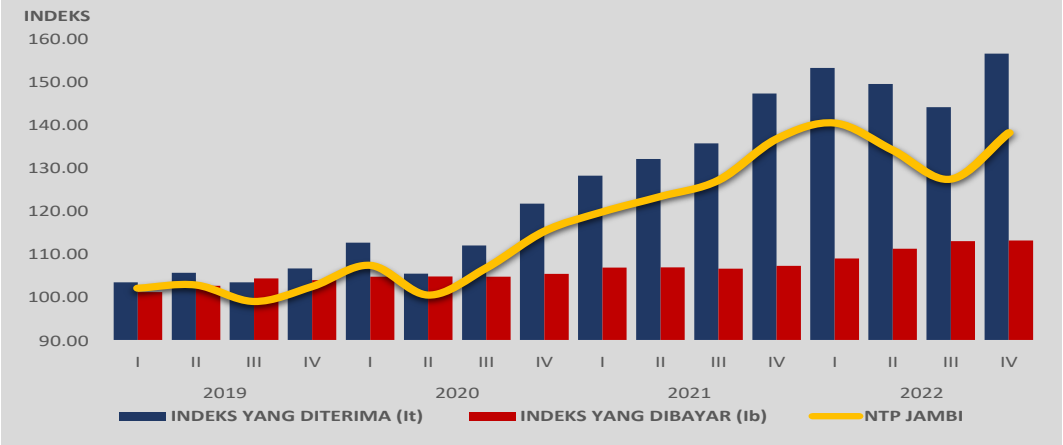

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Pemulihan ekonomi akan terus berlanjut pada tahun 2023 meski lebih rendah dibandingkan 2022. Secara keseluruhan tahun 2023, perekonomian Provinsi Jambi diprediksi tumbuh pada rentang 3,70%-4,50%, ditopang perbaikan permintaan domestik dan terjaganya permintaan eksternal.

Terkendalinya kasus COVID-19 yang terus menunjukkan penurunan serta penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022 melalui Inmendagri Nomor 53 tahun 2022 diperkirakan akan mendorong kinerja konsumsi rumah tangga yang menopang permintaan. Di sisi lain, kinerja ekspor diprakirakan tertahan sejalan dengan perlambatan ekonomi global, khususnya dipengaruhi risiko resesi di beberapa negara mitra dagang, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Sementara itu, secara keseluruhan tahun tekanan inflasi diprakirakan akan menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sinergi kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi yang semakin erat dalam menunjang pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Jambi diperkirakan akan memberikan dampak positif pada pengendalian inflasi di Provinsi Jambi. Namun demikian, berlanjutnya ketegangan geopolitik yang memicu fragmentasi ekonomi, serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif di berbagai negara perlu diwaspadai dan berisiko menekan harga komoditas primer Provinsi Jambi.

5.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI KESELURUHAN TAHUN

7.1.1 Prospek Permintaan

Kebijakan Pemerintah yang mengeluarkan sejumlah aturan optimalisasi penggunaan dana BTT dan DTU dalam rangka pengendalian inflasi di daerah diperkirakan akan mendorong peningkatan permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga juga diperkirakan akan terus melanjutkan tren positif didukung menguatnya pendapatan seiring meningkatnya penyerapan tenaga kerja dari sektor riil.

Permintaan CPO domestik juga diprakirakan membaik seiring dengan meningkatnya permintaan bahan makanan berbasis minyak kelapa sawit. Adapun pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan untuk dapat menjamin pasokan minyak kelapa sawit di dalam negeri, antara lain melalui kebijakan pengetatan rasio ekspor CPO dari 1:6 menjadi 1:8 serta peningkatan tarif bea keluar (BK) dan tariff BLU BPD-PKS menjadi masing-masing sebesar USD 74/ metric ton dan USD 95/ metric ton.

Seiring dengan peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah juga diperkirakan akan meningkat dan menjadi penopang kinerja perekonomian sepanjang tahun 2023 didorong oleh peningkatan pagu anggaran belanja pemerintah dan realisasi belanja infrastruktur yang sebelumnya tertunda karena COVID-19. Lebih lanjut, prospek ekonomi yang lebih baik mendorong Pemda untuk meningkatkan target penerimaannya, seperti pajak terkait kendaraan bermotor dan pajak terkait usaha perhotelan dan restoran. Selain itu, kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah perlu didukung dengan berbagai kegiatan dan *event* yang mendorong peningkatan kegiatan MICE.

Selanjutnya, realisasi investasi yang sempat tertunda pada tahun 2021 dan 2022 diperkirakan akan terakselerasi dan menjadi prioritas pada tahun 2023. Hal ini didukung oleh implementasi *online single submission* yang telah dijalankan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jambi yang dinilai positif dan mendukung iklim investasi di Provinsi Jambi. Peluang investasi pada beberapa proyek strategis Provinsi Jambi, antara lain Kawasan Industri Kemingking dan Pelabuhan Ujung Jabung dan pembangunan bendungan Merangin berpotensi mendorong peningkatan PMA dan PMDN secara keseluruhan tahun 2023 Selain itu, berlanjutnya kebijakan B30 yang ditetapkan meningkat menjadi B35 oleh Pemerintah berpeluang meningkatkan kapasitas utilisasi dan investasi dari industri pengolahan di Provinsi Jambi.

Sementara itu, di tengah dinamika tensi geopolitik global kinerja ekspor barang dan jasa diperkirakan akan tumbuh positif meskipun cenderung terbatas jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja beberapa sektor utama yang menjadi komoditas kebutuhan global seperti batu bara dan minyak nabati diperkirakan masih akan menopang ekspor. Peningkatan ini didukung dengan naiknya permintaan Tiongkok yang melakukan penghapusan kebijakan *zero covid policy* pada akhir triwulan IV 2022. Selain itu, potensi peningkatan permintaan energi dari negara-negara Eropa yang sebelumnya merupakan tujuan ekspor Rusia diperkirakan akan mendorong permintaan batu bara dari Eropa yang turut menopang kinerja ekspor batu bara. Sejalan dengan hal tersebut, harga komoditas perkebunan seperti kopi, kelapa sawit, karet, kelapa, dan kayu manis juga menunjukkan peningkatan yang dapat turut mendorong kinerja ekspor.

Namun demikian, permintaan eksternal pada tahun 2023 diperkirakan melemah dipengaruhi berlanjutnya ketidakpastian dinamika eksternal. Adapun, sinergi dan inovasi guna mendorong akselerasi permintaan domestik akan menjadi kunci untuk tetap bertahan dan bangkit di tengah gejolak ekonomi global dalam rangka tetap menjaga stabilitas dan mendorong berlanjutnya perbaikan ekonomi Provinsi Jambi selama tahun 2023

7.1.2 Prospek Penawaran

Secara sektoral, penguatan kinerja ekonomi Provinsi Jambi terutama ditopang oleh perbaikan lapangan usaha (LU) utama yaitu LU pertanian, kehutanan dan perikanan, LU pertambangan dan penggalian dan LU industri pengolahan. Terjaganya kinerja ketiga LU tersebut dapat menyerap tenaga kerja dalam skala besar berimplikasi pada peningkatan daya beli masyarakat yang menopang kinerja LU perdagangan. Lebih lanjut, terjaganya permintaan baik dari domestik maupun global diperkirakan akan berdampak positif pada seluruh lapangan usaha.

Kinerja LU Pertanian utamanya ditopang oleh perbaikan subsektor perkebunan seiring penguatan produktivitas kebun kelapa sawit pasca *replanting* yang mulai memasuki usia produktif. Lebih lanjut, curah hujan tinggi yang berlangsung sepanjang tahun 2022 diprakirakan masih memberikan dampak positif pada terjaganya produktivitas pada level tinggi di sepanjang tahun 2023. Adapun WRIO memperkirakan kenaikan produksi karet alam dunia sebesar 2,9% (*yoy*) pada keseluruhan tahun 2023 didukung oleh berangsur turunnya curah hujan secara gradual seiring dengan La Nina yang menuju netral.

Sejalan dengan hal tersebut, LU industri pengolahan juga akan melanjutkan tren peningkatan selama tahun 2023. Terjaganya permintaan eksternal terutama imbas penghapusan *zero covid policy* Tiongkok diperkirakan akan mendorong pertumbuhan output LU Industri Pengolahan. Dari sisi domestik, adanya rencana peningkatan volume biodiesel di tahun 2023 seiring dengan peningkatan kada biodiesel dari B30 menjadi B35 diperkirakan akan memperkuat permintaan komoditas CPO domestik dengan estimasi kebutuhan Biodiesel untuk mendukung implementasi B35 sebesar 13.15 juta kL, atau meningkat sekitar 19% dibandingkan alokasi tahun 2022.

Sejalan dengan hal tersebut, kinerja LU Pertambangan dan Penggalian domestik juga diperkirakan akan menopang pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Meningkatnya kapasitas produksi pasca beroperasinya 14 lokasi tambang baru sejak triwulan IV 2022 berpotensi mendorong peningkatan produksi batubara yang menopang kinerja LU Pertambangan.

Prospek pertumbuhan tersebut sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi yang menunjukkan optimisme pelaku usaha. Kegiatan dunia usaha sepanjang tahun 2023 diperkirakan oleh para pelaku usaha tetap akan mengalami pertumbuhan positif seiring berlanjutnya perbaikan ekonomi di tengah peningkatan mobilitas masyarakat serta faktor cuaca yang mendukung produksi komoditas utama daerah.

Selain itu, LU perdagangan, LU akomodasi makan minum dan LU konstruksi yang berkaitan erat dengan konsumsi domestik baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah diperkirakan akan tumbuh dan menjadi kunci kinerja perekonomian di tahun 2023. Lebih lanjut, mencermati perkembangan global dan domestik saat ini, terdapat beberapa risiko yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari proyeksi (*downside risk*) yaitu:

1. Penyebaran kasus Covid-19 yang kembali meluas dengan tingkat penularan yang tinggi dapat kembali membatasi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi sehingga menahan kinerja perekonomian global maupun domestik.
2. Ketegangan geopolitik di antara negara-negara produsen energi di wilayah Eropa Timur dan Timur tengah berisiko mendorong kekurangan pasokan energi primer dan ketidakpastian pasar global, yang mendorong harga di pasar global berfluktuasi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi harga energi primer di dalam negeri.
3. Risiko resesi di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat yang dapat mengganggu harga komoditas dan rantai pasok global.

7.2 PROYEKSI INFLASI

Inflasi gabungan 2 (dua) kota/kabupaten di Provinsi Jambi pada tahun 2023 diprakirakan menurun didukung sinergi kebijakan lintas lembaga yang menunjang pengendalian inflasi di Provinsi Jambi. Namun demikian, meningkatnya permintaan domestik yang diiringi berlanjutnya ketidakpastian global berisiko mendorong laju inflasi komoditas primer di Provinsi Jambi. Membaiknya permintaan domestik akan

berdampak pada naiknya tekanan inflasi pangan (hortikultura, aneka ikan, daging, ayam ras), serta barang dan jasa pada kelompok transportasi, pakaian dan alas kaki, rekreasi, perumahan dan listrik, serta penyediaan makanan dan minuman.

Lebih lanjut, pengetatan kebijakan moneter yang agresif di berbagai negara perlu di waspadai karena berisiko memberikan tekanan pada nilai tukar yang berimbas pada *imported inflation*. Adapun, dengan mencermati hal-hal tersebut laju inflasi gabungan 2 (dua) kota/kabupaten di Provinsi Jambi pada keseluruhan tahun 2023 diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2022, namun bias atas terhadap kisaran sasaran inflasi nasional yaitu sebesar 3±1%.

5.3 REKOMENDASI KEBIJAKAN

Menyikapi kondisi ekonomi dan inflasi terkini, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat respons kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan berlanjutnya penurunan inflasi. Adapun beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan kelancaran distribusi vaksin dan mendorong percepatan peningkatan tingkat vaksinasi di Provinsi Jambi, baik untuk vaksinasi dosis 1 dan 2, maupun vaksin *booster* untuk mendukung normalisasi mobilitas masyarakat dan aktivitas usaha. Selain itu adanya peningkatan kesadaran dan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan melalui sosialisasi kepada masyarakat dapat mendorong sentimen positif dari masyarakat dan pelaku usaha.
2. Mendorong akselerasi realisasi belanja pemerintah daerah untuk memberikan *multiplier effect* terhadap pemulihan ekonomi.
3. Mendorong realisasi program peremajaan/*replanting* perkebunan sawit dan karet untuk mendorong produktivitas TBS dan karet petani yang merupakan komoditas unggulan daerah. Selain itu, melakukan upaya untuk mendorong pengembangan hilirisasi industri karet dan kelapa sawit yang terintegrasi meliputi industri inti dan penunjang lainnya melalui kemudahan perizinan, pembiayaan, dan pengembangan.
4. Mendorong petani untuk melakukan diversifikasi usaha pertanian agar tidak hanya memiliki satu jenis usaha pertanian namun bervariasi, sehingga bisa lebih tahan terhadap fluktuasi harga output, misalnya berupa usaha perkebunan sawit yang terintegrasi dengan peternakan sapi.
5. Mendorong Pengembangan produk unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas serta pemanfaatan teknologi digital dalam rangka meningkatkan panen, mendorong ekspor, serta perluasan pemasaran. Adapun peningkatan SDM dilakukan melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
6. Optimalisasi peluang ekspor batu bara, TBS, dan karet di pasar global maupun pasar domestik seiring dengan penguatan harga komoditas dan peningkatan permintaan di pasar internasional serta domestik.
7. Melakukan kegiatan sosialisasi penggunaan *Local Currency Settlement* (LCS) kepada eksportir dalam penyelesaian transaksi bilateral untuk efisiensi biaya transaksi dan pengurangan ketergantungan terhadap USD.
8. Memfasilitasi dan mendorong upaya penyediaan jalur pengangkutan khusus komoditas batu bara untuk menekan biaya operasional pelaku usaha dan memastikan kelancaran distribusi.
9. Penguatan kinerja UMKM melalui perluasan akses pasar, kemudahan akses pembiayaan, dan transformasi UMKM menjadi *go digital* dengan pendampingan dan bimbingan teknis secara intensif.
10. Mendorong peningkatan nilai tambah hasil tambang antara lain. melalui hilirisasi pengolahan *coal bed methane* dan proses likuifikasi batu bara sebagai alternatif pengganti gas alam cair (LPG).
11. Peningkatan kegiatan promosi investasi terhadap sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, misalnya pengembangan industri pariwisata serta industri kreatif. Selain itu, mempersiapkan *clean and clear project* seperti peraturan/perizinan, pajak/retribusi, pembebasan lahan, dan infrastruktur.

Dari sisi pengendalian inflasi, dalam rangka menjaga kestabilan harga di daerah dan menyikapi potensi risiko ke depan, peningkatan sinergi antar TPID, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Adapun langkah-langkah ataupun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi di antaranya:

1. Keterjangkauan Harga
    a. Pelaksanaan pematauan harga pangan di 12 Kabupaten/Kota,khususnya komoditas pangan strategis, baik di tingkat petani maupun pengecer
    b. Optimalisasi pelaksanaan operasi pasar/pasar murah melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelaksanaan operasi pasar/pasar murah dilakukan dengan pemberlakuan sistem kupon dan zonasi waktu untuk memastikan protokol kesehatan tetap diterapkan.
    c. Pemanfaatan Toko Tani Indonesia (TTI) sebagai saluran pemasaran yang efektif
2. Kelancaran Distribusi
    a. Memastikan pasokan maupun kelancaran distribusi bahan pangan tidak terganggu selama periode HKBN melalui penguatan koordinasi antara TPID dengan OPD/Satuan Tugas terkait.
    b. Digitalisasi distribusi melalui pemanfaatan *platform digital* atau *e-commerce* untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan pemasaran produk ke konsumen akhir, serta mendorong transaksi nontunai.
3. Ketersediaan Pasokan
    a. Penguatan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), khususnya terkait komoditas yang memiliki andil cukup besar terhadap inflasi, melalui pemanfaatan *Early Warning System* (EWS) Kementerian Pertanian untuk mengidentifikasi potensi KAD, dalam rangka mendukung tercapainya kestabilan harga melalui ketersediaan pasokan yang memadai dan memastikan kelancaran distribusi antara wilayah produsen dan konsumen, baik secara *Business to Business (B2B)* maupun *Government to Government (G2G)*.
    b. Tersedianya neraca pangan seluruh Kabupaten/Kota serta *database* terkait arus komoditas bahan pokok yang keluar dan masuk wilayah Provinsi Jambi.
    c. Pengembangan klaster UMKM melalui penerapan manajemen pola tanam, khususnya untuk komoditas pangan strategis, menggunakan pemanfaatan *Internet of Things (IoT)* yang dapat mengukur serta memprediksi pola cuaca untuk menjaga pasokan serta memitigasi potensi gagal panen.
4. Komunikasi Efektif
    a. Optimalisasi penggunaan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) sebagai salah satu *leading indicator* pergerakan harga dan pasokan pangan nasional melalui peningkatan kualitas dan akurasi data.
    b. Menjaga ekspektasi inflasi melalui sosialisasi dan edukasi belanja bijak kepada masyarakat secara rutin dan didukung oleh diseminasi informasi kecukupan stok selama periode HBKN untuk mengurangi *asymmetric information,* sehingga inflasi tetap terjaga di kisaran target inflasi nasional.

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

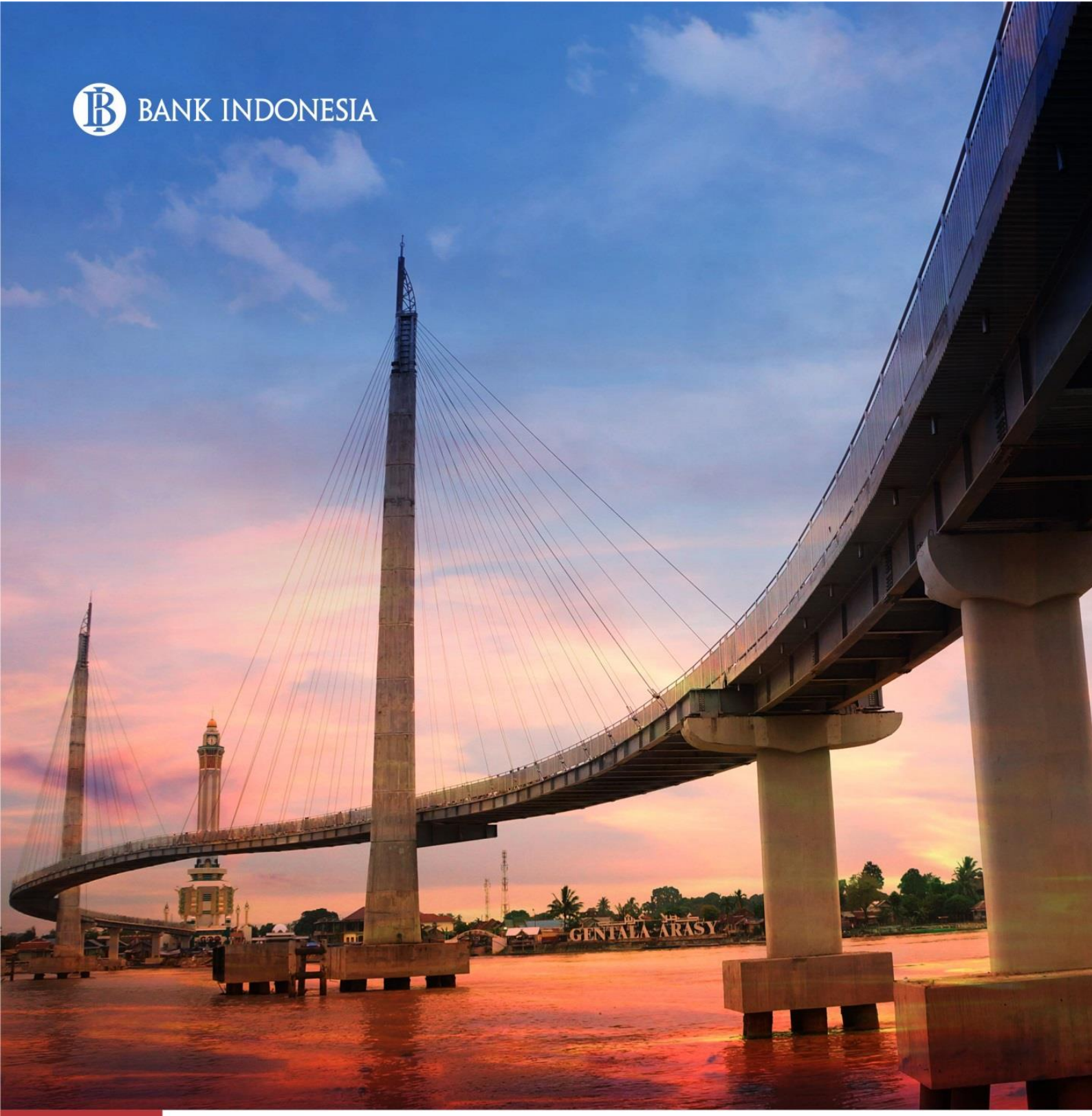

LAMPIRAN

Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

KATEGORI	URAIAN	2021				2022			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,970,850	18,235,150	18,898,990	19,127,430	20,255,750	20,914,210	20,804,320	21,600,570
B	Pertambangan dan Penggalian	6,899,180	7,330,580	8,966,020	9,787,270	10,633,500	13,666,550	15,004,630	14,009,430
C	Industri Pengolahan	5,601,720	5,968,690	6,099,710	6,098,690	6,214,780	6,909,440	6,987,980	6,876,480
D	Pengadaan Listrik dan Gas	39,360	40,740	42,130	43,390	45,080	46,510	49,640	49,850
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	78,350	83,000	83,970	85,770	84,180	85,350	88,720	93,510
F	Konstruksi	4,592,530	4,319,760	4,440,370	4,949,710	4,810,810	4,601,170	4,743,810	4,872,120
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,624,720	7,356,130	7,515,590	7,541,790	7,392,770	8,192,710	8,652,290	9,356,180
H	Transportasi dan Pergudangan	1,381,280	1,469,630	1,530,860	1,663,820	1,593,190	1,897,420	1,983,110	2,413,500
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	613,040	638,050	614,620	702,930	673,210	709,700	740,960	777,920
J	Informasi dan Komunikasi	2,288,670	2,381,800	2,411,970	2,430,510	2,456,520	2,565,450	2,566,690	2,588,010
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,443,170	1,485,250	1,535,270	1,512,660	1,610,070	1,504,740	1,683,450	1,626,960
L	Real Estate	892,650	897,440	958,120	1,005,340	1,009,690	1,030,830	1,042,860	1,067,970
M, N	Jasa Perusahaan	639,710	670,330	701,350	754,080	793,850	937,920	902,720	924,500
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,233,980	2,905,690	2,233,340	2,626,450	2,235,350	2,594,360	2,549,940	2,542,610
P	Jasa Pendidikan	1,965,380	2,098,290	1,950,440	2,186,850	2,068,420	2,106,860	2,167,030	2,242,700
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	710,160	756,130	915,000	934,140	808,880	766,870	834,770	874,150
R, S, T, U	Jasa lainnya	505,130	533,240	524,540	541,220	545,710	598,430	598,980	637,720
	PRODUK REGIONAL DOMESTIK BRUTO	**53,479,880**	**57,169,900**	**59,422,290**	**61,992,050**	**63,231,760**	**69,128,520**	**71,401,900**	**72,554,180**

Sumber: BPS Provinsi Jambi
Keterangan:
* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

KATEGORI	URAIAN	2021				2022			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,074,417	10,434,777	10,561,516	10,138,420	10,338,005	10,756,988	11,056,376	11,116,509
B	Pertambangan dan Penggalian	8,261,853	8,622,308	9,638,884	9,212,175	9,007,648	9,709,406	10,096,224	9,716,752
C	Industri Pengolahan	3,801,901	3,984,030	4,021,465	3,903,710	3,841,446	4,152,273	4,204,120	3,992,876
D	Pengadaan Listrik dan Gas	20,852	21,318	22,000	22,717	23,419	23,835	24,859	24,903
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	50,544	53,540	53,940	55,058	53,880	54,510	56,456	54,938
F	Konstruksi	3,042,687	2,853,699	2,899,318	3,229,303	3,098,516	2,914,155	2,940,965	2,965,375
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,535,976	3,799,934	3,862,175	3,846,497	3,654,197	3,927,109	4,079,311	4,197,175
H	Transportasi dan Pergudangan	1,022,192	1,073,331	1,130,129	1,202,943	1,140,913	1,300,647	1,302,615	1,433,830
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	397,629	413,168	397,195	453,439	431,384	452,284	470,069	491,868
J	Informasi dan Komunikasi	1,529,129	1,587,542	1,603,001	1,615,325	1,635,840	1,710,259	1,717,613	1,730,495
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	912,286	924,265	940,952	896,769	949,222	856,092	939,076	903,440
L	Real Estate	552,606	553,474	574,841	600,996	589,861	590,929	591,816	605,585
M, N	Jasa Perusahaan	361,184	376,722	389,041	413,356	414,432	464,136	445,736	449,079
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,110,043	1,423,455	1,105,566	1,290,239	1,110,229	1,275,867	1,255,309	1,256,102
P	Jasa Pendidikan	1,269,807	1,349,429	1,228,853	1,368,438	1,304,769	1,315,559	1,329,727	1,371,770
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	478,414	507,300	607,473	618,617	540,641	506,736	545,760	565,626
R, S, T, U	Jasa lainnya	366,239	386,432	378,798	389,859	385,086	414,983	409,630	430,439
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**36,787,758**	**38,364,724**	**39,415,148**	**39,257,862**	**38,519,490**	**40,425,769**	**41,465,661**	**41,306,760**

Sumber: BPS Provinsi Jambi
Keterangan:
* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Harga Berlaku Menurut Penggunaan (Juta Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN		2020	2021				2022			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
(1)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	24,936,830	25,296,750	25,419,880	25,181,430	26,960,330	27,150,210	28,742,440	28,637,320	29,863,410
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	326,950	319,680	332,650	329,250	348,680	348,110	376,340	384,570	381,580
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,489,990	2,278,370	4,887,920	4,728,490	6,437,640	2,443,190	4,600,530	4,761,900	7,147,410
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	13,354,430	12,436,840	12,278,710	12,455,360	14,389,000	13,681,510	13,308,900	14,120,320	14,525,820
5	Perubahan Inventori	1,957,190	1,301,080	608,100	541,560	308,970	781,290	769,500	283,040	305,250
6	Ekspor Barang dan Jasa	37,148,770	33,346,700	35,247,730	38,601,470	46,732,190	41,437,050	45,959,940	49,573,770	50,834,970
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	31,619,320	21,499,540	21,605,100	22,415,270	33,184,760	22,609,590	24,629,110	26,359,020	30,504,260
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**52,594,840**	**53,479,880**	**57,169,890**	**59,422,290**	**61,992,050**	**63,231,770**	**69,128,540**	**71,401,900**	**72,554,180**

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Keterangan:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Harga Konstan Menurut Penggunaan (Juta Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN		2020	2021				2022			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
(1)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16,623,360	16,494,913	16,641,607	16,590,122	17,479,367	17,323,795	17,659,058	17,221,216	18,001,801
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	212,619	205,605	214,154	212,762	222,665	218,901	229,354	229,859	228,822
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,967,228	1,430,616	2,921,494	2,801,900	3,800,801	1,473,575	2,716,321	2,797,250	4,134,676
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	9,208,829	8,548,798	8,430,724	8,446,437	9,789,559	9,132,466	8,670,199	9,057,730	9,194,132
5	Perubahan Inventori	1,161,796	821,717	360,815	327,865	210,162	505,004	475,295	147,845	158,408
6	Ekspor Barang dan Jasa	28,606,516	24,011,378	24,597,158	26,706,018	31,014,228	25,035,327	27,088,012	29,252,961	29,491,902
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	21,912,694	14,725,268	14,801,227	15,669,956	23,258,919	15,169,577	16,412,471	17,241,199	19,902,980
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**37,867,655**	**36,787,758**	**38,364,724**	**39,415,148**	**39,257,862**	**38,519,490**	**40,425,769**	**41,465,661**	**41,306,760**

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Keterangan:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Jambi Tahun Dasar 2018

IHK KOTA JAMBI	2022											
KOMODITI*	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
UMUM	**109.22**	**108.29**	**109.75**	**111.43**	**112.30**	**114.04**	**115.52**	**114.18**	**114.81**	**114.63**	**114.00**	**114.90**
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	113.27	110.19	114.02	116.08	117.10	123.00	127.07	121.33	119.05	117.74	115.29	117.92
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	104.99	104.98	104.55	105.29	105.29	105.28	105.44	105.44	105.51	105.51	105.51	105.51
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	107.25	107.35	108.53	109.39	109.74	109.64	110.27	111.39	111.39	111.34	111.42	111.41
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	110.19	110.75	111.24	112.68	112.94	113.30	113.87	114.42	114.60	115.08	115.20	115.78
KESEHATAN	112.14	112.14	112.15	112.15	112.15	113.18	113.18	113.18	113.20	112.65	112.65	112.66
TRANSPORTASI	106.09	105.29	105.48	110.27	114.05	113.49	113.92	114.77	124.48	125.80	125.81	126.14
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	101.25	101.25	101.15	101.15	101.13	100.92	100.79	100.71	100.71	100.89	100.85	100.71
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	122.60	122.60	122.60	122.57	122.57	122.57	122.57	122.57	122.83	122.83	122.83	122.83
PENDIDIKAN	104.83	104.83	104.83	104.83	104.83	105.00	105.40	105.40	105.40	105.40	105.40	105.40
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	106.95	106.99	106.99	108.89	108.89	109.08	109.08	109.08	110.27	110.34	110.34	110.34
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	113.31	113.90	115.14	116.09	116.57	116.68	117.33	118.08	118.55	118.98	120.39	121.17

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Bungo Tahun Dasar 2018

IHK KABUPATEN BUNGO	2022											
KOMODITI*	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
UMUM	**109.19**	**108.77**	**109.97**	**111.34**	**112.35**	**113.96**	**115.16**	**113.50**	**114.75**	**113.44**	**113.42**	**114.19**
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	114.09	112.29	114.84	116.81	119.20	124.84	128.36	121.99	121.40	116.44	116.13	117.97
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	111.01	111.22	111.52	112.30	112.22	112.29	112.66	112.66	112.66	112.67	112.67	113.07
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	103.61	103.66	104.38	105.44	105.81	105.79	105.83	106.10	106.47	106.78	106.99	106.99
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	109.99	110.05	110.80	112.73	113.19	113.68	113.71	114.26	114.62	114.54	114.64	114.81
KESEHATAN	105.58	105.67	105.70	105.86	105.86	105.87	105.82	105.99	106.02	106.02	106.13	106.77
TRANSPORTASI	106.76	106.03	106.04	108.25	109.33	107.67	108.66	109.15	120.18	120.83	120.82	121.25
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	101.78	101.96	102.03	102.03	102.03	102.36	102.45	102.48	102.54	102.54	102.54	102.54
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	107.53	108.24	108.32	108.42	108.42	108.64	109.20	109.36	109.37	109.37	109.37	110.25
PENDIDIKAN	103.29	103.29	103.29	103.29	103.29	103.43	103.49	103.82	104.14	104.14	104.14	104.14
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	105.51	105.51	105.51	105.51	105.56	105.56	105.61	105.62	105.62	105.62	105.62	105.70
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	119.99	122.77	126.33	128.42	129.23	129.78	128.79	130.97	129.94	131.16	131.61	133.06

Keterangan:

* Sejak Tahun 2020 perhitungan IHK menggunakan SBH Tahun Dasar 2018 dan terdapat penyesuaian jumlah kelompok pengeluaran menjadi 11 kelompok dari sebelumnya 7 kelompok

Sumber: BPS Provinsi Jambi

DAFTAR ISTILAH

Ekspor
Seluruh barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Impor
Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

PDRB atas dasar harga berlaku
Penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian.

PDRB atas dasar harga konstan
Perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya.

Bank pemerintah
Bank-bank yang sebelum program rekapitalisasi merupakan bank milik pemerintah (persero) yaitu terdiri dari Bank Mandiri, BNI, BTN dan BRI.

Bank swasta
Perbankan yang sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional sebelum dilakukannya program rekapitalisasi perbankan.

Dana Pihak Ketiga (DPK)
Simpanan masyarakat yang ada di perbankan terdiri dari giro, tabungan, dan deposito.

***Net Interest Margin* (NIM)**
Selisih bersih antara biaya bunga operasional dengan pendapatan bunga operasional.

***Loan to Deposits Ratio* (LDR)**
Rasio antara kredit yang diberikan oleh perbankan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun.

***Non Performing Loan* (NPL)**
Jumlah kredit yang termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet sesuai ketentuan.

Cash inflows
Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.

Cash outflows
Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.

Net cashflows
Selisih bersih antara jumlah *cash inflows* dan *cash outflows* pada periode yang sama terdiri dari *netcash outflows* bila terjadi *cash outflows* lebih tinggi dibandingkan *cash inflows*, dan *netcash inflows* bila terjadi sebaliknya.

Administered prices
kelompok barang yang pergerakan harganya ditentukan oleh pemerintah baik secara keseluruhan maupun sebagian.

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB	:	**Hermanto** Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi **Eva Ariesty** Deputi Kepala Perwakilan
KOORDINATOR PENYUSUN	:	**Handhow Tubagus** Analis
TIM PENULIS	:	**Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi** **Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan** **Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, KI dan Syariah** **Unit Implemetasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP-PUR**

Buku ini dapat diunduh di
www.bi.go.id/Publikasi/Kajian Ekonomi Regional/Jambi